ELEX MEDIA KOMPUTINDO

BIG BUSINESS POOR PEOPLES

BISNIS BESAR MENGUASAI MASYARAKAT MISKIN

Bagaimana Perusahaan-Perusahaan Transnasional Merusak Kehidupan Orang-Orang Miskin di Berbagai Negara

JOHN MADELEY

Big Business Poor People

Bisnis Besar Menguasai Masyarakat Miskin

Big Business Poor People

Bisnis Besar, Menguasai Masyarakat Miskin

John Madeley

Editor (versi) Indonesia: **Rayendra L. Toruan**

Zed Books
London & New York
Diterbitkan oleh PT Elex Media Komputindo
KOMPAS GRAMEDIA

Big Business Poor People
Bisnis Besar Menguasai Masyarakat Miskin:
Bagaimana Perusahaan-Perusahaan Transnasional Merusakan Kehidupan Orang Miskin diterbitkan pertama kali pada tahun 1999 oleh Zed Books Ltd, 7 Cynthia Street, London N1 9JF, Inggris dan Room 400, 175 Fifth Avenue, New York, NY 10010 USA.

Edisi kedua yang diperbarui ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2008
www.zedbooks.uk

Dirancang dan di-typeset oleh Long House Publishing Services

Cover dirancang oleh Andrew Corbett

Dicetak dan dijilid in Malta oleh Gutenberg Press Ltd.

Didistribusikan di Amerika Serikat secara eksklusif oleh Palgrave Macmillan, sebuah divisi dari St Martin's Press, LLC, 175 Fifth Avenue, New York, NY 10010, USA

Sebuah katalog untuk buku ini tersedia di British Library.
Library of Congress Katalogisasi dalam Data Publikasi tersedia.

ISBN 978 1 84813 032 6 hb
ISBN 978 1 84813 033 3 pb

BIG BUSINESS POOR PEOPLE
@ John Madeley
Dialihbahasakan oleh: **Alejandro MP Franklin W**
Editor (versi Indonesia): **Rayendra L. Toruan** rltoruan@elexmedia.co.id
Desain grafis (versi Indonesia):
Hak Cipta Terjemahan Indonesia
@2013 Penerbit PT Elex Media Komputindo
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Versi Indonesia diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Elex Media Komputindo
KOMPAS GRAMEDIA
Anggota IKAPI, Jakarta 2013

ID: 234132552
ISBN: 978-602-02-2893-8
Cetakan pertama (Indonesia): Desember 2013

Dicetak oleh Percetakan PT Grafika Mardi Yuana, Bogor
Isi di luar tanggung jawab percetakan

Daftar Isi

Pengantar Terjemahan Indonesia vii
Kata Pengantar Edisi Kedua x
Pengantar xii
Ucapan Terima Kasih xxiv

Pengantar: Penyebaran Korporasi 1
Investasi asing secara langsung 3 / Mengapa TNCs berbeda 8 / Orang miskin 10 / Ukuran 13 / Keuntungan atau kerugian? 15 / Lingkungan alam fisik 17 / Pekerjaan 18 / Ekonomi ganda 21 / Tenaga buruh anak-anak 23 / Transfer harga 24 / Pelayanan jasa 26 / Kesimpulan 29

1 **Mengapa Negara-negara Miskin "Menginginkan" Korporasi** 31
Globalisasi 33 / Privatisasi 36 / Utang eksternal 39 / Koneksi bantuan 42 / Kesimpulan 45

2 **Korporasi Pertanian: Dari Produksi hingga Perdagangan** 47
Benih 50 / Hak paten 51 / Modifikasi genetik 56 / Terminator 61 / Biopiracy 63 / Agrofuels (biofuels) 66 / Pestisida 70 / Perdagangan 79 / Tanah 80 / Kesimpulan 82

3 **Komoditas Pertanian Memakan Korban** 83
Tembakau 83 / Makanan bayi 93 / Pisang 97 / Minuman ringan: Coca-Cola 99 / Buah, sayur, dan bunga 105 / Kapas 110 / Minyak kelapa sawit: Indonesia 110 / Kesimpulan 113

4 **Kesehatan: Orang Miskin Telan Pil Korporasi** 115
HIV/AIDS dan TNCs 121 / Promosi dan informasi 123 / Antibiotik, pil vitamin, dan obat perangsang 124 / Obat-obat generik 127 / Sumbangan 130 / Produk-produk yang ditarik kembali 132 / Mendiskreditkan para kritikus 132 / Perubahan iklim 134 / Kesimpulan 135

5 **Air: Keran Perusahaan** 137
Perusahaan terbesar 139 / Bolivia 140 / Tanzania 142 / Ghana 145 / Uruguay 146 / Botol air: Brasil 147 / GATS 149 / Kesimpulan 151

6 **Pariwisata: Sebuah Ilusi Besar** 155
Tiga cabang 159 / Hubungan pariwisata dengan sektor lain 164 / Kebudayaan 167 / Kerusakan lingkungan 168 / Pariwisata alternatif 172 / Peraturan 176 / Kesimpulan 177

7 **Pengambilan Gelondongan Kayu dan Ikan** 179
Hutan 179 / Perikanan 193

8 **Menambang Orang Miskin** 207
Budaya 210 / Perusahaan 213 /Pertambangan kontroversial di Asia 215 / Filipina 220 / Afrika 224 / Amerika Latin 227 / Emas 231 / Efeknya pada wanita 233 / Kesimpulan: pertambangan yang bertanggung jawab 235

9 **Barang-Barang Pabrik: Kemiskinan di Tengah Kemewahan** 237
Pakaian 239 / Alas kaki 246 / Karpet: tenaga kerja buruh anak-anak 249 / Alat mainan anak-anak 250 / Zona pengolahan ekspor 254 / Kesimpulan: kode etik 259

10 **Energi: Tak Ada Paksaan bagi Orang Miskin** 261
Bendungan 261 / Bendungan, dana bantuan dan TNCs 264 / Minyak dan gas 269 / Bantuan Bank Dunia 282 /Kesimpulan 284

11 **Pembujuk-Pembujuk Korporasi** 287
Memengaruhi PBB 288 / Penjinakan terhadap UNCTAD 294 / Suap 296 / Hubungan kemasyarakatan 297 / Pengaruh pada WTO 303 / Perdagangan adil 306 / Tanggung jawab sosial perusahaan 311 / Kesimpulan 312

12 **Tanggulangi Kekuasaan: Regulasi, Jalan Pintas, Aksi** 313
Peraturan 314 / Jalan pintas perusahaan 323 / Petani dan aksi pemegang saham 333 / Kesimpulan 337

Kesimpulan 339
Di bawah tekanan 341 / Alternatif 343

Catatan

Pengantar Terjemahan Indonesia

Buku John Madeley yang ada di tangan Anda ini, dengan judul asli, *Big Bisnis Poor Peoples: How Transnational Corporations Damage the World's Poor* atau *Bisnis Besar Masyarakat Tetap Miskin: Bagaimana Perusahaan-Perusahaan Transnasional Merusakkan Dunia Kehidupan Orang Miskin,* diterbitkan pertama kali tahun 1999 oleh Zed Books di London. Ia diterbitkan kembali pada tahun 2008 dengan banyak penambahan kasus-kasus baru yang terjadi di seluruh dunia (note: bdk Kata Pengantara Edisi Kedua).

Buku ini mengulas dan melaporkan secara kasatmata kerugian, penderitaan, pemiskinan dan perusakan sumber-sumber hidup—lahan pertanian, air, hutan, dan laut—dari masyarkat penduduk miskin di negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin oleh globalisasi ekonomi neoliberal saat ini yang dieksekusi oleh perusahaan-perusahaan internasional. Setelah selesai membaca buku ini dalam versi bahasa aslinya pada awal tahun 2012, saya merasa tergerak untuk membantu John Madeley meneruskan informasi dan pesan-pesan yang disampaikannya dalam buku ini bagi sekitar 240 juta penduduk Indonesia dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

Apa yang diteliti, ditulis, dilaporkan, dan dipesan oleh John Madeley dalam buku ini juga amat relevan bagi Indonesia. Pelbagai konflik di Indonesia selama ini, seperti peristiwa Poso, Sampit, Maluku, Papua, dan Revolusi 1998 yang menelan ribuan jiwa manusia dan yang memaksa Suharto meletakkan kekuasaannya, korupsi, dan ketidakstabililan politik dan ekonomi Indonesia hingga pada masa otonomi daerah ini sesungguhnya tidak bisa dilihat terlepas dari ketidakadilan globalisasi ekonomi neoliberal saat ini.

Ekonomi neoliberal, kata Madeley dalam buku ini, mengancam untuk menghancurkan segala-galanya: lingkungan (*environment*), peradaban manusia (*human civilization*), martabat manusia (*human dignity*), kebudayaan (*human cultures*), pemerintahan kerakyatan (*democracy*), dan kedaulatan negara (*state sovereignty*). Akarnya adalah ketamakan segelintir orang (*greed of the few*). Korbannya adalah mayoritas masyarakat miskin di Amerika Latin, Afrika, dan Asia termasuk sekitar 240 juta rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pemain utamanya adalah negara-negara maju industri. Instrumen yang mereka gunakan adalah lembaga-lembaga keuangan internasional (Bank Dunia dan IMF) dan WTO. Caranya adalah membuka pasar bebas (*free market)* dan perdagangan bebas (*freetrade).* Pelaksana-pelaksana lapangannya adalah perusahaan-perusahaan transnasional. Credo-nya adalah kompetisi ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang tak terbatas. Kesejahteraan manusia diukur hanya oleh pertumbuhan ekonomi dan konsumsi barang sebanyak-banyaknya.

Saya berharap buku ini bisa membantu bangsa Indonesia bersikap kritis terhadap globalisasi ekonomi neoliberal ini dan membangun ekonomi bangsa secara arif, adil, demokratis, dan berkelanjutan seperti yang dicita-citakan oleh falsafah Pancasila.

Dalam menerjemahkan buku ini, saya berusaha setia pada apa yang dimaksudkan John Madeley. Namun saya berpikir, buku ini juga akan dibaca oleh pembaca di Indonesia yang barangkali tidak terlalu mengerti jargon-jargon ilmu ekonomi. Karena itu, di mana perlu, saya menambahkan apa yang disampaikan secara implisit oleh John Madeley dengan menempatkannya di dalam tanda [...] ini. Kata, frase atau kalimat yang berada dalam tanda [....] ini berasal dari saya sebagai penerjemah. Apa yang ditambahkan dalam tanda [...] ini tidak menambah hal-hal esential dan juga tidak mengurangi apa yang sebenarnya mau disampaikan pengarang John Madeley.

Dalam beberapa kasus, sejumlah istilah dalam bahasa asli (Inggris) dipertahankan dan dicetak huruf miring. Nama-nama perusahaan asing tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nama organisasi diter-

jemahkan ke dalam bahasa Indonesia sejauh dapat dan versi Inggris ditempatkan dalam kurung.

Angka-angka uang dalam dolar ($) Amerika Serikat, Euro (€) Eropa, poundsterlling (£) Inggris, dipertahankan nominal aslinya, sedangkan perkiraan nilai tukarnya dalam rupiah ditempatkan di dalam kurung dengan nilai kurs rata-rata saat ini: US$1.00 = Rp10.000, €1.00 = Rp13.000 dan £1.00 = Rp15.000.

Dalam bahasa Inggris—kata bahasa Indonesia untuk "perusahaan"—mempunyai beberapa variasi seperti *corporation*, *company* atau *firm,* yang sebetulnya memiliki arti yang mirip tapi tak sama. Dalam buku ini, ketiga istilah ini diterjemahkan secara bervariasi: perusahaan atau korporasi. Untuk perusahaan-perusahaan transnational, dalam rangka efisiensi dan juga untuk membiasakan pembaca Indonesia akan singkatan Inggrisnya yang populer, saya pertahankan pemakaian singkatan TNCs (transnational corporations).

Selamat membaca! Semoga kesejahteraan dan jati diri bangsa Indonesia tetap dibangun secara beradab, jujur, adil, dan penuh persaudaraan seperti dicita-citakan Pancasila melampaui perbedaan agama, suku, ras, pulau, daerah atau budaya.

Roma, 2 Oktober 2012

Alex Jebadu

Pengantar Cetakan Kedua

Dalam mempersiapkan edisi kedua ini, sekitar sembilan tahun setelah yang pertama, saya terkesan oleh bagaimana nama, angka, dan kasus penyalahgunaan kekuasaan yang telah berubah ketimbang analisis yang mendasarinya. Perusahaan-perusahaan Transnational (*Transnational Corporations* atau TNCs) bahkan telah menjadi semakin kuat—banyak angka dalam buku ini memberikan kesaksian terhadap peningkatan dan bangkitnya dunia korporasi—namun mereka sekarang sedang dipantau secara lebih dekat. Beberapa perusahaan besar [yang sekarang ini sudah ada] belum ada pada tahun 1999. Beberapa TNCs telah menjadi lebih dominan, sementara yang lain telah menurun. Perilaku TNCs secara keseluruhan tidak banyak berubah, tapi ada peningkatan kesadaran akan aktivitas bisnis mereka.

Dan ada faktor baru dalam analisis. Pada tahun 1999 perubahan iklim merupakan issue yang relatif baru. Sekarang ini menjadi jelas bahwa perubahan iklim memiliki dampak besar terhadap kehidupan orang-orang miskin. Satu hal yang belum banyak diketahui orang adalah bahwa TNCs merupakan penghasil emisi utama dari gas rumah kaca. Masalah agrofuel merupakan isu yang relatif baru juga pada tahun 1999. Sekali lagi, kedua masalah terakhir ini memiliki implikasinya yang cukup besar bagi masyarakat miskin.

Sebagian besar materi dalam edisi kedua ini adalah baru. Hal-hal baru ini meliputi beberapa contoh terbaru dari dampak perusahaan terhadap masyarakat miskin. Contoh-contoh asli dipertahankan kalau masih relevan. Struktur buku ini adalah bahwa bab-bab yang meliputi sektor layanan jasa

sekarang dibuat menjadi satu—yaitu pariwisata, kesehatan dan sebuah bab baru tentang masalah pengadaan air. Bab 12 ('Menanggulangi Kekuasaan: Peraturan, Jalan Pintas, Aksi') telah diperluas secara substansial, dan ada bab *penutup yang* baru.

"Mengapa kita begitu kaya tapi juga begitu miskin?" tanya seorang ahli saraf (neorologist) di sebuah rumah sakit di Afrika.[1] Jelas, ini merupakan sebuah ironi besar. Beberapa negara yang disebut negara-negara "miskin" pada dasarnya merupkan negara-negara yang kaya akan sumber daya alam. Mengapa kekayaan mereka tidak dinikmati oleh rakyatnya sendiri? Salah satu sebabnya adalah bahwa TNCs telah mengeksploitasi kekayaan mereka dan telah menyalahgunakan kekuasaan mereka. Sudah saatnya supaya eksploitasi ini berhenti. Harapan saya adalah bahwa buku ini akan merangsang perhatian, penelitian dan tindakan untuk mengakhiri dampak yang merusakkan dari TNCs pada orang-orang yang hidupnya yang paling rentan di dunia.

John Madeley

1 Dikutip oleh Lydia Polgreen, 'Congo Republic finds unlikely foe in graft', *New York Times*, 16 Desember 2007.

Pengantar

Banyak buku telah ditulis tentang perusahaan-perusahaan transnasional atau TNCs. Tapi dampak sepak terjang bisnis perusahaan asing ini terhadap kaum miskin hampir tidak pernah dilirik—diperiksa [dan dilaporkan ke publik]. Ini adalah sebuah kelalaian yang serius. TNCs sekarang mempunyai kekusaan sangat besar, bahkan lebih lebih besar dan lebih kuat daripada kekusaan pemerintah negara dalam banyak hal. Hal ini sekurang-kurangnya terjadi karena mereka biasanya efisien dalam apa yang mereka lakukan [usaha dagang, bisnis eknomi]—dan apa yang mereka lakukan adalah berusaha menggandakan uang bagi para pemegang saham mereka. Pengorbanan pada pihak manusia atas kesuksesan komersial perlu [dilihat] dan dinilai. Dampak kebijakan-kebijakan pemerintah dari sebuah negara terhadap orang-orang miskin sudah sering dianalisis. Sebaliknya, dampak-dampak dari bisniss TNCs hampir selalu luput dari perhatian banyak orang [untuk dianalisis dan dikritik].

Ketika 'efisiensi' tidak dipertanggungjawabkan kepada rakyat, hal itu bisa menjadi sebuah eksploitasi. Ketika dampak dari bisnis perusahaan-perusahaan, yang tidak dipilih [oleh rakyat melalui pemilu], dan yang umumnya tidak akuntabel kepada publik dan tidak demokratis, pada masyarakat yang miskin secara material dianalisis, maka sebuah gambar menunjukkan kerusakan mata pencaharian yang tidak membawa kredit apa pun bagi perusahaan-perusahaan. TNCs telah menggunakan uang dan kekuatan kuasa mereka untuk memengaruhi perundingan-perundingan internasional dan mengambil keuntungan penuh dari kebijakan privatisasi ekonomi untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah [di negara mana saja di dunia, terutama pemerintah negara-negara berkembang].

Tetapi, tuduhan yang paling besar terhadap mereka adalah bahwa perusahaan-perusahaan besar pada tempat pertama telah menggunakan kekuasaan mereka untuk secara efektif menyebabkan penderitaan dan kesulitan hidup bagi jutaan orang miskin di negara-negara berkembang di seluruh dunia. Kisah tentang bagaimana mereka melakukan hal ini diceritakan dalam buku ini. Buku ini merupakan kisah nyata yang di alami sebagian besar masyarakat manusia saat ini yang perlu diungkapkan.

Kebanyakan buku tentang TNCs selama ini telah ditulis oleh para ahli ekonomi dan guru atau dosen dalam manajemen bisnis. Tapi buku yang satu ini, yang sedang berada di tangan Anda ini, ditulis oleh seorang mantan pegawai TNC yang kemudian berubah profesi menjadi wartawan yang membuat liputan tentang masalah ekonomi dunia, yang minatnya terhadap segala seluk-beluk bisnis perusahaan bertumbuh dalam setengah abad terakhir ini. Sejak meninggalkan bangku kuliah saya langsung bekerja pada sebuah TNC selama sepuluh tahun, termasuk tiga tahun bekerja menjual produk-produk perusahaan. Hal ini memungkinkan saya untuk "melihat bagian dalam" dan memberikan sebuah pemahaman dan pemikiran dasar tentang perusahaan besar dengan jangkauan bisnis global. Baru-baru ini, sebagai wartawan dan penulis selama 30 tahun terakhir, saya telah melakukan perjalanan dan bekerja di sekitar 50 negara berkembang di seluruh dunia untuk menulis tentang hal-hal yang membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat miskin. Dan TNCs adalah salah satu di antaranya.

Selama ini, banyak penelitian tentang TNCs telah difokuskan pada dampak ekonomis mereka dalam hal efisiensi, penggandaan laba keuntungan, arus modal, dan sebagainya. Tapi penelitian-penelitian ini tidak melihat dampak negatif dari bisnis TNCs terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan budaya dari masyarakat miskin di dunia. Majalah jurnal *Transnational Corporations* (Perusahaan Transnasional) memeriksa dan mengulas aktivitas bisnis TNCs dari hampir setiap sudut, namun jurnal ini jarang menyebutkan masyarakat miskin setempat yang terkena dampak negatif oleh bisnis mereka.

Komunitas akademik, di sekolah manajemen dan bisnis, umumnya gagal untuk memberikan para mahasiswa perhatian terhadap dampak negatif dari bisnis TNCs bagi masyarakat miskin. Saya tidak ingin meminta maaf karena telah melangkah masuk ke sebuah arena di mana para akademisi takut untuk melangkah. Dalam sebuah buku tentang perusahaan yang ditulis pada tahun 1973, Louis Turner mengatakan demikian: "Dalam meneliti buku itu, saya menemukan berapa sering para wartawan mengangkat isu-isu penting bertahun-tahun sebelum otoritas-otoritas akademik mulai membuat analisis mereka."[1]

Akademisi saat ini mesti mulai membuat analisis tentang TNCs dan masyarakat orang miskin. Sudah terlalu banyak tahun telah berlalu. Karena literatur akademis begitu jarang yang isinya berbicara tentang efek negatif dari bisnis TNCs pada kehidupan masyarakat, terutama masyarakat orang miskin, saya telah melengkapi penelitian langsung saya sendiri di negara-negara berkembang dengan menyandarkan diri pada berita surat kabar dan jurnal spesialis yang telah memberikan perhatian lebih khusus pada masalah ini dan juga karena mereka lebih aktual. Saya juga telah banyak mengambil banyak temuan dari lembaga-lembaga non-pemerintah (LSM) yang telah melakukan pekerjaan perintis dalam menyoroti aktivitas bisnis perusahaan. Seperti yang saya telah teliti dalam buku ini, satu hal yang sangat jelas adalah bahwa efek negatif dari bisnis TNCs pada kaum miskin sangat besar, tetapi sering tersembunyi dan jarang dilaporkan kepada publik. Saya menemukan bahwa efek negatif dari bisnis TNCs pada kaum miskin ternyata lebih parah dari yang saya duga. Ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan oleh korporasi.

Kegiatan-kegiatan bisnis utama TNCs di negara-negara berkembang akan dibahas dalam halaman-halaman buku ini. Bisnis-bisnis pokok TNCs yang dibahas di sini akan dibagi ke dalam bisnis di bidang pangan dan pertanian, kehutanan, perikanan, penyediaan air minum, kesehatan,

---

1 Turner, L., *Multinational Companies and the Third World*, London: Allen Lane, 1974, p. ix.

pertambangan, pabrik pembuatan barang-barang atau manufaktur, energi, dan pariwisata — dan layanan jasa kemasyarakatan. Beberapa perusahaan besar melakukan bisnis di lebih dari satu sektor. Karena penyebaran bisnis dari perusahaan-perusahaan meluas, maka kekhawatiran publik atas sepak terjang bisnis mereka juga semakin bertumbuh dan berkembang [di banyak tempat di seluruh negara berkembang]. Sekarang ini sulit untuk tidak melihat kehadiran bisnis TNCs dalam setiap kegiatan ekonomi yang sangat luas yang bisa menghasilkan sebuah profit [bagi perusahaan-perusahaan].

David Korten melukiskan TNCs sebagai "alat dari tirani pasar yang sedang memperluas jangkauannya di seluruh planet seperti sebuah kanker, yang menjajah semakin banyak ruang-ruang kehidupan planet bumi, menghancurkan mata pencaharian-mata pencaharian masyarakat, menggusur orang-orang miskin dari daerah mereka, membuat institusi negara yang demokratis impoten tak berdaya, dan mempropagandakan falsafah hidup yang berpusat pada pencarian yang yang tak pernah terpuaskan".[2] Aspek terburuk dari tirani ini adalah bahwa ia menghantam paling keras pada orang-orang miskin yang paling rentan hidupnya.

"Tirani pasar" (market tyranny) secara efektif membuat negara-negara berkembang jatuh ke dalam cengkeraman kuasa TNCs. Kelahiran Organisasi Perdagangan Dunia (*the World Trade Organization* atau WTO) pada tahun 1994 semakin memperkuat kedudukan TNCs. Oleh adanya WTO, pemerintah-pemerintah negara [khususnya negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin], semakin kehilangan kedaulatannya untuk mengatur dan mengendalikan TNCs. Kata-kata seperti "globalisasi" dan "liberalisasi" merupakan kabar gembira bagi direksi-direksi TNCs. Pada saat TNCs menjadi semakin kuat berkuasa, PBB sendiri telah meninggalkan upayanya untuk menyusun sebuah kode etik atau peraturan untuk mengatur TNCs. TNCs mengklaim bahwa "atur diri sendiri" (*self regulation*) dapat mengontrol industri, namun dalam kenyataannya hal ini tidak menghentikan penyalahgunaan kekuasaan bisnis mereka.

---

2 Korten, D. C., *When Corporations Rule the World*, London: Earthscan, 1995, p. 12.

Ironisnya lagi, krisis ekonomi di negara-negara berkembang malah sering memberi keuntungan bagi TNCs. Karena perusahaan-perusahaan transnasional sering menjadikan krisis ekonomi sebuah negara sebagai kesempatan untuk menampilkan diri sebagai penyelamat. Sering terjadi bahwa karena keputusasaan ekonomi, pemerintah sebuah negara yang sedang krisis akan berusaha menarik TNCs untuk datang menyelamatkan negara mereka dari krisis ekonomi tersebut. Di beberapa daerah pedesaan terpencil di Afrika, layanan sosial pemerintah seperti di bidang kesehatan, pendidikan dan penelitian pertanian sudah tak ada lagi. Ada kekosongan di mana TNCs atau LSM bisa mengisi. Tapi ada bahaya besar di mana TNCs bisa merasa dapat melakukan peranan tersebut.

Banyak negara sekarang sedang berlomba-lomba memberikan investor asing sebuah "iklim bisnis yang menguntungkan". Tapi ini biasanya membawa akibat bahwa TNCs bisa melakukan apa saja yang mereka suka. "TNCs tidak diharapkan sebagai pejuang nurani sosial kemasyarakatan, pembela orang miskin dan perancang nilai-nilai kemanusiaan," kata Reginald Green, karena "kapasitas dan legitimasi mereka untuk bertindak secara independen di bidang-bidang ini hampir nihil dan kegiatan sehubungan dengan pembelaan orang miskin dan nilai-nilai kemanusiaan bertentangan dengan logika bisnis mereka.[3]

Tema utama yang dibahas dalam buku ini adalah dampak-dampak negatif bisnis TNCs terhadap lingkungan fisik dari sebuah negara. Sebuah perusahaan yang merusak lingkungan fisik sebuah wilayah berarti merusak sumber-sumber daya alam yang sangat merugikan penduduk setempat. Ketika aktivitas bisnis sebuah TNC merusak sebuah lingkungan fisik, maka TNC bersangkutan sesungguhnya merusakkan kemampuan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk mencari nafkah hidup. Dan biasanya, orang-orang miskin selalu menderita kerugian paling besar karena sebuah kegiatan bisnis TNCs, karena orang-orang miskin memiliki

3 Green, R. H., 'Transnational corporate responsibility and states, workers and poor people', in World Council of Churches, *Churches and the Trans-national Corporations*, Geneva: World Council of Churches, 1983, p. 110.

alternatif yang terbatas untuk bisa hidup. Untuk mempertahankan kelangsung hidup, mereka bergantung sepenuhnya pada alam di sekitar mereka dan bukan pada pembelian barang-barang [dan kalau alam sebagai sumber hidup mereka rusak, maka tamatlah riwayat hidup mereka]. Kelompok masyarakat miskin tidak begitu gampang untuk bergerak pindah ke tempat baru dan memulai sebuah cara hidup dengan mata pencaharian lain di tempat yang baru [seperti orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi], meskipun dalam keputusasaan hal ini bisa terjadi.

Efek

Buku ini berisi banyak contoh efek sampingan dari bisnis TNCs raksasa pada kehidupan orang-orang miskin. Perusahaan-perusahaan transnasional yang berukuran kecil, yang mempekerjakan tenaga buruh kurang dari 500 orang, tidak menjadi objek studi dari buku ini. Perusahaan-perusahaan transnasional berukuran kecil hanya menguasai kurang dari 10% dari investasi langsung asing [*Foreign Direct Invesments* atau FDI] dari pemerintah. Contoh-contoh yang ditampilkan dalam buku ini tidak otomatis menjadi kasus-kasus paling buruk. Kasus-kasus yang dilaporkan sebagai contoh juga berpretensi sebagai yang paling lengkap, tetapi lebih merupakan sebuah indikasi dari apa yang sedang terjadi. Beberapa dari kasus-kasus yang dilaporkan di sini saya telah saksikan sendiri secara langsung.

Walaupun buku ini memfokuskan perhatian dan laporannya pada dampak-dampak negatif dari bisnis TNCs terhadap kaum miskin di negara-negara berkembang, namun hal itu tidak berarti bahwa perusahaan-perusahaan besar ini tidak mempunyai dampak negatif terhadap kelompok-kelompok masyarakat miskin di negara-negara Barat. Kekuatan korporasi ini telah menjadi bisnis besar di seluruh dunia [termasuk di negara-negara Barat sendiri]. Kontrol atas sumber daya alam dan manusia hampir tak terelakkan sedang jatuh ke kekuasaan bisnis TNCs dengan mengorbankan kelompok-kelompok masyarakat lokal. Meskipun masyarakat lokal yang umumnya miskin amat dirugikan oleh bisnis TNCs, tapi masyarakat-masyarakat lokal ini memiliki sedikit kekuatan untuk melawan keputusan mereka.

Bab Pendahuluan dari buku ini memberikan gambaran umum tentang peranan TNCs. Bab ini mengkaji bagaimana TNCs telah tumbuh baik dalam ukuran maupun kekuatan kuasa mereka terutama di negara-negara berkembang. Selain investasi langsung, TNCs sekarang tidak memiliki banyak pengaturan kepemilikan (*non-ownership arrangement*) dan tidak memiliki hubungkan kesederajatan (*non-equaty links*) seperti subkontrak. Dengan cara ini, perusahaan-perusahaan bisa mendulang laba keuntungan tanpa risiko kerugian uang mereka. Risiko kerugian dipindahkan untuk dipikul oleh negara-negara berkembang atau oleh orang-orang miskin.

TNCs sangat berbeda dari perusahaan-perusahaan lokal yang dimiliki negara-negara berkembang. Ukuran dan internasionalisme memberikan mereka kekuasaan atas pemerintah yang perusahaan-perusahaan nasional tidak memiliki. Jumlah yang cukup besar dari uang yang mereka miliki memungkinkan mereka untuk terlibat dalam kegiatan yang efektif merugikan warga masyarakat miskin. Lebih banyak pekerjaan adalah wortel yang TNC sering pertahankan untuk pemerintah, namun pekerjaan yang diciptakan dapat menjadi berubah-ubah dan jumlahnya tidak beberapa.

Bab 1 membahas mengapa negara-negara berkembang "menginginkan" TNCs. Kelemahan ekonomi merupakan alasan utamanya. Dalam dunia program penyesuaian struktural ekonomi [*Structural Adjustment Programs* atau SAPs yang diberlakukan IMF dan Bank Dunia kepada negara berutang], globalisasi, liberalisasi dan privatisasi, tampaknya pemerintah negara-negara berkembang tidak memiliki pilihan lain selain mengundang perusahaan-perusahaan asing. Tapi "izasi-izasi" zaman modern ini sesungguhnya memiliki dampak negatif yang besar terhadap kaum miskin, yang bermain langsung ke tangan perusahaan-perusahaan transnasional yang mampu membayangkan skenario yang lebih menguntungkan. Karena dihempas oleh krisis ekonomi, pemerintah negara-negara berkembang tampaknya tidak menyadari bahwa hak negara mereka untuk mengembangkan ekonomi dan teknologinya sendiri sedang berada dalam ancaman bahaya.

Baik keringanan utang dan bantuan pembangunan sering dibuat dengan persyaratan bahwa negara-negara bersangkutan harus meli-

beralisasi ekonomi mereka, yang berarti bahwa negara-negara ini harus membuka diri mereka seluas-luasnya bagi perusahaan-perusahaan asing. Ada penekanan yang besar terhadap negara-negara berkembang supaya menerima globalisasi ekonomi.

Kejahatan-kejahtaan dari TNCS biasanya tampak jelas dalam informasi-informasi yang detail, dan sebagian besar buku ini membahas, menurut sektor, rincian-rincian kegiatan dari bisnis TNCs. Bab 2 membahas sektor ekonomi terbesar di dunia, yaitu sektor pertanian. TNCs sangat kelihatan dan sering sangat kontroversial ketika terlibat dalam sektor pertanian: mereka menjual benih, pupuk dan pestisida kepada para petani, mereka patenkan varietas tanaman baru, miliki perkebunan sendiri, dan terlibat dalam modifikasi genetik, pengolahan, pemasaran dan ekspor. Mereka mendominasi pasar-pasar dunia dalam komoditas-komoditas pertanian yang diperdagangkan secara internasional, di mana sejumlah kecil perusahaan menguasai sebagian besar persentase perdagangan. Bab ini juga membahas munculnya agrofuel, yang lagi-lagi didominasi oleh TNCs. Luas areal pertanian yang berada di bawah perkebunan agrofuel mengancam lahan-lahan yang saat ini dibudidayakan oleh petani untuk tanaman pangan.

Bab 3 mengkaji beberapa produk utama di mana TNCs banyak terlibat berbisnis — secara khusus tembakau, makanan bayi, pisang, minuman ringan, buah-buahan, sayuran, dan bunga. Produksi, perdagangan dan penggunaan komoditas-komoditas ini sering kali merusak kehidupan masyarakat miskin. Karena orang-orang Eropa di belahan dunia Utara secara bertahap-tahap mulai berhenti merokok, maka TNCs yang mendominasi industri rokok mulai melihat negara-negara Selatan sebagai pasar yang akan menopang mereka dalam bisnis ini. Lebih dari satu juta anak meninggal setiap tahun yang sebenarnya masih bisa hidup jika mereka telah dipiara dengan air susu ibu atau ASI pada saat mereka masih bayi. Tapi fakta ini tidak menghentikan promosi untuk menggantikan ASI kepada para kaum ibu di negara-negara berkembang oleh beberapa TNCs besar dunia.

Salah satu pelanggaran yang paling mencolok yang dilakukan oleh TNCs, dan bisa dikatakan sebagai salah satu efek negatif paling serius

pada jutaan orang miskin, disoroti dalam Bab 4 tentang kesehatan. Obat-obat bagi masyarakat miskin merupakan bisnis besar bagi orang kaya. Di banyak negara berkembang, 20–30% dari anggaran kesehatan dihabiskan untuk pengadaan obat-obatan, yang sebagian besar dari mereka dibuat oleh TNCs farmasi. Bab ini memperlihatkan bagaimana perusahaan-perusahaan mempromosikan produk mereka dan bagaimana negara-negara berkembang ini dapat dihalang-halangi untuk mengembangkan program kebijakan pengobatan nasional, sehingga orang-orang miskin tidak bisa mendapat akses untuk mendapat obat-obatan murah yang merupakan buatan lokal sendiri.

Barangkali tidak ada pelayanan lebih penting daripada pelayanan pasokan air minum dan TNCs juga sedang mencari untuk mendulang laba keuntungan dari proyek air minum. Tapi tarif yang mahal akan air, sebagaimana diuraikan Bab 5 buku ini, berarti bahwa orang-orang miskin semakin sulit untuk memperoleh air minum. Ada beberapa alternatif untuk privatisasi sumber daya yang memberikan kehidupan ini.

Pariwisata memperoleh mata uang asing bagi negara-negara berkembang, dan banyak negara berkembang melihatnya sebagai salah satu dari beberapa sektor yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi mereka. Tampaknya, pariwisata telah menjadi sebuah cara menarik untuk diversifikasi ekonomi, dengan melarikan diri dari kebergantungan pada ekspor tradisional. Tetapi sebagian besar devisa negara-negara berkembang yang diperoleh dari sektor pariwisata internasional diraup oleh TNCs ketimbang dinikmati oleh orang-orang dari negara-negara berkembang tersebut. Orang-orang miskin khususnya sering kali menjadi korban ketimbang penerima manfaat dari industri pariwisata. Seperti didemonstrasikan Bab 6, pariwisata juga memiliki dampak negatif yang sangat besar dan sering merusak lingkungan masyarakat lokal.

Hutan-hutan tropis sering sangat penting bagi masyarakat miskin, dan TNCs selama ini telah terlibat dalam penghancuran sumber daya yang berharga ini. Ketika TNCs merusak hutan, mereka merusakkan tidak hanya pohon-pohon—mereka juga merusakkan mata pencaharian masyarakat setempat yang hidup dan tinggal di sana. Bab 7 membahas

masalah penebangan hutan yang merajalela demi pengusahaan kayu yang sekarang masih sedang terjadi. Bab ini juga membahas peranan TNCs dalam proses penangkapan ikan yang berlebihan yang menyebabkan stagnan tangkapan ikan dunia. Dengan menggunakan "teknologi modern", kapal-kapal pukat dari negara-negara Barat, yang sebagian besar dimiliki oleh perusahaan-perusahaan, menyapu habis ikan-ikan di perairan dari negara-negara Dunia Ketiga secara terus-menerus, yang pada gilirannya mengancam volume penangkapan dan mata pencaharian nelayan-nelayan lokal. Sekali lagi, masyarakat miskin selalu menanggung beban sebagai korbannya, karena stok ikan di laut mereka semakin sedikit yang tersedia untuk mereka.

Pertambangan adalah kegiatan yang merusak lingkungan, namun menjadi sektor yang sangat menguntungkan TNCs. Seperti yang dibahas dalam Bab 8, sebagian besar kegiatan mereka secara langsung menimbulkan malapetaka terhadap ekonomi dan budaya masyarakat miskin. Di seluruh Asia, Pasifik, Afrika, dan Amerika Latin, pertambangan sedang dioperasikan dengan hampir tidak memedulikan masyararakat setempat yang hidup dan tinggal di wilayah itu. Pertambangan sering mengambil tanah di mana masyarakat tinggal dan hidup bertani. Pertambangan menghasilkan pembuangan limbah besar, yang sering berbahaya bagi kesehatan, mencemari sumber air yang bisa menjangkau sebuah wilayah yang sangat luas dan jauh dari wilayah pertambangan karena dibawa oleh udara atau oleh aliran air sungai.

Pabrik garmen atau pakaian, alat mainan dan sepatu adalah salah satu barang-barang manufaktur utama yang TNCs dan subkontraktor produksikan di negara-negara berkembang. Banyak dari barang-barang ini memiliki nama merek berkualitas tinggi yang dijual dengan harga tinggi di toko-toko, tetapi tenaga buruh miskin yang memproduksikannya sering sangat menderita karena upah yang sangat rendah. Seperti yang diuraikan Bab 9, upah rendah, jam kerja yang panjang dan kondisi kerja yang buruk merupakan sebuah situasi yang umum terjadi di pabrik-pabrik di negara-negara berkembang yang telah disubkontrakkan untuk membuat alat-alat mainan, pakaian, dan sepatu bagi TNCs.

Setiap tahun antara pertengahan 1980-an dan pertengahan 1990-an sekitar empat juta orang mengungsi dari rumah dan tanah-tanah mereka oleh proyek bendungan listrik tenaga air. Perusahaan-perusahaan besar adalah link penting dalam rantai proyek bendungan besar. Pengalaman mereka dalam proyek tersebut memberikan mereka keahlian yang perusahaan nasional biasanya tidak miliki. Bab 10 membahas beberapa dari proyek bendungan besar ini. Bab ini membahas TNCs yang berbinis di bidang energi, termasuk kegiatan dari beberapa perusahaan utama dunia.

TNCs adalah para pembujuk yang hebat. Uang yang mereka keluarkan untuk hubungan kemasyarakatan (*public relations* atau PR) dapat dilihat sebagai bentuk penyalahgunaan kekuatan kuasa bisnis mereka. Mereka harus menghabiskan uang untuk hal ini, karena ada begitu banyak hal yang harus mereka jelaskan. Alih-alih bertindak atau berbisnis secara lebih bertanggung jawab, mereka memilih untuk menghabiskan sejumlah besar uang untuk meletakkan sebuah 'spin' (pentalan) yang baik pada apa yang mereka sedang lakukan. Bab 11 membahas bagaimana TNCs melakukan hal ini. Apa yang mengejutkan dan sangat menyakitkan adalah bagaimana PBB dan beberapa lembaga-lembaga terkait dengannya telah secara efektif ditundukan oleh TNCs. Daya pengaruh TNCs pada badan PBB sangat besar.

Peraturan, jalan pintas dan aksi konkret adalah cara untuk membendung kekuatan kuasa bisnis TNCs, dan hal ini dibahas dalam Bab 12. TNCs boleh sangat kuat, tetapi mereka tidak bisa memaksa warga masyarakat untuk memainkan permainan yang mereka rancangkan. Kelangsungan bisnis perusahaan-perusahaan bergantung pada masyarakat yang menggunakan teknologi mereka dan yang membeli produk-produk mereka. Mereka bergantung pada pasar yang mereka promosikan. Hukum-hukum global diperlukan untuk mengatur tingkah laku perusahaan-perusahaan global, tetapi tindakan warga masyarkat terhadap perusahaan tidak menunggu regulasi global. Orang-orang dapat melakukan jalan pintas melewati TNCs jika mereka bisa. Warga masyarakat, para petani dan pemegang saham sedang berupaya mengambil tindakan.

Bagian Kesimpulan dimulai dengan beberapa pertanyaan yang saya telah ditanyakan kepada saya sejak penerbitan edisi pertama buku ini. Dalam jawaban, saya perhatikan bahwa organisasi-organisasi sosial baru dan masyarakat sedang bermunculan. Beberapa alternatif sedang berkembang yang bisa menjungkirbalikkan dunia yang telah didominasi TNCs. TNCs memang sangat kuat berkuasa hingga saat ini, namun warga masyarakat sedang menyadari bahwa mereka juga sebenarnya mempunyai kekuatan tersendiri.

Ucapan Terima Kasih

Dalam mengupas sebuah kegiatan seluas aktivitas bisnis korporasi-korporasi transnasional, saya telah dibantu oleh banyak orang dan mesti mengucapkan terima kasih, secara khusus, ahli di bidang perikanan Brian O'Riordan, staf PAN Eropa, Amanda Sandford, Aksi untuk Rokok dan Kesehatan, Vandana Shiva, João Pedro Stedile dan Jose Luiz dari Brasil, Zafrullah Chowdhury dari Bangladesh, Janneke van Eijk dari Kampanye tentang Pakaian Bersih, dan peserta dari sejumlah negara berkembang pada sebuah konsultasi tentang Pertambangan dan Masyarakat Adat. Saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada para pejabat dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan, Organisasi Perburuhan Internasional, dan Organisasi Pariwisata Dunia. Juga, orang-orang dari seluruh dunia yang telah membuat komentar yang berharga dan tajam pada edisi pertama. Dan orang-orang lain, terlalu banyak untuk disebut, yang telah mengilhami saya dengan wawasan mereka. Setiap kekeliruan yang mungkin ditemukan dalam buku ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Pengantar: Penyebaran Korporasi

Pemerintahan dengan banyak uang yang terorganisir sama berbahayanya dengan pemerintahan yang dipimpin oleh segerombolan masa yang terorganisir. (Franklin D. Roosevelt, President AS)

Masalah kekuasaan adalah tentang cara mendapatkan dan memilih orang-orang yang berkuasa untuk mengabdikan hidup bagi kepentingan umum ketimbang hidup dengan mengambil dari kepentingan umum. (Robert F. Kennedy)

Bagi Perusahaan Transnasional orang-orang miskin biasanya merupakan realitas yang tidak kelihatan. (Reginald H. Green)

Perusahaan-perusahaan transnasional (*transnational corporations,* selanjutnya TNCs atau juga korporasi tingkat dunia) merupakan salah satu institusi sangat penting dari ekonomi global saat ini dan menduduki posisi semakin kuat dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Enam puluh tahun yang silam (1950-an), misalnya, jumlah TNCs tidak seberapa. Sekarang jumlahnya sudah mencapai puluhan ribu dan mereka berpengaruh ke bidang politik, ekonomi, sosial, dan bidang budaya yang sangat luar biasa terhadap negara, masyarakat, dan lingkungan hidup. TNCs yang didefinisikan oleh PBB sebagai 'perusahaan-perusahaan yang kegiatan-kegiatan usahanya dibuat di dalam dua atau lebih negara dengan kemampuan untuk memengaruhi pihak lain', memproduksi banyak jenis barang dan pelayanan jasa bagi perdagangan internasional dan kerap kali juga bagi pasar dalam negeri lokasi mereka beroperasi. Mereka juga sering disebut perusahaan-perusahaan multinational (*multinational corporations*

atau MNCs) karena TNCs melakukan operasi 'bisnis melampaui batas-batas wilayah negara'.[1] Kekuatan mereka sangat besar dan dampak bisnis mereka terhadap kehidupan masyarakat miskin juga sangat mengerikan namun sering tersembunyi atau tidak tampak.

Sebagian besar TNCs berbasis di negara-negara Barat yang dimiliki oleh para pengusaha orang Barat pula. Oleh karena itu, beberapa TNCs menjadi sebuah tambahan penting bagi ekonomi negara-negara Barat. Ketika mereka beroperasi di negara-negara sedang berkembang, ukuran mereka yang kerap kali kecil membuat kekuatan mereka tidak seberapa. Biarpun demikian, pemerintah-pemerintah negara berkembang umumnya berusaha untuk menarik dan mengundang mereka. Pada saat yang sama organisasi-organisasi non-pemerintah (*non-governmental ogranizations*, selanjutnya NGOs atau LSM–Lembaga Swadaya Masyarakat) di negara-negara Belahan Bumi Selatan (Southern Countries–negara-negara Asia Selatan, Latin Amerika, dan Afrika), yang melihat langsung sepak terjang bisnis TNCs dan dampaknya terhadap masyarakat miskin, kerap memunculkan kritik yang pedas terhadap TNCs. Hingga saat ini, ada perbedaan yang cukup besar di antara pemerintah-pemerintah negara berkembang di Selatan dan LSM yang bergerak di lingkungan hidup dalam menyikapi sepak terjang TNCs.

TNCs harus mendulang keuntungan (*profit*) bagi pemegang saham (*shareholders, shareowners, stockholders* atau *stockowners*) yang merupakan pemilik sebenarnya dari TNCs itu. Pencapaian profit merupakan kewajiban utama perusahaan-perusahaan itu. TNCs sangat berkembang. Globalisasi — dunia sebagai sebuah pasar tunggal — mendorong percepatan pertumbuhan mereka secara dramatis. Menurut laporan UNCTAD (*Uni-ted Nations Conference on Trade and Development* — Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB) pada tahun 2007, di seluruh dunia sekitar 78.000 TNCs (dibandingkan pada tahun awal tahun 1970-an baru berjumlah 7.000 TNCs) dengan 780.000 anak perusahaan yang berada di luar negara asal dan basis TNCs itu sendiri.

---

1 Green, 'Transnational corporate responsibility", p. 119.

Investasi asing secara langsung

Investasi asing secara langsung (*Foreign direct invesment*, selanjutnya FDI) melonjak secara massif 38% pada tahun 2006 hingga mencapai US$1.306 billiun (sekitar Rp13.060 triliun). FDI didominasi oleh TNCs. "Kenaikan arus kapital global sebagian didorong oleh peningkatan profit perusahaan dan mengakibatkan harga saham yang semakin tinggi."[2] TNCs yang berbasis di negara-negara maju menguasai 84% dari FDI dan hampir setengah dari jumlah ini berasal dari negara-negara Uni Eropa, terutama Prancis, Spanyol, dan Inggris.

TNCs yang besar memiliki nilai penjualan tahunan yang melebihi penghasilan kebanyakan negara-negara berkembang. Sekitar 400 perusahaan menguasai lebih dari setengah total penjualan TNCs. Dalam perjuangan mereka yang gigih untuk meningkatkan profit, TNCs memilih untuk memindahkan operasi bisnis mereka ke negara-negara berkembang, yang menyimpan daya tarik keuntungan tinggi bagi mereka. Upah dan biaya operasional bisnis, misalnya, biasanya jauh lebih rendah daripada di negara-negara industri maju seperti di Eropa atau di Amerika Utara. Serikat buruh yang terorganisir mungkin tidak ada dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang sehat masih lemah. Selain itu ada praktik *transfer pricing* dan pemerintah setempat bisa menawarkan apa yang disebut a *tax-free holiday* (hadiah berupa pembebasan pajak) kepada TNCs. Di bawah kontrak *tax-freeholiday*, sebuah perusahaan asing tidak perlu membayar pajak apa pun selama lima bahkan sampai sepuluh tahun pertama ke negara lokasi perusahaan itu beroperasi. Selain itu, ketertarikan TNCs untuk mengalihkan bisnis ke negara berkembang juga mempunyai alasan geografis: negara-negara yang sedang berkembang masih mempunyai lahan luas untuk usaha pertanian, tanah luas yang mengandung bahan mineral pertambangan dan alam yang indah bagi wisatawan untuk dieksplorasi.

"Tenaga buruh yang bekerja di anak cabang perusahaan luar negeri dari TNCs telah meningkat hampir tiga kali lipat sejak tahun 1990 .....

---

2 *United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report 2007, Geneva: UNCTAD, 2007, p. xv.*

Pemerintah terus mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi FDI. Pada tahun 2006, 147 perubahan kebijakan yang membuat lingkungan negara tuan rumah lebih menguntungkan FDI."[3] Aliran FDI ke Afrika pada tahun 2006 berjumlah dua kali lipat dari jumlah aliran FDI tahun 2004, ke Asia Barat, aliran FDI meningkat 44% dibandingkan tahun 2005, ke Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara meningkat 19% dan ke Amerika Latin meningkat 11%.

Korporasi mengonsentrasikan sebagian besar FDI di negara-negara berkembang yang pemerintahannya relatif otoriter. Bentuk pemerintahan seperti itu dinilai dapat diandalkan menjadi negara "klien" atau pelanggan yang baik. Selain itu korporasi atau TNCs juga lebih cenderung untuk berinvestasi di negara-negara di mana pemerintahannya stabil. Karena ketidakstabilan (politik, ekonomi) merupakan iklim buruk bagi bisnis, dan TNCs akan menghindar untuk tidak berbisnis di negara yang situasi politiknya tidak menentu.

20 besar TNCs berdasarkan peringkat nilai pasar:

Nama TNCs	Nilai pasar dalam juta US$ (30 Maret 2007)	Omzet (turnover)	Net Income) Laba Bersih
01. Exxon Mobil	429.566,7	365.467,0	39.500,0
02. General Electric	363.611,3	160.657,0	20.829,0
03. Microsoft	272.911,7	44.282,0	12.599,0
04. Citigroup	252.857,3	21.538,0	---
05. AT&T	246.206,3	63.055,0	7.356,0
06. Gazprom	245.911,4	53.197,2	11.962,7
07. Toyota	230.831,6	178.530,8	11.645.1
08. Bank of America	228.177,3	21.133,3	---
09. Indl & Coml Bk of Cina	224.787,6	4.851.9	---
10. Royal Dutch Shell	214.018,4	318.845,0	25.442,0
11. BP	208.843,5	265.906,0	22.000,0
12. HSBC	202.146,3	15.789,0	---

3 *Ibid.*, pp. xvi dan xvii.

13. Procter & Gamble	199.293,8	68.222,0	8.684,0
14. Walt-Mart	193.642,8	344.992,0	11.284,0
15. Altria (Philip Morris)	184.277,3	70.324,0	12.022,0
16. Cina Mobil HK	181.798,6	38.158,8	8.530,2
17. Pfizer	179.015,4	48.371,0	19.337,0
18. American International	174.878,3	14.048,0	---
19. Johnson & Johnson	174.397,2	53.324,0	11.053,0
20. Berkshire Hathaway	168.279,8	108,990,0	11.015,0

Sumber: *Financial Times*, 29 June 2007.

Kekhawatiran akan dampak negatif terhadap sepak terjang kegiatan bisnis TNCs yang menyebabkan pemerintah negara-negara berkembang mengambil alih aset-aset mereka pada akhir tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an. Pemerintah percaya bahwa dengan menasionalisasikan TNCs, bisa mengambil sendiri keuntungan dari aset-aset negara mereka ketimbang diraih oleh korporasi-korporasi asing. Akan tetapi, masa pengambilalihan aset-aset TNCs itu tidak berlangsung lama. Korporasi-korporasi sangat terampil dalam mengoperasikan bisnis ekonomi demi mendapatkan profit. Kalau tidak, mereka tidak akan mempertahankan bisnis mereka. Setelah masa tahun 1970-an itu, pemerintah negara-negara berkembang dengan cepat menyadari bahwa mereka sesungguhnya tidak sanggup menjalankan TNCs model Barat yang kerap amat kompleks dengan tingkat profitabilitas yang sama. Harapan untuk mendapatkan keuntungan dari nasinalisasi TNCs ini akhirnya gagal diwujudkan. Sebagai akibatnya ide untuk menasionalisasikan korporasi-korporasi asing ditarik kembali dari agenda politik ekonomi para pemerintah negara-negara berkembang sejak itu juga.

Sekitar dua pertiga dari perdagangan internasional dikuasi perusahaan-perusahaan transnasional. "Pemasaran, pengolahan, atau produksi beberapa komoditi—termasuk bauksit, tembaga, bijih besi, nikel, timah, seng, perkebunan tembakau, pisang dan teh—semuanya didominasi oleh sejumlah perusahaan-perusahaan transnasional."[4]

4 Independent Commission on International Development Issues, North–South: *A Programme for Survival*, London: Pan Books, 1980, p. 187.

Bagi sejumlah TNCs, penguasaan lebih dari 80% perdagangan atas produk-produk pertanian tertentu merupakan sebuah praktik yang umum dan biasa (lihat Bab 2). "Di luar sektor primer, lebih dari dua pertiga dari ekspor barang dan jasa di dunia dikuasai oleh TNCs, dan 30–40% dari jumlah itu terjadi di dalam lembaga-lembaga yang sama."[5] Sebuah perkiraan menyatakan bahwa 500 TNCs utama "mengontrol sekitar 70% dari perdagangan dunia, 80% dari investasi asing dan sekitar 30% dari GDP dunia."[6] Sekitar sepertiga dari perdagangan dunia dilakukan oleh TNCs dalam organisasi mereka sendiri—sebuah anak perusahaan di satu negara menjual dan atau membeli dari anak perusahaan yang berada di negara lain, atau berurusan dengan kantor pusat dari korporasi mereka.

Persoalan perusahaan bertumpu pada teori keunggulan komparatif, bahwa setiap pihak akan mendapat keuntungan ketika negara-negara berusaha untuk menspesialisasi dan TNCs akan menolong dalam proces spesialisasi itu. Menurut John H. Dunning: "Salah satu tugas dari pasar internasional adalah untuk mengalokasikan sumber daya dan kemampuan sedemikian rupa sehingga setiap negara terlibat dalam jenis kegiatan ekonomi yang relatif paling cocok dengannya."[7] Akan tetapi, teori keunggulan komparatif, mesin yang menghidupkan motor bisnis TNCs, telah kehilangan kredibilitasnya. Banyak negara yang telah menempuh spesialisasi secara ekonomis namun jutaan [keuntungan, kesejahteraan] belum bisa diraih juga. Meskipun demikian, kemampuan TNCs untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat menghasilkan devisa dan menciptakan lapangan kerja ekstra telah membuat mereka mempunyai kuasa besar atas ekonomi, perdagangan, dan manusia. Namun, kekuasaan ini selalu terbuka untuk disalahgunakan. Penguasaan TNCs atas ekonomi memungkinan mereka untuk secara efektif menguasai dan memerintah negara-negara yang sedang berkembang, bahkan TNCs bisa bersekutu

5 Dunning, J. H., 'Re-evaluating the benefits of foreign direct investment', *Transnational Corporations*, Vol. 3, No. 1 (February 1994), Geneva: UNCTAD, p. 28.

6 Diperkirakan oleh by Richard Tapper, "World Wide Fund for Nature,"dikutip di *The Guardian*, 8 May 1992.

7 Dunning, 'Re-evaluating the benefits', p. 49.

sekian sehingga mereka menjadi satu badan dengan pemerintahan negara berkembang yang dipilih secara demokratis oleh warga masyarakat.

Privatisasi dan liberalisasi yang lebih luas merupakan fasilitasi yang membantu dunia menjadi sebuah pasar tunggal. Globalisasi yang berlangsung hingga saat ini merupakan sebuah fakta [politik sosial ekonomis] yang diciptakan dan dipimpin oleh TNCs. Dalam kenyataannya, badan atau entitas yang melakukan aktivitas perdagangan dunia bukanlah negara-negara, melainkan perusahaan atau korporasi. Proses globalisasi, terutama globalisasi ekonomi, didorong dan dipercepat pada awal tahun 1980-an yakni apa yang disebut Program Penyesuaian Struktural (*Structural Adjustment Programs*, selanjutnya SAPs) yang diberlakukan secara sepihak oleh Bank Dunia/IMF. Di bawah SAPs, sebagian besar negara berkembang dipaksa Bank Dunia dan IMF untuk meliberalisasi ekonomi mereka dengan menghapus hambatan tarif, hambatan non-tarif, kontrol harga atas barang, subsidi, dan penghapusan hambatan-hambatan lainnya, sehingga kekuatan-kekuatan pasar ekonomi bisa bermain bebas dan leluasa. Privatisasi ekonomi dari sebuah negara biasanya membuat negara bersangkutan menjadi lebih menarik bagi TNCs dan telah meningkatkan jumlah negara-negara berkembang menjadi incaran korporasi untuk melakukan investasi ekonomi.

Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*, selanjutnya WTO) yang dibentuk pada tahun 1995 yang menggantikan Perjanjian Tarip dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade*, GAT — telah mendorong peningkatan pengaruh TNCs dalam banyak hal. Ketentuan-ketentuan yang dicapai melalui sidang dan perjanjian WTO, pemerintah negara tidak lagi dapat menggunakan kekuasaannya untuk mengatur dan mengontrol ekonomi di negara mereka, misalnya kekuasaan mengontrol perdaganan yang berhubungan dengan kegiatan investasi, yang pernah mereka miliki dulu sebelum tahun 1980-an.

Mengapa TNCs berbeda

Investasi TNCs di negara-negara berkembang berbeda secara fundamental dibandingkan dengan investasi perusahaan-perusahaan lokal. Perbedaan itu, misalnya, TNCs bisa "langsung mengontrol penyebaran sumber daya ekonomi di dua atau lebih negara sekaligus, dan distribusi dari output yang dihasilkan," kata Dunning.[8] TNCs dapat dengan leluasa memanfaatkan rahasia kekuatan pengetahuan dan pengalaman internasional mereka sedemikian rupa yang umumnya mereka tidak akan mau buka untuk dibagikan kepada perusahaan domestik di negara-negara berkembang di mana TNCs beroperasi. Mereka sanggup mengerahkan kekuatan pasar. Menurut Sheila Page:

> TNCs memiliki keunggulan pengalaman berbisnis di pasar di luar negara tuan rumah.... Mereka tahu dan berpengalaman dalam mengeksploitasi keuntungan untuk bergerak antara ekspor dan investasi di luar negeri, dan karena mereka lebih siap untuk menangkap peluang-peluang baru.[9]

TNCs dapat memainkan peran yang jauh lebih kuat daripada perusahaan lokal di negara-negara berkembang. Ukuran dari TNCs yang besar, khususnya, memungkinkan mereka untuk mempunyai kekuatan yang sangat besar terhadap pemerintah negara-negara berkembang, terutama negara-negara yang kecil. Melalui ukuran mereka yang besar, mereka menjanjikan apa yang mereka dapat tawarkan. Mereka dapat menyediakan dan memberikan modal — untuk investasi, misalnya, dalam kegiatan seperti prospek untuk deposit mineral pertambangan — yang perusahaan-perusahaan nasional tidak miliki. TNCs memiliki manajemen yang unggul dan keterampilan organisasi yang tinggi. Semuanya ini, ditambah lagi dengan pemasaran dan pengalaman internasional, membuat TNCs sebagai kekuatan ekonomi yang tidak bisa ditandingi perusahaan-perusahaan nasional. Ketika mereka bernegosiasi dengan pemerintah

---

8 Dunning, J. H., *International Production and the Multinational Enterprise,* London and Boston: Allen and Unwin, 1981, p. 7.

9 Page, S., *How Developing Countries Trade,* London: Overseas Development Institute, 1994, p. 99.

negara-negara berkembang, TNCs bisa mendapatkan kesepakatan bisnis yang perusahaan-perusahaan lokal lasimnya tidak bisa peroleh.

TNCs juga tampil berbeda karena mereka cenderung membuat keputusan di negara di mana kantor pusat mereka berbasis dan bukan di negara-negara berkembang di mana mereka sedang beroperasi. Keputusan-keputusan TNCs yang sekian sering memiliki dampak negatif terhadap kehidupan orang-orang dari negara-negara berkembang dibuat di kantor pusat TNCs yang berada di kota-kota seperti Washington, London, dan Tokyo. Di negara-negara di mana mereka beroperasi, TNCs biasanya merasa tidak berkewajiban untuk berkonsultasi dengan masyarakat lokal tentang rencana bisnis mereka.

Bahkan perusahaan afiliasi dari TNCs di sebuah negara berkembang tidak mempunyai kekuasaan untuk mengatur operasi bisnisnya sendiri. "Sebagian besar keputusan, yang hasilnya memengaruhi perilaku perusahaan afiliasi, dibuat oleh perusahaan induk atas dasar informasi dan harapan yang hanya bisa diketahui oleh mereka sendiri."[10] Dan mereka beroperasi di pasar di seluruh dunia 24 jam sehari "tanpa peduli terhadap perencanaan ekonomi nasional"[11] dari negara penerima."Pengambilan keputusan lazim dibuat di luar negera yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut," demikian tandas Dunning, dan "semakin global kekuatan investasi dalam aktivitas dan strategi, maka pola hasil dan pertumbuhan dari perusahaan afiliasi akan semakin ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang berada di luar kendali mereka."[12]

TNCs cenderung mengintensifkan efek bisnis besar kepada orang miskin. Perusahaan lokal tidak memiliki dampak yang sama seperti yang dibuat oleh TNCs. Konflik antara pengejaran laba keuntungan di satu pihak dan hak-hak masyarakat lokal di pihak lain kerap menjadi bagian dari ceritera tentang TNCs. Dunning juga menyatakan bahwa "investasi

---

10 Dunning, 'Re-evaluating the benefits', p. 48.

11 Evans, Tony, "International environmental law and the challenge of globalisation" dalam T. Jewell and J. Steele (eds), *Law and Environmental Decision Making*, Oxford: Oxford University Press, 1998.

12 Dunning, *International Production*, p. 368.

asing mentransmisikan gaya hidup dari negara-negara yang berinvestasi ke negara-negara yang merupakan tuan rumah" dari TNCS.[13]

Orang Miskin

Berbeda dengan TNCs, orang-orang miskin tidak memiliki ruang untuk bersuara dalam menentukan bagaimana seharusnya negara-negara mereka dijalankan. Sekitar 1,2 miliar penduduk benua Afrika, Asia, dan Amerika Latin masih miskin secara material, dengan pendapatan kurang dari satu dolar per hari. Hidup penuh tantangan merupakan perjuangan mereka sehari-hari.

Banyak orang miskin di negara-negara berkembang yang tidak memiliki lahan pertanian. Kalaupun mereka memilikinya, tapi ukurannya sangat kecil dan sering merupakan lahan yang buruk dan tak subur. Jika mereka bekerja di sektor ekonomi informal, mereka kerap menganggur. Sekitar 70% dari mereka merupakan wanita dewasa dan gadis-gadis remaja. Sebanyak 1,5 miliar dari orang-orang yang miskin akan sumber daya ini sering lapar hampir sepanjang waktu. Sebagian dari mereka berpendidikan rendah dan kualitas kesehatan mereka buruk. Rumah kediaman mereka kecil. Terkadang mereka mengalami kelaparan di wilayah di mana persediaan makanan masih relatif berlimpah. Kemiskinan mereka lebih dalam arti mereka tidak memiliki lahan untuk menanam sendiri bahan makanan yang mereka butuhkan atau mereka miskin karena tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Harapan hidup masyarakat miskin pendek dan semakin pendek di beberapa negara. Sebagian masyarakat miskin tidak memiliki pekerjaan dan tak bisa menyuarakan hak-hak mereka. Banyak masyarakat miskin telah menyaksikan bagaimana sumber-sumber kehidupan mereka dihancurkan akibat kerusakan lingkungan alam yang semakin parah.

Perubahan iklim sudah memiliki dampak yang besar bagi jutaan orang miskin dan memperparah tingkat kemiskinan mereka. Ia telah mengakibatkan cuaca yang ekstrem, banjir, angin topan, dan diikuti oleh

---

13 *Ibid.*, p. 359.

peningkatan suhu yang bervariabel. Kekeringan yang parah, banjir dan badai sering terjadi dengan frekuensi meningkat. Pola curah hujan dan sistem musim hujan berubah dan ada peningkatan jumlah penyakit, di mana banyak orang meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan perubahan iklim, misalnya malaria (lihat juga bahan di bawah ini dan Bab 4).

Oleh karena perubahan iklim yang tak menentu sekarang ini, lahan pertanian semakin banyak menjadi kering dan rusak yang berakibat lanjut pada gagal panen, gagal ternak piaraan, dan persediaan makanan masyarakat terancam. Bagian bumi yang berubah menjadi gurun pasir semakin banyak dan menyebar di banyak tempat, yang pada gilirannya memaksa orang di wilayah bersangkutan untuk meninggalkan rumah mereka karena mereka merasa tidak bisa lagi bertahan hidup di sana. Jumlah pengungsi akibat kerusakan alam lingkungan di wilayah asal mereka semakin meningkat dengan angka yang sangat mengkhawatirkan—sebagian besar dari kelompok pengungsi ini adalah kelompok masyarakat yang tinggal di pinggiran perbatasan padang pasir dan mereka telah melihat bagaimana padang pasir mengubah tanah mereka [menjadi padang pasir baru]. Para pengungsi ini telah meninggalkan rumah tempat asal mereka dan sering kali berpindah untuk berdiam di tempat-tempat kumuh di pinggiran dekat kota dan hampir tidak ada harapan untuk dapat pulang kembali ke daerah asal mereka dulu. Oleh karena suhu bumi semakin meningkat dan gugusan es abadi di kedua kutub bumi terus mencair seperti yang terjadi hingga saat ini, permukaan air laut sekarang turut naik [menutup dataran rendah dari planet bumi]. Jika gejala alam ini terus berlanjut, maka Bangladesh, misalnya, dan negara-negara yang berdataran rendah lainnya akan kebanjiran [ditutup air laut].

Sebuah kontras yang sangat tajam antara masyarakat miskin dan TNCs adalah bahwa masyarakat miskin sangat tak berdaya dan hampir tidak memiliki kekuasaan. Pada waktu perusahaan transnasional telah memperoleh keuntungan melimpah dari pertumbuhan ekonomi global, masyarakat miskin sebaliknya semakin kehilangan segala sesuatu sebagai pegangan hidup. Dan [kehilangan pegangan hidup] ini sering terjadi sebagai akibat dari perubahan [ekonomi global yang menguntungkan TNCS]. Namun,

pada saat masyarakat miskin dunia semakin terdemoralisasi dan terkocar-kacir tanpa harapan akan masa depan, ada banyak contoh di mana orang-orang miskin mulai bersatu menentang kekuatan TNCs dan menyadari bahwa mereka juga sebenarnya mempunyai kekuatan mereka sendiri [jika misalnya mereka mau bangkit bersama]. Masyarakat miskin dunia juga mengidam-idamkan sebuah taraf hidup yang lebih baik dan aspirasi yang alamiah ini sering mendorong mereka berkontak [atau berkonfrontasi] dengan TNCs. Dengan iklan yang lihai, korporasi transnasional mempropagandakan bahwa masyarakat miskin akan mengalami peningkatan taraf hidup yang lebih baik hanya karena mereka mengonsumsikan produk-produk dari TNCs. Di semua negara berkembang saat ini, orang-orang miskin telah dibujuk untuk menggadaikan sejumlah sumber daya alam mereka yang terbatas untuk ditukar dengan sejumput barang-barang mewah seperti rokok dan makanan kaleng untuk bayi, dan pelbagai makan ringan dan minuman yang kadar gizinya yang rendah.

TNCs telah berhasil membujuk masyarakat miskin dan sederhana di negara-negara berkembang untuk melahap habis produk-produk seperti Coca-Cola, Seven-Up, Pepsi, Kentucky Fried Chicken, beefburgers, pelbagai jenis rokok kretek, dan seterusnya dan tanpa disadari mereka telah dipaksa menjadi bagian dari gaya hidup dan budaya mereka yang baru. Produk-produk ini telah mengisap sebagian besar pendapatan kaum miskin, dengan akibat lebih lanjut adalah bahwa pelbagai jenis makanan tradisional mereka yang biasanya lebih bergizi tidak dapat dijangkau [karena sudah digeser oleh produk TNCs yang kurang bergizi di atas] dan mutu kesehatan mereka melempem. Dengan mengonsumsikan produk-produk yang tidak tepat [kurang bergizi dari TNCs], masyarakat miskin di negara-negara berkembang justru mengalami kekurangan duit untuk membeli barang-barang untuk kebutuhan dasar dan vital (lihat Bab 3 tentang tembakau).

Juga, dengan menyebarluaskan propaganda "Barat adalah yang terbaik" (*West is best*), TNCs telah secara licik menggiring masyarakat miskin untuk tidak mengonsumsi barang makanan yang diproduksi secara lokal. Akibat lebih lanjut, permintaan terhadap makanan produksi lokal turun

dan industri lokal terancam ambruk lalu gulung tikar. Masyarakat miskin di negara-negara berkembang membeli produk-produk TNCs dan mereka bekerja TNCs dengan ketentuan bahwa perusahaan transnasional yang harus membuat keputusan atas semuanya dan orang-orang miskin harus tinggal di daerah-daerah di mana TNCs mengoperasikan bisnis mereka di mana lingkungan alamnya sudah polusi sebagai akibat dari kehadiran bisnis besar perusahaan transnasional.

Ukuran

Ukuran TNCs yang begitu besar saja sudah membuat hubungan yang tidak seimbang antara TNCs sendiri dan masyarakat miskin serta pemerintah negara-negara miskin. Isi negosiasi-negosiasi pemerintah negara-negara miskin dengan sebuah TNCs untuk berinvestasi di negara mereka sering kali lebih memihak pada kepentingan korporasi dan menguntungkan korporasi. Ukuran dan daya kekuatan mereka, pekerjaan-pekerjaan yang mereka tawarkan untuk dibuka di negara-negara berkembang dan pajak yang mereka bayar bagi pemerintah negara miskin membuat TNCs berada pada posisi yang penuh kuasa untuk memengaruhi kebijakan-kebijak publik pemerintah negara miskin. Hal ini membuat orang mempertanyakan proses kepemerintahan yang demokratis itu sendiri. Misalnya, atas dasar hak apaTNCs, yang pada galibnya tidak punya keharusan politis untuk berlaku akuntabel (bertanggung jawab) kepada penduduk negara-negara berkembang, sampai bisa memengaruhi dan bahkan ikut menentukan kebijakan-kebijakan publik dari negara-negara berkembang? Apakah daya kekuatan mereka memungkinkan mereka untuk secara efektif menumbangkan demokrasi? Apakah kita semakin dekat ke titik di mana para pemilih waktu pemilu akan mempertanyakan makna pemilu ketika mereka tahu bahwa para pemimpin kita yang terpilih pada waktu pemilu ternyata lebih tunduk kepada perusahaan [sepanjang karier kepemerintahaan mereka]?

Perubahan-perubahan kebijakan pada tingkat global sering membuat pemerintah negara-negara miskin lemah dalam melakukan kontrol terha-

dap sepak terjang bisnisTNCs. Program SAPs yang dipaksakan IMF/Bank Dunia dan lahirnya WTO — Organisasi Perdagangan Dunia sejak tahun 1995 — telah semakin melemahkan kedaulatan pemerintah negara-negara miskin [yang terbelenggu utang pada lembaga keuangan dunia di atas]. "Telah terjadi erosi kedaulatan pemerintah," kata Kenneth Dadzie, mantan Sekretaris Jenderal UNCTAD, dan "pemerintahan nasional tidak bisa berdaya lagi untuk memainkan peran seperti yang mereka lakukan di masa lalu".[14] TNCs juga bersifat terlalu khusus tentang standar-standar. Eksekutif pemasaran Lewis Pringle mengatakan dalam sebuah konferensi yang disponsori perusahaan Nestlé pada bulan November 1995: "Di banyak (kalau tak semua) pasar baru yang sedang bermunculan di dunia global, hampir tak mungkin orang mencari dan merenggut uang dalam jumlah besar berlipat ganda tanpa melangggar secara serius prinsip-prinsip etika dasar dari bangsa Barat."[15]

TNCs mempunyai kekuatan finansial yang besar untuk membuat promosi penjualan dalam jumlah yang besar di negara-negara berkembang. TNCs bisa mendanai hingga jutaan bagi tenaga kerja *salesmen* dan *saleswomen* untuk pergi berkeliling menjual obat-obatan kepada dokter-dokter dan apotek, dan bahan kimia kepada para petani, misalnya. Dengan kemampuan dana yang tersedia, korporasi transnasional lebih mampu menjangkau seluruh masyarakat daripada pelayanan yang diberikan pemerintah negara. Usaha penjualan ini bisa terlihat pada harga produk TNCs yang relatif tinggi. Oleh karena itu, pada akhirnya, tetap para konsumen miskin di negara-negara berkembang yang membayar upah *salesmen* dan *saleswomen* yang dipekerjakan TNCs [karena gaji mereka sesungguhnya berasal dari penjualan barang-barang ini dengan harga tinggi kepada orang-orang miskin].

TNCs yang berbasis di negara-negara Barat berinvestasi di bidang ekonomi di negara-negara lain karena mereka yakin bahwa operasi bisnis

---

14 Kenneth Dadzie, in a speech to launch UNCTAD's *World Investment Report*, London, August 1994

15 Lewis Pringle, quoted in *The Guardian*, 15 November 1995.

mereka di negara lain akan membawa profit atau keuntungan [dan tanpa keyakinan dan motivasi untuk meraup keuntungan dari negara-negara miskin, TNCs negara-negara Barat tak akan mau berkorban pergi jauh-jauh berbisnis di belahan negara miskin di Asia, Afrika, dan Amerika Latin]. TNCs biasanya kejam secara efisien. Sebalikya, perusahaan lokal berskala kecil di negara-negara berkembang biasanya menyadari bahwa kekejaman dalam berbisnis bisa membuat mereka terusir keluar dari dunia bisnis.

Keuntungan atau kerugian

Uang yang TNCs investasikan di negara-negara berkembang tampaknya diterima, tapi pertanyaannya adalah apakah investasi ini akan memberikan keuntungan bersih bagi perekonomian sebuah negara. Uang yang diinvestasikan oleh perusahaan transnasional sering bukan merupakan uang milik perusahaan itu sendiri. Terkadang uang yang diinvestasikan itu juga dipinjam dari bank-bank di negara-negara berkembang, yang bisa berakibat berkurangnya jumlah uang pada bank-bank negara berkembang yang seharusnya tersedia untuk dipinjamkan kepada usaha-usaha ekonomi kecil di negara berkembang bersangkutan.

TNCs juga tidak dapat diandalkan untuk tinggal lama di sebuah negara. Mereka mempunyai kecenderungan untuk tidak melakukan bisnis dalam jangka panjang di sebuah negara. Karena mereka lebih memikirkan profit untuk diri mereka sendiri daripada memikirkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi negara tuan rumah di mana mereka berbisnis. Pertimbangan demi profit yang egoistik ini terkadang menyebabkan mereka bisa menutup seluruh operasi bisnis, sebuah tindakan yang dapat memiliki dampak yang menghancurkan. Jadi, apa yang membedakan TNCs dari sebuah perusahaan dalam negeri adalah bahwa korporasi-korporasi asing atau TNCs kapan saja dapat mengangkat kaki dan pindahkan bisnis mereka ke negara lain [yang lebih menjanjikan keuntungan]. Prioritas-prioritas dari TNCs sekian sering tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal. "Mereka bukan merupakan bagian dari mayoritas penduduk, meskipun mereka mungkin bersanding dengan segelintir orang

kaya," demikian komentar Dinham dan Hines tentang perusahaan-perusahaan transnasional dalam hubungan dengan sektor pertanian di Kenya.[16]

TNCs telah mempunyai kekuatan yang cukup untuk memimpin proses industrialisasi di beberapa negara. Akan tetapi, bukti menunjukkan bahwa industrialisasi yang telah dipioneer oleh TNCs telah dicapai dengan harga yang mahal dalam bentuk ambruknya sektor pertanian dan pembangunan pedesaan. Pemerintah sering berkecenderungan untuk menjaga tingkat harga pertanian rendah. Hal ini ditempuh untuk menyimpan uang bagi proses industrialisasi dan agar para pekerja di pabrik-pabrik baru yang berorientasi ekspor memiliki makanan murah sehingga mereka tidak akan menuntut upah tinggi. Sekali lagi, orang harus tertarik untuk bekerja di industri. Di Taiwan, misalnya, "pemerintah telah dengan sengaja menekan pendapatan para petani untuk memaksa para petani ini beralih pekerjaan menjadi buruh dalam industri," demikian tutur President Taiwan Lee Teng-Hui.[17]

Hal ini mesti digarisbawahi secara khusus kenyataan bahwa kehadiran TNCs di negara-negara miskin telah membuat kesenjangan internal semakin melebar [antara segelintir orang yang kaya dan mayoritas orang yang miskin]. Hampir semua studi yang telah dilakukan mengenai efek dari FDI menyimpulkan bahwa program FDI telah menyebabkan distribusi pendapatan di negara-negara berkembang tidak merata, khususnya di Asia Timur dan negara-negara Asia Tenggara.[18]

Masalah lain adalah bahwa TNCs umumnya hanya memproduksi barang dan jasa bagi masyarakat yang mempunyai daya beli tinggi. Mereka tidak berminat untuk menghasilkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat miskin yang tidak memiliki uang untuk membelinya di pasar. Korporasi transnasional akan memakai penge-

---

16 Dinham, B. and C. Hines, *Agribusiness in Africa*, London: Earth Resources Research, 1983, p. 112.

17 Lee Teng-Hui, quoted in Walden Bello, *Adverse Impact of Export-Orientated Industrialisation on Third World Environment and Economy*, Malaysia: Third World Network, January 1992.

18 Tsai, Pan-Long, 'Foreign direct investment and income inequality: further evidence', *World Development*, Vol. 23, No. 3 (1995), p. 480.

tahuannya untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat kelas mewah di negara-negara berkembang tempat TNCs itu beroperasi. Produk-produk dan pengetahuan mereka pada dasarnya "menciptakan bias terhadap kaum miskin. Sangat sangat sedikit orang miskin menjadi konsumen atau pelanggan langsung, karyawan atau sumber pasokan bagi TNCs".[19]

Lingkungan alam fisik

Dampak dari sepak terjang bisnis TNCs terhadap lingkungan hidup sebuah negara sangat besar. Perusahaan transnasional yang bergerak di bidang pertanian biasanya lebih cenderung untuk memproduksikan tanaman pangan untuk kepentingan ekspor dibandingkan perusahaan-perusahaan domestik. Pembudidayaan tanaman pangan untuk kepentingan ekspor sering ditempuh dengan memindahkan masyarakat miskin setempat dari tanah mereka. Terkadang mereka lakukan sistem "tanaman pangan sejenis" (*monocropping*)yang biasanya mempercepat proses perusakan tanah dibandingkan dengan tanaman pertanian campuran (*mixed cropping*). Produksi kapas dan tembakau memiliki dampak negatif yang berat terhadap lingkungan (lihat Bab 3). TNCs juga kerap mengimpor ke negara-negara miskin barang-barang yang sebenarnya dilarang oleh hukum di negara asal mereka, seperti misalnya beberapa produk kimia. Mereka mengekspor limbah berbahaya ke negara-negara berkembang dalam skala yang cukup besar, yang mengakibatkan peluang terjadinya bencana terhadap lingkungan hidup.

Menerbangkan dan mengirimkan barang-barang ke seluruh dunia dalam jumlah yang besar membuat TNCs menjadi salah satu entitas yang menimbulkan karbon terbesar ke atmosfer. Karena itu mereka terhitung sebagai kelompok dari perubahan iklim yang tak menentu saat ini dan memperparah tingkat kemiskinan masyarakat miskin (lihat bahan sebelumnya dan Bab 4). Laporan dari Institut Pemerhati Dunia (*Worldwatch*) pada tahun 2008 menunjukkan adanya bukti yang berkembang "bahwa ekonomi

19 Green, 'Transnational corporate responsibility', p. 118.

global saat ini sedang menghancurkan lingkungan alam sendiri dan memberikan sangat sedikit manfaat kepada miliaran orang-orang miskin".[20]

Pekerjaan

Mengontrakkan pekerjaan dari Barat kepada negara-negara berkembang telah menjadi praktik yang umum, namun TNCs telah lama berkebiasaan untuk mencari tenaga kerja murah (*cheap labor*) sebagai sebuah cara meraup keuntungan yang besar. Upah rendah adalah salah satu alasan utama mengapa TNCs amat berminat untuk membuka bisnis di negara-negara berkembang. Pemerintah negara tuan rumah berharap bahwa TNCs dapat menciptakan lapangan kerja dan bahwa lapangan pekerjaan yang semakin banyak akan secara tidak langsung meningkatkan seluruh perekonomian negara. Tapi jangan keliru. Pekerjaan yang diciptakan TNCs sangat rentan, dan hubungan pekerjaan-pekerjaan ini dengan sektor-sektor lain dari ekonomi yang dihasilkan dari FDI sering lemah. Sehubungan dengan ini, Laporan Investasi Dunia dari UNCTAD menyatakan:

> Mobilitas yang semakin besar dari modal dan teknologi di bawah TNCs dapat membawa perubahan-perubahan yang dramatis terhadap produksi dan tenaga kerja di tingkat lokal, nasional dan regional, yang mengakibatkan ketegangan pada tenaga buruh di industri tertentu dan/atau pada pasar tenaga kerja.[21]

Bagi tenaga buruh yang kehilangan pekerjaan ketika sebuah TNCs pindah ke negara lain, 'ketegangan' mungkin tidak akan berlangsung hanya untuk sementara waktu. Tenaga buruh yang dipekerjakan oleh TNCs "umumnya menikmati upah yang tinggi, kondisi kerja dan pelayanan kesejahteraan relatif lebih baik dibandingkan kondisi yang berlaku di perusahaan domestik".[22] Akan tetapi, perbandingan-perbandingan

---

20 *WorldWatch Institute 2008* report. Washington DC: WorldWatch Institute. <http://www.worldwatch.org/node/5551> (accessed 13 March 2008)

21 United Nations Conference on Trade and Development, *World Investment Report 1994*, Geneva: UNCTAD, p. 192.

22 *Ibid.*, p.

seperti ini bisa sangat menyesatkan, karena TNCs umumnya cenderung mengonsentrasikan diri pada industri-industri yang membutuhkan sedikit buruh tapi berkeahlian tinggi dan padat modal. Sedangkan sebagian besar dari jenis pekerjaan di perusahaan demikian umumnya membutuhkan tenaga buruh berketerampilan rendah dan karena itu bergaji rendah seperti pekerjaan produksi dan perakitan. TNCs cenderung sangat mengutamakan spesialisasi khusus, dengan pembagian kerja yang besar. Teknologi maju digunakan pada lini produksi massal. Seorang tenaga buruh akan melakukan sebuah tugas yang kecil dan khusus dalam sebuah jaringan operasi pekerjaan besar. Model pekerjaan macam ini memang bagus untuk meraup profit bagi perusahaan, tapi jenis pekerjaan macam ini cenderung sangat monoton dan memperlakukan tenaga buruh tidak lebih dari pembantu setia mesin pabrik. Sambil bekerja, TNCs juga kerap tidak mempersiapkan tenaga buruh dengan keterampilan yang mereka dapat gunakan di tempat lain — di perusahaan dalam negeri misalnya.

Upah rendah adalah salah satu alasan utama mengapa TNCs sangat gencar mencari bisnis di Burma pada tahun 2007, tanpa peduli dengan rekor yang mengerikan dari junta militer negara itu. Karena tertarik oleh keadaan tenaga kerja di negeri itu yang sangat menguntungkan bagi pengusaha asing, maka sekitar 150 buah TNCs melakukan bisnis perdagangan dengan Burma — terutama di bidang perminyakan, biro perjalanan, kayu, permata dan sektor konveksi — sehingga menciptakan total investasi £1,2 billion (sekitar Rp12 triliun) setiap tahun. Perusahaan raksasa energi AS Chevron, *French group Total* dan Petroleum Nasional Cina merupakan sebagian dari TNCs yang memberikan penghasilan negara kepada Burma. Kampanye Burma yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa TNCs secara efektif membayar peluru-peluru yang kerap digunakan oleh junta militer untuk menindak rakyat Burma yang berseberangan dengan junta. Organisasi Burma yang berbasis di Inggris ini mendesak korporasi-korporasi asing untuk keluar dari negara itu.[23]

23 Judd, T., 'Firms that invest in Burma "have paid for bullets", *The Independent*, 26 September 2007.

Pekerjaan yang diciptakan oleh TNCs juga merupakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak menjamin kepastian karena perjanjian WTO pada perdagangan yang berhubungan dengan langkah-langkah investasi. Perjanjian TRIMS [*Trade Related Aspects of Investment Measures*] berarti bahwa semua negara harus membatalkan undang-undang yang mengharuskan perusahaan asing untuk membeli *inputs* [barang-barang yang bisa dipakai sebagai fasilitas bisnis perusahaan] dari sumber-sumber lokal. Salah satu *inputs* adalah tenaga kerja. Dalam perjanjian WTO, TNCs tidak mempunyai kewajiban untuk menggunakan tenaga kerja lokal atau bahan-bahan dari negara tuan rumah. Mereka dapat berbelanja di mana saja di seluruh dunia yang terpenting dapat diperoleh dengan harga semurah mungkin. Karena perjanjian WTO tersebut, pemerintah negara-negara berkembang tidak selalu bisa memastikan bahwa TNCs akan mempekerjakan tenaga buruh di negaranya.

TNCs sering, meskipun tidak selalu, membayar upah lebih tinggi daripada perusahaan lokal. Tapi bagi orang-orang yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan transnasional ada kerugian serius. Hak mereka untuk bernegosiasi cenderung lebih terbatas. TNCs, tidak seperti serikat dagang, "dapat beroperasi secara global sehingga setiap persekutuan di salah satu bagian dari sebuah TNCs pada akhirnya bernegosiasi dengan seluruh TNCs bersangkutan," seperti dituturkan Reginald Green. "TNCs umumnya lebih besar dan terorganisir secara lebih baik dibandingkan para pengusaha lainnya, dan karena itu lebih mampu menanggung biaya operasi industri."[24] Bagi para tenaga buruh, perasaan menjadi penggerak kecil pada sebuah roda besar bukan merupakan sesuatu yang unik untuk perusahaan-perusahaan besar, namun "hal itu tampil dalam bentuk ekstrem oleh TNCs yang besar," kata Dunning.[25]

Menurut laporan Organisasi Tenaga Buruh Internasional (ILO), peran TNCs dalam menciptakan lapangan kerja adalah "sangat marginal". ILO katakan bahwa jika pekerjaan TNCs bertumbuh, maka hal itu

---

24 Green, 'Transnational corporate responsibility', p. 117.

25 Dunning, *International Production*, p.

"karena akuisisi dan merger/penggabungan perusahaan ketimbang karena kesempatan-kesempatan kerja baru".[26] Sebuah pabrik baru milik sebuah TNCs kelihatannya dapat menciptakan lapangan kerja tetapi biaya tenaga buruh sama seperti di pabrik-pabrik lokal lainnya, dengan demikian menelantarkan tenaga kerja dalam persaingan dengan industri-industri domestik.

Ekonomi ganda

Mengundang TNCs itu mahal. Dalam prosesnya, kalau undangannya diterima maka TNCs tersebut akan menuntut supaya pemerintah negara tuan rumah mengalokasikan sumber daya alam negaranya untuk tujuan bisnis tersebut. Itu berarti, perhatian terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya dari negara tuan rumah harus dikurangi, seperti pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Zona-zona pengolahan ekspor (*Exporting processingzones* atau EPZs) harus telah dibentuk dan disiapkan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan ekspor (lihat Bab 9), tetapi mereka sering menyebabkan 'dualisme'. Ekonomi 'ganda' menjadi tampak: yaitu ekonomi-ekonomi yang tampaknya bergaya modern yang menerima modal dana berlimpah-limpah berjalan berdampingan dengan ekonomi subsisten yang tradisional yang memiliki modal dana lebih sedikit sebagai akibat dari ekonomi modern yang pertama tadi.

Manfaat dari sektor modern mungkin, dalam teorinya, menetes (*trickle down*) ke sektor tradisional atau bahkan mungkin menarik sektor ekonomi tradisional ke atas hingga keluar dari kemiskinan. Namun dalam kenyataannya, hal ini umumnya tidak terjadi. Sebaliknya, yang lebih sering terjadi adalah bahwa dualisme ekonomi ini justru semakin menyuburkan ketidaksetaraan taraf hidup dalam negara berkembang, dengan dua model ekonomi yang berada dan berjalan berdampingan: ekonomi yang kuat (modern) menelan model ekonomi yang lemah (trandisional), yang pada gilirannya tidak membawa manfaat apa pun bagi mayoritas warga negara berkembang.

---

26 Kreye O., J. Heinrichs and F. Frobel, *Multinational Enterprises and Employment*, Geneva: International Labour Organization, Starnberg Institute, 1988.

Seperti telah dibahas di atas, ekonomi modern tidak serta-merta membuat hubungan erat dengan sektor-sektor ekonomi sebuah negara secara keseluruhan. Meksiko, misalnya, telah memiliki program tipe EPZ (*Export Processing Zones*) yang disebut *maquila* (perakitan 'in-bond') sejak tahun 1965. Promosi pekerjaan di wilayah perbatasan Meksiko merupakan salah satu tujuan utama program EPZ itu. Lebih dari satu juta orang Meksiko bekerja di lebih dari 3.000 *maquiladoras*. Secara besar-besaran, mereka memproduksi bagian demi bagian (*parts*) dari sebuah barang dan produk-produk lainnya untuk diekspor ke Amerika Serikat. Tenaga buruh Meksiko murah dan, karena Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara [*North American Free Trade Agreement* atau NAFTA], maka pajak dan biaya bea cukai hampir tidak ada, yang tentunya sangat menguntungkan TNCs.

Maquiladoras dimiliki oleh korporasi-korporasi AS, Jepang dan Eropa dan beberapa *maquiladoras* dapat dianggap *'sweatshops'* di mana perempuan-perempuan muda bekerja dengan diupah 50 sen per jam selama sepuluh jam sehari dan enam hari seminggu.[27] Hubungannya yang sangat sedikit dengan seluruh sektor lain dari perekonomian negara tuan rumah telah terjadi. Kurang dari 2% dari bahan-bahan yang digunakan *maquiladoras* berasal dari sumber-sumber daya ekonomi Meksiko. "Industri *maquila* ... tidak terintegrasi ke dalam seluruh sistem perekonomian regional atau perekonomian nasional Mexico."[28]

Sebagai akibat dari kurangnya integrasi ini, sektor pasokan yang kuat dalam negeri belum berkembang dengan baik di Meksiko. Program *maquila* tidak membantu pembangunan Mexico yang berkelanjutan. Meskipun negara Mexico memiliki kapasitas untuk memproduksi berbagai produk yang kompetitif, kemampuan ini belum direalisasikan. Kantong ekonomi *maquila* ini menghambat kemampuan Meksiko untuk mengembangkan

27 Rosenberg, M., *Maquiladoras in Mexico: Export Assembly Plants for the United States*, New York: About Inc. <http://geography.about.com> (accessed 22 January 2008).

28 Brannon, J. T., D. J. James and G. W. Lucker, 'Generating and sustaining backward linkages between *maquiladoras* and local suppliers in northern Mexico', *World Development*, Vol. 22, No. 12 (1994).

ekonomi yang seimbang. Kompetisi dari Cina telah 'melemahkan daya pikat *maquiladoras* dalam beberapa tahun terakhir dan beberapa laporan menyatakan bahwa lebih dari 500 bangunan *maquiladoras* telah ditutup sejak awal dekade ini, "yang pada gilirannya menyebabkan hilangnya beberapa ratus ribu lapangan pekerjaan."[29]

Tenaga buruh anak-anak

Sementara TNCs umumnya mengklaim bahwa mereka tidak mempekerjakan tenaga buruh anak-anak (*child labour*), namun praktik tidak terpuji ini masih tetap berlangsung. Menurut perkiraan terbaru dari ILO (2006), lebih dari 200 juta anak tetap dipekerjakan sebagai tenaga buruh anak, yang melakukan pekerjaan yang bisa merusak perkembangan mental, fisik, dan emosional anak. Anak-anak umumnya terpaksa harus bekerja demi kelangsungan hidup mereka sendiri dan juga keluarga mereka bergantung padanya. Buruh anak tetap ada bahkan di tempat-tempat atau negara yang telah menyatakannya ilegal, dan sering kali mereka dikelilingi oleh dinding tak bersuara, acuh tak peduli, dan apatis.

Hampir tiga perempat buruh anak-anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan yang sebenarnya tidak baikbagi anak-anak, termasuk perdagangan, konflik bersenjata, perbudakan, eksploitasi seksual dan pekerjaan berbahaya lainnya. Namun pun demikian, saat ini ada kemajuan. Buruh anak-anak turun 11% secara global antara tahun 2002 dan 2006, kata ILO, dan jumlah anak yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya mengalami penurunan sebesar 26%.[30]

Lebih dari 70% dari semua buruh anak-anak bekerja di sektor pertanian. Mulai dari merawat ternak atau mengumpul panenan tanaman sampai pada menangani mesin atau memegang bendera untuk memandu pesawat penyemprotan pestisida. Lebih dari 132 juta anak perempuan

---

29 Rosenberg, *Maquiladoras in Mexico.*

30 30. International Labour Organization, *Child Labour.* Geneva: ILO, 2007. <http://www.ilo.org/global/Themes/Child_Labour/lang—en/ index.htm>, also <www.ilo.ru/news/200306/docs/FactSheetChild ENG.pdf> (accessed 22 January 2008).

dan anak laki-laki, usia 5 sampai 14, membantu memproduksi bahan makanan dan minuman, serat dan bahan primer pertanian. Sektor pertanian dan perkebunan semua jenis dan ukuran, sejumlah besar anak di bawah umur ini melakukan pekerjaan yang berbahaya, yang dapat mengancam keselamatan hidup mereka, anggota badan, kesehatan dan kesejahteraan umum mereka. Dalam hal kematian dan kecelakaan, pertanian merupakan salah satu dari tiga industri yang paling berbahaya untuk para pekerja. Sekitar satu juta anak, banyak dari mereka anak-anak gadis remaja, juga bekerja di tempat eksploitasi pertambangan, dan yang lain bekerja di pabrik-pabrik pembuatan mainan bernilai tinggi, sepatu dan barang pakaian bagi TNCs (lihat Bab 3 dan 9).

Transfer harga

Dengan memiliki banyak anak cabang perusahaan (*subsidiary companies*), TNCs dengan leluasa dapat memanfaatkan apa yang disebut *transfer pricing* atau harga transfer, sebuah praktik yang merugikan negara-negara berkembang. *Transfer pricing* adalah harga yang dikenakan oleh salah satu rekan anak cabang dari sebuah perusahaan transnasional untuk setiap barang, jasa atau keterampilan teknik kepada sesama anak cabang lain dari perusahaan transnasional yang sama yang beroperasi di sebuah negara lain.

"*Transfer pricing* adalah strategi yang sering digunakan oleh TNCs untuk mendulang keuntungan yang besar melalui cara-cara ilegal [yaitu cara-cara yang melanggar hukum]."[31] Dalam praktik *transfer pricing*, TNCs induk menjual bahan-bahan tertentu kepada sebuah perusahaan anak cabangnya yang berada di negara lain dengan sebuah harga artifisial yang tinggi. Bahan-bahan tersebut kemudian digunakan dalam sebuah proses manufaktur atau industri jasa. Karena harus membayar bahan-bahan ini dengan harga yang tinggi, maka profit atau keuntungan yang diraih oleh anak cabang perusahaan turun atau rendah dan dengan demikian anak cabang perusahaan membayar pajak rendah sesuai dengan profit

---

31 Singh, K., *The Growing Abuse of Transfer Pricing by Transnational Corporations*, New Delhi: Public Interest Research Centre, 2 June 2007.

yang kecil kepada negara di mana ia beroperasi, yang pada gilirannya berarti curang (*cheating*) dalam pembayaran pajak kepada pemerintah negara tuan rumah. Bagi negara-negara miskin yang sedang berkembang, praktik *transfer pricing* oleh TNCs merupakan salah satu pos kerugian besar bagi pendapatan negara.

> TNCs tidak hanya meraup keuntungan yang lebih tinggi dengan memanipulasi *transfer pricing:* ada juga kerugian yang besar terhadap penerimaan bagi pajak negara, terutama bagi negara-negara berkembang, yang lebih mengandalkan pajak penghasilan korporasi asing yang beroperasi di negara mereka untuk membiayai program-program pembangunan di negara mereka.... *Transfer pricing* yang pada dasarnya bersifat fiktif menciptakan kerugian besar bagi perolehan devisa asing.[32]

Perbedaan antara keuntungan atau laba yang dilaporkan oleh sebuah anak cabang dari sebuah TNCs dan keuntungan real sebenarnya bisa cukup besar. Di Kolombia, misalnya, karena pengenaan harga yang berlebihan terhadap obat oleh sesama anak cabang perusahaan obat yang beroperasi di negara lain, maka anak cabang TNCs di Kolumbia hanya melaporkan 6% keuntungan kepada pemerintah Kolombia, padahal keuntungan nyata yang sebenarnya adalah sepuluh kali lebih tinggi dari 6% yang dilaporkan secara palsu ini. Tingkat *transfer pricing* sulit diketahui secara pasti karena TNCs tidak mungkin akan memberikan rincian bisnis mereka dan para pemeriksa dari luar, misalnya petugas negara, selalu mengalami kesulitan untuk memperoleh bukti. Biarpun demikian, *transfer pricing* yang tak terpuji ini tampaknya telah dipraktikkan secara luas.

Selain dalam rangka menghindari pajak, alasan lain mengapa TNCs melakukan praktik *transfer pricing* adalah bahwa keuntungan diyakini sulit untuk dibawa ke luar dari negara berkembang, yang secara alamiah keuntungan ini diharapkan akan diinvestasikan kembali di negara berkembang bersangkutan. Akan tetapi, liberalisasi perdagangan telah menghapus beberapa aturan-aturan negara sebelumnya sehubungan dengan aliran keuangan, entah masuk atau ke luar negeri, yang seharusnya

32 *Ibid.*

dapat mengurangi praktik *transfer pricing*. Mobilitas internasional yang semakin berkembang memungkinkan perusahaan transnasional untuk membenturkan sebuah negara dengan negara lain dalam usaha mereka untuk mencari biaya produksi yang paling murah.

Pemerintah negara-negara berkembang amat lamban usahanya untuk mendeteksi dan menghentikan kecurangan *transfer pricing*. Brasil dan India adalah dua contoh negara yang sekarang sedang berusaha menindak keras atas praktik *transfer pricing*. Koordinasi internasional perlu dibentuk. "Penyalahgunaan mekanisme *transfer pricing* bisa ditekan secara drastis jika koordinasi internasional ditingkatkan antara otoritas pajak nasional."[33]

Pelayanan jasa

Sebuah sektor lain yang bertumbuh pesat bagi TNCs yang beroperasi di negara-negara berkembang adalah sektor jasa seperti pariwisata, keuangan dan perbankan, dan pasokan air. Negara-negara berkembang diwajibkan untuk membiarkan atau mengizinkan bank-bank raksasa TNCs untuk secara bebas mengakses pasar perbankan mereka. Hal ini dapat sangat merusakkan pengembangan bank-bank dalam negeri dari negara-negara berkembang sendiri, yang berjuang untuk mengakarkan bisnis perbankan mereka. Di negara mana pun sektor perbankan dapat menjadi instrumen yang ampuh untuk mengendalikan atau memengaruhi produksi dan bahkan kecepatan dan karakter pembangunan ekonomi. Bank memutuskan siapa yang memiliki kredit, berapa banyak dan berapa harganya. Skema kredit mikro bagi masyarakat miskin — yang praktiknya telah sukses di banyak negara berkembang — bisa menderita kerugian besar jika bank-bank TNCs datang untuk memonopoli sektor perbankan di negara-negara berkembang dan menuntut peminjam sebuah tawaran untuk menjamin pembayaran kembali. Para penduduk negara-negara berkembang mungkin merasa bahwa mereka tidak sanggup untuk memerangi apa yang mereka yakini sebagai praktik ketidakadilan dalam kebijakan pinjaman bank. Dengan cara ini, layanan perbankan milik korporasi asing cenderung

33 *Ibid.*

untuk bersifat kurang demokratis dan kurang akuntabel.

Liberalisasi perdagangan internasional di bidang layanan perbankan memiliki bahaya yang besar bagi negara-negara berkembang, demikian menurut laporan UNCTAD. Sebuah komitmen untuk liberalisasi transaksi layanan perbankan yang lintas batas-batas negara akan memerlukan pembongkaran bagian-bagian penting dari rezim kontrol devisa nasional.[34] Di banyak negara berkembang rezim-rezim pengontrol ini sangat penting untuk manajemen mikro-ekonomi. Liberalisasi layanan sektor perbankan juga bisa mengurangi efektivitas kebijakan moneter dari pemerintah negara-negara berkembang, yang sering sangat bergantung pada metode langsung untuk mengendalikan kredit dan suku bunga.

"Sebuah kelas politik baru telah muncul di panggung dunia," kata Hans-Peter Martin dan Harald Schumann:

> Pemerintah negara-negara berkembang mana pun, korporasi atau para wajib pajak sudah tak dapat melepaskan diri daripadanya. Mata uang dan dealer keamanan yang bertindak dalam skala internasional mengarahkan aliran investasi modal yang terus bertumbuh secara bebas dan karenanya dapat menentukan suka dan duka dari seluruh bangsa, dan melakukannya sebagian besar bebas dari kontrol negara.[35]

Para *dealer* (pedagang agen atau perantara) sulit diidentifikasi dengan nama. Mereka bisa bekerja di perusahaan-perusahaan besar dan yang lain pada perusahaan yang relatif kecil, tetapi semua berkarakter transnasional. Pada tahun 1997 sektor perbankan di Asia — terutama di Korea Selatan, Thailand dan Indonesia — mengalami krisis kepercayaan amat parah yang disebabkan oleh pergerakan mata uang besar. Para spekulan internasional kehilangan kepercayaan terhadap kondisi ekonomi Asia dan memindahkan modal (uang) mereka ke luar dari negara-negara ini. Bagi masyarakat miskin, akibat dari pergerakan uang ini sangat tragis. Akibat lanjutannya

---

34 United Nations Conference on Trade and Development, *Handbook ofInternational Trade and Development Statistics, 1990*, Geneva: UNCTAD, 1990, p. viii.

35 Martin, Hans-Peter and Harald Schumann, *The Global Trap: Globalization and the Assault on Democracy and Prosperity*, London: Zed Books, 1997.

adalah jutaan mata pencaharian hancur. Sebuah laporan ILO mengatakan bahwa [penarikan modal yang dilakukan oleh para spekulan internasional dari negara Asia Timur di atas mengakitbatkan] jutaan orang kehilangan pekerjaan di negara-negara Asia Timur yang terkena dampak paling parah sebagai akibat dari PHK, khususnya di bidang konstruksi, sektor layanan keuangan dan manufaktur. Peningkatan angka pengangguran dan penurunan pendapatan mereka yang drastis dari tenaga buruh yang masih bisa bekerja disebabkan oleh penurunan permintaan akan tenaga kerja dan inflasi yang disebabkan oleh devaluasi besar terhadap mata uang. Menurut sebuah laporan, yang paling dramatis lagi adalah bahwa tren yang mengesankan dalam penanggulangan kemiskinan yang dicapai di negara-negara selama 20 tahun terakhir akan terbalik.[36]

Krisis [ekonomi Asia Timur] ini menyebabkan kenaikan harga barang-barang kebutuhan dasar, termasuk beberapa jenis makanan pokok, dan kelompok yang terkena dampak paling tragis adalah orang-orang miskin dengan pendapatan sangat terbatas. Harga fasilitas pertanian yang semakin mahal dan tingkat suku bunga yang juga naik tajam memaksa beberapa petani untuk menjadi bangkrut, dan kelompok yang paling rentan adalah para petani kecil. Ketika para petani kecil jatuh bankrut, maka para petani dengan pemilikan lahan pertanian dan modal yang lebih besar yang relatif masih beruntung dengan membeli tambah lagi tanah pertanian, yang mengakibatkan pola kepemilikan tanah semakin terkonsentrasi [pada tangan sekelompok kecil petani].

Sebuah pelajaran kunci yang negara-negara berkembang bisa pelajari dari masalah sektor perumahan di AS tahun 2007 "adalah bahwa harus bersikap sangat hati-hati terhadap pembiaran lembaga-lembaga dan sistem keuangan yang begitu liberal dan terderegulasi sehingga mereka juga terjebak dalam jaringan investasi dan spekuasi internasional," ujar Martin Khor dari Lembaga Jaringan Kerja Dunia Ketiga (*Third World Network*).[37]

---

36 International Labour Organization, *The Social Impact of the Asian Financial Crisis*, Geneva: ILO, 1998.

37 Khor, M., *Dangers of Opening the Financial Sector*, Malaysia: Third World Network, 24 September 2007.

Kebergantungan yang berlebihan pada layanan impor dapat merugikan perkembangan pembangunan sebuah negara berkembang. Ketika kegiatan pelayanan dari sektor-sektor kunci atau utama tidak dijalankan [dikendalikan] oleh orang-orang lokal, maka keterampilan-keterampilan khusus (*skills*) tidak sedang dikembangkan dengan baik. Selain itu, kebergantungan yang besar pada layanan impor berarti bahwa nilai tambah kegiatan ekonomi yang akan jatuh kepada pihak luar negeri daripada pihak pelaku ekonomi dalam negeri. Jasa-jasa layanan akan memberikan kontribusi keuntungan bagi pembangunan di negara-negara miskin jika jasa-jasa layanan ini dikembangkan secara lokal dan bukannya diimpor melalui TNCs. Kegiatan-kegiatan ekonomi pada sektor jasa pelayanan pada umumnya tidak menciptakan lapangan kerja yang banyak. Dalam banyak kasus, anak cabang dari perusahaan-perusahaan transnasional umumnya berkemampuan modal tinggi, bahkan jika mereka dibandingkan dengan sektor perusahaan manufaktur [dalam negeri].

Kesimpulan

Perusahaan-perusahaan transnasional (TNCs) memainkan peran yang semakin dominan di negara-negara berkembang. Pada saat pemerintah negara-negara berkembang telah mundur dalam beberapa tahun terakhir, peran TNCs telah menjadi semakin besar, yang dipadu dengan kekuatan ekonomi dan industri mereka yang semakin mendalam dan luas. Pemerintah negara-negara industri yang kaya di Belahan Bumi Utara [Eropa, Asia Timur Jauh dan Amerika Utara] telah mengeksploitasi posisi tawar yang lemah dari negara-negara miskin yang sedang berkembang di Belahan Bumi Selatan [Asia Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin) untuk memberi peluang baru bagi perusahaan-perusahaan transnasional milik mereka.

Akan tetapi, TNCs mempunyai kekuatan yang dasyat. Mereka beroperasi sangat sekretif (rahasia) dan tidak akuntabel. Berdasarkan ukuran dan kekuatan yang besar, TNCs tampaknya mendulang keuntungan lebih banyak melalui negosiasi dengan pemerintah negara-negara miskin dan

tidak peduli dengan pandangan umum masyarakat yang pada dasarnya tidak memiliki akses dengan para pembuat kebijakan. Dengan melakukan kegiatan bisnis tanpa kontrol dari pemerintah tuan rumah dan tidak punya rasa tanggung jawab terhadap kemajuan ekonomi dari masyarakat di negara-negara berkembang, sepak terjang bisnis TNCs dapat sangat merugikan iklim politik, ekonomi dan kehidupan sosial dari negara-negara miskin. Dan satu hal yang paling buruk dari semua ini adalah bahwa masyarakat orang miskin adalah kelompok yang paling menderita sebagai akibat dari semua hal ini.

BAB I

Mengapa Negara-Negara Miskin "Menginginkan" Korporasi

Globalisasi bukan merupakan sebuah konsep yang serius. Kami sengaja menciptakannya untuk membuka jalan bagi politik ekonomi kita bisa masuk menembusi negara-negara lain. (John Kenneth Galbraith)

Pada kenyataan selama ini, kebanyakan negara berkembang tidak mendapat keuntungan yang berarti dari kehadiran bisnis TNCs, maka pertanyaannya adalah mengapa pemerintah negara-negara miskin ini terus mengundang TNCs? Alasan paling mendasar adalah kemiskinan. Pemerintah negara-negara berkembang sering berada dalam dilema. Mereka boleh tetap khawatir akan sepak terjang TNCs yang sering sarat dengan kecurangan, tapi mereka tetap mengakui bahwa sebagai orang terluka mereka membutuhkan bantuan. TNCs menawarkan bantuan kepada negara-negara yang memiliki luka-luka ekonomi seperti pengangguran yang parah, kelangkaan kronis akan valuta asing dan utang luar negeri yang semakin membengkak. Korporasi-korporasi transnasional lalu datang menampilkan diri bagaikan insinyur-insinyur yang bisa mencetak kekayaan, dengan uang dan keterampilan tinggi untuk mendapatkan tambahan devisa dan menciptakan lapangan kerja bagi negara-negara tuan rumah yang masih miskin. TNCS tampaknya menjadi jawaban magis [untuk penyembuhan luka-luka ekonomi]. Dampak-dampak negatif yang ditimpulkan oleh TNCs dalam kegiatan bisnis mereka umumnya luput dari perhatian pemerintah negara-negara miskin yang sedang mengalami luka-luka ekonomi yang parah.

"Sihir" pada dasarnya merupakan sebuah ilusi [dan pemerintah negara-negara berkembang seharusnya menyadari hal ini]. Akan tetapi, pe-

merintah negara-negara berkembang akan selalu dibujuk oleh pemerintah negara-negara Barat dan lembaga keuangan internasional [*International Financial Institutions atau IFIs* seperti Bank Dunia dan IMF] bahwa negara-negara miskin ini tidak memiliki pilihan lain kecuali harus membuka pasar mereka, merangkul globalisasi dan menarik perusahaan-perusahaan Barat.[1] Hal ini membuat mereka sulit untuk tidak 'ingin' menarik TNCs. Pengontrolan terhadap sepak terjang business TNCs di negara-negara berkembang sengaja dibuat lemah atau bahkan tidak ada kontrol sama sekali. Pemerintah mungkin akan menutup mata terhadap eksploitasi warga negaranya oleh TNCs yang mereka telah rayu [untuk datang berinvestasi di negara mereka]. TNCs pada umumnya sangat kuat, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam memproduksi barang dan jasa. Dalam posisi tertentu, TNCs sering bisa menyesatkan menteri dan pejabat negara-negara miskin yang [seharusnya berkuasa] membuat kebijakan. Bahkan pemerintah pada akhirnya bisa tampil membela perusahaan-perusahaan asing yang justru sedang mengeksploitasi [kekayaan alam] negara mereka.

Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan begitu kuat sampai mereka merancang aturan-aturan mereka sendiri [yang dalam banyak kasus kemudian menjadi peraturan perundang-undangan yang disahkan pemerintah negara tuan rumah] untuk mengatur kehadiran business mereka. Menurut Vandana Shiva, "pemerintah telah diporak-porandakan oleh TNCs".[2] Perusahaan-perusahaanlah yang menjalankan roda kebijakan publik di negara-negara berkembang dan pemerintah tuan rumah berada di bawah telapak kaki mereka. Pemerintah negara-negara Barat beserta pintalan korporasi (*corporate spin*) mereka sangat cekatan — cerdik. Resep globalisasi, liberalisasi, dan privatisasi 'dipresentasikan dengan keyakinan sungguh-sunguh dan luar biasa. Sejak masa kejayaan perdagangan bebas pada abad ke-19 teori ekonomi belum pernah mendapat kepastian yang

1 Lihat, misalnya, 'Rubin urges South Africa to embrace globalisation', *Financial Times*, 15 July 1998.

2 Vandana Shiva, dalam menjawab sebuah pertanyaan pada sebuah "Konferensi Rakyat Tingkat Tinggi", yang bertepatan dengan KTT G8, di Birmingham, May 1998.

begitu luas seperti sekarang ini."[3] Ketika "kepastian yang begitu luas" berlimpah secara meluap-luap dan "pintalannya" berdentang begitu meyakinkan, negara-negara berkembang tergerak untuk menjadi bagian daripadanya.

Globalisasi

Globalisasi ekonomi — dunia sebagai pasar tunggal, tanpa hambatan, sebagai lawan dari dunia yang dibagi-bagi menjadi pasar-pasar yang terpisah — telah menjadi salah satu isu kontroversial zaman kita dewasa ini. "Globalisasi sendiri bukan merupakan sebuah pilihan kebijakan, melainkan ia adalah sebuah fakta," demikian kata Presiden AS Bill Clinton kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam pertemuan tingkat menteri pada Mei 1998. Pada kesempatan itu, ia sekali lagi menempatkan 'pintalan' (*spin*) pada konsep yang menunjukkan bahwa semua negara di dunia tidak mempunyai pilihan lain — semua negara harus merangkulnya. Liberalisasi dan privatisasi lepas landas (*take off*) pada 1980-an dengan lahirnya SAPs yang diberlakukan secara paksa oleh Bank Dunia/IMF dan tuntutan liberalisasi dan privatisasi ini telah semakin didesak dan dipercepat pelaksanaannya oleh WTO dan TNCs.

Para ahli ekonom pasar bebas percaya bahwa reformasi liberalisasi, yang sedang diadopsi oleh semakin banyak negara berkembang, merupakan kunci untuk memperbaiki prospek-prospek ekonomi dari sebuah negara. TNCs mendukung langkah-langkah liberalisasi seperti penghapusan hambatan-hambatan impor dan ekspor di bidang perdagangan, dan mengurangi peran negara, karena kondisi-kondisi ini akan memberi mereka peran yang lebih leluasa dan kuat dalam perekonomian sebuah negara. Tapi ironisnya, ketika TNCs menuai keuntungan dari liberalisasi dan mempromosikan liberalisasi dan globalisasi, pada saat yang sama mereka juga menuntut supaya kepentingan bisnis mereka harus dilindungi.

---

3 United Nations Development Programme, *Human Development Report 1997*, New York: UNDP, 1997, p. 82.

Secara licik mereka merekayasa bentuk globalisasi yang didorong tidak hanya oleh liberalisasi tetapi juga oleh proteksionisme ketika persoalannya merupakan kepentingan perusahaan transnasional.

Globalisasi memiliki implikasi yang mendalam bagi negara-negara berkembang. Namun, mesti disadari bahwa implikasi globalisasi itu merupakan produk dari keputusan-keputusan yang dibuat manusia dan bukan merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Globalisasi mengancing negara-negara berkembang ke dalam sistem ekonomi global dan membuat mereka sulit mengejar pembangunan ekonomi yang benar-benar independen. Sistem ekonomi global ini dapat secara fundamental memengaruhi kehidupan masyarakat miskin seperti kenaikan harga bahan makanan pokok dan bisa mengancam penghapusan sistem pertanian keluarga berskala kecil dan lebih mendukung [pertanian berskala besar dari] TNCs. Bagi pemerintah negara-negara berkembang, selain sistem ekonomi ini, tampaknya seolah-olah tidak ada alternatif lain. Mereka merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali merangkul liberalisasi dan privatisasi ekonomi ini jika ingin mendapat bantuan [pemerintah negara-negara Barat] atau supaya diberikan keringanan beban pembayaran bunga utang luar negeri, yang sering dibuat dengan persyaratan seperti negara berkembang harus menerima reformasi ekonomi dengan merangkul pasar 'bebas' (*free market*).

Eskalasi globalisasi pada 1990-an dan 2000-an telah memiliki dampak yang besar pada orang-orang miskin. Jutaan penduduk dunia sekarang ini lebih buruk keadaannya dibandingkan pada tahun 1980-an. Globalisasi ekonomi telah memberikan keuntungan besar bagi para pedagang, yaitu TNCs, tapi tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi negara-negara berkembang. Globalisasi justru telah dan sedang memperlebar kesenjangan antara orang kaya (termasuk TNCs) dan orang miskin, yang mengarah ke dunia yang lebih terpolarisasi. Hal ini telah diakui oleh Bank Dunia sendiri.[4] Sebuah Laporan Perdagangan dan Pembangunan dari UNCTAD menunjukkan bukti "bahwa ketidaksetaraan yang terus meningkat men-

4 World Bank, *Global Economic Prospects and the Developing Countries*, Washington, DC: World Bank, 1996.

jadi gambaran semakin biasa dan umum dari ekonomi dunia."[5] Globalisasi ekonomi dan bisnis TNCs tidak membuat bangsa-bangsa semakin baik tetapi sebalik memperlebar jurang perbedaan antara yang punya (kaya) dan yang tidak punya (miskin).

Lebih dari satu dekade kemudian, mesti dipertanyakan mengapa, ketika buktinya cukup jelas pada 1990-an, lembaga-lembaga seperti Bank Dunia — yang memiliki mandat untuk memerangi kemiskinan — melakukan tindakan begitu sedikit untuk memerangi sebuah praktik yang nyata-nyata merugikan masyarakat miskin.

Kenyataan menunjukkan secara kasatmata bahwa negara-negara berkembang yang sangat miskin tetap tidak berkembang. Menurut Laporan Program Pembangunan PBB pada tahun 2003, "lebih dari 50 negara justru telah berubah semakin miskin dalam sepuluh tahun terakhir ini".[6] "Sebuah wajah baru dari 'apartheid' tampaknya menyebar ke seluruh dunia," kata sebuah kertas laporan UNICEF, "di mana jutaan orang dalam kondisi yang menyedihkan hidup secara berdampingan dengan mereka yang menikmati kemakmuran — suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya."[7]

Negara-negara berkembang bertumbuh sekitar 3% antara tahun 1960 dan 1980, tetapi mereka bertumbuh hanya sekitar 1,5% selama antara tahun 1980 dan 2000. Itu berarti bahwa mereka telah tertinggal jauh di belakang negara-negara maju, yang pertumbuhannya juga melambat dari 3,2% mejandi hanya sekitar 2,2%. Selama 20 tahun terakhir, ekonomi Afrika telah menyusut (pada tingkat sekitar 0,8% per tahun, kebalikan dari tingkat pertumbuhan yang pernah dicapai sebelumnya 1,6%), sementara Amerika Latin pada dasarnya telah stagnasi (tumbuh hanya 0,3% dibandingkan dengan 2,8% pada masa-masa sebelumnya).[8]

---

5 United Nations Conference on Trade and Development, *Trade and Development Report 1997*, Geneva: UNCTAD, August 1997.

6 United Nations Development Programme, *Human Development Report 2003*. New York: UNDP, 2003.

7 UNICEF staff working papers, No. EPP-00-00, January 2000, New York: UNICEF, 2000.

8 Ha-Joon Chang, in J. Madeley, *A People's World*. London: Zed Books, 2003, p. 41.

Sekarang orang semakin sadar akan dampak-dampak negatif dari globalisasi ekonomi, khususnya di kalangan orang-orang di negara-negara miskin yang memiliki sedikit atau sama sekali tidak memiliki apa-apa untuk diperdagangkan dan juga mereka yang menjadi korban — dan bukan penerima manfaat — dari proses ekonomi global ini. Keprihatinan atas globalisasi telah menjadi bahan pembicaraan pertemuan WTO tingkat kementerian. Misalnya, "banyak laporan negara berkembang menyuarakan apresiasi yang diungkapkan oleh organisasi-organisasi masyarakat mengenai dampak liberalisasi dan globalisasi [ekonomi]".[9] Warga dan pemerintah negara-negara berkembang sudah mulai melihat wajah globalisasi ekonomi yang sebenarnya — ia ternyata sebuah jebakan (*trap*) yang brutal tapi halus dan licik.

Privatisasi

Elemen ketiga dari trio kebijakan ini — di samping liberalisasi dan globalisasi — adalah privatisasi aset-aset negara. Privatisasi ekonomi lagi-lagi merupakan bagian dari resep SAPS [yang dipaksakan oleh IMF dan Bank Dunia]. Selama 25 tahun terakhir, banyak negara berkembang telah menjual sebagian besar perusahaan milik negara mereka (BUMN) kepada perusahaan swasta besar luar negeri seperti TNCs.

Benar bahwa privatisasi dapat meningkatkan efisiensi kinerja dari sebuah perusahaan yang sebelumnya dijalankan oleh negara. Tapi persoalannya adalah melalui program privatisasi yang dipaksakan ekonomi global, aset-aset milik negara dijual habis, kadang-kadang dengan harga murah, kepada pihak swasta yang sering kali lebih menguntungkan kepentingan perusahaan asing. Melalui proses privatisasi, beberapa sumber daya modal dari negara berkembang praktisnya ditransfer kepemilikannya kepada sebuah TNC. Bagi perusahaan-perusahaan transnasional, privatisasi, karenanya, merupakan sebuah bisnis yang baik dan empuk, terutama karena mereka sering dapat mengakuisisi perusahaan milik negara-negara miskin dengan harga-harga amat rendah (*knockdown prices*). Dalam program privatisasi pemerintah negara Bahama, misalnya, sebuah hotel lokal

9 *South Letter*, Vols 2 and 3, No. 31 (1998), Geneva: The South Centre.

yang telah dijual ke perusahaan jaringan hotel internasional dengan harga US$8 juta sebenarnya mempunyai nilai sebesar US$20 juta [dan karena itu tak dapat dijual kepada TNCs perhotelan dengan harga US$8 juta].

Sejak awal tahjun 1990-an, privatisasi telah mulai dikritik keras oleh orang-orang yang terkena dampaknya negatifnya. Di Sri Lanka, misalnya, keresahan di kalangan angkatan kerja tentang rencana privatisasi atas fasilitas publik milik negara telah menyebabkan tindakan pemogokan yang sangat memengaruhi produksi industri. Proses privatisasi ini bisa sangat merusak pelayanan sektor-sektor sosial yang sangat penting seperti pelayanan bagi kaum miskin, kesehatan, pendidikan, dan penelitian pertanian. Jasa layanan, yang sebelumnya bisa dilakukan oleh negara secara gratis, kini beralih ke perusahaan swasta dengan biaya yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dalam bidang kesehatan, anggaran dan jasa layanan dipotong secara drastis. Orang-orang yang berpenghasilan sangat rendah — lebih rentan terhadap kesehatan yang buruk — menjadi korban langsung dari privatisasi. Di sejumlah negara, kekurangan gizi meningkat dan penyakit lainnya telah muncul setelah privatisasi sektor layanan kesehatan. Pada 1990-an di Zimbabwe, misalnya, penyakit seperti kolera dan TBC, yang sebelumnya hampir musnah di negara itu, kini mulai muncul kembali.

Pendidikan juga merupakan sektor yang terkena dampak langsung dari privatisasi. Di bidang ini, masyarakat miskin di negara-negara berkembang harus membayar layanan pendidikan yang sebelumnya dapat diperoleh tanpa biaya. Salah satu contohnya dapat dilihat di Barat Daya dari Negara Zambia. Di bawah proyek yang didanai oleh Dana Internasional PBB untuk Pengembangan Pertanian, provinsi meningkatkan produksi makanannya antara tahun 1985 dan 1995 menjadi swasembada jagung. Akan tetapi, peningkatan produksi pangan jagung ini tidak mengurangi tingkat malnutrisi masyarakat setempat. Seorang pegawai proyek ini mengatakan bahwa "ketika masyarakat petani berhasil meningkat produksi, sebagian dari produksi pangan dijual untuk mendapatkan uang bagi anak-anak mereka yang mengenyam pendidikan di sekolah. Mereka terpaksa tidak makan secukupnya."[10]

10 Percakapan dengan pengaran, Februari 1996.

Privatisasi mengurangi kapasitas sektor publik untuk melakukan penelitian pertanian. Varietas tanaman pokok yang toleran kekeringan seperti kacang-kacangan, misalnya, jarang menjadi incaran TNCs. Mereka–TNCS–lebih memilih untuk mengembangkan tanaman pangan bernilai harga jual tinggi. Timbul persoalan, petani-petani miskin sering kali tidak mampu membeli tanaman tersebut. Jika semuanya diserahkan kepada sektor swasta, maka pasar akan gagal untuk menyalurkan makanan yang seharusnya dibutuhkan oleh orang-orang lapar. Sejumlah pemerintah di negara-negara berkembang mengaku bahwa dalam banyak kasus mereka tidak dapat menjalankan perusahaan ekonomi berskala besar. Karena itu, mereka melompat dari satu kendaraan yang dirasa tidak cocok ('yang mereka jalankan sendiri') ke kendaraan yang lain ('tapi dikendalikan oleh perusahaan asing'). Yang terjadi bisa menjadi jauh lebih buruk. Karena dengan itu, TNCs dapat secara efektif menjadikan negara-negara berkembang menjadi satelit dari negara-negara Barat, yang pada gilirannya merusakkan kedaulatan dan demokrasi di negara-negara berkembang. Privatisasi yang meluas seperti ini, karenanya, sama dengan pemerintah negara yang tercabut dari takhta kekuasaannya. TNCs dibiarkan bebas merdeka menjalankan kegiatan bisnis dengan kontrol yang amat sedikit dari pemerintah negara tuan rumah.

Privatisasi ekonomi di Afrika telah dipropagandakan oleh sebuah Institute Masalah Ekonomi yang berbasis di London. "Ada solusi pasar bebas yang radikal untuk masalah Afrika," kata institut ini. 'Solusi' yang ditawarkan adalah kembali lagi konsep perusahaan charter, yaitu bentuk-bentuk perusahaan seperti Perusahaan Imperium Inggris Afrika Timur yang pernah beroperasi pada zaman kolonial. Menurut institute di London ini, cara untuk melakukannya adalah sebagai berikut:

> Lelang sewa kepada memerintah negara-negara Afrika, sambil memberikan kepada pemohon yang sukses hak untuk memungut pajak sebagai imbalan untuk penyediaan layanan yang dinyatakan secara khusus — karena jumlahnya cukup besar, maka penawarnya bisa perusahaan multinasional atau konsorsium perusahaan — berbagai tawaran harus ditentukan oleh penduduk melalui pemilihan.[11]

---

11 Whelan, R., 'Foreign aid: who needs it?', *Economic Affairs* (Autumn 1996), London: Institute of Economic Affairs.

Proposal semacam ini mungkin tampak aneh, tetapi gagasan privatisasi grosir negara-negara Afrika hanya akan mengembangkan apa yang sekarang terjadi. Sesungguhnya, kolonialisme oleh perusahaan, dan bukan oleh negara, sudah sedang terjadi. TNCs tampaknya tidak akan tertarik pada gagasan mengambil alih menguasai sebuah negara, namun, karena kenyataan sekarang menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuasaan untuk menguasai negara tanpa harus memilikinya. Karena mengambil alih dan memiliki negara akan memberi mereka tanggung jawab.

Utang eksternal

Utang luar negeri telah menjadi isu utama yang memengaruhi negara-negara berkembang sejak awal tahun 1980-an, ketika suku bunga internasional melonjak, yang disebabkan oleh kebijakan moneter ketat dari negara-negara besar Barat.

Negara-negara berkembang, setelah meminjam uang pada tahun 1970 dengan suku bunga sebesar sekitar 10% — sering kali digunakan oleh proyek skala besar yang kurang bijaksana [atau disalahgunakan pemerintah diktator] pada tahun 1980-an tiba-tiba mereka harus membayar sekitar 20%. Pada saat harga komoditas turun tajam dan pada saat yang sama negara-negara Barat terus melindungi pasar mereka secara gigih dari banjiran barang-barang manufaktur yang diproduksi oleh negara-negara berkembang. Dengan tersendatnya bantuan asing, negara-negara berkembang dipaksa harus mencari banyak devisa asing supaya bisa membayar utang luar negeri, sementara penerimaan mereka sangat kurang. Masalah neraca pembayaran berakhir dan pintu terbuka bagi Bank Dunia dan IMF untuk tampil dengan program penyesuaian struktural atau SAPs.

Di bawah aturan SAPs yang diperintahkan IMF dan Bank Dunia, negara-negara berkembang akan ditawarkan bantuan atau bisa dapat memperoleh pinjaman baru, asalkan mereka bersedia meliberalisasi dan memprivatisasi ekonomi mereka, memangkas anggaran untuk pelayanan sosial, subsidi dipotong, birokrasi pada umumnya harus dirampingkan atau dikurangi, dan merancang perekonomian mereka sedemikian rupa

sehingga siap menyambut investasi asing. Benar bahwa beberapa reformasi diperlukan, tapi dalam proses reformasi ekonomi ternyata orang-orang miskin yang selalu membayar harga mahal dan menjadi korbannya. Dan lagi-lagi, ternyata TNCs yang tampil ke depan pentas reformasi ekonomi mengekori program SAPs yang diberlakukan oleh IMF dan Bank Dunia.

Utang luar negeri telah menjadi salah satu faktor tunggal terbesar yang membuat orang tetap miskin. Lebih dari 50 negara, sebagian besar negara-negara Afrika, sedang memikul beban utang yang parah dan harus mengalihkan uang dari layanan publik yang penting, seperti kesehatan dan pendidikan, untuk membayar kembali utang luar negeri.

Total utang luar negeri dari negara-negara berkembang naik dari "US$9 miliar (sekitar Rp90 triliun) pada tahun 1955 menjadi US$572 milyar (sekitar Rp5.720 triliun) pada tahun 1980 dan menjadi lebih dari US$2.000 miliar (sekitar Rp20.000 triliun) pada tahun 1996".[12] Ini merupakan uang kepada pemerintah negara-negara Barat, lembaga bantuan pemerintah, IMF, Bank Dunia dan bank-bank lain. Hingga tahun 2005, 149 negara termiskin di dunia memiliki utang luar negeri sebesar US$2.700 miliar (sekitar Rp27 triliun).[13] Selama tahun 2005 saja, negara-negara miskin membayar kepada negara-negara kaya sebesar US$513 miliar (sekitar Rp5.230 triliun) untuk layanan (bunga dan pembayaran kembali modal pada saat jatuh tempo) utang ini — atau hampir US$1.5 miliar (sekitar Rp15 triliun) per hari. 53 negara termiskin membayar hampir US$43 miliar (sekitar Rp430 triliun) kepada negara kaya atau sekitar US$118 juta (sekitar Rp1,18 triliun) per hari.[14]

Pada tahun 2005, bantuan pembangunan dari Barat untuk negara-negara berkembang mencapai US$106.8 miliar (sekitar Rp1.060,8 triliun), demikian menurut Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pemba-

---

12 Gelinas, Jacques B., *Freedom from Debt*, London: Zed Books, 1998, p.34.

13 "How big is the debt of developing countries?", Jubilee Debt Campaign, 2007. <http://www.jubileedebtcampaign.org.uk> (accessed 23 January 2008).

14 *Ibid.*

ngunan.[15] Sementara pada saat yang sama, negara-negara berkembang harus membayar kepada negara-negara Barat sebesar US$513 (sekitar Rp5.130 triliun), yang besarnya hampir lima kali lipat dari besar bantuan dari negara Barat di atas. Sehingga pertanyaannya adalah: siapa yang sedang membantu siapa (*Who is helping whom*)?

Ketika negara-negara berkembang harus membayar kembali utang dengan begitu banyak uang, maka pilihan mereka dibatasi. Kebutuhan negara-negara miskin untuk mendapatkan uang untuk membayar kembali utang luar negeri merupakan salah satu alasan utama mengapa mereka meng-'ingin'-kan TNCs. Dampak kemanusiaan dari beban utang luar negeri sangat besar. Laporan Pengembangan Kemanusiaan 1997 memperkirakan bahwa jika negara-negara berutang dibebaskan dari pembayaran utang tahunan, maka mereka bisa menggunakan dana itu untuk investasi "yang di Afrika saja akan dapat menyelamatkan hidup dari sekitar 21 juta anak pada tahun 2000 (tujuh juta jiwa per tahun) dan memberikan kepada 90 juta anak perempuan dan gadis remaja untuk bisa akses ke pendidikan dasar".[16] Oleh penghapusan utang, negara-negara berkembang akan memiliki cukup dana mereka sendiri untuk berinvestasi dan investasi dari TNCs menjadi kurang perlu. Pada tahun 1996 IMF dan Bank Dunia meluncurkan program yang disebut *Inisiatif Heavily-Indebted Poor Countries* (HIPCs) atau Negara-Negara Sangat Terbeban Utang. Tapi usaha ini sangat terbatas dan sejak waktu itu hingga kini usaha penghapusan utang negara-negara miskin berjalan pelan seperti siput. Beberapa negara donor tampaknya memasukkan bantuan asing mereka ke dalam utang negara-negara miskin yang mereka batalkan.

Sesungguhnya ada tekanan besar pada negara-negara berkembang untuk melompat di papan ikutan globalisasi. Hak mereka untuk menentukan kebijakan pembangunan mereka sendiri ditegaskan oleh para pe-

15 Organization for Economic Cooperation and Development, 'Final ODA data for 2005', Paris: OECD, 2006. <http://www.oecd.org/dataoecd/ 52/18/ 37790990. pdf> (accessed 23 January 2008).

16 United Nations Development Programme, *Human Development Report 1997*, p. 93.

mimpin G8 ketika mereka bertemu di Skotlandia pada bulan Juli 2005. Akan tetapi dalam praktiknya, negara-negara berkembang berada di bawah tekanan besar untuk 'menyesuaikan' diri.

Koneksi bantuan

Negara-negara berkembang membutuhkan bantuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial dan mengurangi kemiskinan. Tetapi jika mereka mendapat bantuan, maka mereka menerima TNCs, sehingga pada akhirnya TNCS tetap menjadi penerima manfaat utama dari bantuan yang diperoleh dari negara Barat. Pemerintah-pemerintah negara donor umumnya 'mengikat' sebagian besar bantuan bilateral mereka untuk membeli barang-barang dari perusahaan di negara donor. Sebuah negara berkembang dapat menerima bantuan untuk proyek bendungan, misalnya, dengan syarat bahwa perusahaan-perusahaan dari negara donor menerima kontrak untuk membangunnya (lihat Bab 10). Pembangkit listrik, pertanian dan sektor pariwisata semua menarik bantuan asing, tapi pada gilirannya tetap hanya membantu menguntungkan perusahaan-perusahaan [transnasional yang mengoperasikan proyek-proyek ini].

Lebih dari setengah bantuan Jepang, salah satu donatur terbesar di dunia, tersalur melalui lembaga bantuan·keuangan, *Overseas Economic Cooperation Fund*, untuk tenaga listrik dan gas, dan sektor transportasi — dalam praktiknya ditujukan untuk proyek berskala besar. Pemerintah Jepang secara terbuka menyatakan bahwa bantuan luar negeri mereka bagi negara-negara berkembang membantu TNCs-nya sendiri untuk memenangkan kontrak-kontrak bisnis di luar negeri.

Pogram Pembangunan PBB (*The United Nations Development Programme*atau UNDP), sebuah lembaga bantuan teknis, telah mendorong negara-negara berkembang untuk membuka negara mereka seluas-luasnya bagi TNCs yang antara lain bergerak di bidang pertambangan dan pariwisata. Di Filipina UNDP membantu membiayai upaya pemerintah untuk menarik investor pertambangan asing, meskipun kebijakan ini bisa membuat banyak orang di negara-negara miskin akan menderita kehilangan

tanah pertanian dan mata pencaharian. Setelah mendapat protes publik, pemerintah baru memberlakukan syarat-syarat tertentu pada perusahaan (lihat juga Bab 8).

Bank Dunia, sebuah bantuan keuangan multilateral terbesar di dunia, yang sebagian didanai dari anggaran bantuan pemerintah donor, sedang menggunakan uang bantuan (*aid money*) untuk mempromosikan kepentingan TNCs. Sejumlah proyek bendungan besar, yang telah meningkatkan keuntungan TNCs tapi pada saat yang sama menelantarkan jutaan pengungsi masyarakat setempat akibat proyek dam, telah secara rutin didanai sebagiannya oleh bantuan luar negeri dari Bank Dunia dan donor-donor lainnya. Bank Dunia juga telah mendanai proyek-proyek pertanian berskala besar, pertambangan dan pariwisata. Bank Dunia telah membantu TNCs dengan menyediakan pinjaman untuk membantu membiayai pendirian lembaga-lembaga privatisasi di sejumlah negara Afrika. Melalui kebijakan SAPs, Bank Dunia berada di garis depan dalam usaha membujuk negara-negara berkembang untuk melakukan deregulasi dan liberalisasi ekonomi mereka — menghapus kebijakan perundang-undangan yang mengontrol ekonomi, termasuk kebijakan-kebijakan yang menghambat bisnis TNCs.

Bank Dunia, misalnya, memberikan tekanan untuk deregulasi dan liberalisasi industri obat di Bangladesh, sehingga hal ini merusak salah satu industri obat-obatan nasional yang paling penting dan sukses yang pernah dimiliki oleh negara berkembang (lihat Bab 4). Bank dunia juga telah ikut mempropagandakan ekspor pertanian 'non-tradisional' sebagai bagian dari liberalisasi perdagangan dan penerapan kebijakan SAPs di negara-negara Amerika Latin. Para pemenang dari kebijakan deregulasi ekonomi ini [yang dipropagandakan — dipaksa — oleh IMF, Bank Dunia dan Negara G7] adalah TNCs, dan yang selalu berada pada pihak yang kalah [dan jadi korban] adalah orang miskin.

"Keterlibatan langsung Bank Dunia dengan sektor korporasi transnasional secara finansial... luput dari perhatian banyak orang selama ini", demikian diingatkan David Korten. Meskipun Bank Dunia memberikan pinjaman kepada pemerintah negara berkembang, proyek-proyek Bank

Dunia" biasanya melibatkan kontrak proyek-proyek yang besar dengan perusahaan-perusahaan konstruksi transnasional, perusahaan konsultan besar dan kontraktor pengadaan barang-barang," kata David Korten lebih lanjut.[17]

Padahal menurut Bank Dunia sendiri, "investasi sektor swasta merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting bagi negara-negara berkembang".[18] Bank Dunia secara rutin menyelenggarakan seminar, menerbitkan dokumen-dokumen dan menyelenggarakan pameran untuk melakukan apa saja yang bisa dibuat Bank Dunia untuk memuluskan jalan bagi investasi TNCs di negara-negara miskin. Menurut Bernard Pasquier, dari kelompok Bank Pembangunan Sektor Swasta (*Bank's Private Sector Development* atau PSD), "kami menciptakan sebuah gerbang depan sehingga kita dapat membantu memuluskan jalan bagi perusahaan-perusahaan secara lebih baik. Idenya adalah... untuk, harus kami katakan, menaruh sedikit minyak dalam mesin untuk membantunya agar dapat berjalan lebih lancar. Tujuan kami adalah untuk membantu perusahaan-perusahaan multinasional dan perusahaan-perusahaan domestik di negara-negara berkembang untuk membangun sektor swasta yang lebih berkembang".[19]

Agen Insuransi Investasi Multilateral (*Multilateral Investment Guarantee Agency* atau MIGA) dari Bank Dunia menyatakan bahwa misinya adalah "untuk mempromosikan investasi asing langsung ke negara-negara berkembang".[20] Dalam praktiknya lembaga MIGA milik Bank Dunia ini lebih banyak memberikan keuntungan besar bagi sektor swasta [dalam hal ini TNCS]. Dalam banyak kasus MIGA memberikan jaminan terhadap risiko politik [yang disebut *Political Risk Insurance* atau PRI — Insuransi Risiko Politik], seperti kemungkinan proses nasionalisasi, kerugian transfer mata uang, perang dan gangguan atau protes masyarakat

17 Korten, *When Corporations Rule the World*, p. 166.
18 *World Bank News*, 19 September 1996.
19 Bernard Pasquier, quoted in *The Ecologist*, July/August 1996, p. 177.
20 *About MIGA*. MIGA/World Bank Group, 2008. <http://www.miga.org/about/index_sv.cfm?stid=1588> (accessed 23 January 2008).

sipil. MIGA, misalnya telah memberi asuransi tambang emas baru di Pulau Lihir, Papua Nugini agar sebagiannya dioperasikan oleh TNCs. Para bankir [sebelumnya] berpendapat bahwa sulit untuk mengumpulkan modal besar bagi proyek pertambangan sebesar di Papua Nuova Guinea ini. Karena itu, Bank Dunia tampil ke depan menyalurkan modal yang pasar [dan bank biasa lainnya] gagal melakukannya — justru pasar yang Bank Dunia sendiri propagandakan kepada negara-negara berkembang untuk diadopsi.

Badan-badan bantuan [internasional] diharapkan untuk membantu masyarakat miskin di seluruh dunia. Mereka didanai dengan dana bantuan yang dimaksudkan untuk memerangi kemiskinan. Namun terlalu sering kebijakan dari lembaga-lembaga ini bukan lagi membantu masyaraakat miskin tapi justru membantu orang-orang kaya — yaitu perusahaan-perusahaan besar di bisnis [TNCs].

Kesimpulan

Terhadap konsep globalisasi, liberalisasi, dan privatisasi, seharusnya ditambahkan lagi konsep keempat yang menjadikan ketiga konsep ini sebagai satu kesatuan yang tak terhindarkan, yaitu korporatisasi. Korporatisasi memberikan ancaman terbesar bagi masyarakat miskin. Negara-negara berkembang tidak selalu seharusnya meng-'ingin'-kan perusahaan-perusahaan [transnasional]. Dalam tatanan ekonomi dunia di mana negara-negara Barat mengontrol dompet [keuangan], dan di mana dompet [keuangan] dari negara-negara berkembang banyak yang kosong, negara-negara Barat dan lembaga-lembaga internasional yang dikontrol mereka telah secara efektif membuat negara-negara miskin tersudut dan tunduk — termasuk secara diplomatik, tentunya. Dengan menggunakan kekuatan ekonominya, negara-negara Barat telah menggunakan isu kemiskinan di negara berkembang untuk memaksakan ideologinya yaitu agenda pasar bebas (*free-market agenda*). Tak ada hal yang tidak bisa dielakkan sehubungan dengan globalisasi. Globalisasi adalah sebuah pilihan kebijakan yang telah membuka lebar pintu gerbang bagi TNCs untuk mengeksploitasi masya-

rakat miskin [dan kekayaan mereka]. Globalisasi ekonomi pasar bebas adalah sebuah kebijakan yang sangat diragukan secara moral dan merupakan sebuah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang serius.

BAB II

Korporasi Pertanian: Dari Produksi Hingga Perdagangan

Korporasi-korporasi besar di bidang pertanian menciptakan gambaran kapitalis bekas pertanian negara Soviet. (Christopher Jones, UK petani)

Bagi orang yang ingin membeli jagung, sebenarnya tidak banyak pilihan selain datang kepada kami. (Bob Kohlmeyer, mantan manajer, Cargill)

Bagi petani-petani miskin, teknologi GM bukanlah sebuah pilihan. (Miguel Altieri)

Pertanian, sebuah proses membudidayakan tanaman pangan, adalah usaha yang lebih dari sekadar hanya sebuah industri. Selain itu, ia merupakan sebuah kegiatan, bahkan bisa dipandang sebagai sebuah kegiatan utama, yang memberikan manusia kebutuhan paling dasar supaya bisa hidup. Pertanian merupakan kegiatan utama dari sebagian besar masyarakat miskin di dunia supaya bisa hidup. Pertanian begitu penting, sehingga dengan mengolah sebuah lahan yang tak seberapa luas sekalipun, bisa membuat perbedaan yang jelas antara hidup dan mati dari seorang petani.

Persoalan tentang makanan juga demikian. Ia merupakan sesuatu yang juga lebih dari sekadar komoditas yang diperjualbelikan. Bahkan, makanan itu lebih dari sekadar nutrisi [gizi] yang orang konsumsikan. Makanan seharusnya merupakan sebuah pengalaman ikatan yang unik untuk dibagi-bagikan (*to beshared*) pada setiap tingkat kehidupan manusia: pribadi, keluarga, masyarakat, nasional, dan internasional.

Namun hingga saat ini, lebih dari 800 juta orang di dunia diperkirakan masih menderita kekurangan makanan yang kronis. Hampir setengah dari seluruh umat manusia lapar, dan hidup dengan nilai kurang dari

US$2.00 (sekitar Rp20.000) per hari. Sistem pangan gagal. Masyarakat internasional telah gagal untuk mengembangkan sebuah sistem yang akan bisa memenuhi kebutuhan akan makanan yang dunia bisa kembangkan. Mereka yang lapar membutuhkan roti, beras, jagung, sorgum atau singkong di meja mereka. Akan tetapi, ketimbang memiliki makanan-makanan ini, warga masyarakat yang miskin dan lapar di dunia kebanyakan hanya memiliki perusahaan-perusahaan transnasional–TNCs.

TNCs telah menjadi semakin dominan dalam sistem pengadaan pangan dan pertanian [di seluruh dunia]. Mereka berperan aktif di dalam setiap bagian dari rantai pengembangan makanan, mulai dari usaha pengadaan benih sampai ke penjualan hasil makanan kepada para konsumen. Dalam pengaturan yang saling berhubungan, TNCs membuat penelitian, melakukan pengujian atau *test* dan menjual benih-benih baru, mengambil paten-paten kita untuk digantikan dengan varietas tanaman baru. Lalu mereka jual pupuk dan pestisida kepada para petani bersama dan sesuai dengan jenis benih-benih baru yang mereka ciptakan. TNCs menjual jasa-jasa pelayanan, yang kerap kali disertai dengan rekomendasi tertentu sehubungan varietas tanaman hibrida baru tersebut dan cara-cara pemeliharaannya. Mereka memproseskan berbagai macam jenis makanan, dan mendominasi perdagangan produk-produk utama di bidang pertanian. Dan mereka berusaha untuk memperluas daya kontrol mereka akan rantai proses pengadaan makanan bagi masyarakat dunia melalui apa yang disebut rekayasa genetika.

"Sebuah gelombang penggabungan (*merger*) dan aliansi bisnis telah memusatkan kekuatan pasar di tangan sekelompok kecil orang," kata sebuah laporan LSM ActionAid yang berjudul *Power Hungry*.[1] Kekuatan dan pengaruh dari segelintir pebisnis ini telah sangat meningkat karena didorong oleh kebijakan liberalisasi perdagangan dunia yang sedang diberlakukan oleh WTO, IMF, dan Bank Dunia dengan dukungan pemerintah negara-negara Barat.

1 ActionAid, *Power Hungry: Six Reasons to Regulate Global Food Companies*, Johannesburg: ActionAid, 2005.

Namun, hasilnya hingga saat ini dominasi TNCs di bidang pertanian yang hanya memperparah kemiskinan yang sudah parah. Jadi, pertanian dan proses pengadaan pangan telah berada di bawah kendali perusahaan-perusahaan. Mereka memiliki kekuasaan sangat besar untuk menentukan harga makanan dan atas kehidupan para petani. TNCs Agribisnis telah menelan perusahaan-perusahaan kecil (lihat subjudul 'Benih', di bawah ini) dengan menggabungkan mereka semua dengan sebuah perusahaan dihubungkan dengan semua sektor terkait.

Banyak korporasi yang berbisnis di bidang pertanian bisa lebih kaya dari negara-negara di mana mereka melakukan bisnis. TNC Nestlé, misalnya, memperoleh laba keuntungan yang lebih besar daripada PDB negara Ghana pada tahun 2002. Keuntungan yang diperoleh TNC Unilever adalah sepertiga lebih besar dari pendapatan nasional dari negara Mozambik. Sedangkan besar laba keuntungan yang dicapai TNC Wal-Mart lebih besar dari hasil ekonomi dari kedua negara ini — Ghana dan Mozambik.

Fakta di mana pemerintah negara-negara berkembang sering tidak membuat anggaran cukup untuk pengembangan di bidang pertanian telah membuat TNCs mengambil peran yang semakin besar. Penyilangan tanaman, misalnya, telah menjadi bisnis besar bagi banyak perusahaan. Dengan mengklaim bahwa mereka memiliki teknologi untuk meningkatkan hasil panen, sanggup menghancurkan hama dan penyakit tanaman, dan memberi makan kepada dunia, TNCs memandang rendah pertanian organik tradisional, dan sistem produksi lokal. TNCs juga mengklaim bahwa mereka memiliki peran penting di sektor pertanian di negara-negara berkembang.

Para petani kecil menjadi pasokan bagi TNC pengecer seperti Tesco dan Carrefour dengan meningkatkan volume produk buah-buahan, sayur-sayuran, daging, dan susu. Tapi kepastian keamanan makanan dan standar lingkungan dapat mendorong petani kecil keluar dari bisnis.

Benih

Pada pertengahan tahun 1980-an, ada 7.000 perusahaan yang berpesialisasi untuk memproduksi benih tanaman pangan. Dalam era kebangkitan industri pengembangan benih dan pupuk pada tahun 1960 — yang lazim disebut "revolusi hijau" — TNCs yang bergerak di bidang industri kimia mulai membeli semua perusahaan benih berukuran kecil yang dimiliki keluarga. Pada tahun 1998, ada sekitar 1.500 perusahaan benih di dunia dan 24 di antaranya bisa menguasai sekitar separuh pasar benih komersial dunia. Sepuluh tahun kemudian hingga sekarang, hanya ada sepuluh pebisnis di bidang pengadaan benih tanaman pangan yang mendominasi setengah dari pasar benih dunia. Pengadaan benih tanaman pangan telah menjadi bisnis besar bagi TNCs di bidang agribisnis, dengan industri benih sebagai sayap dari industri bioteknologi.[2]

Benih-benih yang diciptakan oleh TNCs bisa bertumbuh dengan bantuan bahan kimia yang juga mereka produksikan. Saluran distribusi TNCs akan benih identik dengan tanaman dengan bahan-bahan kimia, yang membuka kemungkinan untuk menghubungkan industri kimia, industri pengembangan benih dan industri pemasaran. Tapi, bagi para petani, membeli benih-benih yang diciptakan oleh TNCs berarti memaksa mereka untuk harus membeli pupuk dan pestisida yang diciptakan TNCs. Integrasi teknologi-teknologi dalam satu paket pemasaran memungkinkan perusahaan untuk menjual lebih banyak benih dan bahan kimia. Sebuah pasar ganda karenanya diciptakan untuk menjual kedua produk ini [yaitu benih dan pupuk/pestisida]. TNCs telah menggunakan paten-paten atas benih yang mewajibkan para petani untuk membayar pemakaiannya — meskipun produk yang mereka telah patenkan itu berasal dari benih milik para petani (lihat subjudul "Paten" di bawah ini).

Ada sebuah bahaya serius bahwa pertumbuhan kekuatan TNCs bisa merusakkan independensi para petani, memaksa mereka untuk keluar dari tanah mereka dan mengancam pasokan makanan. Teknologi benih yang

---

2 Consumers International, *Corporate Control of the Food Chain: the GM Link*, London: Consumers International, 2003.

dipromosikan oleh TNCs telah menyebabkan hilangnya ribuan varietas tanaman pangan tradisional. Kehilangan keanekaragaman jenis tanaman pangan membuat peternak dan petani semakin sulit untuk memiliki berbagai materi genetik yang mereka butuhkan untuk mengembangkan tanaman yang menghasilkan lebih banyak makanan dan yang bisa bertahan melawan hama dan penyakit. Sekitar tiga perempat dari keragaman genetik yang ditemukan dalam tanaman pangan telah hilang selama abad terakhir ini, demikian kata Organisasi Pangan dan Pertanian PBB.[3]

Hak paten

Sejak manusia mulai mengenal budaya pertanian sekitar 10.000 tahun yang lalu, para petani telah selalu memproduksikan dan secara otomatis menyimpan benih tanaman pangan untuk disemaikan pada musim tanam berikut. Kebiasaan menyimpan benih ini telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan keragaman genetik tanaman pangan dan menghasilkan varietas yang diadaptasikan dengan kondisi-kondisi alam tertentu. Tapi kini, praktik-praktik tradisional para petani ini telah terancam hilang [dan sudah hilang di banyak tempat]. TNCs telah merebut paten-paten benih yang para petani telah gunakan selama berabad-abad sebelumnya. Dunia dari petani miskin telah terjalin dengan bisnis TNCs [yang mempunyai tujuan utama untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya bagi diri mereka sendiri].

Para petani memiliki sesuatu yang menurut keyakinan TNCs dapat dimanfaatkan untuk mendulang keuntungan bagi mereka. Benih yang telah dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya oleh para petani sendiri selama berabad-abad sekarang sedang digunakan oleh perusahaan transnasional untuk membuat produksi lebih lanjut demi profit atau keuntungan.

3 Lihat, Food and Agriculture Organization, 'The state of plant genetic diversity', factsheet, Rome: FAO. <ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/factsheets/fs06_en.pdf, 2006> (accessed 24 January 2008).

Paten adalah sumber utama (*lifeblood*) dari industri agrokimia, yaitu sarana yang dipakai perusahaan agribisnis untuk melakukan kendali terhadap dunia pertanian. TNCs berpengaruh begitu kuat terutama di negara-negara di mana hukum memberikan mereka hak paten atau hak-hak lain atas varietas benih baru yang mereka kembangkan. Dampak-dampak negatif dari kegiatan ini pada jutaan petani miskin sangat besar. Benar bahwa pengambilan paten benih dari para petani dilakukan dalam rangka perbaikan mutunya. Tapi yang menjadi masalah adalah bahwa TNCs berusaha mematenkan varietas benih baru dan kemudian mereka mengklaimnya sebagai sebuah "penemuan" dari mereka, padahal sebenarnya para petani tradisionallah yang telah membantu untuk mengembangkannya.

"Pendapat yang mengatakan bahwa petani tidak akan berinovasi atau menghasilkan pengetahuan [baru di bidang pertanian] kecuali kalau mereka dapat memperoleh keuntungan pribadi adalah pendapat salah," kata seorang environmentalist India Vandana Shiva. Usaha industri mematenkan benih, kata Shiva, akan membuat para petani bergantung pada TNCs untuk mendapatkan benih tanaman pangan, dan bahwa perusahaan akan memutuskan bagi para petani apa yang mereka harus tanam dan apa yang tidak boleh. Dengan itu, kata Shiva lebih lanjut, ada bahaya akan terjadi "sebuah akhir yang tak diharapkan yaitu totalitarianisme perusahaan multinasional di bidang pertanian dan membuat para petani tidak bisa membuat pilihan [kecuali mengikuti kehendak dan perintah mereka".[4]

Usaha paten mengancam mata pencaharian jutaan petani miskin:

> Penciptaan aturan-aturan global yang kuat yang memberikan dan melindungi hak milik intelektual (*Intelectual Property Rights* atau IPRs) atas teknologi-teknologi varietas tanaman dan benih baru (seperti benih-benih *Genetic Modification* atau GM) telah memungkinkan TNCs untuk menaikkan harga dari produk-produk ini. Para petani kecil yang memproduksi pangan untuk pasar komersial sedang terjebak dalam "perasan biaya-harga": perusahaan-

---

4 Shiva, Vandana, 'Seeds of Discontent', *Multinational Monitor* (June 1996), Washington, DC.

perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi untuk input-input pertanian [seperti pupuk, obat hama atau pestisida], tapi pada saat yang sama TNCs membeli hasil-hasil pertanian dari para petani dengan harga yang lebih rendah.[5]

Korporasi-korporasi yang berbisnis di bidang pertanian telah mengambil alih [dari tangan para petani] lebih dari seribu paten dari tanaman padi, jagung, gandum, kedelai dan sorgum, yang merupakan sumber makanan sangat penting bagi orang-orang miskin. "Jumlah paten pada kelima jenis tanaman pangan ini yang meliputi 70% dari pasokan pangan dunia terus meningkat setiap bulan. Dan enam TNCs sekarang memegang kendali sebagian besar dari jumlah ini."[6] Paten memberikan kekuasaan kepada pemegang paten. Mereka bisa membuat para petani menjadi sangat bergantung pada TNCs untuk mendapatkan benih, yang berarti membahayakan independensi mereka dan hampir pasti mereka akan selalu harus membeli varietas yang telah dipatenkan dengan harga tinggi pada perusahaan transnasional.

TNCs berargumentasi bahwa mereka akan mampu untuk berinvestasi dalam jumlah besar untuk penelitian dan pengawinan benih tanaman baru jika mereka memiliki perlindungan untuk mengamankan investasi itu. Tapi persoalannya, paten bagi sebuah perusahaan dapat berarti mengesampingkan orang miskin. Paten-paten pada dasarnya dirancang untuk proses industri. Lebih dari itu, paten pada tanaman pangan terbuka untuk sejumlah keberatan yang serius. Karena paten-paten ini juga meliputi usaha untuk mematenkan suatu bentuk kehidupan, yaitu gen [yaitu unsur kehidupan — *bio* — yang paling dasar]. Gen-gen pada dasarnya bukan merupakan hasil penemuan manusia (*Genes are not inventions*). Karena usaha-usaha industri paten dapat dilihat sebagai upaya perusahaan untuk mematenkan sebuah bentuk kehidupan [yang seharusnya tidak bisa dipatenkan, tidak bisa dimiliki, tidak bisa dikuasai dan dikontrol oleh siapa pun termasuk oleh TNCs].

---

5 ActionAid, *Power.*

6 ActionAid, *Crops and Robbers*, London: ActionAid, 2001, p. 2.

Amerika Serikat adalah negara pertama yang memberikan hak paten pada varietas tanaman pangan. Sebelum tahun 1997, negara-negara lain "menilai sistem paten atas makhluk-makhluk hidup sebagai sebuah bentuk praktik tidak terpuji dari hak kekayaan intelektual atau IPRs".[7] Beberapa paten menciptakan kebingungan. RiceTec [*Rice Technology* = teknologi tanaman padi], sebuah perusahaan yang berbasis di Texas, telah menciptakan sebuah paten, misalnya, pada padi yang harum aromatik yang dibudidayakan di Amerika Serikat dan diberi label 'Basmati'. Padahal dalam kenyataannya, sekitar 250.000 petani di India dan Pakistan secara tradisional telah lama membudidayakan beras atau padi Basmati. Menciptakan sebuah paten seperti ini sama seperti orang-orang Australia menciptakan hak paten atas sampanye [padahal sampanye sudah ada dan sudah dikenal orang sejak lama dan mungkin sudah menjadi barang yang sudah dikenal umum]. Rice Tec juga sedang memasarkan beras yang diberinya label beras 'Jasmine' [*Jasmine Rice*]. Tapi persoalannya, beras Jasmin ini berasal dari Thailand telah dibudidayakan oleh lebih dari lima juta petani miskin di sana. Konsumer-konsumer beras di AS bisa bingung dan berpikir bahwa ini adalah beras produk dari negara-negara berkembang. Sementara dalam kenyataannya mereka membeli produk-produk dalam negeri yang dipatenkan.

Pada tahun 1998 Parlemen Eropa menyetujui Pedoman Hidup Paten yang menyatakan bahwa varietas tumbuhan-tumbuhan dan hewan "tidak boleh dapat dipatenkan", tapi pedoman itu menambahkan bahwa "penemuan-penemuan yang menyangkut tumbuhan atau hewan dapat dipatenkan jika penemuan itu tidak secara teknis terbatas pada tanaman tertentu atau varietas hewan".[8] Undang-undang Parlement Eropa ini mengizinkan sebuah penemuan untuk dipatenkan asalkan aplikasi penemuan tersebut tidak terbatas pada satu tumbuhan atau varietas hewan. Jadi

---

7 Overseas Development Institute, *Patenting Plants: The Implications for Developing Countries*, London: ODI, 1993.

8 Félix, B., *Biotechnology in Europe: Patents and R&D Investments*, Brussels: Eurostat, 2007. <http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l26026.htm> (accessed 24 January 2008).

sebuah tanaman dengan sebuah gen tertentu yang diubah bisa dipatenkan, tetapi jika varietas tanaman baru itu dikembangkan, maka ia tidak lagi dapat dipatenkan. Sebuah LSM yang berbasis di Barcelona, yang bernama *Genetic Resources Action International*, mengatakan bahwa undang-undang tersebut mengandung pengertian bahwa perusahaan dapat mematenkan tanaman dan hewan sejauh tidak mengganggu keanekaragaman.[9] Ia bisa memberikan jaminan bagi industri yang mengontrol paten bagi seluruh rantai pasokan makanan, mulai dari materi genetik dasar, melalui proses yang menggunakan gen dan urutan-urutan gen, sampai dengan produk yang merupakn hasil akhirnya. Karena itu, sejumlah jenis makanan pokok yang sangat penting bisa terancam bahaya menjadi milik pribadi dari sebuah TNC [dan karena itu dikuasai dan dikontrol TNC]. Undang-undang ini tetap berlaku paling kurang hingga tahun 2008.

Pemberian paten atas mobil bagi sebuah pabrik mobil sulit terpikirkan. Tapi paten-paten semacam itu sudah menjadi ancaman yang berbahaya karena bisa terjadi atas tanaman pangan [yang merupakan kebutuhan vital bagi setiap orang]. Sebuah paten atas seluruh tanaman pangan [oleh sebuah TNC], seperti kedelai misalnya, akan berarti bahwa jika petani tidak membayar royalti atas hasil panen [kepada sebuah TNC sebagai pemegang hak paten kedelai], para petani yang menanam kedelai di kebun mereka dianggap ilegal [dan konsekuensinya TNC pemegang hak paten kedelai bisa memperkarakan para petani secara hukum di depan pengadilan]. Akibat selanjutnya adalah bahwa kegiatan turutan seperti pembuatan kue biskuit dari biji kedelai akan mejadi kegiatan ilegal juga.

Paten yang luas pada tanaman karenanya merupakan sebuah ancaman terhadap keragaman tanaman pangan, ancaman bagi para petani dan bagi rantai proses pembuatan makanan selanjutnya. Paten selalu berarti membentuk kontrol pribadi, eksklusif dan monopolistik atas sumber-sumber genetik tanaman pangan, dengan akibat lebih lanjut para petani terlantar, yang pada akhirnya menjadi sebuah ancaman terhadap ketahanan pangan.

9 Emmot, S., 'The directive rises again', *Seedling*, Vol. 14, No. 1 (March 1997), Barcelona: GRAIN.

"Hak-hak" seperti ini [hak-hak paten] sesungguhnya merupakan rampasan terhadap hak-hak para petani — yaitu hak untuk mengembangkan dan saling menukar benih tanaman pangan di antara mereka sendiri, dan pada akhirnya merupakan perampasan hak atas keberlangsungan hidup seperti yang disebutkan sebelumnya. Lebih lanjut, TNCs sering menghentikan penjualan varietas [tanaman pangan] tradisional karena tidak ada kontrol dalam bentuk seperti hak paten dapat diperoleh varietas tanaman pangan yang telah ada mendahului undang-undang hak paten. Hal ini dapat mengakibatkan varietas tradisional tidak digunakan lagi dan menjadi punah.

Kemandirian di bidang pertanian menjadi semakin sulit. Menyelamatkan keanekaragaman genetik pertanian tidak menjamin kemandirian atau pengembangannya, namun kehilangan keragaman ini bisa mengurangi aneka pilihan dan memupuk kebergantungan.

Modifikasi genetik

Modifikasi genetik (*Genetic Modification* atau GM), juga dikenal sebagai rekayasa genetika, lahir dengan misi mau meningkatkan hasil panen dalam jumlah besar — setinggi 500% untuk — tanaman seperti kelapa dan singkong. Melalui benih-benih tanaman pangan yang direkayasa secara genetik, TNCs agrokimia sesungguhnya · mau menguasai kendali atas rantai makanan.

Benih-benih GM sesungguh sangat kontroversial dalam banyak hal. Oleh teknologi tanaman GM, sebuah gen [baru] yang asing dimasukkan ke dalam sebuah tanaman pangan untuk memberikannya sifat-sifat [baru] seperti penambahan mutu vitamin dan toleransi terhadap kekeringan. Gen [baru yang asing itu] dapat diambil dari sebuah jenis tumbuhan yang lain, dari seekor hewan, dari sebuah virus atau dari sebuah bakteri. Dalam perkawinan benih tanaman pangan, pemasukan gen-baru yang asing tersebut merupakan sesuatu yang tidak alamiah atau tidak wajar dan efek [sampingannya terhadap kesehatan manusia yang mengonsumsinya] belum diketahui.

Penerapan teknologi GM juga bisa menjadi lonceng kematian bagi jutaan petani kecil. Industri GM juga sama sekali tidak dirancang dalam rangka memberi makanan kepada orang-orang miskin yang lapar. Untuk sementara teknologi ini memang dapat meningkatkan hasil yang lebih tinggi — meskipun hal ini juga masih harus dibuktikan, tapi ia mengandung masalah yang serius. "Kita merusak dasar-dasar kehidupan. Jika Anda membuat sebuah kekeliruan dengan teknologi GM, maka Anda sesungguhnya merusakkan dasar genetik Anda", demikian diingatkan Egziabhe, ilmuwan Tewolde Ethiopia. "Jika kita bisa pastikan bahwa teknologi GM akan membawa manfaat besar dalam tahun-tahun mendatang, mari kita lihat. Penggunaan teknologi secara tepat itu sangat vital... bahkan jika perlu harus dibutuhkan dua atau tiga generasi."[10]

Masalah khusus untuk para petani kecil adalah bahwa benih-benih tanaman GM bisa menyebar ke tanah mereka, yang mencemari tanaman mereka sendiri dan membuat mereka tidak bertahan. Hal ini akan merusak jutaan mata pencaharian dan bisa mengurangi produksi hasil pangan dan ketahanan pangan. Benih-benih GM akan "mendesak para petani subsisten dan petani berskala kecil — yang biasa membudidayakan beragam jenis makanan — keluar dari tanah mereka".[11]

Koeksistensi keduanya [yaitu benih asli tradisional para petani dan benih GM] adalah tidak mungkin. Jarak yang aman antara tanaman pangan GM dan tanaman pangan non-GM semakin menjadi sebuah ilusi. Angin, yang kemungkinan akan menjadi lebih ganas oleh karena perubahan iklim tak tentu, sanggup meniupkan benih-benih GM sampai menempuh jarak yang jauh dan yang luas. Gandum dari para petani di Dakota Utara (USA), misalnya, yang bermukim hampir 50 mil [sekitar 80 km] dari kanola GM terdekat kanola, mengatakan bahwa kanola merupakan hama di ladang-ladang gandum mereka. Karena gen-gen GM, yang mencemari gandum petani Dakota Utara, dipatenkan, yang berarti

10 Percakapan dengan pengaran, Maret 2001.

11 Food and Water Watch, 'Sowing the seeds of corporate agriculture in Africa', Washington, DC: Food and Water Watch, 2007. <http://www.foodandwaterwatch.org> (accessed 24 January 2008).

bahwa para petani yang menanam tanaman pangan non-GM menghadapi kenyataan bahwa mereka memiliki tanaman pangan yang tidak diinginkan di tanah ladang-ladang mereka dan kalau mereka ingin memanennya maka mereka harus membayar royalti kepada TNC GM. Hal ini telah terjadi atas diri Percy Schmeiser, seorang petani Saskatchewan (Kanada), yang ladang kanolanya terkontaminasi oleh kanola GM Monsanto yang telah ditiup angin ke ladangnya.

Monsanto membawa Schmeiser ke pengadilan dan menuntutnya untuk membayar denda sebesar £182.000 (sekitar Rp2,83 miliar) karena telah menggunakan kanola GM tanpa sebuah lisensi [pembelian izinan]. Posisi Monsanto waktu itu adalah bahwa tidak penting apakah Schmeiser tahu atau tidak tahu bahwa ladang-ladang kanolanya juga mengandung kanola GM. Tapi fokus tuduhannya adalah bahwa fakta menunjukkan kanola GM tumbuh juga di ladang Schmeiser. Schmeiser kalah [dalam perkara di pengadilan]. Tetapi ia kemudian membawa kasus itu ke Mahkamah Agung Kanada yang setuju dengan Schmeiser yang kemudian memutuskan bahwa ia tidak harus membayar kepada perusahaan Monsanto. Kasus ini sesungguhnya mengingatkan kita akan kedatangan bahaya bagi para petani dan keanekaragaman hayati di mana-mana dari dominasi dan agresi pasar perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam rekayasa genetik tanaman pangan.... Banyak petani masih terus mengontaki Schmeiser dengan cerita-cerita tentang ancaman dan intimidasi dari Monsanto.[12]

Pada tahun 2008 masalah terjadi sebaliknya. Schmeiser membawa Monsanto ke pengadilan, dan menuntut perusahaan Monsanto untuk membayar £300 (sekitar Rp4.500.000) di sebuah pengadilan kecil tingkat lokal. Pokok yang diperkarakan, katanya, "adalah jutaan pound kompensasi bagi mereka [para petani] yang telah menyaksikan tanahnya terkontaminasi oleh bahan GM, dan hak-hak para petani organik dan lain-lain untuk menghasilkan pangan yang bebas dari GM". Perusahaan

12 Percy Schmeiser website.<http://www.percyschmeiser.com> (accessed 13 March 2008).

Monsanto menyebut kasus itu 'spesifik dan lokal'.[13] Kasus perkara ini digelarkan pada bulan Maret 2008 yang dimenangkan oleh Schmeiser dan ia mendapat kompensasi yang dituntutnya.[14] Pada bulan Desember 2007, Percy Schmeiser dan istrinya Louise diberi penghargaan *Right Livelihood Award* atas keberanian mereka dalam membela keanekaragaman hayati dan hak-hak petani.

Adopsi tanaman GM yang semakin luas akan menyebabkan penyebaran sistem pertanian monokultur. Lebih lanjut ia akan menyebabkan kerugian terhadap keragaman genetik tanaman pangan. Hal ini bisa memengaruhi lembaga yang bertugas melindungi keanekaragaman genetik tanaman — seperti, misalnya, pusat-pusat Kelompok Konsultasi Penelitian Pertanian Internasional (*Consultative Group on International Agricultural Research*).

Menurut Hans Herren, direktur jenderal dari Pusat Internasional Fisiologi Serangga dan Ekologi di Nairobi:

> Dasar genetik sempit dari tanaman yang dimodifikasi secara genetik adalah melawan mereka. Penerapan tanaman GM akan menyebabkan semakin hilangnya keanekaragaman spesies tanaman yang para ilmuwan perlukan untuk pengembangbiakan varietas tanaman baru... terlalu menyempitkan pendekatan terhadap masalah keamanan pangan sangat berbahaya. Afrika membutuhkan berbagai varietas tanaman yang cocok secara ekologis. Konsep tentang tanaman yang telah diubah secara genetik tidak dibuat atas pertimbangan untuk menyejahterakan para petani. Tanaman pangan GM tidak akan memberi makan kepada orang-orang yang lapar, sebaliknya proyek ini akan membuat orang lapar semakin miskin.[15]

13 Adam, D., 'Canadian farmer forces GM giant back to court', *The Guardian*, 22 January 2008.

14 Lyons, M., 'Schmeiser gets cheque from Monsanto for small-claims case', *The StarPhoenix.com* (Canada), 19 March 2008. <http://www.canada.com/saskatoonstarphoenix/news/story.html?id=563c7d70-7435-4671-b364-9808cf025541&k=89275> (accessed 20 March 2008).

15 Herren, H., speech to the Overseas Development Institute, London, October 1998.

Jenis ancaman baru lain terhadap para petani datang dari apa yang disebut herbisida [*herbicide* atau *weedkiller* = racun kimia pembasmi rumput]. Beberapa tanaman pangan GM sesungguhnya dirancang khusus untuk melawan herbisida. Namun pemakaian herbisida bisa membunuh segala tanaman yang lain, kecuali tanaman pangan GM sendiri, termasuk serangga yang ada manfaatnya, seperti kepik (*ladybirds*), dan juga daun obat-obatan penting dan herbal-herbal lainnya. Jika pemakaian benih-benih GM menyebar luas, maka pemakaian herbisida juga akan semakin banyak dan rumput-rumput liar di ladang-ladang terdekat juga akan menjadi resistan terhadap racun dari tanaman pangan GM. "Gulma super" (*superweed*), misalnya, akan memerlukan dosis herbisida yang lebih tinggi. Tapi penggunaan herbisida yang demikian tidak dengan sendirinya akan diterima oleh perusahaan pangan GM. Percobaan-percobaan terhadap kapas GM di India menunjukkan ada sedikit perbedaan dalam jumlah pestisida yang harus disemprotkan pada GM dan kapas konvensional.

Masalah terbesar yang dihadapi para petani kecil adalah bahwa teknologi GM dikuasai oleh perusahaan. Sepuluh TNCs terkemuka — termasuk Monsanto dari Amerika Serikat dan Novatis dan Syngenta dari Swiss — menguasai sekitar setengah dari pasar benih GM dunia, dan konsolidasinya terus meningkat. Bagi negara-negara berkembang, kontrol pasar benih oleh TNCs tersebut bisa sangat merugikan. Perusahaan-perusahaan agrokimia ini, misalnya, bisa menuntut supaya para petani harus membeli benih GM mereka setiap tahun. Kalau TNCs tetap tidak bersedia melepaskan paten-paten [tanaman pangan GM], maka mereka akan menahan benih dan kontrol teknologi GM tidak dapat beralih kapada para petani. Tapi hingga kini tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka mau melakukan hal itu. Hanya kalau mereka [para petani] memegang kendali atas teknologi GM, maka para petani kecil bisa mengembangkan GM yang akan dapat memerangi kemiskinan dan kelaparan.

Negara-negara Afrika telah secara terus-terang meragukan teknologi GM. Pada pertemuan FAO dari Komisi Sumber Daya Genetik, 24 delegasi dari pemerintah negara-negara Afrika mengeluarkan pernyataan keras yang antara lain mengatakan bahwa sesungguhnya teknologi GM

"akan menghancurkan keanekaragaman [tanaman pangan], kearifan ilmu pengetahuan lokal dan sistem pertanian berkelanjutan yang para petani kita telah kembangkan selama ribuan tahun, dan dengan demikian melemahkan kemampuan kita untuk memberi makan bagi diri kita sendiri".[16]

Oleh karena kontrol korporasi atas rantai makanan, maka teknologi GM cenderung membuat situasi lebih buruk ketimbang meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk bisa mendapatkan makanan yang cukup bagi diri mereka sendiri. Teknologi GM karenanya menjadi ancaman yang dapat menghancurkan mata pencaharian para petani dan merupakan penyelewengan dari program untuk mengurangi hingga setengah dari kelaparan dunia sebelum tahun 2015. Solusi terhadap masalah kelaparan dunia tidak bisa dicapai dengan teknologi pangan GM, tetapi dengan sebuah pendekatan yang berbeda yang lebih memampukan para petani untuk memiliki solusi yang mereka kuasai sendiri terhadap masalah agronomi mereka.

Terminator

Sebuah isu modifikasi genetik tambahan mengemuka ketika sebuah perusahaan AS, Delta & Pine Land, perusahaan benih kapas terbesar di dunia, dan Departemen Pertanian Amerika Serikat (*US Department of Agriculture* atau USDA) mendapat sebuah paten untuk sebuah teknik khusus di mana bibit kapas hanya bisa ditanam satu kali. Teknologi ini secara genetik menonaktifkan kemampuan benih sehingga ia tidak berkecambah jika benih ditanam lagi. Teknologi ini mengakhiri [*to terminate, terminator*] proses reproduksi tanaman sehingga benih yang dipanen akan steril (mandul) jika petani mencoba menanamnya kembali [Karena kalau tidak, perusahaan tidak bisa jual benih lagi pada musim berikut]. Hal ini membawa revolusi paling besar yang sebelumnya belum pernah melanda sistem pertanian umat manusia. Ia mengancam praktik para petani untuk menyimpan benih sendiri dari satu musim untuk digunakan pada musim berikutnya. Para petani akan kalah berhadapan dengan teknologi benih

16 Statement to the FAO Commission on Genetic Resources, June 1999.

terminator ini yang dikenal dengan nama "benih bunuh diri" (*suicide seed*), sedangkan TNCs akan terus memperoleh keuntungan karena mereka tidak akan berhenti menjual benih kepada para petani.

Terminator juga memiliki implikasi yang lebih luas. "Para ahli tanaman pangan genetik yang telah mempelajari paten ini mengatakan kepada kami bahwa serbuk sari dari tanaman pangan yang membawa sifat terminator akan menginfeksi ladang-ladang petani, baik yang menolak tanaman ini maupun yang tidak sanggup menguasai teknologinya," demikian kata Camila Montecinos dari sebuah organisasi yang berbasis di Chile, *Centro de educación y Tecnologia* (CET), yang bekerja dengan masyarakat petani.[17]

Tak lama kemudian Perusahaan Monsanto melamar untuk mendapatkan paten terminator benih tanaman pangan [yang beroperasi] di lebih dari 70 negara. Tapi setelah mendapat protes dari seluruh dunia yang melawan teknologi ini, Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati merekomendasikan, pada tahun 2000, *moratorium* [larangan] terhadap penjualan benih-benih tanaman pangan terminator. Moratorium ini ditegaskan kembali pada tahun 2006. India dan Brasil telah mengeluarkan undang-undang nasional untuk melarang teknologi ini.

Akan tetapi dalam kenyataannya, para peneliti "tetap melanjutkan pengembangan teknologi ini dan memenangkan paten-paten atas terminator karena sterilitas benih tanaman pangan sangat menguntungkan industri mereka dan tidak mau meninggalkannya begitu saja," demikian kata Lucy Sharratt dari Jaringan Aksi Bioteknologi di Kanada.[18] Karena itu, ancaman terhadap para petani yang disebabkan oleh benih-benih tanaman pangan terminator masih berjalan terus di berbagai tempat di dunia [Tahun 2009 saya membeli benih mentimun di sebuah toko keil di Maumere, Flores untuk di tanaman Buahnya lebat. Saya membiarkan satu

---

17 Lihat, 'Terminating food security?'*International Agricultural Development* (May/June 1998), pp. 7–9.

18 Lucy Sharratt (Canadian Biotechnology Action Network), 'Bill to ban Terminator introduced in Canada', Action Group on Erosion, Technology and Concentration (ETC), Canada, 31 May 2007. <http://www.banterminator.org> (accessed 23 November 2007).

buah sampai matang untuk bibit. Musim berikut saya tanam tapi tak satu biji pun yang tumbuh. Setelah menyampaikan pengaduan kepada toko penjual benih, saya diberi tahu bahwa benih mentimun itu hanya bisa ditanam satu kali dan saya harus beli lagi di toko kalau tanam mentimun lagi. Waktu itu saya tak bisa mengerti mengapa].

Biopiracy

"Biopiracy" berasal dari kata *bio* yang artinya hidup dan *piracy* artinya pembajakan. Sehingga secara harafiah, biropiracy artinya pembajakan kehidupan. Secara teknis, biopiracy adalah tindakan pengambilan keanekaragaman hayati, seperti tanaman dan hewan, dan bagian-bagian tertentu dari tanaman dan hewan, atau ilmu pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, "tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari masyarakat yang memiliki keanekaragaman hayati atau ilmu pengetahuan tradisional itu sebelumnya".[19]

TNCs secara rutin mendulang keuntungan dari *biopiracy*, sementara komunitas masyarakat lokal menerima sedikit atau tidak terima apa-apa. *Biopiracy* dapat terjadi lewat kegiatan perusahaan-perusahaan (kadang-kadang melalui departemen penelitian akademik yang disponsor TNCs) yang mengambil spesies tanaman dari negara-negara berkembang tanpa izin atau kompensasi. Universitas Wisconsin (AS), misalnya, menerima dua paten AS untuk sebuah jenis protein yang berasal dari buah berry dari sebuah tanaman milik para petani di Gabon (Afrika) yang mereka sebut dengan nama *Pentadiplandra brazzeana*. Buah berry ini dikumpulkan oleh peneliti Universitas Wisconsin yang waktu itu sedang bekerja di Gabon. Peneliti ini menemukan bahwa protein manis dapat diperoleh dari buah berry ini. Lalu Universitas Wisconsin menyebut protein ini dengan nama "brazzein", dan memperkirakan bahwa protein brazzein ini 2.000 kali lebih manis dari gula. Sejak saat itu Universitas Wisconsin

---

19 'The benefits of biodiversity: 100+ examples of the contribution ndigenous and rural communities in the South to the development of the North', RAFI Occasional Paper Series, Vol. 1, No. 1 (March 1994), Ottawa: RAFI.

memiliki hak eksklusif atas brazzein dan sedang berusaha memiliki lisensi bagi TNCs yang merupakan pemain-pemain utama dalam perdagangan bahan pemanis senilai US$100 miliar (sekitar Rp1.000 triliun) per tahun. Sedangkan masyarakat miskin di Gabon yang merupakan pemilik buah berry Pentadiplandra brazzeana tidak mendapat kompensasi sama sekali atau pembagian keuntungan dari teknologi pengembangan bahan pemanis baru ini.

Di bawah nama sebelumnya *Rural Advancement Foundation International* (RAFI), sebuah Kelompok Aksi atas Bahaya Erosi, Teknologi, dan Konsentrasi (*Erosion, Technology and Concentration* atau ETC) menyusun sebuah daftar pada akhir tahun1990-an yang berisi contoh-contoh sumber daya genetik dan kearifan pengetahuan lokal di negara-negara Selatan telah memberikan atau sedang memberikan kontribusi terhadap pertanian, pengolahan makanan atau pengembangan farmasi di di negara-negara industri Utara. Daftar itu berisi lebih dari 100 contoh kontribusi negara-negara berkembang untuk makanan dan obat-obatan yang di pabrik dan dipegang hak patennya oleh negara-negara Barat. Obat-obat itu misalnya antara lain aspirin sintetis Bayer, obat yang paling banyak digunakan di dunia, yang berasal dari tanaman obat tradisional Arab.

Bahan gandum dari Pusat Perbaikan Jagung dan Gandum Internasional yang berbasis di Meksiko diperkirakan menyumbangkan US$3,1 miliar (sekitar Rp31 miliar) per tahun dengan total nilai lahan pertanian tanaman gandum AS sekitar 34%. Pau D'Arc, sebuah tanaman obat dari Amerika Latin yang digunakan untuk memerangi malaria dan kanker, memiliki nilai pasar di negara-negarai industru Utara sebesar US$200 juta (sekiar Rp2 triliun) per tahun.[20]

Sebuah laporan RAFI yang disusun untuk Program Pembangunan PBB menemukan bahwa kontribusi sumber daya genetik tanaman dan kearifan ilmu pengetahuan dari masyarakat petani di negara-negara Selatan [atau negara miskin yang sedang berkembang] bernilai sekitar US$4,5 miliar (sekitar Rp45 triliun) per tahun ke negara-negara industri

20 *Ibid.*

Utara [atau negara-negara industri maju]. Namun negara-negara miskin di Selatan tidak menerima apa-apa sebagai imbalan dari kontribusi besar ini. Negara-negara Selatan telah secara efektif dibohongi sebesar jumlah angka-angka di atas, kata RAFI. Ini baru biopiracy (pembajakan sumber-sumber hidup) di bidang pertanian dan belum ditambah lagi dengan harga bahan-bahan pertanian di negara-negara Utara.[21]

"Apa yang sedang di bajakan bukan merupakan satu penemuan dari satu orang individu atau satu perusahaan, tetapi kreativitas kolektif dan penemuan jutaan orang selama ribuan tahun, sebuah kreativitas... yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita di masa depan," kata Vandana Shiva.[22]

Masalah *biopiracy* masih berlangsung terus. Sebuah laporan tahun 2006 menemukan "sebuah litani kasus akuisisi keanekaragaman hayati yang mencurigakan. Ini bukan masalah tentang akuisisi yang mencurigakan. Tapi masalah kasus biopiracy, atau, untuk menggunakan istilah yang lebih kuno, "pencurian". Ini [kekayaan alam yang tadi dibajak dan dikuasai TNCs negara-negara Utara] seharusnya merupakan sesuatu yang gratis bagi semua orang di luar sana."[23]

Sebagian besar negara-negara Afrika telah turut dipengaruhi. Di Gurun Kalahari di Afrika Selatan, misalnya, tanaman yang disebut *Hoodia* dikembangkan dan dipatenkan oleh Dewan Penelitian Ilmiah dan Industri Afrika Selatan yang digunakan sebagai penekan nafsu makan. Tindakan ini jelas merupakan kapitalisasi kearifan ilmu pengetahuan tradisional [yang dimiliki secara umum] suku San di Gurun Kalahari. Hak-hak eksklusif

---

21 Rural Advancement Foundation International/United Nations Development Programme, 'Conserving indigenous knowledge: integrating two sistems of innovation', RAFI/UNDP report, quoted in the *Financial Times*, 28 October 1994.

22 Shiva, V., 'Globalism, biodiversity and the Third World', in E. Goldsmith, M. Khor, H. Norberg-Hodge and V. Shiva, *The Future of Progress: Reflection on Environment and Development*, Dartington and Berkeley, CA: Green Books/ISEC, 1995.

23 McGown, J., *Third World Resurgence*, No. 186 (February 2006), Malaysia. See also McGown, J., 'Out of Africa: mysteries of access and benefit sharing', Washington, DC: Edmonds Institute, African Centre for Biosafety, January 2006. <http://www.edmonds-institute.org/ outofafrica.pdf> (accessed 23 November 2007).

atas tanaman ini telah dijual ke sebuah perusahaan Inggris. Hanya setelah mendapat kecaman dari masyarakat seluruh dunia, sejumlah persentase royalti — "sebuah prosentasi yang sangat kecil — diberikan kepada Suku San".[24]

Legislasi nasional ketat diperlukan untuk mencegah koleksi plasma nutfah yang tidak sah, terutama oleh TNCs. Banyak negara telah memberlakukan larangan tersebut, termasuk Ethiopia, Iran, Irak, dan Cina.

Agrofuels (biofuels)

Pada akhir tahun 2007 kenyataan mulai menunjukkan bahwa penanaman tanaman pangan untuk digunakan sebagai bahan bakar — makanan untuk mobil — dirancang untuk peningkatan yang dramatis. "Biodiesel dan etanol menempati 7% dari permintaan dunia untuk bahan bakar cair pada tahun 2030, dengan konsumsi meningkat empat kali lipat menjadi 36 juta metrik ton per tahun dari tingkat saat ini sekitar 8 juta ton", demikian dilaporkan FAO pada bulan November 2007.[25]

Untuk dunia orang miskin, hal ini bisa menjadi bencana, dan hingga April 2008 sebuah kajian ulang secara besar-besaran sedang berlangsung. Harga pangan dunia yang terus naik setidaknya sebagiannya disebabkan oleh pasokan bahan makanan yang semakin ketat karena sebagian lahan pertanian telah dialihkan untuk kepentingan agrofuel (lihat bahan di bawah ini). Tetapi tanaman pangan masih tetap terancam. TNCs membayangkan bahwa tanaman-tanaman untuk bahan bakar — yang dapat meliputi jagung dan gandum serta gula dan kelapa sawit — dapat ditanam di lahan-lahan yang pada saat ini sedang digunakan untuk tanaman pangan untuk makanan manusia. Tanaman untuk bahan bakar juga bisa ditanam di kawasan-kawasan hutan dan memberikan kontribusi terhadap degradasi lingkungan hidup, termasuk memperburuk masalah pemanasan global saat ini. Program biofuel bisa mengakibatkan "konsentrasi kepemilikan yang

24 *Ibid.*

25 Food and Agriculture Organization, 'Bioenergy growth must be carefully managed', Rome: FAO, 13 November 2007.

dapat membuat masyarakat petani miskin di dunia terdesak keluar dari tanah-tanah mereka dan menghempaskan mereka ke jurang kemiskinan yang lebih dalam," kata sebuah laporan PBB.[26]

Dalam apa yang disebut memburu emas agrofuel (*goldrushagrofuel*), TNCs telah berpindah ke aktivitas di sebuah jalan besar. Gelombang investasi di bidang agrofuel (juga disebut biofuel) merestrukturisasi agribisnis itu sendiri. Pemain-pemain baru yang kuat sedang berkumpul di sektor ini. Perusahaan-perusahaan kosmetik menjual biodiesel. Setelah mendapat keuntungan jutaan [US$] dari harga minyak yang lebih tinggi, perusahaan-perusahaan minyak raksasa sekarang sedang mencaplok pembelian perkebunan-perkebunan. Para spekulan Wall Street mengayunkan penawaran dengan baron-baron feudal gula. Semua uang yang beredar di seluruh dunia sedang melakukan reorganisasi dan mengintensifkan struktur-struktur transnasional, yang menghubungkan kelas pemilik tanah paling brutal di negara-negara Selatan dengan TNCs yang sangat kuat dari negara-negara Utara.[27]

Perusahaan-perusahaan komoditi pertanian seperti Cargill dan Archer Daniels Midland menginvestasikan dana besar, bersama dengan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam perdagangan gula, minyak sawit, dan, juga kehutanan. Perusahaan-perusahaan minyak seperti British Petroleum, Mitsui, Petrobras dari Brasil dan Petro Cina sedang membuat investasi besar. Richard Branson, pemilik Virgin Group dan sekarang Virgin Fuels, "memiliki portofolio investasi agrofuel yang semakin berkembang pesat".[28]

Risiko-risiko terhadap para investor sedang dilindungi oleh pemerintah dan lembaga-lembaga donor internasional seperti Bank Dunia dan bank-bank pembangunan regional. Uang yang mereka berikan melalui subsidi langsung, keringanan pajak, rute-rute transportasi yang dibangun secara publik, rencana-rencana perdagangan karbon dan pinjaman lu-

26 Lihat, Vidal, J., 'Global rush to energy crops threatens to bring food shortages and increase poverty, says UN', *The Guardian*, 9 May 2007.

27 Genetic Resources Action International (GRAIN), 'Corporate power — agrofuels and the expansion of agribusiness', *Seedling* (July 2007), Barcelona.

28 *Ibid.*

nak membuat agrofuel secara ekonomis bertahan. Pemerintah negara-negara OECD (*Organization of Economic Cooperation and Development*) memberikan dana insentif dan subsidi [kepada para investor] yang besarnya diperkirakan mencapai US$15 miliar (sekitar Rp150 triliun) per tahun.[29]

Hal ini seharusnya menjadi kekhawatiran khusus. TNCs sekarang mengalirkan uang ke benua Afrika untuk kepentingan produksi tanaman agrofuel, sebuah perburuan yang mengingatkan orang akan ekspansi awal kolonial Eropa dulu. Perusahaan Petrobras, misalnya, telah membuat penawaran untuk impor etanol dengan berbagai negara-negara Afrika mulai dari Senegal ke Nigeria dan Mozambik ke Angola. Pemerintah Negara Tanzania telah melakukan negosiasi dengan 11 TNCs untuk investasi di bidang usaha produksi tanaman agrofuel di negeri ini.

Ada beberapa proyek biofuel berskala kecil yang dipioneer oleh LSM di Afrika, beberapa di antaranya menghasilkan minyak baik untuk penggunaan lokal maupun pembuatan sabun. Perkembangan usaha agrofuel yang amat pesat saat ini hampir tidak ada hubungannya dengan usaha pertanian berskala kecil.

Agrofuel akan memenuhi kebutuhan engergi dari mobil-mobil orang kaya dengan mengorbankan kehidupan orang miskin. Masyarakat miskin pedesaan merasa tidak masuk akal bahwa hutan dan sistem pertanian mereka yang berkelanjutan dan bisa memasok pangan yang aman harus diganti tanaman-tanaman industri yang dimiliki perusahaan asing. "Privatisasi tanah yang merupakan sumber kekayaan Afrika akan merusak setiap kesempatan yang negara-negara Afrika miliki untuk menentukan masa depan mereka sendiri."[30]

Kritik terhadap pertumbuhan industri agrofuel telah datang dari Pelapor Khusus PBB tentang hak atas pangan, Jean Ziegler. Dalam

29 Action Group on Erosion, Technology and Concentration, 'Taxpayers are unknowingly funding this threat to the poor. Peak Soil + Peak Oil = Peak Spoils', ETC, Canada, December 2007. <http://www.etcgroup.org/en/materials/publications.html?pub_id=668> (accessed 20 December 2007).

30 *Ibid.*

laporan sementara yang dibuatnya untuk Majelis Umum PBB pada bulan Oktober 2007, Ziegler merekomendasikan moratorium lima tahun terhadap produksi biofuel. Dia mengingatkan bahwa usaha perburuan untuk mengubah tanaman pangan menjadi bahan bakar untuk mobil, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dampaknya pada masalah kelaparan global, akan menjadi resep yang baik untuk mengundang bencana. Dia mengidentifikasi beberapa dampak negatif yang potensial: bisa meningkatnya harga pangan, meningkatnya persaingan dalam penguasaan tanah dan hutan, penggusuran masyarakat setempat secara paksa, dampak terhadap lapangan kerja dan kondisi kerja, dan kenaikan harga dan kelangkaan air.[31]

Namun di beberapa tempat sudah ada tanda-tanda bahwa orang-orang yang terkena dampak industri agrofuel mulai melawan. Di Afrika Selatan, masyarakat sipil telah menolak rencana pemerintah untuk menggunakan tanah suku dan tanah yang dimiliki secara komunal di Cape Timur untuk industri agrofuel. Di Uganda, kerusuhan masyarakat sipil memaksa pemerintah untuk mencabut kembali izin yang telah diberikan kepada perusahaan transnasional untuk mengeksploitasi hutan Mabira untuk menanam tebu bagi perkebunan agrofuel.[32] Perlawanan ini dapat diperkirakan akan bertumbuh terus.

Royal Society yang berbasis di Inggris melaporkan masalah peralihan ke biofuel di awal tahun 2008, sambil memperingatkan bahwa hal itu berisiko gagal mengurangi emisi gas rumah kaca dari transportasi secara signifikan, dan bisa sangat merusakkan lingkungan hidup.[33]

Pada bulan April dan Mei 2008, kenaikan harga pangan disoroti komunitas masyarakat dunia sebagai akibat dari industri biofuel dan perluasan pemanfaatan lahan bagi tanaman biofuel. Karena itu kebutuhan

---

31 Institute of Science in Society (ISIS), 'UN "Right to Food" Rapporteur urges 5-year moratorium on biofuels', press release, 8 November 2007.

32 GRAIN, 'Corporate power'.

33 FWispace, 'Biofuels could harm environment, warns Royal Society', 14 January 2008. <http://www.fwi.co.uk/Articles/2008/01/14/109006/biofuels-could-harm-environment-warns-royal-society.html> (accessed 17 January 2008).

untuk mengkaji kembali proyek biofuel secara substansial menjadi jelas. Akan tetapi TNCs tampaknya akan tetap cenderung untuk terus memburu biofuel untuk melindungi investasi mereka. Namu mesti disadari, tanpa penerimaan masyarakat publik, biofuel memiliki masa depan yang terbatas. Mereka, misalnya harus dibatasi untuk hanya memanfaatkan tanah limbah [*waste land*] yang tidak bisa dipakai untuk membudidayakan tanaman pangan.

Agrofuel adalah usaha bisnis TNCs yang berlangkah terlalu jauh, suatu proyek yang memperlihatkan mereka "merah di gigi dan kuku" (*read in tooth and claw*) dalam memburu keuntungan dan tidak peduli apa pun akibatnya bagi masyarakat miskin. Kerusakan lingkungan sudah disebabkan oleh antara lain eskalasi produksi minyak sawit (lihat Bab 3).

Pestisida

Sejak tahun 1997 sektor agrokimia telah menyaksikan sejumlah penggabungan perusahaan, yang menyebabkan sejumlah perusahaan besar semakin kuat dan berkuasa. Penjualan pestisida global pada tahun 2006 adalah US$30.4 millist (sekitar Rp304 triliun), di mana enam TNCs besar (Syngenta, Bayer, Monsanto, BASF, Dow, DuPont) menguasai 85% dari penjualannya.[34]

Pestisida adalah racun yang sulit untuk digunakan dengan aman di negara-negara berkembang. Label pada kaleng kerap kali tidak dipahami. Sabun dan air kadang tidak tersedia untuk mencuci bahan kimia dari tangan atau badan setelah tumpahan yang tak sengaja terjadi, dan pakaian pelindung mungkin terlalu mahal untuk dibeli atau terlalu panas untuk dipakai. Pestisida juga bisa merusakkan lingkungan bila ia masuk ke dalam air sungai dan waduk, yang selanjutnya dapat mengontaminasi air minum dan stok ikan. Pestisida digunakan oleh oleh masyarakat petani miskin dan sering menyebabkan masalah kesehatan dan bahkan kematian.

Insektisida yang berfungsi menangkal hama, fungisida mengatasi penyakit dan herbisida untuk memerangi rumput liar merupakan tiga

34 PAN Europe, correspondence with author, December 2007.

produk yang menguntungkan industri kimia. Oleh karena subsidi kepada para petani di negara-negara Barat sudah berkurang, maka tak heran kalau penjualan pestisida di Barat kurang laku. Pabrik-pabrik pestisida telah semakin melirik negara-negara berkembang sebagai tempat pelemparan produk-produk mereka.

Iklan-iklan besar oleh perusahaan-perusahaan kimia telah mengubah negara-negara berkembang menjadi pasar-pasar penjualan dan sekaligus tempat pembuangan pestisida. Sebagian pestisida diekspor oleh TNCs yang berbasis di negara-negara Barat, sebagian yang lain diproduksi di negara-negara berkembang oleh anak perusahaan TNCs. Di negara-negara berkembang, sebagian besar pestisida dipakai pada tanaman-tanaman pangan yang dikembangkan untuk kepentingan ekspor.

Pestisida-pestisida yang sangat berbahaya, termasuk misalnya DDT [*Dichloro Diphenyl Trichloroethane*], *aldrin* dan *paraquat*, sudah dilarang atau sangat dibatasi penggunaannya di negara-negara Barat. Tetapi beberapa pestisida berbahaya ini masih diekspor ke negara-negara berkembang oleh TNCs. "Export pestisida berbahaya ke negara-negara miskin yang pemakaiannya sudah dilarang di Eropa merupakan salah satu contoh skandal ekonomi global".[35] Walaupun perusahaan Shell sudah menghentikan produksi pestisida *dieldrin*,yang sudah dilarang secara luas, pestisida ini tetap mempunyai stoknya yang besar di Afrika (lihat bahan di bawah ini).

Di negara-negara berkembang, kekurangan informasi tentang pestisida-pestisida yang sudah dilarang dan regulasi yang lemah dan ditambah lagi dengan buta huruf bahasa asing dapat mengubah pestisida berbahaya ini menjadi zat mematikan yang meracuni masyarakat, tanah dan air.

Pisang

Untuk membasmi serangga, penyakit jamur dan rumput-rumput liar, perusahaan-perusahaan perkebunan pisang memakai pestisida dalam

35 Weir, D. and M. Schapiro, *The Circle of Poison*, San Francisco: Institute for Food and Development Policy, 1981, p. 3.

jum-lah besar. Lima perusahaan — Dole, Del Monte, Chiquita, Fyffes dan Noboa — memproduksikan sebagian besar pisang untuk kebutuhan dunia di perkebunan-perkebunan besar.

"Kebanyakan pemilik perkebunan pisang menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli obat-obat kimia pertanian daripada untuk menggaji para tenaga buruh mereka."[36] Bahan kimia yang digunakan di perkebunan pisang mencakup setidaknya empat macam yang diklasifikasikan sangat berbahaya oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Bahan-bahan kimia ini disemprotkan di udara dan dilakukan secara manual dengan tangan. Sebagian besar dari pestisida yang disemprotkan pada tanaman pangan dengan menggunakan pesawat terbang tidak jatuh langsung mengenai tanaman. Tapi pestisida ini bisa jatuh di tanah dan di saluran air — yang memberi dampak pada tenaga buruh yang bekerja di perkebunan, di dalam dan di luar rumah mereka yang dekat dengan perkebunan. Padahal menurut undang-undang di beberapa negara, para pekerja tidak boleh berada di ladang pada saat penyemprotan terjadi, tetapi hukum ini sering dilanggar. Di negara-negara lain, bahkan tidak ada aturan sama sekali.

Pencemaran air juga terjadi. "Produksi pisang yang intensif mengharuskan penggunaan air dalam jumlah besar dan karena itu bisa menimbulkan ancaman bagi mereka yang berada di hilir yang memanfaatkan air yang terpolusi pestisida untuk minum, masak dan cuci pakaian."[37]

Dampak pestisida terhadap kesehatan merupakan masalah yang sangat serius. Masalah ini meliputi: depresi, gangguan pernapasan, kerusakan pada mata, kanker, kemandulan dan infeksi kulit. Wanita bisa keguguran atau melahirkan anak dengan cacat sejak lahir. Para tenaga kerja jarang diberi alat pelindung atau pelatihan yang memadai. Mereka, yang bekerja baik di perkebunan maupun di rumah bagian pengepakan pisang, melakukan pekerjaan yang melelahkan dan berulang-ulang dalam kondisi panas dan lembap. Di perkebunan hampir pasti tidak ada staf

---

36 Banana Link (UK), 'Pesticide use'. <http://www.bananalink.org.uk/index.php?option=com_content&task =view&id=148&Itemid=90> (accessed 24 January 2008).

37 *Ibid.*

medis dan dokter sering digunakan oleh perusahaan. Dokter kadang dipekerjakan di perusahaan-perusahaan dan karena itu mereka tidak bersedia mengidentifikasi paparan bahan kimia atau cedera-cedera karena bekerja pada industri perkebunan pisang.[38]

Puluhan ribu pekerja pisang di Amerika Latin telah berusaha menuntut ganti rugi melalui perkara di pengadilan. Perusahaan Dole, Del Monte dan Chiquita, dan perusahaan kimia Dow, Shell, dan Occidental telah menghadapi tuntutan hukum karena masalah efek berbahaya dari Nemagon kimia yang sangat beracun (DBCP) seperti cacat lahir, kerusakan hati dan ginjal, dan dugaan kemandulan pada pekerja pria. Pada bulan November 2007 para petani ladang di Nikaragua memenangkan US$3,2 juta (sekitar Rp32 miliar) sebagai kompensasi dari perusahaan Dole. Para pekerja mengatakan bahwa mereka telah menjadi mandul karena pemakaian pestisida DBCP yang yang digunakan di perkebunan pisan perusahaan Dole.[39]

Tuntutan-tuntutan perkara hukum lainnya masih sedang ditunda di mana ribuan pekerja-pekerja di [perkebunan pisang TNCs] di Costa Rica, Honduras, Guatemala dan Panama menyatakan bahwa mereka juga telah terluka [kena dampak dari] oleh menggunakan DBCP di perkebunan.

Beras

Penggunaan pestisida saat ini semakin dipertanyakan. TNCs yang berbisnis bahan kimia telah membujuk para petani di seluruh dunia untuk membeli pestisida, tetapi efeknya telah menyebabkan kekhawatiran serius. Di Asia, di mana industri kimia telah membuat terobosan yang jauh ke dalam sektor beras, sejumlah besar bahan kimia telah menghancurkan musuh alami hama. Para petani padi di Asia mulai mempertanyakan apakah mereka membutuhkan produk-produk ini atau seharusnya tidak perlu.

Ada bukti yang cukup, yang ditambah dengan pertumbuhan kesadaran di kalangan petani padi di Asia, bahwa hasil dapat dipertahankan

38 *Ibid.*

39 'Jury holds Dole liable for punitive damages', *Los Angeles Times*, 8 November 2007.

medis dan dokter sering digunakan oleh perusahaan. Dokter kadang dipekerjakan di perusahaan-perusahaan dan karena itu mereka tidak bersedia mengidentifikasi paparan bahan kimia atau cedera-cedera karena bekerja *pada industri perkebunan pisang.*[38]

Puluhan ribu pekerja pisang di Amerika Latin telah berusaha menuntut ganti rugi melalui perkara di pengadilan. Perusahaan Dole, Del Monte dan Chiquita, dan perusahaan kimia Dow, Shell, dan Occidental telah menghadapi tuntutan hukum karena masalah efek berbahaya dari Nemagon kimia yang sangat beracun (DBCP) seperti cacat lahir, kerusakan hati dan ginjal, dan dugaan kemandulan pada pekerja pria. Pada bulan November 2007 para petani ladang di Nikaragua memenangkan US$3,2 juta (sekitar Rp32 miliar) sebagai kompensasi dari perusahaan Dole. Para pekerja mengatakan bahwa mereka telah menjadi mandul karena pemakaian pestisida DBCP yang yang digunakan di perkebunan pisan perusahaan Dole.[39]

Tuntutan-tuntutan perkara hukum lainnya masih sedang ditunda di mana ribuan pekerja-pekerja di [perkebunan pisang TNCs] di Costa Rica, Honduras, Guatemala dan Panama menyatakan bahwa mereka juga telah terluka [kena dampak dari] oleh menggunakan DBCP di perkebunan.

Beras

Penggunaan pestisida saat ini semakin dipertanyakan. TNCs yang berbisnis bahan kimia telah membujuk para petani di seluruh dunia untuk membeli pestisida, tetapi efeknya telah menyebabkan kekhawatiran serius. Di Asia, di mana industri kimia telah membuat terobosan yang jauh ke dalam sektor beras, sejumlah besar bahan kimia telah menghancurkan musuh alami hama. Para petani padi di Asia mulai mempertanyakan apakah mereka membutuhkan produk-produk ini atau seharusnya tidak perlu.

Ada bukti yang cukup, yang ditambah dengan pertumbuhan kesadaran di kalangan petani padi di Asia, bahwa hasil dapat dipertahankan

---

38 *Ibid.*

39 'Jury holds Dole liable for punitive damages', *Los Angeles Times*, 8 November 2007.

dan bahkan ditingkatkan dengan kurang menggunakan pestisida. Seperti kebanyakan tanaman pangan lainnya, padi menarik serangga yang merusakkannya. Untuk mengendalikan hama, para petani telah dibujuk untuk menggunakan kaleng kimia yang beracun [pestisida]. "Selama lebih dari 40 tahun, petani-petani di Asia telah bergantung pada pestisida kimia, seakan-akan mereka adalah obat-obatan," kata Dr. Kong Luen Heong dari Lembaga Penelitian Padi Internasional (*International Rice Research Institute* atau IRRI).[40]

Menurut Dr. Paul Teng dari IRRI, para petani yang terjebak propaganda dari TNCs tentang pestisida, dan melihat insektisida sebagai obat pembunuh serangga. Dibutuhkan upaya untuk menyapih mereka dari cara berpikir ini. Perusahaan-perusahaan biasanya sangat terorganisir baik dan memiliki uang lebih banyak daripada pemerintah untuk menyebarluaskan propaganda mereka [ke mana dan kepada siapa saja mereka mau].[41]

Dengan membagikan secara gratis baju kaus (T-shirt) dan topi perusahaan, perusahaan-perusahaan kimia telah berusaha menanamkan semacam loyalitas di kalangan petani akan kebutuhan pestisida yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Iklan-iklan radio yang banyak dan baliho-baliho di pinggir-pinggir jalan besar telah memengaruhi emosi, terutama takut akan kehilangan, untuk memperkuat pesan-pesan propaganda yang perusahaan inginkan para petani untuk percaya. "Banyak periklanan perusahaan sangat menakutkan," kata Heong. Tapi perubahan dramatis telah mulai terjadi. Meskipun iklan-iklan sangat banyak, para petani telah mulai menurunkan pengurangan pemakaian pestisida, antara lain karena pengurangan penggunaan pestisida dapat memberi mereka penghasilan panen yang lebih tinggi.

Program Antarnegara dari sembilan negara FAO untuk pengelolaan hama terpadu (PHT atau *integrate pest management* atau IPM) di Asia telah mendorong para petani padi di 8.000 desa untuk mengurangi penggunaan insektisida secara drastis. Secara total, penurunan 75% telah dicapai

40 Percakapangan dengan pengaran, Februari, 1994.
41 *Ibid.*

di desa-desa ini dan hasil panen padi mereka telah meningkat rata-rata 10%.[42]

Meningkatnya kesadaran tentang cara alami pengendalian hama memberikan para petani berskala kecil keuntungan yang lebih tinggi dengan mengorbankan penjualan TNCs. Karena protest para petani, perusahaan-perusahaan kimia juga sedang menghadapi tindakan penertiban oleh sejumlah pemerintah negara-negara Asia yang kemungkinan akan mengurangi penjualan mereka.

Tanaman pangan non-tradisional

Ancaman baru terhadap kesehatan manusia datang dari sejumlah besar pestisida yang sedang dipakai untuk tanaman ekspor non-tradisional, seperti buah-buahan, sayuran, dan bunga. Penggunaan bahan kimia yang sangat beracun kini menyebabkan masalah kesehatan yang serius di sejumlah negara Amerika Latin, terutama bagi perempuan yang berbisnis dalam produksi bunga. Mareka mengalami tingkat keguguran kandungan yang tinggi, sakit kepala yang berkepanjangan dan pusing. Selain itu, masalah ekonomi juga bermunculan. Para produsen bisa kehilangan nilai seluruh tanaman, dan juga akan menghadapi tuntutan hukum yang keras, jika residu-residu pestisida dalam bahan makanan yang dijual melanggar standar-standar negara pengimpor.

Pekerja yang menderita masalah kesehatan karena dampak pemakaian pestisida diharapkan untuk mengikuti contoh dari para pekerja di perkebunan pisang [TNCs di Amerika Latin] dan mencari keadilan di pengadilan. TNCs yang bergerak di bidang agribisnis merupakan badan-badan usaha ekonomi yang sangat besar dan kuat, tetapi, sekali lagi, masyarakat miskin di seluruh dunia sudah menunjukkan tanda-tanda mau memberikan perlawanan balik.

42 Percakapan dengan pengarang, Juni 1996.

Perdagangan

Dua-pertiga dari perdagangan dunia berlangsung antara perusahaan-perusahaan transnasional. TNCs ini mendominasi pasar dunia dalam perdagangan komoditi pertanian internasional, di mana sejumlah kecil perusahaan menguasai sebagian besar perdagangan. Dua TNCs, yaitu DuPont dan Monsanto, secara bersama-sama mendominasi pasar benih dunia untuk jagung (65%) dan kedelai (44%). Enam TNCs lain — BASF, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto dan Syngenta — mengontrol 75–80% dari pasar pestisida global (turun dari 12 perusahaan pada tahun 1994). Monsanto menguasai 91% dari pasar benih GM dunia pada tahun 2001, setelah mengambil alih 60% dari pasar benih jagung non-GM dari Brasil dalam waktu dua tahun (1997–1999).

Lima perusahaan menguasai 90% dari perdagangan gandum internasional. Enam perusahaan menguasai 75% dari pasar pestisida global. Perusahaan Cargill dan dua perusahaan lainnya mendominasi industri pengolahan kakao di Negara Pantai Gading, di mana 95% dari kapasitas pengolahannya dikontrol oleh TNCs. Lima perusahaan — Chiquita, Del Monte, Dole, Fyffes, dan Noboa — menguasai 80% dari pasar pisang dunia, di mana perusahaan Chiquita dan perusahaan Dole Food menguasai hampir 50%. Tiga perusahaan mengontrol 85% pasar teh dunia dan Unilever merupakan pemasok teh terbesar. Perusahaan Nestlé praktis telah memonopoli pasar susu UHT di Pakistan dan menguasai sekitar 80% dari produksi susu Peru. Sebanyak 30 perusahaan pengecer makanan terbesar menguasai sekitar sepertiga dari seluruh penjualan makanan kelontong dunia. Dari semua penjualan makanan di Thailand, 36% kini disalurkan melalui pengecer TNCs: Tesco memiliki 48 outlet dan penjualan sekitar US $1,2 miliar (sekitar Rp12 triliun) di Thailand pada tahun 2003.[43] Perdagangan produk-produk pertanian dan bahan makanan bertumbuh dari US$65 miliar (sekitar Rp650 triliun) pada tahun 1972 menjadi US$468 miliar (sekitar Rp4.680 triliun) pada tahun 1997 dan US$634 miliar (sekitar 6.340 triliun) pada tahun 2004.[44]

43 Figures from ActionAid, Power Hungry.

44 Figures from FAOSTAT, FAO,2006.

Peningkatan-peningkatan perdagangan ini — yang merupakan bagian dari proses globalisasi — telah mengubah beberapa perusahaan kecil yang tak banyak dikenal sebelumnya menjadi TNCs besar dengan pengaruh politik yang signifikan. Tapi hal ini memiliki implikasi yang serius bagi masyarakat miskin. Karena kebutuhan untuk mendapatkan banyak valuta asing agar bisa membayar utang luar negeri, negara-negara berkembang telah didorong oleh Bank Dunia dan lembaga-lembaga donor lainnya agar para petani negara mereka mengusahakan lebih banyak perdagangan komoditas pertanian seperti kopi, kakao, dan teh. Tapi hal ini telah mengakibatkan "kelebihan pasokan" dari sejumlah komoditas, yang pada gilirannya menyebabkan harganya turun begitu rendah, bahkan sering harga turun sampai berada di bawah biaya produksi. Hal ini tentu mengakibatkan penderitaan bagi para petani dan memperburuk kondisi hidup dari masyarakat petani miskin.

TNCs begitu kuat sampai-sampai para petani miskin hampir tidak mendapat keuntungan dari perdagangan internasional saat ini. Pemimpin pemerintah negara-negara Barat mengatakan bahwa liberalisasi perdagangan akan membawa keuntungan besar. Perdana Menteri Inggris pada bulan November 1995, misalnya, mengatakan bahwa "negara-negara berkembang bisa mendapatkan US$47 miliar (sekitar Rp470 triliun) dari ekspor pertanian yang terus meningkat".[45] Tetapi dalam hal perdagangan yang bekerja untuk orang miskin, angka-angka seperti ini hanya merupakan sebuah ilusi. Sejumlah kecil negara berkembang memiliki stok makanan yang mereka sedang tunggu untuk dijual ke negara-negara Barat hanya kalau negara-negara Barat akan membiarkan mereka. Orang mereka sendiri membutuhkan makanan. Surplus makanan yang sungguh-sungguh benar ada sangat sedikit.

Selain itu, penerima manfaat utama dari US$47 miliar itu juga bukan masyarakat miskin. "Ketika keuntungan besar didistribusi oleh reformasi perdagangan, kita perlu melihat hasil cetak akhirnya: hampir

45 Blair, Tony, 14 November 2005, dalam pidato untuk the Lord Mayor's Banquet, London.

semua keuntungan [perdagangan global] dinikmati oleh negara-negara kaya dan negara-negara berpenghasilan menengah, dan bukan dinikmati oleh negara-negara miskin dan lebih khusus lagi tidak oleh negara-negara miskin di Afrika."[46] Dan perolehan keuntungan yang terbesari akan didulang oleh para pedagang, bukan negara atau para petani. "Untuk para produsen pertanian berpenghasilan rendah, manfaat dari liberalisasi ... akan sangat terbatas."[47]

TNCs telah memperjuangkan liberalisasi — perdagangan bebas — sebagai sebuah reformasi utama perdagangan, tapi hanya kalau reformasi perdagangan itu sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka dan menguntungkan bisnis mereka. Perjanjian GATT tahun 1994 di Uruguay mengantar sebuah era yang menguntungkan bagi bisnis TNCs. Salah satu perjanjian yang berasal pertemuan GATT di Uruguay, dan kelahiran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1995 adalah perjanjian tentang Perdagangan Hak-Hak Kekayaan Intelektual (*Trade-Related Intelectural Property Rights* atau TRIPs). Kalau WTO merupakan organisasi yang mempromosikan perdagangan bebas, maka TRIPs merupakan perjanjian proteksionis. TNCs bertanggung jawab atas tekanan yang mereka buat. Perjanjian TRIPs merupakan gagasan koalisi industri yang terdiri atas 13 perusahaan utama AS, termasuk Bristol Myers Squibb, Dupont, Monsanto, dan General Motors. Mereka menginginkan perjanjian ini karena perjanjian ini bisa melindungi hak paten mereka. Ironinya persis terletak di sini. Pada satu sisi TNCs memperjuangkan perdagangan bebas untuk seluruh dunia, tapi pada sisi lain mereka menginginkan agar kepentingan bisnis mereka sendiri harus dilindungi.[48]

Produksi dan perdagangan makanan dunia dari biji-bijian (gandum, jagung, dll.) melebihi produksi jenis tanaman pangan lainnya. Cargill, sebuah perusahaan swasta AS yang berbasis di Minneapolis, adalah pe-

46 Sachs, J., *The End of Poverty*, London: Penguin, 2005, p. 281.

47 United Nations Conference on Trade and Development, *Globalization and Liberalization*, Geneva: UNCTAD, 1998.

48 Lihat Madeley, J., *Hungry for Trade: How the Poor Pay for Free Trade*, London: Zed Books, 2000

dagang gandum internasional terbesar di dunia. Ia menguasai lebih dari setengah perdagangan gandum dunia. Cargill diikuti oleh Mitsui/Cook Jepang, Louis Dreyfus dari Prancis (sebuah nama yang dikontrol oleh sebuah keluarga Prancis), perusahaan Swiss André/Garnac (juga dinamai seturut nama keluarga pemiliknya), dan Bunge Brasil dan Born (perusahaan keluarga lainnya). Karena itu jelas terlihat bahwa sejumlah kecil keluarga dan konglomerat Jepang menguasai sebagian besar perdagangan gandum internasional. Perusahaan-perusahaan ini diperkirakan menguasai sekitar 60% dari semua saham usaha gandum di dunia.

Cargill menggambarkan dirinya sebagai "penyalur dari makanan internasional dan manajemen pertanian dengan 158.000 karyawan di 66 negara. Cargill memproses dan mendistribusikan gandum, minyak dari biji-bijian dan komoditas lain untuk pembuat produk nutrisi makanan dan hewan. Ia juga menyediakan tanaman dan ternak produsen dengan layanan pertanian dan produknya.[49] "Cargill bercita-cita untuk menjadi pemimpin global dalam memberi makanan kepada masyarakat dunia," kata Paul Conway, Presiden Cargill, pada bulan Juli 2007.[50]

Sebagai sebuah perusahaan swasta, Cargill tidak berkewajiban untuk memberi tahu publik tentang operasi-operasinya. Sebuah anak perusahaan Cargill pernah menyatakan bahwa baik perusahaan maupun para karyawannya akan terbuka untuk menghadapi tuntutan pidana jika orang melapor kepada pemerintah AS tentang beberapa kegiatannya. "Tidak sulit untuk memberi jawaban terhadap negara-negara terbelakang yang berani mengajukan pertanyaan aneh seperti itu."[51] Menurut Kevin Watkins, seorang pengarang yang telah membuat penelitian pada GATT, Churchil bertanggung jawab untuk mempersiapkan kertas negosiasi Amerika Serikat untuk pertanian dalam pertemuan GATT pada Giliran

49 Dari Website Cargill .<http://www.cargill.com> (accessed 23 November 2007).

50 Conway, P., sebuah pidato sewaktu di Indonesia, 10 July 2007. <http://www.cargill.com/news/media/070709conway.htm> (accessed 23 November 2007).

51 Clairmonte, F. and J. Cavanagh, *The World in Their Web*, London: Zed Books, 1983, p. 59.

Uruguay.[52] Tapi hal ini disangkal oleh perusahaan dan hanya mengatakan bahwa hal itu membuat pandangannya diketahui pemerintah AS dan pemerintah Eropa.

Bisnis perusahaan Cargill berpengaruhi langsung terhadap orang-orang miskin di negara-negara berkembang. "Tujuan perusahaan Cargill adalah dua kali lipat setiap lima sampai tujuh tahun, namun pencapaian tujuan ini memerlukan pendudukan wilayah demi wilayah, dan pengusiran seluruh masyarakat dari pemukiman mereka "[53]

Tanah

TNCs membutuhkan tanah yang pada saat ini umumnya berada di tangan para petani berskala kecil. Dengan adanya industri makanan yang mengglobal, pengalihan penggunaan tanah dari tanaman pangan ke tanaman ekspor bertumbuh cepat. Jutaan hektar tanah setiap tahun akan beralih fungsi menjadi tanah untuk tanaman perkebunan. Perkebunan-perkebunan hampir selalu dibuat dengan motivasi pasar ekspor. Konversi lahan pertanian yang begitu cepat dan merajalela dari tangan para petani kecil ke tangan TNCs yang memproduksi pangan dengan motivasi utama untuk ekspor sungguh mengancam eksistensi hidup masyarakat petani kecil dan masyarakat adat lokal yang umumnya miskin (*indigenous community*). Ekspansi TNCs yang berbisnis di bidang tanaman pangan dengan menguasai sebagian besar lahan pertanian mereka bukan merupakan ancaman berbahaya bagi kehidupan masyarakat miskin di negara-negara berkembang dan hal ini akan meningkatkan gejala migrasi masyarakat pedesaan ke daerah perkotaan. [Walaupun akibatnya merugikan masyarakat miskin di negara-negara berkembang], TNCs yang berbisnis di bidang perdagangan komoditi pertanian akan tetap mempropagandakan proses globalisasi ini [sebagai sesuatu yang baik].

Masalah apakah lahan-lahan tanah yang baik harus digunakan untuk menanam tanaman untuk kepentingan ekspor, daripada untuk menanam

52 Watkins, K., *Fixing the Rules*, London: CIIR, 1992, p. 38.
53 Kneen, B., *Invisible Giant*, London: Pluto Press, 1995, p. 206

tanaman pangan bagi masyarakat lokal, telah lama diperdebatkan. Walau makanan merupakan kebutuhan manusia paling dasar, ketakcukupan uang dan daya beli yang rendah merupakan faktor utama terjadinya kelaparan. Walaupun penjualan tanaman ekspor [ke luar negeri] membawa uang [bagi negara-negara berkembang], harga komoditi pertanian untuk ekspor, seperti yang disebutkan sebelumnya, sering terlalu rendah sehingga tetap tidak memberikan keuntungan bagi para produsen [yaitu para petani miskin dan negara berkembang yang merupakan pemilik lahan pertanian]. Oleh karena dalam kenyataannya jutaan petani yang menanam tanaman pangan untuk ekspor memperoleh manfaat yang sangat sedikit dari perdagangan ekspor, maka keseimbangan tanaman pangan untuk ekspor perlu diatur kembali dengan lebih memperhatikan kebutuhan konsumsi masyarakat lokal.

Karena dihadapkan dengan masalah penurunan harga yang disebabkan oleh produksi yang berlebihan, maka negara-negara utama penghasil kopi dunia pada bulan Oktober 1994 bersepakat untuk menarik kembali pasokan kopi dari pasar ekspor. Hasilnya adalah harga kopi dunia kembali naik. Harga kopi di pasar dunia mencapai level tertinggi selama 20 tahun pada Mei 1997, setelah negara-negara penghasil kopi menahan laju pasokan kopi [ke pasar dunia] untuk menjaga harga [yang menguntungkan].[54]

Nasionalisasi perusahaan asing secara luas oleh negara-negara berkembang pada tahun 1970-an juga termasuk meliputi perkebunan-perkebunan berskala besar yang berorientasi ekspor. Pada akhir tahun 1980-an sejumlah pemerintah negara berkembang mengundang kembali investor asing, sering kali dalam bentuk kerja sama (*joint-venture*). Di beberapa negara, perkebunan-perkebunan tradisional dari zaman kolonial telah diganti dengan model di mana sejumlah besar petani menanam dan mengolah tanaman pangan dengan sebuah kontrak. Pertanian di bidang tanaman tembakau oleh TNCs merupakan contoh klasik untuk hal ini, tetapi seperti biasa perjanjian kontrak semacam ini memiliki sejumlah lubang perangkap tersembunyi (untuk soal ini lihat bahan Bab 3).

54 Informasi lebih lanjut tentang manajemen suplai komoditi, lihat Peter Robbins, *Stolen Fruit*, London: Zed Books, 2003.

Kesimpulan

Jutaan orang [di seluruh dunia] meninggal setiap tahun karena tidak mendapatkan makanan yang cukup. Mereka adalah orang miskin, tanpa uang untuk membeli, atau sumber daya untuk menanam bahan makanan sendiri secara cukup. Bisa dikatakan bahwa ini merupakan sebuah skandal terbesar dari awal abad ke-21 ini. Makanan dan sistem pertanian seharusnya dirancang sekian sehingga memungkinkan masyarakat miskin bisa memiliki makanan yang mereka butuhkan. Peran TNCs yang dominan jauh dari kenyataan membantu mengatasi masalah kelaparan dunia. Kebutuhan dasar dari semua masyarakat dunia seharusnya lebih diutamakan daripada kejar profit — keuntungan — dari segelintir orang [yang diperankan oleh TNCs].

BAB 3

Komoditas Agrikultural dan Para Korbannya

Jutaan orang di negara-negara berkembang terlibat dalam menghasilkan bahan-bahan makanan dan komoditas pertanian. Demikian juga perusahaan-perusahaan transnasional yang telah terlibat cukup besar dalam produksi, pemasaran dan penjualannya. Tembakau, makanan bayi, pisang, bunga, minuman-minuman cola, kapas dan minyak sawit adalah di antara produk-produk pertanian yang menonjol.

Tembakau

Tembakau adalah salah satu komoditas pertanian dunia terbesar yang diperdagangkan. Penggunaannya juga merupakan bencana utama bagi kesehatan masyarakat. Merokok adalah penyebab utama kematian [manusia di dunia], yang menewaskan hampir lima juta orang per tahun, di mana penyakit dan kematian bergeser ke negara-negara Selatan. Pada saat kebiasaan merokok di negara-negara Utara mulai menurun, industri ini telah semakin mulai mengarahkan targetnya ke negara-negara Selatan, yang melihatnya sebagai pasar yang masih bisa menopang profit bagi mereka.

Di negara-negara Utara, jumlah orang yang merokok adalah kurang dari tiga dari setiap sepuluh orang dewasa, dibandingkan dengan sekitar enam dari sepuluh orang dewasa pada 40 tahun yang lalu. Dan sekarang di negara-negara Utara, merokok tidak lagi diterima secara sosial di rumah, di tempat-tempat umum dan di tempat kerja. Penyakit yang berhubungan dengan merokok membunuh sekitar dua juta orang setiap tahun di negara-negara Utara, di mana kebanyakan orang sekarang mengakui bahwa merokok adalah tindakan membunuh. Meskipun kesadaran akan

bahaya merokok mulai merata di seluruh dunia, merokok di negara-negara Selatan masih terus meningkat. Pada tingkat konsumsi tembakau saat ini, merokok diperkirakan akan membunuh sekitar 10 juta orang per tahun hingga tahun 2020, di mana dua-pertiga dari angka kematian ini akan terjadi di negara-negara berkembang. Pada tahun 1960 hanya sekitar 20% pria di negara-negara Selatan merokok — dan dari jumlah itu hampir tidak ada wanita. Sekarang, setelah sejumlah persuasi-persuasi yang halus dari perusahaan-perusahaan rokok, 50% pria dan 9% wanita merokok.[1]

Produksi dan perdagangan tembakau sebagian besar terkonsentrasi di tangan TNCs. Empat perusahaan, Altria Group (Philip Morris), BAT (*BritishAmericanTobacco*), Reynolds American dan Tembakau Jepang menguasai sekitar 70% dari produksi tembakau global (kecuali Cina, yang merupakan negara monopoli). TNCs yang berbisnis tembakau berada pada posisi defensif ketika para perokok yang sakit kronis mulai menuntut mereka secara hukum ke pengadilan atas kerusakan kesehatan yang disebabkan oleh rokok produksi mereka. Beberapa dokter percaya bahwa dalam kurun waktu 30 tahun di masa datang, sebagian besar kebiasaan merokok di negara-negara industri akan menjadi kebiasaan yang hanya terjadi pada masa lalu.

Bagi pemerintah tampaknya tembakau merupakan sumber uang. Jika perkebunan tembakau cukup luas, maka ia dapat dikenakan pajak dan diekspor. Bagi sejumlah negara, tembakau merupakan sumber penghasil devisa utama. Ia bisa ciptakan lapangan kerja. Tapi ada harga yang harus dibayar. Tembakau bisa memperburuk kesehatan jutaan manusia. Untuk layanan kesehatan di negara-negara berkembang, pengobatan terhadap penyakit yang berhubungan dengan merokok menjadi beban tambahan pada anggaran negara yang sudah kompleks. Merokok merusak layanan kesehatan pada sebuah bangsa. Ketika sebuah negara harus menghabiskan uang mengobati perokok, maka negara akan memiliki uang kurang untuk melawan masalah penyakit-penyakit lainnya.

---

1 Mackay, J., M. Eriksen and O. Shafey, *The Tobacco Atlas*, 2nd edition, American Cancer Society, 2006.

Para perokok di Cina memberikan pendapatan kepada bendahara lebih dari US$5 miliar (sekitar Rp50 trilliun) per tahun pajak. Namun Cina menghabiskan (pada tahun 2002) US$3,5 miliar (sekitar Rp35 triliun) pada biaya kesehatan yang disebabkan oleh tembakau. Jika biaya ini dikurangi hingga 20%, Cina bisa mampu mempekerjakan lebih dari setengah juta guru tambahan untuk sekolah-sekolah dasar.[2]

Walaupun merokok bisa memperburuk kesehatan, pemerintah tampaknya tetap enggan untuk menertibkan industri-industri tembakau yang kuat. Rumah sakit di negara-negara berkembang sudah cukup dipenuhi oleh penderita penyakit yang disebabkan oleh merokok. Di Zimbabwe, misalnya, kanker paru-paru akibat terlalu banyak merokok telah menjadi salah satu keluhan yang paling umum di Rumah Sakit Mpilo di Bulawayo. Di Sudan, penyakit jantung koroner telah menjadi salah satu penyebab kematian paling umum.[3]

Lahan-lahan dikuasai perkembunan tembakau berarti lahan untuk tanaman pangan menjadi semakin berkurang. Menurut FAO, Malawi memiliki 4,3% dari lahan pertaniannya dikuasai perkebunan tembakau, dan Zimbabwe 2%. Walaupun prosentase ini kecil untuk skala nasional, mereka dapat meningkat secara dramatis di daerah-daerah tertentu di mana petani telah dibujuk untuk memberikan porsi terbesar tanah mereka untuk perkebunan tembakau.

Dr. Judith MacKay, Direktur Konsultasi Pengendalian Tembakau Asia di Hong Kong, mengklaim bahwa penggunaan lahan oleh perusahaan tembakau bisa merampas makanan dari 10 hingga 20 juta orang. "Di mana makanan harus diimpor karena lahan pertanian yang kaya sedang dialihkan ke produksi tembakau, pemerintah harus menanggung biaya impor pangan," demikian kata MacKay lebih lanjut.[4]

---

2 'Tobacco watch on public health policy', *Japan Times*, 25 June 2007.

3 Says berutang budi pada Dr. Keith Ball, mantan Ketua *Action on Smoking and Health*, untuk informasi ini.

4 MacKay, J., 'The fight against tobacco in developing countries', in *Tubercle and Lung Diseases*, London: Longman, 1994.

Iklan tembakau yang tinggi oleh TNCs dapat membujuk dan meninabobokan orang miskin untuk merokok lebih banyak, dan menggunakan uang mereka yang seharusnya digunakan untuk makanan, namun dalam kenyataannya justru digunakan untuk membeli rokok. Menurut Dr. Fami-Pearse dari Universitas Lagos, orang di Bangladesh yang berpenghasilan rendah, yang telah dibujuk untuk merokok lima batang sehari, harus memotong pembelian bahan makanan sebesar 15%, yang mengurangi asupan kalori harian mereka dengan 300 dari jumlah yang sudah rendah sebesar 2.000.[5]

Industri juga mengonsentrasikan periklanannya yang besar pada anak-anak dan orang muda untuk merekrut perokok baru. Biaya iklannya lunas terbayar kembali. Karena setiap hari, sekurang-kurangnya 4.000 orang muda mulai merokok. Sebuah artikel dalam Journal Asosiasi Medis Amerika (*Journal of American Medical Association*) menyatakan bahwa anak-anak masih kecil melihat, memahami, dan ingat iklan. Artikel itu mengatakan bahwa beberapa iklan berbentuk kartun jauh lebih berhasil dalam memasarkan rokok kepada anak-anak daripada kepada orang-orang dewasa. Bentuk lain dari iklan yang merusak adalah yang menggambarkan rokok atau logo-logo rokok pada alat mainan anak-anak. Industri rokok juga telah mempromosikan dirinya melalui sponsor acara-acara olahraga yang populer dengan anak-anak. Industri rokok masih berpropaganda merekrut orang sebagai perokok-perokok baru untuk menggantikan perokok-perokok yang sudah sedang sekarat, dan semakin dini dalam usia mereka sewaktu direkrut menjadi perokok baru maka sedini itu juga mereka mulai berkontribusi untuk keuntungan bagi perusahaan.

Di negara-negara berkembang yang yang menanam tembakau, TNCs sering mengontrakkan produksi tembakau kepada para petani kecil, sambil memberikan para petani petunjuk-petunjuk tertentu, menjual kepada mereka bibit tembakau yang mereka perlukan, demikian juga pupuknya dan bahan-bahan lain untuk perawatan tembakau, lalu TNCs kemudian

5 Makalah yang dipresentasikan di Konferensi Kelima tentang Rokok dan Kesehatan, Winnipeg, 1983.

membeli daun tembakau kering dari mereka. Tetapi, keuntungan yang diperoleh para petani kecil yang dikontrakkan ini biasanya rendah.

Di Uganda, misalnya, sekitar 4/5 dari tembakau Uganda ditanam di wilayah Nil Barat [hulu dari Sungai Nil yang berakhir di Mesir] atau di wilayah barat-utara dari negara itu. Sekitar 10.000 petani berskala kecil menanam tembakau di wilayah ini di bawah kontrak dengan perusahaan rokok BAT [*British American Tobacco*], yang memiliki hak monopoli atas tembakau di negara itu. Perusahaan BAT menyuplai para petani dengan sebuah paket (biasanya diberi dalam bentuk kredit pinjaman) yang meliputi fasilitas penanaman tembakau seperti pupuk, benih tembakau, pestisida, dan saran teknis [tentang cara penanaman dan pemeliharaannya], dan nanti Perusahaan BAT membeli daun-daun tembakau dari para petani ini dengan harga yang sudah ditentukan oleh perusahaan BAT.[6]

Di Filipina, Otoritas Tembakau Nasional menetapkan harga dasar daun tembakau 20 peso per kilogram (sekitar 50p), kata Simon Chapman. Tapi Philip Morris dan RJ Reynolds membayar kepada para petani hanya 7 peso per kilogram (sekitar 17p).[7] Menurut Chris Palabay, juru bicara Solidaritas Petani Tembakau Melawan Eksploitasi, suku bunga untuk para petani tembakau di Filipina untuk sebuah kredit pinjaman selama empat sampai lima tahun adalah antara 75 sampai 100%.[8]

Belenggu utang bisa menjelaskan mengapa banyak petani terus menanam tembakau: yaitu karena para petani tembakau telah terlebih dahulu berutang uang kepada perusahaan. Negara Malawi sering disebut oleh TNCs berbisnis tembakau sebagai sebuah negara di mana tanaman tembakau memainkan peran ekonomis yang besar, namun para petani sederhana Malawi — terutama kaum wanita — "tidak mendapatkan kesejahteraan dari ekonomi tembakau", sebagaimana seorang mantan karyawan dari Kerja Sama Pembangunan Sekemakmuran (*Commonwealth*

6 Aliro, O. K., *Uganda: Paying the Price of Growing Tobacco*, Kampala: The Monitor Publications, 1993.

7 Chapman, S., with W. W. Leng, *Tobacco Control in the Third World: a Resource Atlas*, Malaysia: International Organization of Consumer Unions, 1990.

8 *Ibid.*

Development Corporation) tandaskan di Malawi: "Ribuan petani Malawi telah dipindahkan dari tanah-tanah mereka untuk membuka jalan bagi perkebunan-perkebunan besar tembakau."[9]

Lingkungan

Kebanyakan tembakau di negara-negara berkembang dibudidayakan di daerah-daerah semikering. Pohon-pohon biasanya jarang di daerah-daerah seperti ini dan industri tembakau sangat banyak menggunakan pohon. Sekitar setengah dari produk daun tembakau di negara-negara Selatan diawetkan dengan kayu. Proses pengawetan demikian menyebabkan kepunahan pohon-pohonan yang mengkhawatirkan, yang menempatkan sebuah beban tambahan pada hutan [yang seharusnya dilindungi]. Pemotongan pohon-pohon ini mengakibatkan perusakan pelindung alamiah tanah [yaitu pepohonan yang antara lain memberi humus kesuburan pada tanah dan menahannya dari erosi oleh akar-akar pohon] dan mengubah lahan menjadi tempat-tempat tandus yang mandul. Di Negara Uganda, misalnya, "efek yang paling mencolok dari industri budi daya daun tembakau adalah penipisan yang drastis terhadap hutan, baik hutan alamiah maupun hutan buatan yang sengaja ditanam warga masyarakat setempat".[10]

Di wilayah Nil Barat dari Uganda, daerah yang paling banyak terkena dampak deforestrasi adalah Maracha, yang sedang berada dalam bahaya menjadi padang gurun baru. Sumur-sumur dan sungai di daerah tersebut mengering, yang memaksa masyarakat setempat untuk berjalan lebih jauh untuk mencari bahan bakar. Perempuan, yang telah bekerja berjam-jam, memikul sebagian besar dari beban ekstra ini. Karena pohon-pohon telah dipotong, maka tanah kurang memiliki penutupan dan lebih gampang terhanyut kalau hujan lebat.[11] Petani mengeluhkan soal kehilangan tanah bagian atas yang subur dan hasil panen berkurang. Menanggapi hal ini, TNCBAT mengatakan bahwa pohon-pohon sedang ditanam kembali di

9 "Curiocities", New Internationalist, October, 1996.
10 Aliro, Uganda: Paying the Price.
11 *Ibid.*

Uganda dan bahwa hal itu meningkatkan efisiensi tungku gudang untuk mengurangi konsumsi kayu. Sebuah laporan Satuan Intelligence *Economist* menunjukkan:

> Salah satu konsekuensi utama dari produksi tembakau di negara-negara Dunia Ketiga diakibatkan oleh kebutuhan energi yang cukup besar dari proses pengapian pengawetan... seperti misalnya, di beberapa negara berkembang, perusahaan tembakau merupakan salah satu faktor penyebab masalah deforestasi yang sekarang sedang dihadapi. Pembukaan lahan berhutan membuka jalan untuk terjadinya erosi tanah dan dampak-dampak lingkungan lainnya yang pada akhirnya mengurangi produktivitas lahan pertanian.[12]

Tembakau, karenanya, menyebabkan penghilangan pohon-pohonan, yang pada gilirannya memengaruhi produksi pangan di beberapa negara di dunia yang menderita kelaparan hebat. Di Kenya, TNC BAT mengatakan bahwa petani hanya bisa menjadi petani tembakau jika mereka setuju untuk menanam 1.000 pohon eucalyptus setiap tahun di tanah mereka. Tapi penegakan terhadap kebijakan ini menjadi masalah tersendiri. Seorang mantan karyawan senior BAT Kenya mengatakan:

> Perusahaan [BAT] meneriakkan penanaman pohon besar-besaran tapi ini, saya khawatir, tidak lebih dari upaya keji untuk menutupi seluruh masalah [yang sebenarnya]. Tidak bisa disangkal bahwa pohon di daerah penghasil tembakau sedang ditebang, mau tak mau, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama [di masa depan], tidak akan ada tersisa sama sekali. Masalahnya adalah bahwa BAT, serta petani, bisa lolos dari itu dan mereka bisa.[13]

Rata-rata para petani kecil di Kenya memiliki kurang dari empat hektar lahan. Jika ia tanam tembakau, yang mungkin memakan setengah hektar dan pohon-pohon di tanam areal hektar lainnya [seperti yang dipropagandakan BAT]. Tanah untuk tanaman pangan dan keperluan lain jadinya

12 Economist Intelligence Unit: *Tobaccoand Food Crops Production in the Third World*, London: EIU, 1983.

13 Komunikasi pribadi.

harus semakin kecil. Bahkan pohon yang tumbuh cepat sekalipun dapat membutuhkan waktu lima tahun untuk tumbuh dan banyak petani tidak tertarik menanam pohon hari ini yang baru siap dipotong sekitar lima tahun lagi di masa depan. Mereka memiliki masalah yang agak lebih mendesak, yaitu tanaman bahan pangan yang bisa memastikan bahwa keluarga mereka bisa bertahan hidup hari ini. Selain itu, banyak petani lebih suka menggunakan pohon seperti eucalyptus untuk bahan bangunan dan mereka terus menebangi hutan asli untuk pengawetan tembakau. Juga, pohon-pohon yang baru ditanam tidak selalu bertahan hidup. Menanggapi hal ini, TNC BAT di Kenya tetap mengklaim bahwa para petani yang dikontrak memiliki cukup kayu dan bahwa 40 juta pohon, yang ditanam oleh para petani ini, masih hidup.[14]

Deforestasi yang dipicu perkebunan tembakau sangat memprihatinkan di beberapa wilayah di Brasil, di mana anak perusahaan BAT Souza Cruz SA menguasai hampir 4/5% dari total pemasaran tembakau Brasil.[15] Kebanyakan tembakau dibudidayakan di ladang-ladang para keluarga petani kecil, yang total jumlahnya sekitar 130.000 keluarga petani tembakau. Para tetani tembakau negara Brasil ini membutuhkan kayu [untuk pengawetan tanaman tembakau] sebanyak 60 juta pohon per tahun.

> Tembakau adalah godaan ekonomi yang sangat kuat untuk para petani kami. Orang telah secara tradisional memproduksikan buah-buahan, sayuran, dan susu, secara subsisten, pada lima, sepuluh atau terkadang 18 hektar [lahan]. Pemerintah tidak memberi mereka dukungan ekonomis. Perusahaan-perusahaan tembakau telah menyerbu para petani kecil ini, dan menawarkan mereka sebuah tanaman cash alternatif lainnya. Mereka [perusahaan tembakau] mengatakan bahwa mereka bisa memiliki uang tunai di saku mereka, satu set TV, air dan sanitasi di rumah Anda, dan sebagainya, dan sebagainya... Itulah kekuatan dari perusahaan untuk menarik para petani, namun hal itu berdampak [negatif terhadap] kehidupan komunitas kami, [dan] pereko-

---

14 Lihat 'Growing the golden leaf', *African Farming* (November/December 1996).

15 Informasi dari Souza Cruz SA website. <http://www.answers.com/ topic/souza-cruz-s-a?cat=biz-fin> (accessed 28 February 2008).

> nomian kami. Ketika para petani memilih untuk menanam tembakau mereka mengalihkan semua tanah mereka ke usaha itu. Hasilnya adalah [sistem pertanian] monokultur. Petani menjadi bergantung pada tembakau. Kami menyaksikan tanah yang tererosi, pencemaran air dan tanah, dan penggundulan hutan. Wilayah-wilayah sangat miskin yang kita lihat sekarang ini, antara lain dalam bentuk hilangnya pohon-pohon, adalah daerah di mana perkebunan dibudidayakan, karena proses pengawetan tembakau menuntut penggunaan kayu [yang banyak].[16]

Hal ini memperlihatkan faktor lingkungan secara lebih jauh. Produksi tembakau menghabiskan nutrisi [kesuburan] tanah "pada tingkat jauh lebih cepat daripada oleh tanaman lainnya, sehingga dengan cepat menurunkan kualitas tanah [untuk menumbuhkan kehidupan]".[17] Di beberapa negara seperti Malawi, Sri Lanka, Zambia, dan Zimbabwe, misalnya, tanaman tembakau sering tumbuh di tanah berbukit-bukit dan hal ini mempercepat erosi tanah. Humus tanah yang hilang karena budi daya tembakau sangat mengkhawatirkan. Kehilangan humus tanah ini pasti memengaruhi kemampuan tanah untuk menumbuhkan tanaman, termasuk tanaman pangan. Ketika humus tanah telah habis [tererosi] dan pohon-pohon punah dari daerah perkebunan tembakau, perusahaan transnasional hampir pasti akan pindah ke lokasi baru.

Tanaman tembakau membutuhkan penggunaan pestisida yang banyak. Sebuah selebaran instruksional yang diberikan kepada para petani tembakau di Kenya mendaftarkan program persemaian bibit tembakau yang disarankan perusahaan transnasional BAT. Dari kegiatan membuat persemaian sampai pemindahan benih ke ladang-ladang tembakau memakan waktu sekitar tiga bulan. Selama waktu tiga bulan itu, 16 pemakaian pestisida direkomendasikan.

Eucalyptus, pohon yang disukai industri tembakau, sangat kontroversial. Pohon ini tumbuh cepat, bahkan di daerah yang kering, dengan

---

16 Rt Revd Luiz Prado, Bishop of Pelotas, wawancara dengan pengarang, 1998.

17 Goodland, R. J. A., C. Watson and G. Ledec, *Environmental Management in Tropical Agriculture*, Boulder, CO: Westview Press, 1984, p. 56.

mengisap air yang ada di bawah tanah. Namun pertumbuhannya yang cepat dapat dicapai dengan mengorbankan tabel air. Jika tabel air yang lebih rendah rusak atau diambil, maka kemampuan lahan untuk menumbuhkan tanaman pangan bisa rusak.

Konvensi kerangka kerja

Sebagian besar industri tembakau selama ini hampir bebas dari ketetapan regulasi internasional. Namun pada tahun 1996, Majelis Kesehatan Dunia (*World Health Assembly* atau WHA) dari WHO mengadopsi sebuah resolusi yang meminta Direktur Jenderal [dari WHO] untuk memulai pengembangan Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (*Framework Convention on Tobacco Control* atau FCTC). Tujuannya adalah bahwa WHO harus menggunakan kewenangannya untuk mengembangkan konvensi internasional untuk memajukan kesehatan masyarakat.

Pada bulan Mei 1999, Majelis Kesehatan Dunia membuka jalan bagi dimulainya negosiasi pada seperangkat aturan dan peraturan untuk mengatur perang melawan tembakau. [Menghadapi semua perkembangan ini], industri-industri tembakau melakukan segala macam manuver yang melemahkan proposal dari Majelis Kesehatan Dunia ini, dengan menyusupkan pengaruh yang besar mereka terhadap posisi Amerika Serikat. Biarpun demikian, WHA tetap meneruskan proyeknya dan mengadopsi Konvensi pada bulan Mei 2003. Ini adalah sebuah perjanjian internasional pertama di bidang masalah industri tembakau.[18]

Pada bulan Mei 2004, dalam kurun waktu satu tahun dari perjanjian yang disepakati oleh Majelis Kesehatan Dunia, 167 anggota menyatakan, hampir 90% dari negara-negara anggota WHO, telah menandatanganinya dan lebih dari setengah ratifikasi yang diperlukan untuk pemberlakuannya telah diterima. FCTC telah menjadi salah satu konvensi PBB yang paling cepat dirangkul untuk diterima. Konvensi ini mengharuskan negara-

---

18 Pekkanen, J., 'Thank you for smoking', *The Washingtonian* (December 2007). <http://www.washingtonian.com:80/articles/people/5856.html> (accessed 20 December 2007).

negara untuk melarang iklan tembakau, setiap bungkus rokok harus dicantumkan peringatan kerusakan kesehatan pada bungkus rokok antara 30% sampai 50% dari ukuran paket, dan memastikan bahwa perusahaan tidak membuat klaim-klaim [atau iklan-iklan] yang menyesatkan.

FCTC mengendalikan kekuatan perusahaan-perusahaan tembakau dan bisa membawa manfaat besar bagi kesehatan. Tapi konvensi internasional ini harus diimplementasikan secara nasional. Dalam sebuah pengelompokan yang disebut Aliansi Konvensi Kerangka Kerja yang beranggotakan sekitar 300 LSM dari 100 negara mendesak pemerintah negara untuk mengimplementasikan FCTC dan memonitor kepatuhan ketaatan terhadap perjanjian FCTC ini di negara-negara yang telah meratifikasinya.[19]

Ada alternatif lain dari budi daya tembakau. Sejumlah tanaman dapat dibudidayakan pada lahan-lahan yang sekarang ditanami tembakau. Tanaman-tanaman itu termasuk sebagian besar tanaman biji-bijian dan sayuran, seperti paprika dan cabai, buah-buahan seperti jeruk, kiwi, avokad dan mangga, dan kacang-kacangan, termasuk macadamia, pecan, dan mete. Tanaman alternatif terbaik untuk para petani berskala kecil adalah tanaman pangan yang dapat dijemur, disimpan dan dijual untuk ekspor di akhir musim. Sebuah sistem pertanian campuran bisa mengembalikan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan tanah yang dipakai untuk budi daya [tanaman monokultur] tembakau.

Intinya bagi pemerintah negara-negara berkembang adalah bahwa biaya ekonomi budi daya tembakau menjadi lebih negatif setiap tahun. Biaya pengobatan, kecacatan dan kematian melebihi manfaat ekonomi bagi para produsen. Karena kesadaran akan bahaya merokok meningkat, maka permintaan rokok akan melambat dan harga akan jatuh. Menghadapi aksi yang terkoordinasi secara internasional menentang kebiasaan merokok, industri tembakau pasti akan terus meningkatkan kegiatan promosinya di negara-negara berkembang. Para TNCs tembakau memiliki uang banyak

19 Informasi dari Framework Convention Alliance website. <http://www.fctc.org> (accessed 20 December 2007).

di tangan mereka untuk melawan kontrol dari lembaga kesehatan dan terus berjuang untuk menentang pemberlakuannya. Tapi kalau pemerintah [negara-negara berkembang] tidak mengambil tindakan [tegas dan keras], mereka akan berhadapan dengan populasi yang semakin tidak sehat dan epidemi-epidemi besar yang berhubungan dengan penyakit-penyakit karena merokok.

Makanan bayi

Bayi-bayi yang diberi makanan sedotan dari botol adalah "25 kali lebih kemungkinan meninggal di masa kecil dibandingkan bayi yang diberi ASI (Air Susu Ibu) secara eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan", demikian kata laporan UNICEF.[20] UNICEF melaporkan pada tahun 1990 bahwa lebih dari satu juta bayi meninggal akibat susu botol. Jumlah ini tampaknya akan meluas ke tahun 2000-an. Namun, dengan cara yang halus dan kadang-kadang tidak dengan cara-cara yang halus, perusahaan transnasional susu terus membujuk para ibu untuk tidak menyusui bayi mereka. Promosi mereka terhadap pengganti ASI kepada ibu-ibu memengaruhi kehidupan dari sejumlah orang di dunia yang paling rentan.

Memberi makan kepada bayi dengan ASI diakui secara universal lebih unggul dari susu botol. ASI memberikan campuran nutrisi yang benar, antibodi dan sel darah putih untuk melindungi bayi terhadap penyakit. Penelitian juga menunjukkan bahwa bayi yang disusui memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Namun sayangnya, pemberian ASI bagi bayi di negara-negara industri dan juga d[illegible]egara-negara berkembang telah banyak dikalahkan oleh susu dari [illegible] Di Cina, rumah bagi sekitar satu dari lima dari populasi dunia, ke[illegible] pemerian ASI menurun cukup drastis. Di Bangladesh Muslim, ia telah turun lebih dari setengahnya dalam sepuluh tahun antara tahun 1983 dan 1993 (dari 96 persen menjadi 46 persen) meskipun Quran memerintahkan bahwa bayi harus disapih hanya ketika mereka berusia dua tahun.

20 United Nations Children's Fund, *The State of the World's Children Report, 1991*, New York: UNICEF, December 1990.

Salah satu sebab utama dari penurunan ini adalah promosi yang kuat dan iklan yang gencar oleh TNCs pengganti ASI. Dalam mengejar keuntungan, TNCs telah membujuk jutaan ibu untuk meninggalkan pemberian ASI bagi bayi mereka dan menggunakan susu bubuk sebagai gantinya. Persediaan gratis untuk rumah sakit telah sangat persuasif dan UNICEF percaya bahwa ini adalah sebuah praktik yang sangat merugikan, yang memancing kaum ibu menjauhi kebiasaan memberi ASI kepada bayi mereka.

Perusahaan Nestlé yang berbasis di Swiss adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia. Produk-produk utamanya adalah kopi, gula, air, mineral susu, es krim, dan makanan hewan piaraan dalam rumah [seperti anjing, kucing, atau burung-burung]. Di seluruh dunia, Nestlè menguasai sekitar 40% dari pasar dunia dalam pengganti ASI — atau "formula bayi" sebagaimana perusahaan menyebutnya.

Gereja-gereja dan kelompok-kelompok yang peduli di Amerika Serikat mulai memboikot produk-produk Nestlé pada tahun 1977. Gerakan pemboikotan ini segera menyebar ke Kanada, Eropa, dan Selandia Baru. Ketika boikot mulai tumbuh, sebuah koalisi LSM seluruh dunia yang disebut Jaringan Aksi Makan Bayi Internasional (*Baby International Food Action Network* atau IBFAN) dibentuk pada tahun 1979. [Menghadapi tantangan ini,] perusahaan Nestlé meningkatkan pengeluarannya untuk hubungan kemasyarakatan untuk melawan ancaman terhadap bisnisnya dan mengirim [illegible]).000 brosur yang mengkilap untuk pendeta-pendeta dan badan ke[illegible]n melalui bagian hubungan kemasyarakatan dari perusahaan.

IBFAN mulai berkampanye melawan praktik-praktik perusahaan susu seperti iklan billboard, pemberian contoh kepada para ibu, dan perangkat promosi lainnya untuk mendorong ibu baru tidak menyusui bayi mereka. IBFAN, yang dikoordinasi oleh Aksi Susu Bayi yang berbasis di Inggris, membantu untuk mengangkat masalah pemasaran makanan bayi dalam agenda kesehatan internasional. Kelompok-kelompok anggota IBFAN mendesak pemerintah negara-negara di dunia untuk mengembangkan kerangka kerja internasional untuk kode etik pemasaran yang kuat dan

efektif. Dalam waktu kurang dari 18 bulan kampanye membuahkan hasil. Kode Etik Internasional Pemasaran Pengganti ASI diterima oleh Majelis Kesehatan Dunia pada bulan Mei 1981. Kode Etik ini melarang perusahaan-perusahaan untuk membuat iklan dan memberikan contoh. Hal tersebut diperkuat lagi pada tahun 1994.

Di bawah tekanan dari Kode Etik dan boikot ini, Nestlé mengurangi beberapa malapraktik yang cukup kasatmata, seperti penggunaan *'milk nurses/perawat susu'* (para salesmen/saleswomen perusahaan susu Nestlè yang berpakaian seperti seorang perawat), gambar bayi pada kaleng susu formula dan beberapa iklan lainnya. Pada tahun 1984 boikot itu dicabut kembali setelah Nestlé berjanji bahwa Nestlè akan tetap taat terhadap Kode Etik dari WHO dan bahkan sekalipun tanpa adanya regulasi nasional pada sebuah negara di mana Nestlè berbisnis. Tetapi dalam kenyataannya, pada saat beberapa dari praktik pemasaran [yang tak terpuji dari] Nestle berhenti, praktik-praktik lainnya tetap berjalan terus. Karena itu, boikot diberlakukan kembali pada tahun 1986 dan masih berlaku hingga saat ini. "Boikot telah memaksa Nestlè menghentikan beberapa taktik yang digunakan Nestlè di masa lalu... tapi sekarang kita melihat adanya strategi baru yaitu medikalisasi pemberian makanan pada bayi, misalnya iklan yang mempromosikan susu formula dengan "blok bangunan otak" (*brain building blocks*)," sebuah taktik yang baru-baru ini dilarang oleh undang-undang di Filipina, kata Mike Brady dari Aksi S·tsu Bayi (*Baby Milk Action*) (lihat juga bahan Bab 12).[21]

Dalam sebuah laporan pemantauan, IF nengatakan pada bulan November 2007 bahwa ketiadaan regu..si sehubungan dengan soal ini mendorong industri makanan bayi untuk menggunting bentuk-bentuk pemasaran baru yang agresif. Laporan ini memberikan "detail-detail yang grafik dari cara tak terpuji sejumlah perusahaan kelas berat yang berkompetisi dengan susu ibu — ASI". TNCs berbisnis susu bayi "menebarkan strategi baru yang digunakan oleh industri makanan bayi

21 IBFAN, 'Breaking the rules, stretching the rules 2007', siaran pers, 27 November 2007.

untuk menjunjung tinggi produk mereka dan melemahkan kebiasaan ibu-ibu menyusui langsung bayi mereka — yaitu dari ASI".[22]

Laporan tersebut berisi pengalaman dari 67 negara di mana perusahaan-perusahaan dievaluasi berdasarkan persyaratan pemasaran susu yang ditetapkan Majelis Kesehatan Dunia sejak tahun 1981. Sejumlah bukti dikumpulkan dari Juni tahun 2004 hingga Oktober 2007. Sekitar 3.000 dugaan pelanggaran didata dan dianalisis. Laporan tersebut mengklaim bahwa pelanggaran yang dibuat Nestlé tetap banyak, dan bahwa kegagalan [pemerintah negara] untuk menindak praktik-praktik tersebut telah mendorong perusahaan lain, seperti kelompok NUMICO (yang merek-mereknya meliputi *Cow& Gate*, *Milupa* dan *Nutricia*) untuk melakukan praktik-praktik serupa supaya bisa bersaing.

Persaingan yang ketat antara TNCs ini tampaknya membuat standar-standar kode etik tidak diindahkan. NUMICO misalnya sekarang sedang menyaingi Nestlé dalam hal jumlah dugaan pelanggaran pada waktu perusahaan ini mengembangkan bisnisnya di Asia dan di tempat-tempat lain, kata laporan itu. Pada saat NUMICO baru-baru ini dibeli oleh perusahaan Danone, IBFAN menginginkan agar Danone melakukan perubahan-perubahan fundamental dalam taktik-taktik pemasaran dari sejumlah perusahaan makanan bayi yang sekarang berada di bawah kepemilikannya.

Boikot terhadap Nestle akan berjalan terus, kata organisasi Aksi Susu Bayi, sampai perusahaan Nestlè mau mematuhi Kode Etik dari WHO dan resolusi dari Majelis Kesehatan Dunia dalam kebijakan dan praktik bisnisnya 'estlé adalah perusahaan yang paling diboikot di Inggris. Pemboikot didukung oleh lebih dari 90 gereja, departemen kesehatan dan i ..pok konsumen, oleh lebih dari 90 perusahaan, 80 serikat mahasiswa, 17 pemerintah daerah, 12 serikat buruh, anggota parlemen, dan partai-partai politik. Pemboikotan juga beroperasi paling kurang di 18 negara. Nestlé mengklaim bahwa ia sungguh mematuhi Kode Etik dari WHO dan WHA, dan bahwa perusahaan telah "berusaha melaksanakannya di banyak negara untuk mempromosikan adopsi dari

22 *Ibid.*

Kode Etik WHO oleh pemerintah negara".[23] Pada tahun 1998 IBFAN menerima *Right Livelihood Award*:

> atas komitmen untuk berkampanye secara efektif dalam mendukung praktik pemberian ASI pada bayi ... dalam menghadapi kekuatan besar dari perusahaan-perusahaan multinasional yang mendominasi pasar makanan bayi dunia, IBFAN dengan banyak cara memobilisasi masyarakat secara efektif untuk mendesak pemerintah mereka agar bertindak dan melakukan pemantauan warganya sesuai dengan rekomendasi dari Majelis Kesehatan Dunia, dan agar mendorong usaha kemandirian yang efektif pada tingkat akar rumput.[24]

Pisang

Pisang adalah simbol kekuatan TNCs untuk menguasai warga masyarakat miskin. Aspek-aspek dari relasi yang tak setara ini meliputi kondisi kerja dan hidup yang memprihatinkan daripara petani yang membudida-yakan tanaman pisang, penindasan serikat-serikat buruh dagang yang independen, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh bahan kimia beracun dan pertanian yang intensif, dan kekuatan TNCs yang tidak seimbang yang memasok pisang untuk dipasarkan di negara-negara Utara.

Pisang dan keluarga pisang raja merupakan tanaman pangan pokok keempat di dunia yang sangat penting. Pisang dan pisang raja berperan sangat penting untuk keamanan pangan di banyak negara tropis. Buah-buahan ini dibudiday n di ladang-ladang kecil dan perkebunan di sekitar 100 negara di Asia, Karibia, dan Amerika Latin.

Bagi sekitar 15 ı a penghasil pisang Amerika Latin dan Karibia, pisang merupakan sumber pendapatan penting dari sektor ekspor. Sekitar 20% dari 70 juta ton pisang yang diproduksikan setiap tahun memasuki pasar buah-buahan dunia. Dua negara penghasil pisang terbesar dunia,

23 Nestlé website. <http://www.nestle.com> (accessed 13 May 2008).

24 The Right Livelihood Foundation, 'The 1998 Right Livelihood Award Recipients', Stockholm. <http://www.rightlivelihood.org/ibfan.html> (accessed 28 January 2008).

India dan Brasil, hampir tidak terlibat dalam perdagangan pisang internasional.

Lima perusahaan utama — Chiquita, Del Monte, Dole, Fyffes, dan Noboa — menguasai dan mengontrol 80% dari pemasaran pisang dunia. Perusahaan-perusahaan ini "sanggup memainkan kekuatan pasar mereka pada beberapa atau pada semua tahap dari rantai pemasaran pisang".[25] Hanya sekitar 12% dari harga eceran pisan didapat kembali oleh negara-negara produsen, meskipun proses pengolahan pisang sangat sedikit yang terjadi di luar ladang-ladang atau perkebunan [pisang]. Untuk setiap £1.00 (sekitar Rp15.000) yang seorang pembeli di Inggris belanjakan untuk pisang Ekuador, sekitar £0.40 sen menjadi keuntungan supermarket [tempat penjualan akhir], sedangkan para petani perkebunan pisang [di Equador, dll.] menerima hanya £1,05 sen.[26]

Sekitar 80% dari pisang yang diekspor ditanam di perkebunan, kebanyakan oleh TNCs di Amerika Latin. Oleh persaingan yang sengit antara perusahaan-perusahaan, yang merupakan sebuah ciri khas dari industri, persentase ini kemungkinan akan terus meningkat. Sebuah "perlombaan hingga ke dasar" (*race to the bottom*) sedang dikejar dalam industri pisang pada waktu TNCs berpindah dari satu negara ke negara yang lain untuk mencari pisang yang lebih murah, dan para petani pisang berskala kecil tertatih-tatih berjuang untuk ikut bersaing. Biaya usaha pisang karenanya lebih banyak dibebankan kepada ratusan ribu petani pisang berskala kecil, oleh para buruh dan komunitas mereka:

> Dampak-dampak dari dari lomba hingga ke dasar ini sungguh menghancurkan: migrasi, diskriminasi gender, kanker, dan bahkan kematian yang disebabkan oleh penggunaan agrokimia tanpa pemakaian alat pelindung, kerusakan lingkungan dan meluasnya kegagalan untuk mematuhi standar-standar kerja yang disepakati secara internasional termasuk hak untuk bergabung dengan serikat dagang independen.[27]

---

25 Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan, 'UNCTAD Info Comm', dikutip di ActionAid, *Power Hungry*, p. 21.

26 Informasi dari Banana Link website. <http://www.bananalink. org.uk> (accessed 28 January 2008).

27 *Ibid.*

Raceto thebottom di dunia industri sekarang sedang dipimpin oleh supermarket-supermarket Eropa, yang telah menjadi pemain paling kuat dalam rantai suplai pemasaran pisang internasional. Supermarket-supermarket Inggris sedang terlibat dalam "perang harga pisang", yang mencocokkan harga satu sama lain sampai ke tingkat sangat rendah sehingga para petani perkebunan pisang sekarang hampir tidak mungkin bisa mendapatkan upah yang layak. Banyak perusahaan pisang dan supermarket tidak bersedia menerima tanggung jawab atas dampak-dampak sosial dan lingkungan dari bisnis mereka di negara-negara produsen.

Pada bulan April 2007 perang harga pisang pecah di antara supermarket Inggris. Asda/Walmart memotong harga eceran sebesar 20%. Lalu perusahaan pengecer besar lainnya merasa wajib untuk mengikutinya. Namun potongan harga ini "berarti bahwa kemungkinan untuk memperbaiki upah dan kondisi kerja pada awal rantai proses pasokan pisang semakin sangat kecil". Dalam perang harga pisang sebelumnya yang dipimpin oleh Asda, catatan menunjukkan bagaimana pemasok supermarket memotong biaya tenaga kerja di perkebunan-perkebunan pisang mereka di Costa Rica. "Tidak ada jaminan sama sekali bahwa perang [harga pisang] terbaru ini, cepat atau lambat, tidak akan menimbulkan situasi yang sama bagi petani pisang yang sudah dieksploitasi secara berlebihan."[28]

Ketika pisang dibudidayakan di perkebunan-perkebunan untuk dipasarkan di negara-negara industri, fasilitas-fasilitas eksternal yang mahal — terutama pestisida — digunakan untuk menghasilkan buah pisang yang mulus tak bercacat (lihat bahan Bab 2). Tanaman pisang juga dibudidayakan oleh jutaan petani berskala kecil di Afrika, Asia Selatan, Karibia, dan Amerika Latin. Sebagian dari tanaman pangan ini diekspor — di bawah sistem *Fairtrade*, misalnya — sebagian lagi adalah untuk konsumsi rumah tangga atau pasar lokal. Dalam pembudidayaan pisang untuk konsumsi pasar lokal hampir tidak digunakan fasilitas eksternal seperti pestisida.

---

28 ActionAid, *Who Pays? How British Supermarkets Are Keeping Women Workers in Poverty*, London: ActionAid, 23 April 2007.

Minuman ringan: Coca-Cola

Sebagai salah satu merek yang paling dikenal di dunia, perusahaan Coca-Cola mengklaim bahwa ia mematuhi "standar etika paling tinggi" dan menjadi "warga negara korporasi yang luar biasa dalam setiap komunitas yang kami layani".[29] Akan tetapi aktivitas Coca-Cola di beberapa wilayah termiskin di dunia menimbulkan dampak yang sungguh merusakkan manusia, terutama pada kebutuhan yang paling dasar, yaitu kebutuhan akan air.

Untuk membuat minuman Coca-Cola dibutuhkan air dalam jumlah yang banyak. Dibutuhkan hampir tiga liter air untuk membuat satu liter Coca-Cola. Untuk memiliki air yang cukup, Coca-Cola mulai mengambil alih kontrol *aquifer-aquifer* milik masyarakat di seluruh dunia. *Aquifer* adalah ruang-ruang bawah tanah yang luas yang menampung air yang telah dikumpulkan selama ratusan tahun oleh planet bumi. Mereka merupakan warisan dari seluruh masyarakat setempat. Dalam perjuangan Perusahaan Coca-Cola untuk mencari air untuk membuat minuman ini, banyak warga masyarakat miskin menderita kekurangan air, sumur-sumur para petani mengering dan pertanian lokal terancam rusak.

"Perusahaan Coca-Cola juga diduga telah melanggar hak-hak buruh di negara-negara seperti Kolombia, Turki, Guatemala, dan Rusia. Hanya melalui jutaan dolar yang dipakainya untuk kampanye pemasaran, Coca-Cola dapat mempertahankan citra bersih yang sangat dibutuhkannya," demikian kata sebuah laporan dari *War on Want.*[30]

Di India, aktivitas Coca-Cola, khususnya bagian unit pembotolan, telah membawa dampak [negatif] bagi masyarakat di seluruh negara ini. Perusahaan Coca-Cola datang ke India pada tahun 1993. Ia mencari pasar baru untuk minuman Coca-Cola tetapi pertama-tama hal yang harus dicarinya adalah air. Masalahnya adalah bahwa India sudah menghadapi masalah krisis air. Sejak kehadiran perusahaan ini di India, sejumlah besar

29 Coca-Cola: Code of Business Conduct. <http://www.thecoca-cola company.com/ourcompany/business_conduct. html> (accessed 28 January 2008).

30 War on Want, *Coca-Cola: the Alternative Report*, London: War on Want, March 2006.

air telah diambil dari tanah untuk membuat Coca-Cola dan membuat orang-orang yang tinggal dan bekerja di sekitar bagian unit pembotolan Coca-Cola kekurangan air baik untuk minum maupun untuk pertanian. Tanah-tanah lumpur, yang terkontaminasi oleh logam beracun seperti kadmium dan timah, telah mencemari tanah dan air di sekitar bangunan [tempat pembotolan Coca-Cola]. Coca-Cola juga telah mendistribusikan lumpur [yang terkontaminasi itu] kepada para petani untuk memupuk tanaman mereka, yang kemudian menyebabkan gagal panen. Akibatnya para petani kehilangan mata pencaharian dan kaum perempuan sekarang harus menempuh perjalanan yang jauh untuk mencari air bagi keperluan rumah tangga.

Bangunan tempat pembotolan perusahaan Coca-Cola di Plachimada di negara bagian Kerala/India mulai beroperasi pada tahun 2000, tetapi kehadirannya menimbulkan perlawanan hebat dari masyarakat setempat yang terkena dampaknya sehingga ia terpaksa ditutup pada tahun 2004. Dalam waktu enam bulan sejak pendiriannya, orang-orang desa — yang tergolong orang termiskin di negara bagian Kerala — menyaksikan bahwa air di wilayah mereka semakin kurang dan kualitasnya turun secara drastis, yang menimbulkan munculnya macam-macam penyakit. Coca-Cola mengebor sebanyak 350.000 liter (atau 3.500 drom) air dari dalam tanah per hari untuk unit pembotolan pabrik Coca-Cola, dan masyarakat setempat segera melancarkan protes.

Pada tahun 2002 Dinas Kesehatan setempat memutuskan bahwa air di sumur dekat pabrik itu tidak layak untuk digunakan manusia. Pada akhir 2003, Pengadilan Tinggi Kerala memutuskan bahwa ekstraksi berat Coca-Cola dari sumber daya air tanah umum adalah ilegal, dan memerintahkannya untuk mencari sumber alternatif untuk produksinya. Pada bulan Maret 2004, dewan desa menolak untuk memperbarui lisensi perusahaan, dengan alasan bahwa lisensi telah digunakan secara berlebihan dan menyebabkan polusi sumber air masyarakat setempat. Sejak pabrik ditutup, telah terjadi penurunan 50% dalam penjualan minuman Coca-Cola di Kerala.[31]

31 Surendranath, C., 'Coke vs People: The Heat Is on in Plachimada', India Resource Centre, 14 April 2004.

Menjelang akhir tahun 1999, Coca-Cola mendirikan pabrik pembotolan di desa Kaladera di Rajasthan, yang dikenal sebagai negara bagian padang pasir. Kaladera adalah sebuah desa kecil dan miskin yang ditandai dengan iklim semikering. Petani mengandalkan akses air di dalam tanah untuk budi daya tanaman pangan mereka. Tapi sejak kedatangan perusahaan Coca-Cola, mereka telah dihadapkan dengan masalah kekurangan air yang sangat mengkhawatirkan, yang membuat tanaman pangan dan mata pencaharian mereka berada dalam bahaya.

> Penduduk desa setempat bersaksi bahwa kedatangan Coca-Cola memperburuk situasi mereka yang sudah genting. Dokumen resmi dari kementerian air pemerintah menunjukkan bahwa tingkat air tetap stabil dari tahun 1995 sampai tahun 2000, ketika pabrik Coca-Cola menjadi operasional. Tingkat air kemudian turun hampir 10 meter selama lima tahun berikutnya. Warga setempat takut bahwa Kaladera bisa menjadi 'zona gelap', sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan daerah yang ditinggalkan karena sumber daya air habis.[32]

Komunitas-komunitas lain di India yang hidup dan bekerja di sekitar pabrik pembotolan Coca-Cola mengalami kekurangan air yang parah serta kerusakan lingkungan. Penduduk desa setempat di dekat kota suci Varanasi di Uttar Pradesh, misalnya, mengeluh bahwa eksploitasi perusahaan yang berlebihan atas sumber daya air mereka telah mengorbankan panen masyarakat setempat dan menyebabkan pengeringan sumur-sumur mereka. Sama seperti di Rajasthan dan Kerala, warga desa di Utttar Pradesh telah melakukan protes terhadap pabrik Coca-Cola di tempat itu karena perampasan atas sumber daya air dari masyarakat setempat.

Studi-studi, termasuk sebuah studi oleh Dewan Air Tanah Pusat di India, telah membenarkan adanya penurunan tabel air yang signifikan. Ketika air diekstraksi dengan menggali semakin dalam, air menjadi bau dan rasanya aneh. Tampaknya, Coca-Cola telah membuang air limbah ke dalam hamparan wilayah di sekitar pabrik dan kadang-kadang ke sungai-

32 War on Want, *Coca-Cola: the Alternative Report.*

sungai di daerah itu. Hasilnya adalah bahwa air tanah serta tanah telah tercemar. Penguasa setempat di bidang kesehatan telah menempelkan tanda-tanda/pengumuman di sekitar sumur-sumur dan pompa tangan dan mengingatkan masyarakat bahwa air di sumur-sumur itu tidak baik untuk dikonsumsi manusia.

Pengujian yang dilakukan oleh berbagai instansi, termasuk pemerintah India, menegaskan bahwa produk-produk Coca-Cola mengandung pestisida yang tinggi. Namun, Coca-Cola memperkenalkan produk-produk baru di pasar India. Salah satu fasilitas pembotolan terbaru yang ingin dibuka di Ballia, terletak di daerah dengan kontaminasi arsenik parah di dalam air tanahnya.[33]

Sebuah laporan yang ditugaskan oleh perusahaan mengatakan bahwa pabrik pembotolan Coca-Cola di India berkontribusi terhadap kelangkaan air dan sering gagal untuk memenuhi peraturan perusahaan sehubungan dengan pengolahan air limbah. Laporan oleh Institut Energi dan Sumber Daya, sebuah organisasi riset independen yang berbasis di New Delhi, didirikan untuk mengelola masalah kekhawatiran tentang praktik bisnis Coca-Cola di India. Exekutif Coca-Cola mengatakan bahwa perusahaan telah mengikuti standar lingkungan "yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Kami melihat laporan ini sangat, sangat positif dan sangat serius. Seluruh laporan ini — yang memakan waktu hampir 18 bulan — jelas merupakan komitmen bagi saya dan tim saya untuk membawa rekomendasi kepada sidang dewan yang berangkat dari laporan in," kata Atul Singh, presiden Coca-cola dari divisi India.[34]

Dua kesimpulan utama dari laporan tersebut adalah bahwa Coca-Cola harus memperbaiki pengelolaannya terhadap air limbah pabrik dan harus menghindari pembangunan pabrik pembotolan di daerah di mana sumber daya air yang sudah kurang [bagi masyarakat setempat]. Perusahaan telah berjanji akan mengganti kembali air dari akuifer-akuifer India

33 Informasi dari India Resource Centre. <www.indiaresource.org> (accessed 28 January 2008).

34 Simons, C., 'Report faults Coke water use in India. Company says it is following environmental standards', Cox News Service (US), 14 January 2008.

dari yang pernah digunakan pabrik pembotolan Coca-Cola hingga tahun 2009.

Aktivitas pabrik Coca-Cola di Afrika juga menimbulkan perlawanan. Di daerah pelabuhan Nigeria Apapa, misalnya, sekitar 4.000 orang, banyak dari mereka merupakan warga masyarakat miskin dan buta huruf, percaya bahwa pabrik pembotolan Coca-Cola di wilayah itu "telah mencuri mata pencaharian mereka".[35] Coca-Cola dituduh mencemari sebuah laguna dengan memompa limbah yang tidak diolah ke dalam air dan membunuh ikan-ikan di dalam laguna tersebut.

Sesungguhnya, protes internasional terhadap Coca-Cola karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pencemaran lingkungan sudah mulai bertumbuh. Kampanye Internasional untuk Meminta Coca-Cola Akuntabel adalah perjuangan utama yang menghubungkan hak-hak buruh, hak asasi manusia dan keadilan lingkungan.

Kaum buruh Coca-Cola sendiri ini telah banyak menderita, kata *War on Want,* dan perusahaan sering dikaitkan juga dengan sikapnya yang anti-serikat buruh. Kasus yang paling menonjol adalah di Kolombia, di mana paramiliter telah menewaskan delapan pekerja Coca-Cola sejak tahun 1990. Serikat Buruh utama Coca-Cola SinalTrainal berusaha untuk meminta Coca-Cola bertanggung jawab dan menuduhnya telah menggunakan kekuatan paramiliter untuk mengintimidasi anggota serikat buruh untuk menjaga pembotolan pabriknya bebas dari kegiatan serikat mereka. SinalTrainal menuduh bahwa anggota dan keluarga mereka telah dikenakan 'siklus kekerasan mengerikan' oleh pasukan paramiliter Kolombia dan diduga anak perusahaan pembotolan Coca-Cola di Kolumbia terlibat di dalamnya.[36]

Kaum buruh Guatemala telah berjuang melawan Coca-Cola sejak 1970-an. Pada tahun-tahun antara 1976 dan 1985, tiga sekretaris umum dari serikat utama dibunuh dan anggota keluarga, teman-teman dan

---

35 Teather, D., 'Has Coke become the new McDonald's?' *The Guardian*, 18 August 2006.

36 War on Want, *Coca-Cola: the Alternative Report.*

penasihat hukum mereka diancam, ditangkap, diculik, ditembak, disiksa, dan dipaksa ke pengasingan. Pelanggaran terhadap hak-hak pekerja terus berlangsung. Dan kaum buruh Coca-Cola dan anggota keluarga mereka, yang memiliki hubungan dengan serikat pekerja, telah dilaporkan menjadi sasaran ancaman pembunuhan. Di tempat lain di negara-negara seperti Peru, Rusia dan Chili, para buruh Coca-Cola telah melancarkan protes terhadap kebijakan perusahaan yang anti-serikat buruh.

[Terhadap isu-isu pelanggaran di atas,] Coca-Cola membela diri-nya dan dengan tegas menolak keterlibatannya dalam setiap tuduhan yang paling serius dan mengklaim tidak ada substansi terhadap klaim-klaim yang diarahkan kepadanya. Coca-Cola telah menyewa sebuah perusahaan hubungan kemasyarakatan, yang bernama Hubungan Sempurna (*Perfect-Relations*), untuk mengembangkan citra baru bagi perusahaan Coca-Cola di India. Kepala komunikasi untuk Coca-Cola Asia telah dipindahkan ke India dari Hong Kong untuk mencoba mengatasi sikap anti-pathy masyarakat setempat di India terhadap Coca-Cola. Hal ini merupakan indikasi keberhasilan dari kampanye perusahaan. Coca-Cola juga telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan secara signifikan anggaran untuk pemasarannya di India.

Aktivitas Coca-Cola, khususnya di Kolombia dan India, telah menarik sejumlah kampanye — terutama Kampanye untuk Menghentikan Pembunuh Coke (*Campaign Stop Killer Coke*) dan Kampanye Internasional untuk Coca-Cola yang Bertanggung Jawab (*The International Campaign to Hold Coca-Cola Accountable*). Mahasiswa-mahasiswa di sekitar sepuluh universitas di AS telah melarang minuman Coca-Cola. Para pegawai pos di Amerika Serikat telah mendesak penghapusan mesin penjual Coca-Cola dari kantor pos. Serikat-serikat guru di New York dan California telah meluluskan resolusi yang menyerukan penghapusan Coke dari sekolah-sekolah mereka.

Pada bulan Oktober 2007 Coca-Cola adalah salah satu dari empat perusahaan yang dipilih untuk menerima Penghargaan Produk Internasional Yang Buruk (*International Bad Product Award*) oleh para Konsumen Internanional. Penghargaan [buruk ini] bertujuan untuk menyoroti kegagalan tanggung jawab perusahaan dan penyalahgunaan kepercayaan konsumen

oleh merek-merek yang diakui secara internasional. Coca-Cola diberi penghargaan [buruk] "karena ia tetap melanjutkan pemasaran internasional atas air botol yang bernama Dasani, meskipun perusahaan mengakui bahwa produk ini berasal dari sumber yang sama seperti air keran lokal".[37]

Buah, sayuran, dan bunga

Dalam mengejar pendapatan ekspor, sejumlah negara berkembang telah berpaling ke usaha pembudidayaan buah-buahan, sayuran, dan bunga. TNCs telah menonjol dalam usaha ini, akan tetapi bidang usaha ini sekali lagi sering membuat hidup lebih sulit bagi masyarakat setempat.

Sebuah pertumbuhan yang besar dalam ekspor buah, sayuran, dan bunga dari Amerika Latin ke Amerika Serikat telah terjadi selama dua puluh tahun terakhir. Sebagian besar lahan pertanian yang terbaik di Amerika Latin sekarang tidak hanya sedang membudidayakan tanaman ekspor tradisional, seperti kopi, gula, pisang, dan kapas, tetapi juga produk-produk lain untuk ekspor seperti mangga, kedelai, dan bunga mawar. Ini merupakan tanaman ekspor non-tradisional yang dapat dijual dengan harga tinggi. Bagi mereka yang memegang kuasa kontrol, bisnis tersebut menguntungkan. Tapi umumnya, orang-orang yang memegang kontrol adalah para tuan tanah, investor kaya dan perusahaan asing. Pebisnis-pebisnis yang besar telah mengakumulasi tanah untuk pembudidayaan tanaman ekspor, sementara para petani miskin telah terjepit keluar dari pasar dan didorong ke bagian lahan yang marginal.

Perdagangan sering masuk dengan mengorbankan sumber makanan bagi masyarakat lokal dan "dengan mengorbankan kesehatan para buruh kerja, distribusi yang tidak merata atas keuntungan ekonomis dan degradasi lingkungan di banyak negara pengekspor".[38] Pada tahun 1980, Chili

---

37 Consumers International, 'Global consumer movement announces winners of International Bad Product Awards', Consumers International, October 2007. <http://www.consumersinternational.org> (accessed 28 January 2008).

38 Thrupp, L. A., with G. Bergeron and W. F. Waters, *Bittersweet Harvests for Global Supermarkets: Challenges in Latin America's Agricultural Export Boom*, Washington, DC: World Resources Institute, 1995.

mengekspor kacang-kacangan, sebuah makanan pokok yang penting, karena umumnya dibudidayakan terutama untuk konsumsi lokal. Tapi pada awal 1990-an jumlah kacang-kacangan yang diekspor hampir tiga kali lebih tinggi –55.000 ton per tahun, dibandingkan dengan hanya 20.000 ton yang ditanam untuk konsumsi lokal. Produsen-produsen buah-buahan berkala besar telah membeli ladang-ladang buah para petani kecil. Hal "telah mengubah wajah pertanian negara [Chili] dan menyakitkan hati banyak petani kecil".[39] Dukungan pemerintah bagi petani untuk membantu mereka mempertahankan produksi bahan pangan telah jatuh secara dramatis di banyak negara di Amerika Latin.

Para petani berskala kecil dan konsumen-konsumen di Amerika Latin sedang memikul akibat dari pergeseran drastis untuk pertanian dengan orientasi ekspor. Di kota-kota besar dan kota kecil di seluruh Amerika Latin, kacang-kacangan sekarang telah menjadi kangka karena ladang-ladang yang dulu pernah digunakan untuk budi daya kacang sekarang beralih menjadi kebun sayur-sayuran untuk ekspor. Padahal kacang berkontribusi sekitar 30% dari protein yang dikonsumsi oleh 200 juta keluarga berpenghasilan rendah di Amerika Latin. Kebanyakan petani kacang sekarang mengalihkan usaha menanam sayur-mayur untuk ekspor dan kurang menggunakan tanah mereka (yang luasnya sering sudah kecil) untuk budi daya kacang bagi kebutuhan mereka sendiri. Jutaan orang miskin telah menyaksikan penurunan ketahanan pangan mereka sebagai akibat dari perdagangan ini. Dalam sebuah usaha dagang yang didominasi oleh TNCs, semakin banyak negara-negara berkembang membudidayakan dan mengekspor bunga ke negara-negara Barat. Kenya, Kolombia, India, dan Cina adalah di antara eksportir utama dari komoditi baru.

Kenya adalah pemasok utama bunga ke pasar Eropa, yang menyediakan 31% dari kebutuhan bunga Eropa pada tahun 2006, meningkat dari 25% pada tahun 2003. Sistem irigasi yang digunakan oleh industri bunga Kenya menuntut penggunaan-penggunaan air yang banyak. Banyak perkebunan di lahan sekitar Danau Naivasha yang sebelumnya merupakan daerah

39 *Ibid.*

peternakan tanah dan pertanian kecil. Sebuah perkiraan mengatakan bahwa sekitar 15 cm air diambil setiap tahun dari Danau Naivasha oleh para petani bunga. Ini berarti bahwa air yang tersedia bagi para petani yang memproduksi tanaman pangan semakin kurang.[40] Kenya sudah menderita kekurangan lahan untuk produksi makanan, dan tampaknya ada konflik antara perluasan tanaman hortikultura dan peternakan pemilik Suku Maasai, yang mengklaim bahwa tanah di sekitar Danau Naivasha adalah milik mereka.

Perdagangan juga memiliki implikasi bagi kesehatan para pekerja. Pada Hari Valentine tahun 2002 sebuah kampanye nasional dibuat untuk mendukung ribuan pekerja di perkebunan bunga Kenya. Kampanye itu menggunakan simbol "mawar biru" untuk menyoroti permintaan masyarakat akan sebuah simbol cinta dapat menyebakan akibat yang menghancurkan bagi para pekerja, menyebabkan mereka untuk bekerja berjam-jam atas waktu lembur yang dipaksakan untuk memenuhi peningkatan permintaan.

Salah satu keprihatinan utama dari Organisasi Wanita Pekerja Kenya (*Kenya WomenWorkers' Organization* atau KEWWO) adalah kurangnya kondisi kerja yang aman dan bersih. Para kaum buruh mengatakan bahwa mereka harus kembali masuk rumah kaça segera setelah penyemprotan, dan melaporkan adanya penyakit kulit dan saluran pernapasan dan infeksi mata. Pekerja perempuan juga melaporkan adanya pelecehan verbal dan seksual oleh supervisor. Seorang pekerja melaporkan bagaimana ia diangkut dalam truk tanpa ventilasi yang diperuntukkan untuk pengangkutan bunga dan para pekerja lain mengeluh soal perumahan [tempat kerja] yang terlalu penuh sesak. Sebagian besar pekerja perempuan mengatakan mereka dipekerjakan secara musiman atau kasual.

WHO merekomendasikan sekurang-kurangnya 24 jam antara waktu bunga disemprot dengan pestisida untuk mempertahankan keindahan mereka waktu para karyawan kembali memasuki daerah tersebut. Sebuah laporan dari *War on Want* mengatakan bahwa "ketika supermarket Inggris

---

40 "Kenya flower exports flourish despite odds2, *African Agriculture* (30 April, 2007).

mengatakan bahwa pesanan habis, banyak pekerja yang disuruh masuk rumah kaca untuk memotong bunga tanpa pakaian pelindung yang tepat setelah fumigasi". Dikatakan bahwa kaum perempuan di Kolombia, "yang dipaksa untuk menghirup bahan-bahan kimia beracun, rata-rata mengalami keguguran dan bayi yang dilahirkan cacat. Paparan pestisida sering kali menyebabkan para buruh pingsan, asma kronis, masalah mata, dan pernapasan, keluhan soal kulit, alergi, dan sakit kepala".[41]

Di India, semakin banyak bunga untuk tujuan ekspor diproduksi setiap tahun, yang dibantu dan didukung oleh pemerintah, sedangkan perusahaan dari Belanda memasok banyak bahan penanaman. Negara bagian Karnataka adalah yang pertama yang mempromosikan pembudidayaan bunga (*floriculture*). Kebijakan pertanian, yang dimulai pada tahun 1995, menabur tanaman korporasi, tapi kini telah ada peralihan fokus dari sereal ke bunga. Bengal Barat, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Maharashtra, dan yang paling baru Haryana telah menjadi kecanduan akan kekuasaan aroma bunga. Sejumlah besar bunga yang dibudidayakan diekspor ke Eropa.

Dengan jarak tanam khas 60.000 tanaman bunga per hektar di India, dan kebutuhan untuk mempertahankan standar kualitas internasional, penggunaan bahan kimia pertanian sangat tinggi. Rata-rata penyemprotan pestisida dua kali seminggu diperlukan untuk mengendalikan hama dan penyakit. Namun, karena kebijakan pembibitan nasional India dilonggarkan pemberlakuannya pada tahun 1988, untuk mendorong industri bunga, maka sekitar 40 jenis hama dan penyakit baru telah muncul India.

Mengubah lahan subur dari produksi makanan pokok untuk budi daya komersial bunga bisa mengancam keberlanjutan sistem pertanian India. Budi daya bunga ini tidak seekonomis pembudidayaan tanaman pangan. Jika sumber daya yang digunakan untuk pemeliharaan bunga dialokasikan untuk produksi pangan, kata Vandana Shiva, India akan menghasilkan makanan empat kali lebih daripada yang India bisa beli di pasar global dengan menggunakan pendapatan dari penjualan bunga. "Dalam hal

41 War on Want, *Growing Pains: The Human Cost of Cut Flowers in British Supermarkets*, London: War on Want, March 2007.

ketahanan pangan nasional, pertanian yang berorientasi ekspor lebih banyak menghancurkan daripada menciptakan," katanya.[42]

Pendapatan valuta asing bersih dari satu hektar lahan yang ditanami mawar cukup untuk mengimpor hanya 1.256 ton tanaman pangan. Tapi sebuah tambahan 4.274 ton tanaman pangan, dan hampir 200.000 hari kerja, bisa dihasilkan jika sumber daya dan modal yang digunakan dalam satu hektar budi daya bunga mawar itu harus digunakan sebagai pengganti untuk tanaman pangan. Ini menunjukkan keunggulan ekonomis dan kebutuhan sosial dari tanaman pangan lebih superior dari budi daya bunga.[43]

Pertanian bunga (*floriculture*) juga menuntut air dalam jumlah melimpah, pada 212 inci per hektar. Ia menggunakan empat kali jumlah air yang digunakan untuk tanaman pangan. Sebuah jejak dampak negatif sedang ditinggalkan pada struktur tanah, yang menggerus kesuburan dan mengontaminasi pasokan air minum di bawah tanah. Pada akhirnya tanah di bawah budi daya bunga yang intensif bisa membuatnya tak produktif dan tandus. Impian florikultur bisa berubah menjadi mimpi buruk kerawanan pangan dan bencana ekologis.

Kapas

Walaupun perbudakan anak tidak memiliki tempat di abad kedua puluh satu ini, namun dalam kenyataannya tetap terus berlangsung dalam rantai pasokan kapas India, demikian dilaporkan Komite India dari Belanda. Lebih dari 416.000 anak di bawah usia 18 tahun, di antaranya hampir 225.000 lebih muda dari 14 tahun, terlibat dalam (sering terbelenggu) pekerja anak-anak di ladang-ladang kapas India. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan.

---

42 Acharya, K., 'Thorns in the booming cut-rose industry', International Press Service News Agency, 4 December 2007.

43 Sharma, D., *Selling Out: the Cost of Free Trade for Food Security in India*, London: UK Food Group, 1999, dan wawancara dengan Mr. Sharma.

Anak-anak bekerja di negara-negara bagian Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, dan Tamil Nadu. Lebih dari 13 perusahaan besar India dan dua TNCs, Senin-santo dan Bayer, terlibat dalam "bentuk perbudakan modern atas anak-anak", kata Komite India. Mereka yang paling banyak terlibat adalah perusahaan India Nuziveedu, Raasi, Ankur, dan Monsanto, termasuk mitra Mahyco India.[44]

Kelapa sawit: Indonesia

Perburuan akan kelapa sawit dan agrofuel mengancam akan melepaskan 14 miliar ton karbon dari lahan gambut di Indonesia, yang memiliki cadangan tanah gambut terbesar di dunia. TNCs mempertaruhkan bencana perubahan iklim dengan merusakkan lahan-lahan gambut, demikian dilaporkan Greenpeace. Lahan gambut Indonesia selama ini berperan sebagai penyimpan karbon yang besar, sehingga menggantinya dengan perkebunan berarti melepaskan volume besar gas rumah kaca ke atmosfer. Walau mereka hanya mencakup 0,1% dari tanah di bumi, "berkat budi daya industri minyak sawit mereka berkontribusi 4% emisi global. Jika ekspansi industri kelapa sawit terus berlanjut tak terbendung, maka angka itu akan terus naik".[45] Sebuah laporan Program Lingkungan PBB pada tahun 2007 (dikutip dalam laporan Greenpeace) mengakui bahwa perkebunan kelapa sawit sekarang menjadi penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia dan Malaysia .

Unilever, Cargill, Nestle, Kraft, Procter & Gamble, dan supermarket Inggris adalah pengguna-pengguna besar dari minyak sawit Indonesia, yang paling banyak berasal dari provinsi Riau di Sumatera. Sekitar 14,6 miliar ton karbon — hampir setara dengan satu tahun seluruh emisi karbon global — terkancing di *peatbeds* (tanah gemuk) Riau, terdalam di dunia. Lebih dari 1,4 juta hektar hutan perawan di Riau telah dikonversi menjadi

---

44 Venkateswarlu, D., *Child Bondage Continues in Indian Cotton Supply Chain*, Utrecht: India Committee of the Netherlands, 25 September 2007.

45 Greenpeace International, *How the Palm Oil Industry is Cooking the Climate*, Greenpeace International, November 2007.

kelompok ini adalah untuk menciptakan standar yang jelas dari produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.

Menghadapi masalah-masalah yang dikhawatirkan ini, perusahaan-perusahaan menyangkal keterlibatan langsung dalam penciptaan perkebunan sawit, namun mengakui bahwa ada masalah minyak sawit yang berkelanjutan. Nestlé, yang menggunakan 170.000 ton minyak sawit dari Malaysia dan Indonesia, mengatakan bahwa ia mempunyai sumber pasokannya dari pemasok yang bertanggung jawab, dan bahwa pada saat ini tidak ada minyak sawit yang disertifikasi sebagai berkelanjutan: "Begitu prinsip-prinsipnya diadopsi, Nestlé akan ikut mempromosikan pengadopsian mereka". Unilever, yang menggunakan 1,2 juta ton minyak sawit per tahun, mengatakan telah menginvestasikan banyak waktu dan uang untuk memastikan bahwa pasokan minyak kelapa sawitnya dibudidayakan dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan: "Pekerjaan kami.... baru-baru ini telah dibuat menjadi lebih berat karena perburuhan menuju biofuel. Kami telah melobi keras dengan pemerintah untuk mengingatkan mereka akan konsekuensi yang tidak diinginkan dari kebijakan ini pada pasokan pangan global dan deforestasi." Cargill, yang mengimpor 535.000 ton minyak sawit per tahun ke Inggris, mengatakan: "Kami sudah membuat analisis dampak bagi perkembangan baru dan tidak mengembangkan budidaya sawit di wilayah bernilai konservasi tinggi".[49]

Kesimpulan

Banyak TNCs yang terlibat dalam agri-komoditas yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Mereka menggunakan posisi dominan mereka untuk mempersulit pemenuhan kebutuhan masyarakat di mana mereka aktif beroperasi, dan melakukan terlalu sedikit untuk memperbaiki pelanggaran-pelanggaran [hak asasi manusia dan lingkungan]. Kelompok masyarakat yang selalu memikul akibatnya adalah orang-orang yang paling miskin.

49 Vidal, J., 'Big food companies accused of risking climate catastrophe', *The Guardian*, 8 November 2007.

BAB 4

Kesehatan: Orang Miskin Telan Pil Korporasi

Obat tidak begitu saja sama seperti produk-produk lain, mereka harus dibentengi oleh prinsip-prinsip etika dan moral yang lebih dibandingkan dengan produk-produk lainnya. (Fredrik Hedlund)

Obat-obatan yang syah secara hukum sama sekali bukan skandal. (Susan George)

Dunia ini sedang menghadapi risiko semakin meningkatnya "wabah penyakit, ... bencana alam dan keadaan darurat kesehatan lainnya", demikian kata laporan tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2007.[1] Hampir pasti, orang-orang miskin selalu yang paling banyak menderita dan jadi korban penyakit. Dalam situasi seperti ini, TNCs-lah bisa berbuat banyak untuk membawa obat-obatan yang esensial bagi masyarakat miskin.

Hampir dua miliar orang, mendekati sepertiga dari jumlah umat manusia [menurut statistik 2012 jumlah penduduk bumi adalah sekitar 7 miliar jiwa], tidak bisa mengakses obat-obatan yang esensial. Setiap menit, rata-rata 26 orang meninggal dunia akibat penyakit menular, kematian yang sesungguhnya dapat dihindari. Malaria menelan korban sekitar satu juta jiwa setiap tahun — kebanyakan anak-anak dan wanita hamil. Dua juta orang meninggal setiap tahun karena TBC [*Tuberculosis*]. Setengah dari kematian global akibat kanker terjadi di negara-negara berkembang. Penyakit asma meningkat rata-rata sebesar 50% setiap sepuluh tahun di kota-kota di negara-negara berkembang.

1 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), *The World Health Report 2007*, Geneva: WHO, 2007.

HIV/AIDS menyebabkan penderitaan manusia yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Di beberapa negara, penyakit ini membuat kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama puluhan tahun justru mundur ke belakang. HIV/AIDs mejadi penyebab utama kematian di Afrika. Pada tahun 2007, 33,2 juta orang diperkirakan akan hidup dengan HIV, 2,5 juta orang barusan saja terinfeksi HIV dan 2,1 juta orang meninggal karena AIDS. Diperkirakan 1,7 juta orang barusan saja terinfeksi HIV di sub-Sahara Afrika pada tahun 2007. Diperkirakan 22,5 juta penduduk dunia hidup dengan HIV — dan 68% dari jumlah ini berada di sub-Sahara Afrika.[2]

TNCs farmasi sebenarnya bisa membantu untuk membasmi penyakit-penyakit ini. Karena perusahaan-perusahaan ini memiliki kekuatan besar. Pasar global [farmasi] dikendalikan oleh selusin perusahaan raksasa seperti Pfizer, Bristol-Myers Squibb, Bayer, Merck & Co, Pharmacia, Novartis, Johnson & Johnson, Abbott Laboratories, American Home Products, Eli Lilly, Schering-Plough, GlaxoSmithKline, dan Allergan. Berbasis di New York, pemimpin pemasaran dari perusahaan Pfizer mempekerjakan sekitar 87.000 karyawan di lebih dari 150 negara yang bekerja untuk menemukan, mengembangkan, memproduksi dan memberikan resep obat-obatan yang berkualitas, aman dan efektif kepada para pasien.[3]

Sepuluh perusahaan farmasi yang berprofit paling tinggi, 2006 di dunia (US$ juta)

Nama Perusahaan	Profit
1. Pfizer (USA)	19.337
2. Johson and Johnson (USA)	11.053
3. GlaxoSmithKline (UK)	10.135
4. Hoffmann-La Roche (Switzerland)	7.318
5. Novartis (Switzerland)	7.202

2 UNAIDS data, November 2007. <http://data.unaids.org> (accessed 18 December 2007).

3 Pfizer website. <http://www.pfizer.com/about/leadership_and_structure/ company_fact_sheet.jsp> (accessed 20 December 2007).

6.	AstraZeneca (UK)	6.063
7.	Sanofi-Aventis (FR)	5.033
8.	Merck (USA)	4.434
9.	Wyeth (USA)	4.197
10.	Amgen (USA)	2.950

Sumber: Berasal dari "Top 50 pharmaceutical companies", *MedAdNews*, September 2007.

Gabungan nilai kekayaan dari lima perusahaan farmasi paling top di atas sama dengan dua kali gabungan GNP dari semua negara-negara Afrika sub-Sahara. Pengaruh mereka terhadap aturan perdagangan dunia juga sangat kuat karena mereka dapat menggunakan kekayaan mereka untuk memengaruhi langsung para penguasa pemerintah negara Barat".[4] Dominasi pasar farmasi-TNCs memungkinkan mereka untuk mendikte sebagian besar apa yang diproduksikan dan harga penjualannya. Mereka bergerak sangat pelan bagai siput dalam menyediakan obat-obatan dengan biaya murah bagi masyarakat miskin yang sangat membutuhkannya. Akses yang semakin baik terhadap obat-obatan seharusnya bisa menyelamatkan jutaan jiwa manusia per tahun.

Pasar global produk-produk farmasi pada tahun 2006 mencapai nilai sebesar US$643 miliar (sekitar Rp6.430 triliun).[5] Jumlah ini adalah dua kali lipat dalam sepuluh tahun, meskipun profit-profit industri ini telah berada di bawah tekanan dan tidak memberikan investor pengembalian yang mereka biasa peroleh sebelumnya. Tapi ukuran dan anggaran tahunan dari perusahaan-perusahaan utama farmasi dalam relasi mereka dengan sebagian besar negara-negara berkembang membuat mereka berada dalam posisi yang kuat untuk memengaruhi kebijakan kesehatan pemerintah [negara tuan rumah] dan para konsumen [obat-obatan]. Di sejumlah

4 'USA: the pharmaceutical industri stalks the corridors of power', *Guardian Unlimited*, 13 February 2001.

5 IMS Health, 'IMS Health reports global pharmaceutical market grew 7.0 per cent in 2006, to $643 billion', IMS Health, Norwalk (US), 20 March 2007.

negara berkembang, 20–30% dari anggaran kesehatan digunakan untuk pengadaan obat-obatan, yang kebanyakan dibuat oleh TNCs farmasi.

Para TNCs farmasi mengklaim bahwa mereka membantu orang miskin untuk bisa akses terhadap obat-obatan. Tapi kenyataannya, TNCs ini hampir tidak berminat untuk mengembangkan obat-obat baru untuk melawan penyakit yang menimpa orang-orang miskin di dunia. "Hanya 10% dari total investasi global dalam penelitian farmasi ditujukan pada penyakit yang menimpa 90% dari penduduk dunia."[6] Antara tahun 1975 dan 2004, ada 1.556 bahan aktif baru untuk obat-obatan yang dikembangkan oleh farmasi-TNCs, "tetapi dari jumlah besar ini hanya 18 buah yang didedikasikan untuk melawan penyakit-penyakit [di negara-negara] tropis," kata Mira Shiva dari LSM Aksi Kesehatan International (*Health Action International NGO*).[7]

Akses terhadap obat-obatan sangat fundamental jika orang ingin menikmati hak mereka untuk hidup sehat. Kalau pemerintah di satu pihak mempunyai tanggung jawab penting untuk menjamin akses pelayanan kesehatan bagi semua warga negaranya, maka industri farmasi di pihak lain yang berperan menyediakan obat-obatan mempunyai tanggung jawab tersendiri.

Sebuah laporan LSM pada tahun 2002, yang berjudul "Melampaui Kedermawan" (*Beyond Phylantrophy*), menyerukan agar industri farmasi memberikan kontribusi untuk mengatasi krisis kesehatan di negara-negara berkembang. Laporan ini mengusulkan seperangkat tolok ukur untuk membantu investor dalam menilai tanggung jawab sosial perusahaan farmasi. Tolok ukur ini berhubungan dengan kebijakan perusahaan dan praktik dalam lima bidang utama yang berdampak pada akses terhadap obat-obatan untuk 14 juta anak-anak dan orang dewasa yang meninggal

6 Kuanpoth, J. (University of Wollongong, Sydney), makalah yang dipresentasikan pada The International Conference on Compulsory Licensing: Innovation and Access for All, November 2007. Dikutip dalam Marwaan Macan-Markar, 'Global campaign vows to fight MNC drug monopoly', International Press Service News Agency. <www.corpwatch.org/article.php? id=14831> (accessed 20 December 2007).

7 *Ibid.*

setiap tahun akibat penyakit menular. Laporan ini menantang industri farmasi untuk mengadopsi kebijakan harga, paten, gabungan inisiatif publik-swasta, penelitian dan pengembangan, dan penggunaan obat-obatan yang tepat.[8]

Sejak publikasi dari laporan LSM ini, industri farmasi sedunia telah membuat kemajuan yang mengagumkan di beberapa hal ini, terutama dengan mengadopsi kebijakan-kebijakan terbatas untuk mempromosikan akses ke obat-obatan untuk penyakit amat berbahaya seperti HIV dan AIDS, TBC, dan malaria. Namun kepastian jutaan orang miskin bisa mendapatkan obat-obatan yang mereka butuhkan masih merupakan sebuah tantangan besar, "mengingat munculnya penyakit baru, dan kembalinya penyakit-penyakit "lama", ancaman pandemik, dan beban pertumbuhan dari penyakit menular di negara-negara berkembang".[9]

Paten, dan pengaruhnya terhadap harga, merupakan faktor kunci. TNCs Farmasi melindungi obat-obatan yang mereka kembangkan dengan paten. Mereka berpendapat bahwa perlindungan paten yang kuat diperlukan untuk usaha penelitian dan pengembangan mereka. Paten melindungi profit perusahaan, tetapi juga berarti bahwa perusahaan yang bersaing tidak dapat menghasilkan harga obat-obatan lebih rendah, dan dengan demikian hanya dapat menghambat pengembangan obat-obat generik. Pengunaan oleh TNCs atas perjanjian Hak Kekayaan Intelektual yang Berhubungan dengan Perdagangan (*Trade-Related Intellectual Property Rights* atau TRIPS) mencegah orang miskin mengakses obat-obat generik yang murah tapi esensial. Karena hak paten dapat berlaku untuk sebuah jangka waktu yang lama, maka perusahaan-perusahaan mempunyai kekuatan monopoli dan orang-orang miskin menjadi semakin tak berdaya. Tanpa kompetisi generik, orang tidak punya pilihan selain harus membeli prdoduk-produk yang bermerek baru yang berarti [karena merek dan obat baru] harganya lebih tinggi.

8 Save the Children, Voluntary Service Overseas and Oxfam, 'Beyond Philanthropy', report, 2002.

9 Oxfam, 'Investing for life: meeting poor people's needs for access to medicines through responsible bisnis practices', Briefing Paper 109, November 2007.

Menurut perkiraan WHO, sekitar 85% dari peduduk dunia tidak sanggup membeli obat-obatan untuk keperluan kesehatan mereka. Harga yang tinggi merupakan salah satu hambatan utama untuk akses kepada obat-obatan. Masyarakat miskin perlu akses ke pengobatan yang tersedia dengan harga-harga yang bisa dijangkau sesuai dengan kemampuan mereka. "Industri [farmasi] harus menempatkan akses terhadap obat-obatan pada jantung dari setiap keputusan dan praktik yang dibuatnya. Hal ini harus menjadi strategi bisnis yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan akan memungkinkan industri untuk memainkan perannya secara lebih baik dalam mencapai hak universal di bidang kesehatan."[10] Harga obat-obatan harus diatur menurut sebuah formula yang mencerminkan kemampuan [masyarakat miskin] untuk membayar. Tapi hingga saat ini, persis hal ini yang industri [farmasi] gagal untuk dilakukan:

> Tanggapan-tanggapan industri terhadap kinerja keuangan yang lesu — menaikan harga, sangat agresif membela hak paten dan memperpanjang [paten-paten] yang sudah ada melalui 'pembaruan' (ever-greening) daripada investasi dalam penelitian dan pengembangan obat-obat baru — telah merugikan kebutuhan akan harga [obat-obatan] yang lebih rendah, pendekatan yang fleksibel terhadap paten, dan investasi R & D [R = *Research*/penelitian & D = *development*/pengembangan] untuk penyakit yang relevan dengan negara-negara berkembang.[11]

Semakin banyak pemerintah negara berkembang sedang membuat komitmen serius untuk mencapai pelayanan kesehatan yang layak dan pemerataan akses [kepada obat-obatan]. Tanpa solusi terhadap masalah akses terhadap obat-obatan, mereka tidak dapat memenuhi panggilan dan kewajiban mereka untuk melayani warga negara mereka. Di negara-negara berkembang, di mana sebagian besar orang hidup dalam kemiskinan dan sangat sensitif terhadap kenaikan harga, perusahaan-perusahaan dapat merespons dengan menerapkan kebijakan harga berbeda yang berkorelasi dengan tingkat pendapatan masyarakat, atau dengan kebijakan-kebijakan

---

10 *Ibid.*
11 *Ibid.*

paten yang fleksibel untuk memastikan harga rendah yang diinginkan bisa tercapai.

HIV/AIDS dan TNCs

Pengobatan antiretroviral (ARV), pengobatan jenis utama untuk HIV atau AIDS, tidak menyembuhkan tetapi dapat menghentikan orang dari menjadi sakit selama bertahun-tahun. Pengobatan terdiri atas obat-obatan yang harus diminum setiap hari selama hidup seseorang tersisa.

Pada akhir tahun 1990-an, harga ARV yang dibebankan oleh farmasi-TNC adalah US8.000 (sekitar Rp80 juta) atau lebih per orang per tahun. Burroughs Wellcome, sekarang bagian dari GlaxoSmithKline, dikenakan biaya US$8.000 per tahun untuk AZT, misalnya, efektif pertama ARV. Protes dari organisasi AIDS menyebabkan perusahaan menurunkan harga sedikit. Pemerintah Brasil kemudian memutuskan untuk membuat ARV dalam negeri. Brasil tidak memberikan monopoli paten pada obat-obatan sampai 1997, sehingga produk diciptakan sebelum waktu yang tidak dipatenkan di Brasil. Seiring waktu, Brasil mampu menurunkan harga secara substansial. Bagi kebanyakan negara berkembang, nama merek barang membuatnya bisa memenangkan harga.

Di banyak negara, beberapa ARV yang dipatenkan. Negara-negara lain tidak memiliki pengetahuan atau pasar cukup besar untuk menghasilkan ARV secara efisien oleh mereka sendiri. Lalu pada tahun 2001, Cipla, sebuah pabrik besar obat-obat generik yang berbasis di India, mengumumkan bahwa mereka akan menyediakan kombinasi obat ARV dengan harga US$350 (sekitar Rp3.500.000) per orang per tahun — kurang dari satu dolar per hari.

Harga Cipla merevolusi pemikiran tentang pengobatan orang-orang yang menderita AIDS di negara-negara berkembang. Pada tahun 2002, mengikuti usulan dari Sekretaris Umum PBB Kofi Annan, Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria diluncurkan — sebuah usaha dunia internasional untuk menggunakan uang bantuan untuk memerangi ketiga penyakit ini. Dalam kasus AIDS, harga [ARV]

yang lebih murah yang dicapai oleh persaingan generik membawa harapan baru bagi jutaan orang.

Turunnya harga ARV telah membuat pengobatan dapat menjangkau banyak orang. Biarpun demikian, harga itu tetap terlalu tinggi untuk kebanyakan layanan kesehatan masyarakat. Dari sekitar 6,5 juta orang yang membutuhkan pengobatan ARV pada bulan Juni 2006, hanya 1,65 juta orang dilaporkan telah memiliki akses ke pengobatan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.[12]

Sebuah ancaman baru kini sedang muncul. "Keuntungan yang mengesankan, jika sangat parsial, dalam penyediaan pengobatan sekarang terancam oleh tingginya biaya obat AIDS keluaran baru."[13] Sekali lagi farmasi-TNCs terlibat [dalam menaikkan harga obat AIDS]. Pengobatan ARV menyebabkan pergeseran rejimen obat dari waktu ke waktu, pada waktu pasien mengembangkan resistansi terhadap terapi-terapi awal. Tingginya biaya obat-obat baru dapat membuatnya lebih mahal untuk mempertahankan pengobatan bagi mereka yang sudah memakai terapi ART.

Pada akhir tahun 2006 dan 2007, Thailand memutuskan untuk mengeluarkan lisensi wajib — otorisasi persaingan generik untuk produk-produk yang tetap paten — untuk dua jenis obat AIDS yang baru. Tindakan Thailand menyebabkan penurunan tajam harga global dan memicu protes dari farmasi-TNCs dan ancaman sanksi dari pemerintah AS. Sebuah perusahaan, namanya Abbott Laboratories, "menarik aplikasi pendaftaran untuk obat baru dari Thailand. Upaya Thailand menunjukkan jalan ke masa depan untuk memastikan bahwa harga obat yang sengaja dibuat-buat terlalu tinggi tidak lagi memblokir program untuk menyediakan dan memperluas pengobatan untuk orang yang mengidap HIV/AIDS..."[14]

12 UNAIDS, 'HIV treatment', December 2007. <www.unaids.org> (accessed 20 December 2007).

13 Weissman, R., 'Big Pharma and AIDS, Act II: patents and the price of second-line treatment', *Multinational Monitor* (March/April 2007).

14 *Ibid.*

Abbott Laboratories mengatakan bahwa pihaknya telah menerapkan langkah-langkah praktis untuk membuat obat HIV "tersedia seluas mungkin... pendekatan kami yang komprehensif, yang mencakup mekanisme penetapan harga yang adil berjenjang dan pendaftaran yang luas, telah mencapai hasil yang menggembirakan: saat ini, 80.000 patient HIV Afrika berada pada versi panas-stabil dari LPV/r".[15]

Promosi dan informasi

Industri farmasi menghabiskan antara 15 dan 20% dari omzet tahunan untuk pemasaran dan promosi produk-produknya, lebih dari yang industri habiskan pada pengembangan obat-obat baru. Bagi kebanyakan orang di negara-negara berkembang industri sering menjadi sumber utama informasi tentang obat. Hal ini memberikan tanggung jawab moral pada perusahaan. Tapi sering terjadi, bukan informasi yang berguna yang diperoleh masyarakat miskin, tapi iklan-iklan yang berat dan banyak.

Menurut sebuah laporan PBB: "Sehubungan dengan produk-produk farmasi, sebagian besar upaya promosi oleh TNCs di negara-negara berkembang diarahkan kepada barang-barang relatif mahal, yang awalnya dirancang untuk dipasarkan di negara-negara maju. "Promosi sering melatarbelakangi produk-produ perawatan pribadi, "sering nilai medisnya diragukan, sebaliknya persiapan yang relatif sederhana dan murah yang diperlukan untuk mengatasi penyakit yang paling umum di antara masyarakat miskin".[16]

Dokter-dokter sering dibujuk oleh pemasaran. Menurut Asosiasi Obat di Filipina, "sejumlah studi ilmiah telah menunjukkan dampak pemasaran obat pada pola resep dari dokter".[17] Dokter dibujuk, kadang-

15 Abbott Laboratories, letter to Joanne Bauer, Bisnis and Human Rights Resource Centre, 18 December 2007. <http://www.bisnis-humanrights.org/Documents/Oxfamresponses> (accessed 20 December 2007).

16 PBB, *Transnasional Corporations in World Development*, New York: UN, 1988, pp. 222–3.

17 Studi UNCTAD, dikutip dalam WHO, *Essential Drugs Monitor*, No. 17, Geneva: WHO, 1994.

kadang oleh uang suap atau pemanis, untuk merekomendasikan [kepada patien] produk-produk yang dibuat oleh perusahaan obat. Sebuah aliansi, karenanya, telah terbentuk antara perusahaan obat TNC, pemerintah negara-negara Barat (yang melindungi kepentingan TNCs mereka), dokter lokal dan lembaga medis.

Antibiotik, pil vitamin, dan obat perangsang

Antibiotik telah menyelamatkan nyawa manusisa lebih banyak daripada obat-obat jenis lainnya, tetapi ironisnya, penggunaannya yang berlebihan sekarang ini menimbulkan masalah kesehatan yang serius dan hal ini terutama paling banyak terjadi di negara-negara berkembang. Obat antibiotik berfungsi untuk membunuh atau memperlambat pertumbuhan bakteri, dan dengan demikian merupakan sebuah intervensi yang sangat kuat. Penggunaan antibiotik "telah diatur untuk mengintervensi genetika populasi yang terlihat hingga saat ini di planet ini".[18] Akan tetapi, kemungkinan intervensi kolosal ini memiliki risiko-risiko [yang tinggi].

Promosi yang luas atas antibiotik oleh farmasi-TNCs, dan penggunaannya untuk mengobati penyakit yang sebenarnya relatif sepele, membuat obat-obat ini kurang efektif, dan mungkin tidak berguna, ketika mereka dibutuhkan untuk memerangi penyakit yang serius. Hal ini memiliki konsekuensi yang sangat besar bagi kesehatan. Beberapa bakteri sekarang menjadi resisten terhadap antibiotik. Profesor Stuart Levy, direktur Pusat Perlawanan Obat di Tufts University, Boston, mengatakan: "Masyarakat sedang menghadapi salah satu masalah kesehatan umum yang paling berat, yaitu munculnya bakteri menular dengan ketahanan terhadap banyak, dan dalam beberapa kasus, terhadap semua obat antibiotik yang tersedia."[19]

---

18 O'Brien, T. F. *et al.*, 'Resistance of bacteria to antibacterial agents: report of Task Force 2', *Reviews of Infectious Disease*, Vol. 9 (Supplement 3) (May–June 1987), dikutip dalam Chetley, A., *Problem Drugs*, Amsterdam: Health Action International, 1993.

19 Stuart Levy, dikutip dalam 'Antibiotics: the menace of your medicine chest', *The Observer*, 8 December 1996.

Perlawanan terhadap antibiotik telah mencapai proporsi epidemik di banyak negara "dan resistensi terhadap banyak obat yang lain dokter tak bisa berdaya dalam pengobatan penyakit yang jumlahnya terus meningkat," kata Profesor Jacques Acar, Ketua Organisasi Kesehatan Dunia Kelompok Kerja Pemantauan dan Pengelolaan Resistensi bakteri terhadap agen antimikroba.[20] Oleh karena itu, masyarakat miskin semakin sulit untuk mendapat obat-obat penting yang sungguh-sungguh mereka butuhkan.

Orang-orang miskin sederhana selalu yang menjadi korban. Sebuah bakteri yang disebut *Shigelladysenteri*, misalnya, "sekarang menjadi penyebab disentri di Afrika dan penyebab utama kematian anak-anak. Bakteri ini resisten terhadap semua antibiotik yang ada saat ini."[21] Menurut Dr. Graham Dukes: "Kita dihadapkan dengan masalah kembali ke zaman kegelapan medis di mana antibiotik tidak lagi bisa melawan berbagai macam infeksi, yang sebagiannya karena diciptakan oleh antibiotik sendiri dan sebagian yang lain mungkin karena memang wabah dan sangat mematikan."[22] Namun, masalah-masalah ini sesungguhnya sudah diketahui sejak lama.

Promosi ke apoteker-apoteker bisa sangat banyak. Di Peru, misalnya, apoteker telah ditawarkan televisi dan hadiah lainnya jika mereka mendapatkan poin yang banyak dengan menjual obat-obatan yang diproduksi oleh tiga perusahaan. Untuk penjualan obat-obat antibiotik, maka penawaran poinnya tinggi.

Obat-obat antibiotik sekarang sering disalahgunakan untuk mengobati infeksi virus, seperti diare non-bakteri, infeksi saluran pernapasan seperti batuk dan pilek dan beberapa infeksi umum lainnya. Perusahaan obat Laboratories LAFI, misalnya, merekomendasikan kombinasi antibiotik di Bolivia, kata Aksi Kesehatan Internasional (sebuah jaringan LSM

---

20 Jacques Acar, dikutip dalam *Essential Drugs Monitor*, No. 20 (1995), Geneva: World Health Organization.

21 Levy, dikutip dalam *The Observer* (lihat catatan 19).

22 Graham Dukes, dikutip dalam Health Action International brochure, Amsterdam: HAI, 1996.

konsumen, kesehatan dan pembangunan) "bagi bayi dan anak-anak yang sering mengalami infeksi saluran pernapasan yang akut". Tampaknya hal ini sengaja dilakukan untuk mendorong penggunaan produk ini sebanyak mungkin.[23]

Orang-orang dengan pendapatan terbatas, karena dirangsang oleh periklanan dan didorong oleh dokter dan apotek, dapat saja mengalihkan penggunaan uang mereka untuk kepentingan tertentu dan mesti menggunakannya untuk membeli obat antibiotik. Mereka menghadapi dua situasi sulit. Pertama, mereka tidak bisa melawan tawaran iklan antibiotik pada waktu mereka menghadapi penyakit yang serius. Kedua, karena harus membeli produk ini, maka mereka akan semakin memiliki sedikit uang untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih esensial seperti belanja bahan makanan dan pelayanan jasa.

Promosi dan penjualan pil-pil vitamin juga merajalela di negara-negara berkembang. Lagi-lagi hal ini dimotori oleh TNCs yang berbisnis di bidang farmasi. Sekali lagi, orang-orang miskin sering kali gampang dibujuk untuk membayar barang-barang mahal. Padahal, cara terbaik untuk mendapatkan vitamin adalah makanan. Jika anak-anak mengonsumsi makanan secara cukup dan mengandung banyak gizi, maka mereka tidak perlu membutuhkan pil-pil vitamin. Kebanyakan orang "memperoleh vitamin cukup banyak dari makanan yang mereka makan dan oleh karena itu orang tidak perlu mengonsumsi vitamin tambahan dalam bentuk suplemen-suplemen".[24]

Di negara-negara berkembang di mana gizi buruk masih menjadi masalah, iklan dapat membuat orang untuk lebih tertarik membeli paket-paket pil vitamin daripada membeli makanan yang bergizi. Tanpa disadari banyak orang, promosi pil vitamin yang merebak ini juga merupakan upaya untuk "memedikalisasi" kelaparan, kata Andy Chetley, "sehingga sebab-sebab ekonomis dan sosial dari malnutrisi tidak ditangani".[25] Menurut

23 Health Action International brochure, Amsterdam: HAI, 1996.
24 Henry, J., *The British Medical Association Guide to Medicines and Drugs*, London: Dorling Kindersley, 1991, p. 145.
25 Chetley, *Problem Drugs*.

Chetley, "Penyalahgunaan pil-pil vitamin dapat mendistorsi prioritas kesehatan nasional, menguras sumber daya yang terbatas dari ekonomi nasional, memboroskan keuangan warga masyarakat secara individual dan keluarga-keluarga yang berpenghasilan terbatas, memupuk keyakinan yang salah dan berbahaya tentang hakikat kesehatan, dan mendorong praktik-praktik yang tidak efektif dan berbahaya."[26]

Promosi persuasif untuk pil-pil perangsang nafsu makan juga bisa menguras sumber daya warga masyarakat yang sudah terbatas. Padahal kehilangan nafsu makan merupakan gejala umum dari adanya penyakit tetapi biasanya ia bersifat sementara dan seharusnya tidak memerlukan pengobatan. Kurang nafsu makan bisa terjadi karena kekurangan makanan. "Dalam kasus-kasus gizi buruk yang ekstrem... penggunaan perangsang nafsu makan bisa menimbulkan berbahaya."[27] Namun sayang, di beberapa negara berkembang, TNCs sangat gencar mengiklankan pil-pil perangsang makanan ini.

Obat-obat generik

Pemerintah negara-negara berkembang sering tidak mampu membeli produk-produk yang dipaten. Obat-obat generik — yaitu obat-obat yang dipasarkan tanpa nama pemilik — memungkinkan pemerintah untuk menyediakan obat-obat esensial yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. "Obat-obat generik sering kali sama efektifnya dengan obat-obat dengan merek baru tapi yang jelas obat bermerek baru lebih mahal daripada obat-obat generik," kata WHO.[28]

TCNs yang berbisnis di bidang farmasi sering menghalangi usaha-usaha pemerintah negara-negara berkembang untuk memberikan warga mereka obat-obat generik yang aman, efektif dan murah. Nama dari sebuah obat generik adalah nama farmakologi dari satu senyawa (aspirin,

26 *Ibid.*

27 *Ibid.*

28 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 'Globalization, trade and health: generic drugs', Geneva: WHO, Geneva. <http://www.who.int/trade/glossary/story034/en/> (accessed 21 December 2007).

misalnya), biasanya diberikan oleh WHO. Meskipun obat-obat generik sudah ada sejak tahun 1890-an, mereka baru mulai lebih menonjol pada tahun 1950-an. Mereka memiliki keuntungan besar karena dari segi biaya jauh murah dibandingkan dengan barang-barang bermerek dan biasanya berkualitas baik. Bagi masyarakat miskin, hal ini sangat penting. Tetapi TNCs telah mengobarkan "perang pasar strategis melawan produk-produk murah yang memiliki nama generik," kata Chowdhury. Pasukan pemasaran mereka yang luas telah menyebarkan rumor bahwa obat-obat generik yang diproduksi "oleh industri kecil yang tidak sehat, tak kompeten dan tak berpengalaman, dan bahwa mereka itu tidak murni, terkontaminasi atau tidak efektif".[29]

Pada bulan Mei 1981 Majelis Kesehatan Dunia dari WHO mengadopsi Program Aksi Obat Esensial dan mendesak negara-negara anggota untuk mengadopsi daftar obat-obat esensial, nama-nama generik, undang-undang yang lebih ketat untuk mengatur perobat-obatan, strategi untuk menurunkan harga-harga obat dan kode etik untuk praktik pemasaran obat.

Bangladesh merupakan negara pertama yang menerima tantangan ini. Pada bulan Mei 1982, Dewan Menteri di Bangladesh menyetujui laporan Kebijakan Obat Nasional. Sesuai dengan kebijakan ini, 1.742 dari 4.340 obat dianggap 'tidak esensial atau tidak efektif', dan dilarang. Kebijakan Pemerintah Bangladesh selanjutnya merekomendasikan bahwa 150 jenis obat esensial dan 100 jenis obat khusus mesti diresepkan oleh spesialis dan konsultan, dan 45 jenis dari obat esensial itu mesti diproduksi dan dijual hanya dengan nama-nama generik mereka. Perusahaan obat TNCs tidak akan diizinkan lagi untuk menghasilkan produk-produk sederhana seperti analgesik umum dan vitamin. Obat-obat sederhana ini mesti dibuat secara eksklusif oleh perusahaan-perusahaan lokal.

Pada tahun 1981 sebuah pusat kesehatan masyarakat, Gonoshasthaya Kendra, yang didirikan sepuluh tahun sebelumnya, memulai Gonoshasthaya Farmasi (GPL) untuk memproduksi dan memasarkan obat-obat

29 Chowdhury, Z., *The Politics of Essential Drugs*, London: Zed Books, 1995, p. 9.

generik yang berharga murah. Kebijakan baru ini hanya mengancam seperempat dari bisnis TNC berbisnis farmasi yang berbasis di Amerika Serikat, tetapi ia menuai badai protes, di mana perusahaan-perusahaan AS bersandar pada pemerintah mereka untuk menggunakan pengaruhnya agar kebijakan di atas dicabut.

"TNCs mulai memobilisasi Asosiasi Medis Bangladesh dan opini publik dari kalangan elite," kata Chowdhury. Dalam sebuah acara dengar pendapat publik "mereka [TNCs] menuntut bahwa kebijakan-kebijakan obat generik telah gagal di seluruh dunia". Namun ketua sidang dengar pendapat itu menyimpulkan bahwa "kampanye-kampanye TNCs semata-mata didasarkan pada kebohongan dan bahwa mereka hanya memegang kekuatan mereka dalam membela kepentingan komersial mereka. Dia merekomendasikan agar kebijakan tersebut harus segera diberi kerangka hukum".[30]

Melanjutkan kampanye mereka terhadap kebijakan baru, farmasi-TNCs menyebarkan iklan dan artikel di koran dan mendorong dokter-dokter untuk melihat kebijakan tersebut sebagai sebuah kekangan terhadap hak mereka untuk memberi resep dan sebagai pelanggaran terhadap kebebasan klinis mereka. Mereka juga menarik hal-hal lainnya. Inggris, Belanda, dan duta besar Jerman Barat meminta presiden negara itu untuk mengekspresikan kekecewaan mereka pada kebijakan obat yang diusulkan.

Apa yang mengkhawatirkan TNCs adalah bahwa jika pemerintah Bangladesh melanjutkan kebijakannya — dan memang Bangladesh telah melakukan hal itu meskipun ada tekanan besar dari TNCs dan boss mereka pemerintah negara-negara Barat, maka negara-negara lain akan mengikutinya. Ketakutan mereka ini ada benarnya. Pada tahun 1983 pemerintah India melarang pembuatan dan penjualan 25 obat yang memiliki efek sampingan. Jumlah orang yang mempunyai akses terhadap obat esensial terus bertumbuh, dan sebagian besar negara kini telah memiliki daftar nasional obat-obat esensial.

30 *Ibid.*

Keengganan Pharma-TNCs untuk memahami bahwa akses kepada obat-obatan merupakan "hak asasi manusia,yang diabadikan oleh hukum internasional, dan untuk mengakui bahwa perusahaan-perusahaan farmasi memiliki tanggung jawab dalam konteks ini, telah mencegah penerapan strategi-strategi yang tepat".[31]

Yang dikhawatirkan oleh TNCs adalah bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah negara berkembang ini membuat mereka sulit berbisnis obat-obatan. Orangtua yang miskin secara material yang anaknya sakit seharusnya mampu membeli obat yang diproduksi secara lokal dan murah. Di beberapa negara berkembang, orangtua sering kali tidak mempunyai pilihan karena TNCs telah meyakinkan pemerintah bahwa obat yang diproduksi secara lokal tidak perlu. Pilihan bebas warga masyarakat miskin telah dirampas dari orang miskin oleh TNCs. Obat-obatan untuk warga masyarakat miskin telah ditentukan oleh kebijakan-kebijakan bisnis TNCs:

> Masyarakat mengharapkan perusahaan-perusahaan farmasi — dengan akses istimewa mereka ke pasar global — untuk mengembangkan produk-produk yang diperlukan dengan harga yang terjangkau, dalam presentasi yang dapat digunakan, dan memasarkan mereka secara etis. Industri farmasi diharapkan mematuhi persyaratan-persyaratan yang andal dan berkelanjutan ini, dan dengan melakukan demikian, industri farmasi memainkan perannya dalam tanggung jawab yang lebih luas untuk meningkatkan kesehatan semua orang.[32]

Sumbangan

TNCs berbisnis farmasi memberikan banyak penekanan pada sumbangan obat-obatan ke negara-negara berkembang. Hal ini mungkin tampaknya baik, dan memang ada hasilnya, misalnya, keberhasilan program eradikasi penyakit-penyakit tertentu (Merck memberi sumbangan untuk usaha penghapusan kebutaan di Afrika, misalnya). Namun sumbangan obat-obatan sering tidak cocok dan dapat mengorbankan kebijakan-kebijakan lainnya.

31 Oxfam, "Investing for Life".

32 *Ibid.*

Produk-produk yang disumbangkan umumnya tidak baik karena beberapa alasan. Hampir pasti barang-barang yang disumbangkan itu sudah mulai kedaluwarsa. Selain itu obat-obat ini juga asing bagi para pemberi resep [dokter-dokter] lokal. Persediaannya juga tidak pasti dari segi waktu dan jumlah yang dibutuhkan. Kadang-kadang, mereka tidak sesuai dengan pedoman klinis nasional negara-negara penerima sumbangan dan dapat merusak standar-standar klinis mereka. Selain itu, obat-obat sumbangan menciptakan kekacauan di pasar obat-obat berharga murah. Mereka menghalangi jumlah kebutuhan obat-obatan secara akurat, dan memengaruhi perencanaan seluruh rantai pasokan dari produsen obat-obatan kepada pasien. Merusakkan persaingan pasar bisa berakibat sangat serius, karena perusahaan-perusahaan produsen obat-obat generik tidak dapat bersaing dengan obat-obat yang disumbangkan secara gratis: kemampuan untuk memprediksi permintaan perlu jika mereka ingin mencapai harga yang rendah. "Pengalaman dalam menerima bantuan-bantuan darurat selama bertahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa obat-obat sumbangan telah terbukti lebih merusakkan daripada kegunaannya," kata Organisasi Kesehatan Dunia, karena "obat-obat bantuan mungkin tidak relevan dengan situasi darurat tertentu, atau mungkin juga tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan perobatan lokal dan pedoman-pedoman pengobatan yang standar".[33]

Sumbangan obat-obatan biasanya dibuat untuk menjaga keseimbangan neraca perusahaan. TNCs yang berbasis di Eropa dan Amerika Serikat biasanya mendapat keuntungan pajak yang besar ketika mereka memberikan donasi (sumbangan). Untuk setiap pemberian sumbangan kepada masyarakat miskin, peraturan pajak AS memungkinkan penghapusan pajak dalam jumlah sampai dua kali biaya produksi. Tak bisa disangkal bahwa sumbangan mempunyai manfaatnya bila disumbangkan sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang menerimanya. Tetapi sumbangan-sumbangan dengan motivasi buruk yang tersembunyi hanya membuang-buang waktu dan sumber daya dari masyarakat miskin di negara-negara berkembang.

---

33 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 'WHO issues new international guidelines for drug donations', Geneva: World Health Organization, 30 April 1996.

WHO menyetujui praktik sumbangan obat-obatan dengan syarat-syarat utama sebagai berikut: (1) obat-obatan yang disumbangkan harus menguntungkan penerima semaksimal mungkin; (2) sumbangan harus diberikan dengan menghargai keinginan dan otoritas penerima, dan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah negara penerima; (3) tidak boleh ada standar ganda dalam kualitas — jika kualitas item bersangkutan, dalam hal ini obat-obatan, tidak dapat diterima di negara donor sendiri, maka item itu tidak dapat diterima sebagai sumbangan [bagi orang miskin di negara berkembang]; dan (4) harus ada komunikasi yang baik antara donor dan penerima.[34]

Produk-produk yang ditarik kembali

Beberapa produk dari TNCs berbisnis di bidang farmasi sesungguhnya dilarang atau telah ditarik dari peredaran di negara-negara Barat karena mereka dianggap tidak aman. Akan tetapi, di negara-negara berkembang, item-item obat bersangkutan tetap diberi label "aman", dan orang-orang akan membelinya dengan harapan bahwa penyakit mereka akan dihalau dan kesehatan mereka dipulihkan kembali. Tapi dalam kenyataannya, obat-obatan itu bisa saja sebaliknya justru membunuh mereka.

"Di negara-negara berkembang, ada banyak obat yang beredar, padahal dalam daftar PBB penggunaan atau penjualan obat-obat bersangkutan telah dilarang atau telah ditarik kembali atau sangat dibatasi," kata Zafrullah Chowdhury, yang telah mengembangkan Kebijakan Perobatan Nasional Bangladesh.[35] Zafrullah, misalnya, membuat daftar obat-obat tonik: "tonik biasa, dengan 17% kadar alkohol, yang dipasarkan di Inggris oleh Squibb sebagai Verdivition dipromosikan di India sebagai sebuah tonik otak."

Mendiskreditkan para kritikus

TNCs yang berbisnis di bidang farmasi barangkali termasuk di antara perusahaan-perusahaan dunia yang sangat kuat, dalam hal kekuatan penga-

---

34 *Ibid.*

35 Chowdhury, *The Politics of Essential Drugs*, p. 58.

ruh yang mereka miliki. Mereka juga memiliki strategi yang ampuh bagaimana menangani setiap kritik yang diarahkan kepada mereka. Andy Chetley teringat bagaimana pada awal tahun 1970 PBB membentuk Komite Orang-Orang Penting (*Committeee of Eminent Persons*) untuk menyelidiki laba keuntungan yang tinggi dari perusahaan farmasi dan kimia. Sebagai reaksi atas lahirnya komisi PBB ini, maka "sebuah subkomite kecil sekitar 6 perusahaan Swiss (termasuk Ciba-Geigy, Sandoz, dan Roche) didirikan oleh TNCs untuk melawan hasil penyelidikan komisi PBB ini," demikian kata Chetley. Tujuan dari organisasi tandingan dari TNCs ini adalah untuk menghindari implementasi kode etik internasional bagi TNCs. Dalam sebuah pertemuan TNCs ini, mereka merumuskan lima strategi untuk menghadapi kritik:

1. Kritikus diidentifikasi sebagai lawan dan didiskreditkan sebagai mitra diskusi.
2. Motif-motif yang meragukan diberikan kepada kritikus: prasangka ideologis atau nasionalistik, iri hati, dianggap bodoh, tak tahu dan kurang pengalaman.
3. Ketika kritik bersifat global [umum] atau tidak langsung: kebalikan harus "dibuktikan" dengan cara memberi contoh terisolasi (misalnya, mereka memberikan sebuah deskripsi proyek individual).
4. Ketika kritik tidak bisa dibantah (misalnya, dalam kasus ITT di Chile), penekanan diletakkan pada kenyataan bahwa masalah itu adalah kasus individual, dan bahwa hal itu masih dalam penyelidikan.
5. Dalam kasus apa pun, harus dikatakan di depan umum bahwa mempertahankan usaha yang bebas adalah hak semua orang. Oleh karena itu, harus ditampilkan, terutama di media massa, bahwa kritik terhadap TNCs pada dasarnya merupakan kritik terhadap kebebasan berbisnis [pasar bebas] dan bahwa mereka adalah musuh dari dunia bebas, yang pandangan hidupnya didasarkan pada Marxisme.[36]

36 Chetley, A., *A Healthy Bisnis*, London: Zed Books, 1990, p. 73.

Meskipun TNCS berusaha mendiskreditkan mereka, LSM-LSM tetap sukses. Di Jerman, misalnya, Kampanye BUKO Pharma mendesak TNCs untuk menarik obat-obat nonesensial dan tidak rasional dan mengubah strategi pemasaran mereka. Kampanye berhasil melobi parlemen Jerman. Selain itu, sebuah undang-undang telah disahkan untuk memperketat kontrol pada ekspor obat-obatan.[37]

Perubahan iklim

Emisi-emisi karbon yang cukup substansial juga berkontribusi terhadap dampak negatif TNCs yang berbisnis di bidang farmasi terhadap kesehatan kaum miskin di dunia. Emisi karbon dioksida saat ini sudah banyak diterima sebagai penyebab utama dari perubahan iklim. Dan hal ini sudah memiliki dampak yang besar dan merusakkan kesehatan, di mana masyarakat miskin selalu yang paling menderita. Perubahan iklim telah menjadi faktor kunci dari kematian 1,5 juta orang selama dua dekade terakhir, sebagai akibat dari peningkatan kecelakaan dan banjir, angin topan, dan suhu ekstrem. Pola curah hujan berubah tak tentu dan semakin banyak tanah menjadi rusak, yang pada gilirannya mengancam pasokan makanan bagi umat manusia.

"Efek-efek terhadap kesehatan dari iklim yang terus berubah dengan cepat saat ini cenderung sangat negatif, khususnya di wilayah masyarakat paling miskin, yang telah memberikan kontribusi untuk emisi gas rumah kaca," demikian kata WHO.[38] Aktivitas TNCs bertanggung jawab atas sejumlah besar emisi karbon. Mereka menguasai sebagian besar barang-barang yang diperdagangkan secara internasional. Mereka menerbangkan dan mengapalkan barang-barang dan manusia ke seluruh dunia. Melalui propaganda globalisasi ekonomi, mereka terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi dengan itu mereka menambah emisi karbon [ke

37 Informasi dariBUKO Pharma Campaign website. <http://www.bukopharma.de> (accessed 4 March 2008).

38 Organisasi Kesehatan Dunia atau (WHO), 'Climate and health', factsheet, Geneva: WHO, July 2005.

atmosfir]. Proses manufaktur mereka sering menimbulkan emisi karbon yang tinggi. TNCs berada di mana-mana, tapi jejak karbon yang mereka ciptakan belum dipublikasikan secara luas. Tapi emisi karbon di mana saja membawa dampak negatif bagi masyarakat miskin.

TNCs biasanya tidak melaporkan emisi karbon mereka. Juga pemerintah negara-negara di mana mereka berbisnis belum mewajibkan mereka untuk melaporkannya. Di Inggris, "pada waktu perubahan iklim menjadi isu sangat penting baik bagi pebisnis maupun bagi umat manusia seluruhnya, fakta menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan belum diwajibkan memperlihatkan sejauh mana mereka memancarkan karbon dioksida atau CO2 [ke atmosfir]".[39]

Hanya 16 dari 100 perusahaan terbesar yang terdaftar di 100 indeks FTSE [*Financial Time-Stock Exchange*] telah mengungkapkan dalam laporan tahunan mereka tentang berapa banyak CO2 yang mereka memancarkan dalam kategori paling dasar — emisi-emisi langsung mereka (bahan bakar fosil yang dibakar oleh pemanas sentral di kantor-kantor dan toko-toko, dan bahan bakar yang digunakan dalam kendaraan-kendaraan). Ke-16 perusahaan ini bertanggung jawab atas 285.930.000 ton CO2 yang menggemparkan — setara dengan lebih dari setengah dari total emisi di Inggris (meskipun banyak dari emisi ini juga berlangsung di tempat lain di dunia). Jika sisa anggota FTSE yang lain juga menggunakan standar-standar yang sama untuk melaporkan jejak-jejak CO2 mereka, maka mereka juga akan bertanggung jawab atas lebih dari 191.420.000 ton CO2. "Ini adalah jutaan emisi FTSE tak terlaporkan dan memperlihatkan kelemahan Inggris atas emisi CO2 yang tak terlaporkan."[40]

Kesimpulan

Salah satu dari Sasaran Pembangunan Milenium [yang dicanangkan PBB] adalah untuk menyediakan akses kepada obat-obatan penting dengan

39 Christian Aid, *Coming Clean: Revealing the UK's True Carbon Footprint*, London: Christian Aid, 2007.

40 *Ibid.*

harga terjangkau di negara-negara berkembang. Namun jika TNCs yang berbisnis di bidang farmasi melanjutkan cara-cara bisnis mereka selama ini, maka mereka akan gagal untuk membuat kontribusi yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

Tujuan utama TNCs berbisnis di bidang farmasi di negara-negara berkembang adalah mengejar keuntungan di atas kesehatan masyarakat, bahkan ketika keuntungan itu sangat kecil dibandingkan dengan keuntungan mereka secara keseluruhan. Barang-barang medis yang dipatenkan tentu saja dapat mempunyai kegunaannya. Bila dibuat resep secara benar mereka dapat menyelamatkan nyawa manusia. Tapi mereka terbuka untuk disalahgunakan atau dilanggar, dan di antara pelanggar itu adalah TNCs sendiri yang berbisnis di bidang farmasi.

Kekeliruan besar yang telah dilakukan pemerintah adalah mereka percaya bahwa TNCs memiliki jawaban atas semua masalah kesehatan. Namun, seperti Roberto Lopez dari sebuah LSM yang berbasis di Peru (*Accion Internacional poor la Salud*) tandaskan: "Anda tidak dapat memecahkan masalah yang disebabkan oleh kemiskinan dengan pil-pil."[41] Pil-pil perusahaan biasanya sulit untuk ditelan.

---

41 Roberto Lopez, dikutip di dalam The Health Action International brochure, Amsterdam: HAI, 1996.

BAB 5

Air: Keran Perusahaan

Industri layanan jasa adalah bisnis besar dan semakin didominasi oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Tetapi ketika perusahaan-perusahaan berusaha mendulang laba keuntungan dari jasa layanan seperti pasokan air, kesehatan dan pendidikan, mereka yang tidak mempunyai daya beli selalu cenderung menjadi korbannya.

Tidak ada layanan jasa yang lebih vital daripada layanan pasokan air. Seperti udara, air sangat diperlukan bagi kehidupan. Sampai tahun 1990-an persediaan air di negara-negara berkembang dipandang sebagai barang publik atau harta umum dan bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Pengadaan air dijalankan oleh perusahaan milik publik seperti BUMN atau BUMD atas nama publik. Sejak itu, privatisasi pelayanan publik, termasuk perusahaan air, telah menjadi syarat pemberian pinjaman luar negeri dan keringanan utang negeri [oleh negara-negara Barat melalui IMF dan Bank Dunia). TNCs menangkap peluang ini untuk mendulang keuntungan. Tapi bantuan finansial dan pengaruh politik digunakan [pemerintah negara Barat] untuk mempromosikan kebijakan-kebijakan yang justru bertentangan dengan maksud pemberian mereka yang sebenarnya — mengangkat orang keluar dari kemiskinan.

"Hak asasi manusia atas air adalah sesuatu yang sangat diperlukan untuk menjalani hidup sebagai manusia yang bermartabat", demikian dideklarasikan PBB pada tahun 2002.[1] Akan tetapi, pada saat yang sama kita saksikan proses liberalisasi dan privatisasi layanan publik, termasuk

1 Departemen Informasi Publik PBB, *United Nations Water for Life Decade 2005–2015*, November 2004. <http://www.un.org/ waterforlifedecade/pdf/righttowater.pdf> (accessed 7 February 2008).

layanan air yang diberlakukan oleh pemerintah negara-negara Barat, Bank Dunia, IMF dan WTO. Perkembangan ini dengan sendirinya mengancam hak-hak dasar martabat manusia.

Sebuah krisis di seluruh dunia atas air merupakan sebuah fakta yang sangat jelas. Bahkan krisis ini sudah cukup parah sebelum TNCs melakukan eksploitasi air untuk tujuan mereka sendiri. Menurut PBB, 31 negara kini menghadapi kelangkaan air dan 1 miliar manusia tidak memiliki akses terhadap air minum yang bersih:

> Konsumsi air bertambah dua kali lipat setiap 20 tahun, namun pada saat yang sama, sumber-sumber air dengan cepat menjadi tercemar, habis, dialihkan penggunaannya dan dimanfaatkan oleh kepentingan korporasi mulai dari industri pertanian dan manufaktur untuk produksi listrik dan pertambangan. Bank Dunia memprediksi bahwa hingga tahun 2025, duapertiga dari penduduk dunia akan menderita kekurangan air minum yang bersih.[2]

Air bisa berubah nasibnya seperti minyak [karena menjadi barang langka] dari abad kedua puluh satu. Di tengah perebutan oleh perusahaan-perusahaan untuk "menguasai" air, orang-orang di negara-negara berkembang semakin kehilangan kepemilikan dan penguasaan atas sumber daya hidup yang amat vital ini. Pemerintah mengenakan perisai korporasi. "Alih-alih melindungi sumber air yang dimiliki warga negara mereka dari para pencari keuntungan pribadi [TNCs], pemerintah justru mundur dari tanggung jawab publiknya dan tunduk terhadap kehendak perusahaan transnasional raksasa yang siap melahap keuntungan dari masalah kekurangan air. Dan sekarang banyak perusahaan asing bergegas untuk berinvestasi dalam di bidang ekonomi baru ini yaitu air."[3]

Perusahaan air ini ingin memprivatisasi sistem-sistem persediaan air yang selama ini dimiliki secara publik. Mereka mempromosikan air botol,

---

2 *Ibid.*

3 Public Citizen, *WaterPrivatization: Issues and Debates*, Washington, DC: Public Citizen, 2007. <http://www.citizen.org/cmep/Water/ articles.cfm?ID=10842> (accessed 31 October 2007).

dan menjual air dalam jumlah besar dengan mengangkutnya dari daerah kaya air ke pasar-pasar yang sedang kehausan air. Untuk memastikan keuntungan yang maksimum, perusahaan-perusahaan juga melobi untuk dengan sengaja melemahkan standar kualitas air, dan mendorong perjanjian perdagangan [dengan pemerintah setempat] untuk menyerahkan sumber daya air mereka untuk dikelola perusahaan-perusahaan asing.

> Cair [air] yang semua orang butuh.... sedang dalam proses untuk dikelola swasta, yang melahirkan salah satu peluang bisnis besar dunia... Oleh karena hanya 5% dari industri air saat ini berada di tangan swasta, maka potensi pertumbuhan dari bisnis ini [di masa depan] sangat besar.[4]

Perusahaan terbesar

Sekitar 10% dari penduduk dunia memiliki kebutuhan air yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Dua perusahaan terbesar di sektor ini berbasis di Prancis, yaitu SUEZ yang melayani 117.400.000 orang di seluruh dunia, dan Veolia (sebelumnya Vivendi) yang melayani 108,2 juta jiwa manusia di seluruh dunia. Dengan 77.800 karyawan, pendapatan Veolia tahun 2006 adalah sebesar €10,1 miliar (sekitar Rp131,3 triliun).[5]

Perusahaan-perusahaan air berpendapat bahwa privatisasi diperlukan untuk mengatasi kegagalan pemerintah negara dalam layanan-layanan dasar untuk publik. Tapi kalau perusahaan umum yang dikelola pemerintah negara (BUMN atau BUMD) memberi layanan yang tidak memuaskan dan sebagai akibatnya persentase masyarakat di sejumlah negara berkembang tidak memiliki akses terhadap air cukup tinggi, mengapa tidak dicarikan ahli-ahli di sektor air untuk mengatasinya? Privatisasi layanan air bisa masuk akal dan dapat berjalan baik hanya di negara-negara di mana semua orang mempunyai daya beli tinggi dan undang-undang negara untuk mengatur ekonomi termasuk di sektor air cukup kua. Akan

---

4 Tully, S., *Fortune*, 15 May 2002.

5 Global Water Intelligence, *Mason's Water Yearbook 2004/5*, 27 September 2007. Oxford: Global Water Intelligence.

tetapi, di negara-negara miskin ada banyak kesulitan. Perusahaan-perusahaan berbisnis air hanya untuk mengejar profit untuk memuaskan para pemegang saham mereka. Tetapi memburu profit dengan berbisnis air bagi masyarakat di negara-negara miskin yang tidak mempunyai uang merupakan sesuatu yang tidak mungkin, seperti telah banyak terjadi selama ini di banyak tempat. Jadi, propaganda privatisasi terhadap layanan publik merupakan sebuah pembunuhan atas nasib warga masyarakat miskin. TNCs berharap untuk mendulang uang dari orang-orang yang memiliki sedikit uang. Proyek-proyek publik yang diprivatisasi ini juga sering kali tidak ditempuh melalui cara-cara demokratis. Lebih dari itu, di banyak negara berkembang hingga saat ini, privatisasi air belum terbukti bisa memperbaiki mutu pelayanan, malah sebaliknya privatisasi air justru menyediakan katalog [daftar] bencana.

Bolivia

Bolivia merupakan salah satu negara berkembang pertama yang didorong menyerahkan sumber airnya untuk diprivatisasi. Pada tahun 1997, Bank Dunia merekomendasikan privatisasi layanan air publik di Cochabamba, kota terbesar ketiga di Bolivia, sebagai sebuah syarat bagi negara Bolivia untuk menerima bantuan atau pinjaman [pada Bank Dunia] untuk kepentingan pengembangan air minum.

Hal ini mengakibatkan, pada bulan September 1999, 40 tahun konsesi diberikan kepada Bechtel, sebuah perusahaan konstruksi raksasa yang berbasis di San Francisco, USA. Bechtel waktu itu merupakan sebuah penawar tunggal. Dalam waktu sekitar seminggu setelah mengambil alih usaha layanan air untuk kota Cochabamba, perusahaan Bechtel Bolivia — *Aguas del Tunari* — menaikkan tarif harga air lebih dari 50% dan dalam beberapa kasus bahkan lebih tinggi lagi. Kenaikan tarif ini memicu protes yang hebat dari seluruh warga Kota Cochabamba. Di daerah di mana upah minimum berada di bawah US$100 (sekitar Rp1 juta) per bulan, orang menghadapi kenaikan biaya hidup US$20 per bulan dan masih ada banyak dampak lainnya. Masyarakat akhirnya mengumpulkan air hujan dari

sumur-sumur mereka sendiri dan dari atap rumah. Banyak orang hanya bisa mendapatkan air selama dua jam sehari. Semua sistem air otonom harus diserahkan tanpa kompensasi.[6]

Cochabamba, kota berpenduduk sekitar setengah juta orang, macet total akibat pemogokan umum yang dibuat selama tiga kali. Dalam upaya untuk melindungi kontrak Bechtel, pemerintah Bolivia mengumumkan keadaan darurat militer dan mulai menangkap para pemimpin protes di rumah-rumah mereka pada malam hari. Seorang remaja tak bersenjata tajam berumur 17 tahun ditembak mati oleh Tentara Bolivia. Setidaknya 175 orang lainnya luka-luka. Pada bulan April 2000, konsesi ini akhirnya dihentikan karena kerusuhan sipil yang menimbulkan perselisihan antara pemerintah Bolivia dan Aguas del Tunari. Perusahaan air kota akhirnya dikembalikan kepemilikannya kepada publik [BUMN/BUMK].

Pada bulan November 2001, Bechtel membawa persoalan ini ke pengadilan dan menuntut kompensasi sebesar US$50 juta (sekitar Rp500 miliar). Selama empat tahun, kelompok warga negara Bolivia melancarkan kampanye global untuk menekan Bechtel untuk menjatuhkan kasus ini. Para pengunjuk rasa menduduki dan menutup markas Bechtel San Fransisco sebanyak dua kali. Para pejabat perusahaan dibombardir oleh e-mail-e-mail yang berisi kritikan terhadap mereka. Akhirnya, pada bulan Januari 2006, perusahaan setuju. "Ini merupakan peristiwa pertama terjadi di mana sebuah perusahaan besar seperti Bechtel menyerah kalah atas perkara bisnis dagang yang besar akibat dari tekanan masyarakat global," kata JimShultz, direktur eksekutif dari Pusat Demokrasi di Cochabamba, dan pemimpin kampanye. "Ini harus menjadi sinyal kepada perusahaan untuk mempertimbangkan tindakan hukum yang sama bahwa mereka harus siap untuk membela tindakan-tindakannya di hadapan pengadilan opini publik global."[7]

---

6 Levy, M. L., 'The damn water is ours', *New Internationalist* (September 2001).

7 CorpWatch, 'Bolivia: Bechtel drops $50 million claim to settle Bolivian water dispute', CorpWatch, Environmental News Service, 19 January 2006. <http://www.corpwatch.org/article.php?id=13144> (accessed 31 October 2007).

TNCs "ingin mengubah segala sesuatu untuk dipasarkan," kata Oscar Olivera, seorang pemimpin lain dari kerusuhan masalah air di Bolivia. "Bagi masyarakat adat/pedesaan, air bukanlah komoditas. Air adalah barang kebutuhan umum bersama. Untuk Bolivia, kekalahan Bechtel menunjukkan bahwa hak-hak rakyat tak bisa ditawar-tawar untuk digadai".[8]

Jika Perjanjian Umum WTO tentang Perdagangan Jasa diperketat dengan cara membuat privatisasi ireversibel (lihat bahan di bawah ini), maka sebuah pemerintah sebuah negara sulit untuk menarik kembali keputusan privatisasi dari sebuah proyek. Kekuatan warga masyarakat untuk membuat pandangan mereka didengar bisa saja akan dibuat sekian rupa untuk dibatasi.

Tanzania

Dari tahun 1996 sampai 2003, privatisasi [penyerahan BUMN kepada perusahaan swasta asing] dari Air Dar es Salaam dan Dawasa (*Sewage Authority*) di Tanzania merupakan sebuah syarat dari dukungan IMF terhadap negara ini. Restrukturisasi dan privatisasi aset-aset negara menjadi bagian dari permintaan IMF kepada Tanzania supaya bisa mendapatkan keringanan pembayaran utang luar negeri [termasuk utang yang dipinjam pada IFM dan Bank Dunia]. Padahal Tanzania merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Sebanyak 90% penduduknya hidup dengan penghasilan kurang dari US$2 (sekitar Rp18.000) per hari. Menurut laporan Bank Dunia, sekurang-kurangnya 38% (sekitar 14,3 juta orang) dari total penduduk Tanzania tidak memiliki akses terhadap air bersih. Selama bertahun-tahun, [BUMN] Air Dar es Salaam — kota terbesar di Tanzania dan bekas ibu kota negara — terbengkalai dan investasi terhadap infrastrukturnya kurang diperhatikan. Itu berarti bahwa pada masa itu sangat sedikit penduduk kota ini mendapat akses terhadap air.[9]

Pada bulan Februari 2003 sebuah kontrak senilai US$102 juta (atau Rp1.020 miliar) selama sepuluh tahun untuk pengelolaan dan pengope-

8 *Ibid.*
9 Rice, X., 'The water margin', *The Guardian*, 16 August 2007.

rasian Air Dar es Salaam dan sistem pembuangan limbah kota diberikan kepada Layanan Air Kota (*City Water Services*) — sebuah perusahaan patungan yang terdiri atas Perusahaan Biwater dari Inggris, sebuah konsultan teknik dari Jerman dan investor lokal dari Tanzania. Kontrak ini sangat didukung oleh Departemen Inggris untuk Pembangunan Internasional yang memberikan Lembaga Internasional Adam Smith dana bantuan sebesar £444.000 (atau Rp5,777 miliar) untuk memproduksi bahan-bahan dalam rangka membangun relasi yang baik dengan masyarakat (*publicrelation*), termasuk usaha penciptaan sebuah lagu populer yang isinya mempropagandakan privatisasi [BUMN Air Kota Dar es Salaam] dan membujuk masyarakat kota itu yang skeptis tentang manfaat privatisasi.

[Akan tetapi setelah privatisasi,] harga air di kota Dar es Salaam meningkat tajam. Padahal, peningkatan kualitas layanan air juga tetap jauh dari yang dipropagandakan, malahan semakin buruk. Pada bulan Mei 2005 kontrak dihentikan [sebelum waktunya]. Pemerintah Tanzania menendang keluar perusahaan Layanan Air Kota dan mengklaim bahwa perusahaan ini telah gagal melakukan investasi, bahkan gagal untuk mencapai setengah investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan layanan air. Sebuah laporan Bank Dunia yang belum dipublikasi menyimpulkan bahwa "asumsi utama dari semua pihak yang terlibat dalam proyek, terutama pada pihak donor [perusahaan Biwater Inggris dan Konsultan Teknik Jerman] adalah bahwa tidak mungkin operator swasta [atau perusahaan swasta asing] akan melakukan [pelayaanan air] lebih buruk dari perusahaan Dawasa [milik pemerintah Tanzania sebelumnya]. Tapi itulah yang terjadi yaitu hasil privatisasi tidak sesuai dengan yang dipropagandakan".[10]

Orang-orang miskin Tanzania, sesungguhnya telah jatuh menjadi korban dari kebijakan pemerintah negara asing dan lembaga keuangan internasional yang mereka tidak pernah inginkan. Salah satu kewajiban sosial dari perusahaan Air Kota — perusahaan patungan dengan dua negara Eropa tadi: Inggris dan Jerman — adalah mengontribusi terhadap dana

10 Seager, A., 'Tanzania wins £3m damages from Biwater subsidiary', *The Guardian*, 11 January 2008.

yang akan menghubungkan keluarga-keluarga miskin dengan sistem pipa air. Tapi dalam kenyataannya hal ini tidak pernah dibuat. Biwater kemudian meminta afiliasi dari Bank Dunia, yaitu Pusat Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional untuk memutuskan bahwa pemerintah Negara Tanzania harus membayar kepada perusahaan Biwater sebesar US$20–25 juta (atau Rp200–250 miliar) atas tindakannya yang mengambil alih investasi perusahaan air, aset-aset dan pendapatannya di Kota Dar es Salaam.

Langkah Biwater memicu amarah paraktivists. Biwater menentang permintaan pemerintah Tanzania bahwa kasus ini harus digelarkan di hadapan masyarakat umum. Selain itu, Biwater Inggris juga tidak setuju perkara ini dipergelarkan di tanah Afrika [tapi mesti di Eropa atau di kantor Bank Dunia]. Selain itu Biwater juga menolak untuk membuka dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus ini:

> Ini sungguh memalukan. Kami percaya bahwa rakyat Tanzania berhak untuk tahu persis apa yang terjadi dengan Biwater. Demikian juga orang-orang di Inggris berhak untuk mengetahui bagaimana perusahaan-perusahaan yang berbasis di Inggris berperilaku di luar negeri.Pemerintah Inggris juga memikul tanggung jawab atas kegagalan ini. Dana bantuan Inggris itu telah digunakan untuk membayar penciptaan sebuah lagu pop dan video yang pro privatisasi di Tanzania dalam rangka memenangkan dukungan bagi sebuah kebijakan [privatisasi aset-aset publik milik negara] yang telah menjadi kegagalan total di seluruh negara berkembang.[11]

Privatisasi air merupakan syarat bagi Tanzania untuk menerima bantuan keringanan utang. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan, dan bukan sebaliknya untuk memperkuat kemiskinan. "Sama sekali tidak adil bahwa sebuah perusahaan Inggris seperti Biwater berusaha mengais kembali uangnya setelah gagal dalam proyek mereka," kata Andrew Mushi, seorang wakil aktivist di Tanzania melawan privatisasi

---

11 World Development Movement, 'UK water company takes one of world's poorest countries to court', London: World Development Movement, 2005. <http://www.wdm.org.uk/news/archive/2005/biwater tanzan.htm> (accessed 7 February 2008).

air.[12] Pada bulan Januari 2008 Tanzania memenangkan £3 juta (atau Rp39 miliar) atas kerusakan yang telah ditimbulkan Jasa Layanan Air Kota yang dimiliki perusahaan asing. Di bawah aturan Komisi Perdagangan Internasional dari PBB, pengadilan London menemukan bahwa air dan pembuangan limbah kota di Kota Dar es Salaam telah memburuk di bawah manajemen perusahaan asing tersebut.[13]

Ghana

Pada bulan Mei 2001, sebagian besar masyarakat sipil di Ghana, termasuk kelompok-kelompok perempuan, guru, serikat buruh, pekerja kesehatan masyarakat, kelompok-kelompok lingkungan, organisasi orang-orang cacat dan mahasiswa, berkumpul di bawah bendera Koalisi Nasional Ghana Menentang Privatisasi Air [*National Coalition Against Privatization of Water*, disingkat *National CAP of Water* atau CAP Nasional Air] untuk menentang proposal yang didukung Bank Dunia untuk memprivatisasi layaan air perkotaan. Bank Dunia telah menawarkan pinjaman bebas bunga sebesar US$150 juta (sekitar Rp1500 miliar) untuk meningkatkan pengelolaan perusahaan Air Milik Negara di Ghana dan harus disewakan pengelolaannya kepada manajemen baru. Selain itu, Bank Dunia juga menginginkan kenaikan 95% tarif harga air.

TNCs utama yang menawarkan diri termasuk Suez dan Vivendi (sekarang Veolia), Saur dan Biwater. CAP Nasional Air dibentuk untuk menanggapi kekhawatiran yang meluas di kalangan masyarakat bahwa privatisasi air akan memiliki dampak negatif serius terhadap kesehatan, pekerjaan perempuan, akses terhadap air yang aman, bersih dan harga terjangkau, dan kontrol lokal dan akuntabilitas. Gelombang gerakan tahun 2001 yang berhubungan dengan masalah air lahir sebagai reaksi terhadap syarat-syarat pinjaman utang pada IMF dan Bank Dunia. Menurut Bank Dunia dan IMF, meningkatkan "arus pendapatan" dari penggunaan air akan membuatnya lebih menguntungkan di pasar internasional. Namun,

12 *Ibid.*

13 Seager, 'Tanzania wins £3m damages'.

di Ghana lebih dari 50% penduduk berpenghasilan kurang dari US$1 per hari dan sekitar 40% berada di bawah garis kemiskinan nasional. Saat ini sekitar 35% dari penduduk Ghana tidak memiliki akses terhadap air yang aman dan 68% tidak mendapat layanan kesehatan yang layak. Perusahaan Air Ghana tidak memiliki prestasi yang baik, sekitar setengah air negara yang diolah malah hilang.[14]

Sebuah survei oleh Pusat Pengembangan Sosial Terpadu yang berbasis di Ghana menunjukkan bahwa keluarga-keluarga miskin di lima tempat di Accra ibukota Ghana menghabiskan antara 18% dan 25% dari pendapatan mereka untuk keperluaan air saja. "Dengan mengingat kenyataan-kenyataan ini, maka benar-benar tidak manusiawi dan tidak bertanggung jawab pada pihak IMF dan Bank Dunia untuk mempromosikan pemulihan biaya yang meningkat dan mekanisme penyesuaian tarif otomatis — kebijakan-kebijakan yang lasim digunakan oleh kedua lembaga keuangan internasional ini untuk menaikkan harga konsumen air, sering sebagai taktik awal menuju politik privatisasi."[15] "Anda tidak dapat memprivatisasi air yang sama vitalnya seperti udara yang kita hirup dan membiarkan kekuatan pasar yang nafsu kejar keuntungan untuk menentukan siapa yang bisa dan siapa yang tidak bisa memiliki air untuk minum.[16]

Uruguay

Melalui sebuah referendum nasional pada Oktober 2004, Uruguay menjadi negara pertama yang mengundang-undangkan larangan terhadap privatisasi air oleh demokrasi langsung dan menyatakan air sebagai "hak konstitusional". Lebih dari 64% dari penduduk Uruguay — 1.440.000 pemilih — mendukung Reformasi Konstitusi untuk membela hak atas air. Pemilihan bersejarah di

---

14 Lihat 'Ghana: 49 per cent of treated water goes waste', survey, *Ghanaian Chronicle* (Accra), 19 September 2007. <http://www.allafrica.com/stories/200709190855.html> (accessed 31 October 2007).

15 Koalisi Nasional Ghana Melawan Privatizasi Air, 'Tell the World Bank and its corporate allies to stop pushing water privatization!!', October 2007. <http://www.ghanacap.org/page.aspx?navid=1511> (accessed 31 October 2007).

16 Etego. A., BBC News, 12 August, 2003. <news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3145001.stm> (accessed 31 October 2007).

Uruguay menambahkan air sebagai hak manusia yang harus dilindungi oleh Konstitusi mereka dan meletakkan dasar konstitusional untuk mengelola air secara eksklusif sebagai barang publik [dikelola negara untuk kepentingan umum tanpa harus kejar laba], secara partisipatif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2002 Surat Perjanjian (*Letter of Intent*) antara pemerintah Uruguay dan IMF telah ditandatangani: tujuannya adalah untuk memperluas privatisasi air minum dan layanan sanitasi bagi seluruh negara Uruguay. Privatisasi air mulai di departemen Maldonado dengan kedatangan TNC Suez dari Prancis, diikuti oleh TNCs Aguas de Bilbao dari Spanyol. Hal ini telah memiliki konsekuensi negatif yang banyak.

Privatisasi air mengucilkan banyak anggota masyarakat dari akses terhadap air minum karena mereka tidak mampu membayar harga air yang mereka butuhkan. Kualitas pelayanan air juga menurun bila dibandingkan dengan layanan sebelumnya yang dikelola oleh perusahaan air negara. Badan kontrol kualitas air bahkan menganjurkan supaya tidak boleh minum air langsung dari keran karena tidak memenuhi standar-standar air minum yang sehat dan bersih.

Pada tahun 2002 Komisi Nasional Pertahanan Air dan Kehidupan (atau CNDAV: singkatan asli dalam Bahasa Spanyol) dibentuk untuk menentang konsep komersialisasi air. Para pendiri organisasi ini termasuk asosiasi lingkungan, FFOSE (serikat buruh dari perusahaan air publik), dan Sahabat-Sahabat Bumi (*Friends of the Earth*) di Uruguay.[17]

Botol air: Brasil

Nestlé, salah satu perusahaan makanan dan air botol terbesar di dunia, telah menciptakan kontroversi atas aktivitasnya di negara bagian Brasil Minas Gerais. Nestlé adalah salah satu dari empat perusahaan yang paling diboikot di seluruh dunia karena dari "pemasarannya yang agresif" terhadap makanan bayi (lihat bahan Bab 3).[18]

17 Information from Public Citizen website. <http://www.citizen.org/cmep/Water/cmep_Water/reports/uruguay> (accessed 7 February 2008).

18 Lihat Baby Milk Action website.<http://www.babymilkaction.org> (accessed 7 February 2008).

Pada tahun 1992 Nestlé mengambil alih perusahaan Perrier dan dengan demikian mendapatkan kontrol atas Minas Gerais — taman air bersejarah di São Lourenço. Pada tahun 1996 perusahaan itu menggali dua sumur sedalam 162 meter ke dalam akuifer [tampungan air di dalam perut bumi], yang dikenal juga dengan nama sumur Primavera, "tanpa autorisasi sesuai aturan yang berlaku" dan mulai menyaringnya [demineralisasi air = memisahkan air dari unsur-unsur garam dan mineral lainnya] untuk menjadi air bersih yang siap dipasarkan dengan merek *Pure Life* (Hidup Bersih). Demineralisasi air merupakan perbuatan ilegal di bawah hukum federal Brasil.[19]

Tetapi Perusahaan Nestlé tidak menghentikan operasinya. Maka pada tahun 2003 Departemen Nasional Sumber Daya Mineral (DNPM, singkatan asli dalam Bahasa Spanyol) menugaskan tim dari bidang hukum yang menetapkan status ilegal dari aktivitas bisnis Nestlé dan merekomendasikan bahwa operasi bisnis air di sumur Primavera mesti "dilumpuhkan". Pada bulan Maret 2004 sebuah perintah diterbitkan dalam buku harian resmi yang memberikan perusahaan Nestlé kesempatan 30 hari untuk menggulungkan tikar seluruh aktivitasnya di sumur Primavera. Tapi perusahaan Nestlé menolak ultimatum ini dan pergi ke Mahkamah Agung untuk meminta perpanjangan waktu 30 hari lagi hingga Oktober 2004.

Perusahaan Nestlé mengklaim bahwa tuduhan tentang sumur-sumur 162 meter yang digali ke dalam akuifer di taman kota tidak benar dan bahwa "audit pihak ketiga oleh Bureau Veritas menegaskan bahwa kita telah bertindak sesuai dengan undang-undang Brasil", dan bahwa "kita mengambil air dari dalam tanah jauh lebih sedikit daripada yang diizinkan secara hukum". Namun kelompok kampanye Aksi Susu Bayi (*Baby Milk Action*) diberi tahu oleh Bureau Veritas bahwa pekerjaan perusahaan Nestlè "tidak mempunyai audit yang legal seperti yang diklaimnya, juga tidak mencakup tinjauan dari aksi masyarakat sipil yang berlangsung". Seorang

19 Baby Milk Action, 'Nestlé's claims on water bottling operation in Brasil demonstrably untrue', press release, 2 March 2006.<http://www.babymilkaction.org/press/press2march06.html> (accessed 31 October 2007).

hidrologist setempat mengatakan bahwa "Nestlé keliru dalam mempresentasikan hasil investigasi atau laporan hasil investigasi dilakukan tidak secara lengkap atau tidak jujur. Bukti dokumenter jelas-jelas menunjukkan bahwa hasil investigasi, seperti yang dipresentasikan oleh Nestlé, jelas tidak benar".[20]

Pada tahun 2001 warga kota São Lourenço mempresentasikan sebuah petisi dengan 3.000 tanda tangan kepada Pedro Paulo Aina, seorang Jaksa Penuntut Umum karena mereka khawatir bahwa turis-turis melihat adanya perubahan komposisi mineral dari mata air di taman kota São Lourenço. Penyurutan volume air juga sudah terjadi dan menurut Nestlé hal ini terjadi karena akibat banjir, tapi menurut hidrologist kota São Lourenço hal itu terjadi karena proyek pengisapan air sumur Primavera oleh perusahaan Nestlè. Jaksa Penuntut Umum menginvestigasi kasus ini dan menuntut [perusahaan Nestlè] membayar ganti rugi kepada warga penduduk dari kota São Lourenço.

Sebuah dengar pendapat berlangsung di Kongres Brasil pada bulan Juli 2004 dan sebuah majalah resmi melaporkan: "Petugas Kementerian Umum Federa dari Minas Gerais Afrânio mengecam aktivitas Nestlé di musim semi di São Lourenço sebagai tidak layak dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Kode Etik Air Mineral."[21] Perusahaan Nestlé menghentikan pabrik demineralisasi air pada Oktober 2004, namun tetap terus memompa air untuk mengekstrak gas karbon dioksida. Masyararat peserta kampanye terus melapor Nestlé ke pengadilan dan menuntutnya untuk membayar ganti rugi warga penduduk dari kota São Lourenço.

GATS

Membebaskan perdagangan di bidang layanan jasa seperti layanan persediaan air merupakan tujuan dari Perjanjian Umum WTO tentang Perdagangan Jasa (*General Agreement on Tradein Services* atau GATS). Yang menikmati manfaat dari perjanjian WTO adalah pebisnis besar, dan pihak

---

20 *Ibid.*
21 *Ibid.*

yang selalu kalah adalah masyarakat sederhana yang miskin, karena GATS bisa mengancam penyediaan layanan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat miskin. Seperti dijelaskan di atas, usaha privatisasi air di Bolivia menunjukkan bahwa sebuah sistem yang diatur oleh kemampuan orang untuk membayar tidak akan membawa layanan jasa kepada masyarakat miskin.

Korporasi telah menjadi kekuatan yang berada di belakang GATS — 160 layanan jasa diperdagangkan secara internasional. Perjanjian ini merupakan bagian penting dari senjata mereka. Tujuannya adalah untuk menghilangkan peraturan-peraturan pemerintah di bidang pelayanan jasa yang dianggap sebagai hambatan-hambatan bagi perdagangan.

Dalam teorinya, negara-negara anggota WTO bisa memutuskan layanan jasa sektor mana yang mereka inginkan untuk diprivatisasi. Akan tetapi dalam praktik, pemerintah negara-negara Barat telah memberikan tekanan pada negara-negara berkembang agar mereka menyerahkan sektor layanan jasa untuk diprivatisasi — di bawah ancaman akan kehilangan bantuan pembangunan [dari negara industri bila pemerintah negara berkembang tidak mengabulkan tuntutan privatisasi mereka]. *Christian Aid* mengatakan bahwa pemerintah Inggris, misalnya, telah menekan pemerintah Ghana untuk menyerahkan perusahaan layanan air di kota-kotanya untuk dikelola oleh perusahaan-perusahaan dan hal ini menjadi syarat bagi pemerintah Ghana untuk mendapat bantuan pembangunan dari Inggris sebesar £10 juta (sekitar Rp150 miliar).[22] Tanzania, yang dikutip di atas, juga merupakan contoh lain dari kasus serupa.

TNCs tertarik untuk memperluas aplikasi perjanjian GATS dan mengubah strukturnya sehingga regulasi di satu sektor juga berlaku bagi sektor-sektor terkait lainnya. Pemerintah negara-negara berkembang, sebagai akibatnya, sering berada di bawah tekanan untuk menata kembali kepemilikan dan pemberian layanan jasa di negara mereka, dan mengorbankan sektor-sektor layanan jasa ini kepada ideologi "perdagangan

22 Christian Aid, *Master or Servant? How Global Trade Rules Can Work to the Benefit of Poor People*, London: Christian Aid, 2001. p. 2.

bebas". Negosiasi-negosiasi GATS sering sangat kompleks dan teknis, yang membuat banyak negara berkembang tidak berada pada posisi yang menguntung pada setiap negosiasi. Selain itu, GATS bercita-cita untuk membuat privatisasi sebagai sebuah kebijakan ekonomi yang tidak dapat diubah lagi. Ini berarti bahwa sekali pemerintah membuka sektor layanan tertentu kepada aturan WTO, maka hal itu tidak akan bisa diubah kembali: perusahaan-perusahaan memiliki kekuatan untuk menuntut [secara hukum di depan pengadilan] pemerintah-pemerintah yang goyah atau plin-plan.

"Keuntungan dari privatisasi perdagangan di bidang pelayanan jasa jauh melebihi privatisasi perdagangan barang-barang," kata Direktur Jenderal WTO Pascal Lamy pada Oktober 2007. Akan tetapi pertanyaannya adalah pihak siapa yang memanen keuntungan [dari privatisasi ini]. Jawabannya adalah perusahaan-perusahaan transnasional.[23] Sebuah perjanjian GATS yang diperpanjang atau diperluas akan melayani kepentingan TNCs. Sarah Anderson, dari Institut Studi Kebijakan Publik Washington, DC, yang telah membantu koordinasi masyarakat sipil AS menekan perusahaan Bechtel untuk menyelesaikan gugatannya [sehubungan dengan masalah privatisasi air Kota Cochabamba di Bolivia], mengatakan bahwa untuk mencegah konfrontasi serupa di masa mendatang, "tantangan sekarang adalah membangun pada momentum ini untuk mendorong lahirnya aturan-aturan perdagangan dan investasi baru yang mempromosikan demokrasi dan pembangunan berkelanjutan daripada aturan-aturan yang hanya menguntungkan kepentingan-kepentingan egoistik dari TNCs besar".[24]

Kesimpulan

Dalam menghadapi oposisi masyarakat lokal yang terus menyebar luas, perusahaan-perusahaan di sektor layanan jasa air mulai melangkah secara

---

23 Lamy, P., sebuah pidato pada European Services Forum and the London School of Economics, 15 October 2007.

24 CorpWatch, 'Bolivia: Bechtel drops $50 million claim'.

lebih hati-hati. Pada tahun 2003 malah sudah ada tanda-tanda akan perlunya sebuah usaha pertimbangan kembali. Di Forum Air Dunia 2003 di Kyoto, Thames Water (Inggris) menyatakan, "Pada dasarnya, hal ini salah dan kontra-produktif dalam praktik bagi badan-badan publik pemerintah untuk dipaksa menjual sektor-sektor layanan publik kepada perusahaan swasta".[25]

TNCs telah terbukti gagal memberikan pelayanan air bersih dan terjangkau bagi masyarakat miskin di negara-negara berkembang. Investasi mereka tidak bertujuan untuk meningkatkan layanan jasa air dan sanitasi bagi masyarakat miskin. Namun, ketimbang mengembangkan kebijakan-kebijakan baru yang didasarkan pada pengalaman ini, pemerintah negara-negara Eropa dan lembaga-lembaga keuangan internasional justru sedang merancang mekanisme-mekanisme baru untuk menarik sektor swasta ke dalam usaha layanan air dan sanitasi, termasuk berbagai instrumen keuangan untuk menjamin keuntungan perusahaan. Tindakan mengabaikan kegagalan sektor swasta [privatisasi] untuk mengusahakan layanan air bagi mayoritas masyarakat miskin yang menderita kekurangan air di negara-negara berkembang.

Peningkatan-peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang signifikan telah dicapai di kota-kota di negara berkembang oleh berbagai bentuk inovatif dari pengelolaan air publik. Pilihan-pilihan pengelolaan air publik mulai dari reformasi utilitas publik yang ada hingga rencana manajemen berbasis masyarakat. Perbaikan air minum publik di negara-negara berkembang berjalan penuh tantangan. Sebuah kendala utama adalah prasangka sistematis terhadap air publik pada pihak lembaga-lembaga keuangan internasional dan pemerintah donor, yang menjadikan privatisasi sebagai syarat-syarat bagi pinjaman luar negeri dan bantuan bagi negara-negara berkembang dan menggunakan anggaran bantuan luar negeri untuk mendanai pemain-pemain kunci [TNCs] dalam privatisasi dunia industri.

25 Kuper, J., *Privatisation, Power and Poverty*, London: War on Want, February 2004.

Keberhasilan organisasi-organisasi berbasis kemasyarakatan di negara-negara berkembang, di mana masyarakat setempat telah bertanggung jawab atas pengelolaan air minum mereka, telah diabaikan oleh pemerintah negara-negara Barat. Masyarakat miskin di Brasil, Bangladesh, Ghana, dan Bolivia menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan. Aktivis di negara-negara berkembang lainnya telah belajar dari keberhasilan-keberhasilan ini. Masyarakat miskin tahu bahwa mereka sedang memperjuangkan kebutuhan paling dasar dari semua kebutuhan yang lain. Seperti seorang aktivis masalah air di Ghana merumuskannya secara sangat tepat: "Mereka [perusahaan atau TNCs] berjuang demik keuntungan bisnis mereka, kami berjuang untuk mempertahankan hidup kami."[26]

Lembaga-lembaga bantuan telah menyerukan bantuan Uni Eropa untuk proyek air yang tidak menjurus kepada kepentingan-kepentingan pribadi:

> Ada kebutuhan mendesak untuk memberi bantuan pendanaan tanpa harus diboncengi syarat politik yang terang-terangan. Uni Eropa memiliki peran yang jelas untuk bermain dengan memastikan bahwa bantuan program untuk air dan sanitasi di negara-negara berkembang (termasuk Sarana Air UE) tidak memihak sektor swasta. Inisiatif Proyek Air Uni Eropa terlalu penuh dengan misi ekspansi sektor swasta.[27]

Pada bulan Mei 2004, Dewan Menteri-Menteri Afrika, Caribia, dan Pasifik-Uni Eropa (ACP-UE) sepakat untuk mengalokasikan €500 juta (sekitar Rp6.500 miliar) untuk sebuah Sarana Air ACP-Uni Eropa. Fasilitas ini memiliki potensi, asalkan kebutuhan masyarakat miskin menjadi pertimbangan utama dalam pendekatannya, dan asalkan kebijakan negara-negara Uni Eropa memiliki koherensi — yaitu bahwa mereka [pemerintah negara-negara Barat] mesti berhenti mendorong liberalisasi dan privatisasi layanan-layanan publik. Sejumlah organisasi ACP telah menyelenggarakan

26 *Ibid.*

27 Surat terbuka kepada European Commissioner for Development and Humanitarian Aid, 22 March 2005. War on Want and 74 others. <http://www.waronwant.org> (last accessed 31 October 2007).

beberapa lokakarya untuk membantu mengembangkan proposal yang sehat bagi fasilitas layanan publik.

Bagi penduduk di setiap negara, air harus menjadi barang kebutuhan publik yang bisa dijangkau oleh setiap warga negara tanpa terpengaruh oleh besar pendapatannya dan bukan sebaliknya menjadi sumber pemintalan uang dari sektor swasta (TNCs).

BAB 6

Pariwisata: Sebuah Ilusi Besar

Pariwisata adalah prostitusi budaya. (Haunani-Kay Trask daru Hawaii)

TNCs... menguasai sebagian besar transaksi pariwisata internasional. (Laporan PBB)

Sebagai sektor layanan jasa terbesar di dunia, pariwisata mempekerjakan sekitar satu dari setiap dua belas tenaga kerja dunia dan menarik minat lebih dari satu dari setiap tujuh orang manusia di dunia. Pariwisata merupakan penghasil mata uang asing terbesar kedua bagi negara-negara berkembang (setelah minyak bumi). Untuk beberapa negara tertentu, pariwisata merupakan salah satu dari beberapa sektor ekonomi yang berkembang pesat. Pada tahun 2008 sekitar 900 juta orang menjadi wisatawan internasional.[1]

Pariwisata atau tourisme internasional didominasi oleh TNCs besar dan dilayani oleh orang-orang miskin di negara-negara tuan rumah. Liburan murah bagi orang-orang di Barat menjadi kesempatan untuk mendulang keuntungan yang melimpah bagi TNCs, tapi ada juga akibat yang harus dibayar. Warga masyarakat di negara-negara tujuan wisata tidak hanya memperoleh keuntungan yang sedikit, tapi ekonomi mereka, mata pencaharian, budaya dan lingkungan mereka juga dapat rusak.

Setelah serangan teroris di New York pada 11 September 2001, pertumbuhan pariwisata internasional sempat terhenti. Tapi perhentian tidak lama. Pada tahun-tahun berikut periode 2000–2005, pariwisata

---

1 DariTourism Concern website. <http://www.tourismconcern.org.uk> (accessed 8 January 2008).

telah pulih kembali. "Pertumbuhan itu disebabkan oleh faktor-faktor seperti peningkatan sarana informasi dan sistem pemesanan yang dibuat melalui Internet; adanya keinginan terus-menerus dari konsumen untuk bepergian lebih sering dan lebih jauh; globalisasi yang semakin kuat oleh perusahaan-perusahaan; dan faktor terakhir adalah harga tiket penerbangan yang murah."[2] Secara global, antara tahun 2001 dan 2004, pendapatan dari pariwisata internasional bertumbuh sebesar 33,2%. Untuk negara-negara berkembang, pendapatan dari sektor pariwisata antara 2001 dan 2004 melampaui angka ini, yaitu meningkat sebesar 40,6%.[3]

Pariwisata dilihat oleh banyak negara miskin sebagai sebuah bentuk pertumbuhan ekonomi. Selain itu ia juga menjadi sebuah cara gampang untuk memperbanyak jenis sektor ekonomi dan melarikan diri dari ke-bergantung pada ekspor tradisional. Sektor pariwisata memperoleh pendapatan ekspor tanpa banyak masalah seperti dialami oleh jenis ekspor-ekspor lain seperti kopi dan teh yang selama ini harganya relatif rendah dan tidak stabil. Kalau orang-orang Eropa mengalami peningkatan penghasilannya [misalnya karena gaji naik atau profit bisnis bertambah], biasanya kenaikan itu tidak akan diikuti oleh peningkatan konsumsi mereka akan barang-barang dagang impor seperti kopi atau teh. Hampir pasti mereka akan lebih banyak menghabiskan uang pada musim liburan dengan mengadakan perjalanan-perjalanan yang jauh, entah ke Afrika, Asia, Amerika Latin atau Pacifik [karena itu harga kopi dan teh akan tetap saja]. Pariwisata juga menghindari hambatan-hambatan yang dibuat oleh pemerintah negara-negara Barat untuk menjaga barang-barang yang dipabrik oleh negara-negara berkembang tidak masuk pasar-pasar barang di Eropa. Pariwisata menciptakan lapangan kerja dan seharusnya sektor ini bisa membiaskan manfaatnya bagi industri-industri lokal. Negara-negara berkembang memiliki banyak aset bernilai bagi industri pariwisata seperti budaya, lingkungan, satwa liar, dan iklim.

---

2 Euromonitor, *World Market for Travel and Tourism*, London: Euromonitor, 15 February 2007.

3 World Tourism Organization, Report to the United Nations Secretary-General, Madrid, 2005.

Peluang-peluang segar untuk mengeksplorasi sesuatu yang belum diketahui menambah glamor yang tampaknya masih samar-samar. Cina, misalnya, telah menjadi tujuan [tourisme] yang semakin populer "karena Cina telah membuka dirinya kepada Barat dan telah meningkatkan infra-struktur-infrastruktur dan fasilitas-fasilitas negaranya. Cina hampir me-nyamai Amerika Serikat dalam hal jumlah total kedatangan wisatawan pada tahun 2005, yang diperkirakan mencapai 47,9 juta orang.[4]

Tapi industri pariwisata juga memiliki segi buruknya yang cukup serius. Depresi ekonomi dan kebutuhan untuk mencari cara-cara baru untuk memperoleh devisa asing telah menjadi motivasi yang mendorong kebangkitan pariwisata di negara-negara berkembang. Dihadapkan dengan beban utang yang menumpuk, yang memperburuk kondisi perdagangan dan membuat bantuan asing menurun, negara-negara berkembang mau tak mau memacukan dirinya untuk mengembangkan potensi-potensi pariwisata, yang menurut pandangan mereka industri pariwisata tidak membawa dampak apa-apa [secara negatif] selain hanya hal-hal positif. Mereka mengharapkan pariwisata bisa meningkatkan perolehan devisa asing untuk membayar utang [yang dipinjam dari negara-negara Barat termasuk melalui IMF dan Bank Dunia]. "Pengembangan pariwisata sering kali dilihat sebagai solusi yang cepat dan sederhana terhadap masalah dari sebuah negara atau wilayah yang secara ekonomis masih terkebelakang, sehingga penggunaan atribut-atribut alamiah dari sebuah daerah tertentu dapat memberikan keuntungan ekonomi secara cepat," tulis sepesialis pariwisata Veronica H. Long.[5]

Di tengah keglamoran pariwisata, ada sejumlah keraguan tentang kontribusi industri pariwisata terhadap pembangunan manusia di negara-negara miskin. Kondisi kerja di sektor ini sering memprihatinkan, upah rendah, dan perbedaan antara pekerja wisata dan wisatawan sangat kontras secara tajam. Sementara TNCs menuai manfaatnya yang banyak, industri

---

4 Euromonitor, *World Market for Travel and Tourism.*

5 Long, V. H., 'Government–industri–community interaction in tourism development in Mexico', dalam M. Thea Sinclair and M. J. Stabler (eds), *The Tourism Industri: an International Analysis*, Wallingford (UK): CAB International, 1991, p. 4.

pariwisata sering kali merusakkan kekayaan-kekayaan yang menarik wisatawan ke sana seperti lingkungan alam dan budaya. Melalui permintaan mereka yang tinggi akan layanan air, misalnya, dan dampaknya terhadap budaya lokal, industri wisata dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan yang pada akhirnya harus ditanggung oleh masyarakat negara miskin.

Demikian juga ekonomi nasional tidak mendapat keuntungan seperti yang dipropagandakan. Sebagian besar dari uang yang para wisatawan bayar dan belanjakan, dipanen oleh TNCs melalui kepemilikan mereka atas hotel-hotel, maskapai penerbangan dan operasi tour (biro travel). Ketika para wisatawan mengunjungi pantai-pantai mereka, negara-negara berkembang sering memanen kurang dari sepertiga dari uang yang para wisatawan bayar dan belanjakan, dan bahkan bisa kurang dari sepertiga. Sebuah contoh dikutip oleh Anita Roddick: "Hingga 86% dari keuntungan liburan ilusif di Republik Dominika tetap tinggal di [atau dipanen oleh] Inggris."[6] Hal yang sama juga diutarkan oleh M. Thea Sinclair dari Pusat Penelitian Pariwisata di Universias Kent: "Masalah utama yang berkaitan dengan pariwisata di negara-negara berkembang adalah... distribusi pendapatan yang diperoleh dari industri pariwisata antara perusahaan-perusahaan dan individu-individu pelaku wisata baik di negara tujuan maupun di negara asal wisatawan."[7]

Daya tarik dari industri pariwisata bagi TNCs bisa dimengerti. Ketika pariwisata menjadi salah satu industri dunia yang berkembang sangat cepat, maka perusahaan transnasional atau TNCs juga bersemangat untuk masuk ke sektor ini dan mengeksploitasi peluang-peluang baru. TNCs Pariwisata didefinisikan oleh Organisasi Pariwisata Dunia sebagai "perusahaan-perusahaan asing yang menyediakan layanan untuk mentransportasikan orang dengan investasi langsung atau bentuk-bentuk lain dari pengaturan

---

6 Roddick, A., 'Travel that doesn't cost the earth', *The Independent*, 20 September 2005.

7 Sinclair, M.T., P. Alizadeh, E. Atieno and O. Onunga, 'Tourism development in Kenya', in David Harrison (ed.), *Tourism and the Less Developed Countries*, London: Belhaven Press/Halstead Press, 1992, p. 55.

kontrak dalam satu atau lebih negara penerima".[8]

Di satu sisi TNCs ingin mengontrol sektor-sektor penting, seperti hotel-hotel besar dan restoran-restoran, mereka juga sering memilih untuk tidak menginvestasikan uang mereka secara langsung. Banyak dari mereka yang berbisnis di bidang ini dengan taruhan keuangan yang minimal. Mereka melakukan hal ini melalui waralaba dan kontrak manajemen. Sebuah rantai besar membuat pengaturan bagi sebuah perusahaan yang lebih kecil untuk mendirikan sebuah hotel di lokasi tertentu dan dengan standar-standar tertentu. Lalu sebuah biaya dibayar oleh perusahaan yang lebih kecil untuk menggunakan nama dan logo dari rantai industri besar tadi.

Tiga cabang

Jenis-jenis cabang TNCs [di bidang industri pariwisata] dapat ditemukan dalam industri pariwisata internasional. Tapi yang paling penting adalah maskapai penerbangan, hotel, dan jaringan-jaringan rantai restoran, operator tour dan agen perjalanan. Cabang-cabang ini menguasai sebagian besar transaksi pariwisata internasional.[9]

Maskapai penerbangan

Mulai dari perusahaan-perusahaan yang besar dan dimiliki secara publik sampai dengan yang perusahaan-perusahaan kecil dan murah, maskapai penerbangan mentransportasikan lebih dari 80% wisatawan mancanegara. Banyak maskapai penerbangan besar sekaligus memiliki operasi anak perusahaan di bidang pariwisata, termasuk investasi langsung dan pengaturan kontrak dengan jaringan hotel dan restoran, perusahaan yang mengoperasikan wisata, katering, dan agen-agen perjalanan. *British Airways*, misalnya, mempunyai sebuah anak perusahaan, yaitu *British Airways*

---

8 World Tourism Organization, *The Role of Transnasional Tourism Enterprises in the Development of Tourism*, Madrid: WTO, 1985.

9 United Nations Centre on Transnasional Corporations, *Transnasional Corporations, Services and the Uruguay Round*, New York: UNCTC, 1990, p. 92.

Holidays, yang menawarkan akomodasi hotel, menyewa mobil, transfer [uang] dan tour keliling kota. Banyak anak perusahaan *British Airways Holidays* ini memiliki afiliasinya di negara-negara berkembang, yang meliputi kegiatan seperti asuransi, layanan komputer dan layanan teknis.

Perubahan-perubahan kebijakan oleh maskapai penerbangan internasional, di mana negara-negara berkembang tidak memiliki kontrol, dapat secara drastis memengaruhi penerimaan dari sektor pariwisata. Pada tahun 1988, misalnya, *Japan Airlines* dan *Continental* menarik diri dari bandara internasional Fiji, yang kemudian memengaruhi kedatangan wisatawan dari Jepang, Kanada, dan Amerika Serikat [ke Fiji]. Bagi negara-ne-gara berkembang, perdagangan [di bidang pariwisata] bisa berisiko tinggi.

Perusahaan-perusahaan maskai penerbangan yang sudah lama dan mapan menghadapi persaingan ketat dengan maskai penerbangan yang murah. Selain itu, semua maskapai penerbangan akan berada di bawah tekanan akibat kesadaran masyarakat tentang dampak terhadap iklim dari penerbangan udara. Penurunan jumlah orang untuk bepergian melalui udara diperkirakan "sebagai akibat dari maskapai penerbangan yang dituding sebagai salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan dan yang mendorong pemanasan global".[10] Perubahan iklim telah kembali menjadi faktor kunci.

Operator tour

Operator tour adalah para grosir yang mengumpulkan berbagai elemen dari paket tour atau perjalanan, dengan tujuan untuk mencapai penurunan harga bagi para konsumen. Sebelum munculnya Internet dan maskapai penerbangan yang murah, mereka menetapkan harga cukup menukik tinggi. Paket-paket liburan biasanya yang menjadi norma. Tapi banyak wisatawan sekarang ini bisa mendapatkan harga [penerbangan, hotel, restoran, dll.] yang lebih rendah, dan juga jenis liburan yang lebih pribadi, dengan membuat pelbagai elemen yang berbeda-beda menjadi satu paket.

10 Hofmann, O., 'Airlines brace themselves for the climate change storm', *Euromonitor*, 9 November 2006.

Operator tour tetap masih memiliki peran penting di Inggris dan Jepang, meskipun hal ini kurang penting di Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat, sebagian karena pariwisata domestik di ketiga negara ini masih lebih populer. Beberapa operator tour merupakan bagian dari TNCs yang mencakup jaringan hotel dan maskapai penerbangan. Mereka biasanya lebih memilih untuk menggunakan maskapai penerbangan dari negara-negara Barat, antara lain disebabkan karena wisatawan sendiri memiliki preferensi atas maskapai penerbangan ini. Mereka menjual paket tour wisata melalui agen perjalanan, kadang-kadang dalam kelompok yang sama, dan membuat iklan-iklan persuasif yang memperlihatkan gambar-gambar yang indah dari negara-negara berkembang, namun gambar-gambar yang diiklankan itu sering kali tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Hotel

Dari semua aktivitas yang membentuk industri pariwisata, hotel memiliki kemungkinan dampak terbesar pada negara-negara berkembang. TNCs biasanya lebih memilih untuk tidak memiliki hotel sendiri di luar negeri, dan bahkan tidak memiliki bisnis keuangan secara langsung dengan hotel-hotel di luar negeri. Jaringan perhotelan memanen sebagian besar uang mereka baik melalui manajemen pengaturan dengan perusahaan-perusahaan lokal atau dengan waralaba, "yang mengenakan biaya yang sangat tinggi untuk penggunaan nama merek mereka," demikian kata Koson Srisang, Sekretaris Eksekutif Koalisi Ekumenis Pariwisata Dunia Ketiga.[11]

Hotel-hotel tersebut menguasai "persentasi jauh lebih tinggi dari jumlah total kamar hotel di banyak negara berkembang daripada di negara-negara maju".[12] Mereka juga beroperasi dengan cara yang berbeda. Sebuah studi dari PBB menunjukkan bahwa di Asia, 60% dari hotel

11 Koson Srisang, quoted in *Contours* magazine (September 1991), Thailand: Ecumenical Coalition on Third World Tourism.

12 United Nations Centre on Transnasional Corporations, *Transnasional Corporations in International Tourism*, New York: UNCTC, 1982, p. 9.

berafiliasi dengan jaringan hotel transnasional yang dihubungkan oleh kontrak manajemen, 23% oleh waralaba dan 15% oleh saham ekuitas.[13] Manajemen dan perjanjian waralaba karenanya bisa menguasai 85% dari hotel-hotel di Asia yang berasosiasi dengan TNCs.

Jaringan-jaringan hotel terbesar di dunia sebagian besar berbasis di Amerika Serikat. Sebuah hotel yang terhubung ke satu atau lebih dari jaringan rantai besar perhotelan dapat ditemukan di hampir setiap negara di dunia. Jaringan rantai perhotelan terbesar, dalam hal jumlah hotel, yaitu *Wyndham*, melukiskan dirinya sebagai sebuah "bisnis penginapan dengan hampir 6.500 hotel waralaba. Ia memiliki lebih dari 535.000 kamar di enam benua... 10 merek kami bersaing di setiap segmen pasar dari ekonomi ke kelas atas".[14] Jaringan perhotelan ini meliputi *Howard Johnson, Days Inn Hotel* dan *Travelodge*. Grup Hotel *InterContinental* mengklaim jumlah kamar tamu lebih dari perusahaan hotel lainnya, yaitu 571.071 kamar di lebih dari 3.800 hotel di hampir 100 negara. Merek-merek mereka termasuk *InterContinental, Crowne Plaza* dan *Holiday Inn*. Sebagian besar hotel mereka adalah perusahaan waralaba.[15]

Berdasarkan perjanjian manajemen, sebuah TNC melakukan operasi dan manajemen dari sebuah hotel di negara berkembang yang dimiliki oleh kepentingan-kepentingan lokal. Pengaturan ini sangat populer dengan TNCs — karena dengan itu mereka [TNCs] memberi kontrol yang besar kepada mereka [kepentingan lokal] atas keuangan sebuah hotel tanpa risiko bahwa sesewaktu dapat diambil alih kepemilikannya.

Waralaba memungkinkan sebuah perusahaan lokal untuk menggunakan nama, merek dagang dan jasa dari jaringan hotel TNCs sebagai imbalan atas penyewaan yang cukup besar (biasanya ada sebuah jumlah tetap yang ditambah dengan persentase pada kamar-kamar hotel). Hotel ini ke-

13 PBB, *Services in Asia and the Pacific: Selected Papers*, Vol. 1, New York: UN, 1990, p. 372.

14 Informasi dari Wyndham Hotel Franchise website. <http://www.hotelfranchise.wyndhamworldwide.com> (accessed 7 January 2008).

15 Informasi dari InterContinental Hotel Group website. <http://www.ichotelsgroup.com> (accessed 5 February 2008).

mudian dipromosikan sebagai anggota kelompok hotel TNCs. Jika terjadi suatu masalah yang serius — misalnya terjadi kemerosotan ekonomi yang parah — maka hal itu akan menjadi tanggung jawab perusahaan. [Dalam hal ini], TNC telah mentransfer risiko [ini kepada perusahaan lokal].

Jaringan kerja

Sebuah jaringan kerja yang berhubungan satu sama lain merupakan ciri khas pelbagai cabang industri. Mayoritas turis, setelah membeli tiket mereka dari agen perjalanan atau operator tour yang berbasis di negara-negara industri, baik pesan secara langsung maupun melalui Internet, menggunakan sebuah maskapai penerbangan yang berbasis di negara itu dan tinggal di sebuah hotel yang sebagiannya dimiliki atau dikelola oleh grup hotel TNCs. Beberapa perusahaan wisata memiliki struktur vertikal – yaitu turis membuat pesan tempat liburan melalui sebuah agen perjalanan yang merupakan bagian dari perusahaan yang sama sebagai operator tour, maskapai penerbangan dan hotel tempat mereka tinggal.

Perusahaan TUI AG yang berbasis di Hannover merupakan contoh terbesar dari jaringan tersebut. Sebagai usaha pariwisata dan kelompok layanan jasa terbesar di dunia, yang mempekerjakan 80.000 orang tenaga kerja di 500 anak perusahaan, TUI AG menggambarkan dirinya sebagai perusahaan kelas dunia, inovatif dan berfokus pada pelanggan yang memiliki banyak merek hotel liburan paling terkenal di Eropa, dengan posisi kepemimpinan dalam maskapai penerbangan, tour bisnis yang inklusif, dan sektor agen perjalanan.[16]

Perusahaan [TUI AG] memiliki sekitar 3.200 agen perjalanan dan menjual tempat-tempat untuk liburan pada TV perjalanan, Internet dan penjualan langsung. Perusahaan ini juga menawarkan liburan "di berbagai negara melalui operator tour yang berbeda. Selain paket liburan, berbagai produk termasuk komponen liburan individual dapat dipilih, seperti penerbangan individu, akomodasi hotel, wisata di daerah liburan dan

16 Informasi dari TUI website. <http://www.tui-group.com/en> (accessed 8 January 2008).

menyewa mobil. Perusahaan TUI AG memiliki maskapai penerbangannya sendiri dan menerbangkan wisatawan ke sekitar 150 negara tujuan di seluruh dunia. Dan ia memiliki dua belas merek perusahaan yang sama di 30 negara dengan sekitar 276 hotel. *Portland Direct* dan *Thomson Holidays* merupakan di antara perusahaan TUI AG yang memakai merek Inggris.

Thomas Cook Group memiliki jaringan lebih dari 3.000 agen perjalanan yang dimiliki atau waralaba, dan juga menjual secara *online* melalui Internet. Maskapai ini mengoperasikan armada 97 pesawat terbang (maskapai penerbangan *MyTravel* dan *Thomas Cook*) dan memiliki operasi tour di Inggris, Irlandia, benua Eropa dan Amerika Utara.[17]

Hubungan pariwisata dengan sektor lain

Salah satu kelemahan yang paling buruk dari pariwisata adalah bahwa di sebagian besar negara berkembang sangat kecil bukti yang menunjukkan bahwa industri pariwisata membantu memajukan pembangunan. Walaupun industri pariwisata memiliki potensi untuk merangsang pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya, tapi di dalam kenyataannya industri pariwisata tidak selalu mengembangkan hubungan positif yang cukup dengan sektor-sektor ekonomi yang lain dan tidak membawa keuntungan pembangunan sebuah negara secara keseluruhan. Keuntungan "perputaran industri pariwisata" (*the spin-off of tourism*) sering amat sedikit dan biaya yang dikeluarkan bisa lebih tinggi dari keuntungan yang diperoleh. Kontribusi pariwisata internasional terhadap emisi karbon dan perubahan iklim juga turut menambah biaya.

Beberapa praktik bisnis dari TNCs pariwisata dapat membebankan biaya tambahan kepada negara tuan rumah. Ekonomi harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Tanah dan pantai-pantai harus dilindungi, dan infrastruktur, hotel dan kompleks-kompleks sebagai tempat liburan harus dibangun khusus. Jalan penghubung baru ke tempat wisata biasanya akan dibutuhkan khusus juga dan pelayanan

---

17 Informasi dari Thomas Cook website. <http://www.thomascook.com> (accessed 5 February 2008).

harus diprioritaskan. Biaya untuk membangun infrastruktur hampir pasti berasal dari anggaran negara tuan rumah, yang bisa jadi menyebabkan belanja negara di bidang-bidang lain harus ditunda. "Pembangunan" hampir tidak berjalan maju.[18]

Industri pariwisata cenderung membeli barang-barang yang diperlukanya dari luar negara-negara berkembang. Ini merupakan sebuah praktik yang biasa dilakukan, kata Lorine Tevi dari Dewan Gereja Dunia, yang telah mempelajari efek pariwisata di Pasifik, di mana sebuah hotel di Kepulauan Pasifik membeli mebel-mebelnya di Swedia, mesin di kantornya dari Amerika Serikat, sistem penerangannya dari Belanda, kipas-kipas anginnya dari Jerman, kair tirainya dari Prancis, dan makanannya dari Australia.[19]

Pertumbuhan pariwisata telah menyebabkan ledakan konstruksi mini di Asia dan di negara-negara Kepulauan Pasifik seperti Fiji, Tonga, Vanuatu, dan Samoa Barat. Tapi ledakan mini tampaknya telah lebih banyak menguntungkan kontraktor dan perusahaan-perusahaan penyedia barang kebutuhan hotel yang berbasis di negara-negara Barat. Ada beberapa lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal untuk sementara waktu — meskipun banyak tenaga pekerja direkrut dari luar negeri — tetapi hanya bersifat sementara.

Makanan yang dihasilkan dan pendapatan para petani di negara-negara tuan rumah dapat didongkrak jika hotel-hotel membeli makanan lokal. Tetapi hal ini sering tidak terjadi. Di Gambia, manajer salah satu hotel di sana mengaku bahwa mereka mengimpor hampir semua makanan yang disajikan untuk para tamu hotel.[20] Mitra-mitra lokal dapat diwajibkan untuk menghasilkan pasokan produk-produk tertentu dari pihak ketiga atau dari waralaba [sesuai dengan kebutuhan tamu hotel]. TNCs dapat

18 United Nations Centre on Transnasional Corporations, *Transnasional Corporations, Services and the Uruguay Round*, p. 105.

19 Informasi dipresentasikan pada Konferensi tentang Pariwisata dan Penduduk Dunia Ketiga di Bad Boll, Germany, March 1986.

20 Lihat Panos Institute, 'The Gambia tries to cash in on its roots', *Panoscope, PS magazine* (January 1992), London: Panos Institute.

menetapkan aturan-aturan bahwa hanya jenis-jenis makanan dengan kelas-kelas tertentu harus disajikan di hotel — persyaratan-persyaratan yang para petani lokal di negara-negara berkemang sering kali tidak bisa penuhi.

Orang-orang yang tinggal di daerah pariwisata di negara-negara berkembang sering kali memiliki sedikit atau bahkan tidak mempunyai kekuasaan sama sekali atas industri pariwisata yang bisa memengaruhi hidup mereka begitu kuat. [Oleh kehadiran industri pariwisata,] mereka bisa kehilangan rumah tinggal, tanah mereka dan gaya hidup asli yang tradisional. Hidup mereka bisa tiba-tiba menjadi sangat bergantung pada industri pariwisata yang melayani para wisatawan kaya yang tuntutan-tuntutannya telah membuat hidup mereka terbalik dari atas ke bawah. Hotel-hotel wisata dan kompleks-kompleks hiburan sering kali menuntut lahan-lahan yang luas, dan jarang dibangun di atas tanah yang tidak pernah digunakan orang sebelumnya. Di negara bagian Orissa, India, misalnya, banyak orang-orang miskin yang menjadi tunawisma setelah pembangunan hotel-hotel di atas lahan di mana rumah-rumah mereka sebelumnya tegak berdiri. Ketika sebuah TNC ingin membangun sebuah resort wisata berbintang 5 di Goa, perusahaan ini membeli sebuah bidang tanah yang sebelumnya merupakan ladang padi para petani lokal. Para petani lokal ini disarankan beralih profesi dari petani ke pengrajin yang menghasilkan barang-barang kerajinan bagi para wisatawan.

Para nelayan dan wanita menduduki tempat pertama sebagai korban [industri pariwisata]. Karena banyak hotel yang dibangun ke arah laut di mana orang telah biasa melaut untuk menangkap ikan selama bertahun-tahun. Para nelayan ini kerap kali dilarang untuk untuk menangkap ikan di wilayah di sekitar hotel tanpa kompensasi. Di sebuah lokasi di Filipina, nelayan-nelayan lokal dilarang untuk menangkap ikan dalam radius 25 kilometer dari kompleks pehotelan di pantai.[21]

21 Informasi dipresentasikan pada Konferensi tentang Pariwisata dan Penduduk Dunia Ketia di Bad Boll, Germany, March 1986.

Kebudayaan

Para turis sering kali pergi ke negara-negara berkembang untuk menikmati kebudayaannya, termasuk warisan-warisan budaya dan tempat-tempat sejarah budaya. Perjalanan-perjalanan dengan motivasi budaya menyaksikan adanya peningkatan penjualan dari 51% dari tahun 2000 hingga 2005, "di mana turis semakin bersedia menghabiskan waktu perjalanan dan waktu liburan mereka lebih banyak pada kunjungan-kunjungan dengan motivasi pendidikan".[22] Namun kehadiran wisatawan, dan infrastruktur-infrastruktur yang dibutuhkan untuk melayani kebutuhan mereka, berkontribusi terhadap penghancuran atraksi yang justru menarik mereka untuk berwisata ke wilayah tersebut. Mengubah situs-situs sakral setempat menjadi tempat wisata bisa mengurangi kesakralan yang para wisatawan ingin alami.

Tapi dampak industri pariwisata secara keseluruhan terhadap kebudayaan setempat telah menimbulkan banyak kritik. "Pariwisata adalah prostitusi budaya," kata Haunani-Kay Trask, seorang profesor di Universitas Manoa di Hawaii. "Ini adalah kekerasan terhadap kita."[23] Kebudayaan Hawaii telah menderita sakit parah yang akut karena turisme. Dengan penduduk lokal hanya sekitar satu juta orang, Hawaii menerima sekitar tujuh juta wisatawan setiap tahun dan dampaknya sangat besar. Ada bukti bahwa pariwisata telah mengabadikan kemiskinan bagi penduduk asli Hawaii.

Pembangunan hotel-hotel besar di Hawaii, misalnya telah menuntut pemakaian air yang sangat banyak dan menyebabkan air yang tersedia selalu kurang. Terumbu karang dan daerah penangkapan ikan telah hancur karena limbah-limbah kotor dari hotel-hotel dan irigasi lapangan golf. "Pariwisata memotong hubungan antara penduduk asli Hawaii dengan tanah, budaya, tradisi dan gaya hidup mereka," demikian diingatkan Kaleo Patterson, seorang pendeta [dari sebuah gereja] lokal di Hawaii.

---

22 Euromonitor, *The World Market for Travel and Tourism.*

23 Haunani-Kay Trask, dalam sebuah pidato di Konferensi tentang Pariwisata dan Penduduk Dunia Ketiga di Bad Boll, Germany, March 1986.

Menulis tentang dampak pariwisata terhadap orang-orang yang tinggal di dekat Malindi, sebuah resort populer di Pantai Kenya, antropolog Robert Peake mengatakan: "Untuk para orang-orang tua [setempat], pariwisata dan konsep Barat tentang waktu luang [yang dihabiskan dengan libur di tempat/negara lain] adalah kebalikan dari segala sesuatu yang layak dan sehat dalam masyarakat [mereka]... pariwisata mengancam relasi sosial yang membentuk dasar dari masyarakat tradisional Swahili."[24]

Salah satu aspek manusiawi dan budaya yang paling buruk dari pariwisata adalah bahwa industri pariwisata menyebabkan, terutama di sejumlah tempat tujuan, peningkatan besar prostitusi. Hal ini terutama terlihat jelas di negara-negara seperti Thailand dan Filipina. Dua dari setiap tiga wisatawan Jepang yang pergi ke Filipina adalah orang-orang yang mempunyai paket wisata dengan seks "*built-in*". Diperkirakan satu juta anak di negara berkembang terjebak dalam perbudakan pelacuran anak, sebagian besar didorong oleh perdagangan turis. Menurut sebuah laporan yang dibuat oleh *Christian Aid*, diperkirakan bahwa sekitar 200.000 anak bekerja sebagai pelacur di Thailand dan sekitar 60.000 di Filipina. Sekitar 200.000 gadis Nepal telah dijual sebagai budak di rumah-rumah pelacuran di India. Di Sri Lanka, sekitar 2.500 pelacur anak laki-laki, yang disebut *beach boys*, mencari nafkah dari wisatawan laki-laki.[25] Anak-anak ini merupakan kelompok yang menderita paling tragis dari industri pariwisata internasional. TNCs operator tour yang berbasis di Eropa dan juga di Jepang telah terlibat dalam bisnis ini.

Kerusakan lingkungan

Pariwisata berdampak pada lingkungan dalam banyak hal. Ketika jumlah wisatawan meningkat, demikian juga kerusakan terhadap lingkungan. Di beberapa negara, wisatawan bisa berdampak merusak lingkungan

---

24 Robert Peake, dikutip dalam *Tourism in Focus* (Spring 1994), sebuah Majalah Pemerhati Pariwisata.

25 Maybin, E., *An Abuse of Innocence: Tourism and Child Prostitution in the Third World*, London: Christian Aid, May 1995.

yang menarik [kedatangan] mereka. Kerusakan lingkungan sering terjadi karena perkembangan pesat dan tidak terkendali dari pariwisata. Padahal lingkungan memainkan biola [faktor, peran] kedua dalam industri pariwisata. Terlalu sering pemerintah, TNCs yang berbisnis di industri pariwisata dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya lebih memilih untuk mempertahankan ekonomi pariwisata mereka daripada mempertahankan ekosistem dari lingkungan alam mereka. Akibatnya, perkembangan pariwisata

> sering dibangun pada bentangan pemandangan alam dan tempat-tempat yang paling indah di dunia, mengancam dan menghancurkan lingkungan dan membuang sumber daya alam yang terbatas, menghancurkan tempat-tempat bagi masyarakat lokal dan turis masa depan ... Pengembangan pariwisata yang tidak diatur [dan direncanakan dengan baik] terus menghancurkan lingkungan, menurunkan kualitas budaya dan menghancurkan mata pencaharian tradisional.[26]

Ada banyak contoh dari efek destruktif dari industri pariwisata. Jaringan hotel di Meksiko telah membakar sebagian dari hutan untuk membangun kompleks-kompleks perhotelan baru bagi wisatawan. Pembangunan pariwisata yang tidak terencana di resort Acapulco di Meksiko telah menghasilkan sebuah teluk tercemar dan pemukiman liar yang besar. Beberapa taman permainan Afrika Timur telah berubah menjadi *dust-bowls* oleh kendaraan-kendaraan wisatawan. Kepala bagian perencanaan pariwisata di Indonesia telah memperingatkan bahwa kehidupan tradisional di pulau Bali terancam oleh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh investasi di bidang pariwisata. Di Goa, India, pembuangan limbah dari sejumlah hotel besar di sepanjang pantai telah mencemari laut dan satwa-satwa laut menjadi rusak. Limbah-limbah yang dibuat oleh industri pariwisata sulit untuk dibersihkan dari daerah-daerah yang rapuh dan gunung-gunung sampah bermunculan di tempat-tempat yang seharusnya merupakan bentangan alam sangat indah di dunia.

---

26 Tourism Concern website (Lihat catatan 1).

Kerusakan yang disebabkan oleh tsunami yang melanda pesisir-pesisir pantai di Asia pada akhir Desember 2004 adalah beberapa kali di daerah pantai di mana semak-semak bakau telah dirusakkan atau sengaja ditebang demi pembangunan hotel-hotel wisata, sebagian karena didorong oleh Bank Dunia dan badan-badan keuangan internasional lainnya. Dengan hilangnya semak-semak bakau sebagai penahan alamiah, maka gelombang laut menghantam langsung bibir pantai dan sejumlah nyawa manusia melayang. Tapi pantai-pantai terdekat yang tidak mempunyai perkembangan tersebut [tak ada industri pariwisata], di mana hutan bakau masih utuh, mengalami kerusakan jauh lebih sedikit.

Di pulau Sumeulue, Indonesia, sekitar 37 km dari episentrum tsunami, misalnya, hanya empat kematian dilaporkan dari total jumlah penduduk sekitar 76.000 jiwa. Pulau ini memiliki kawasan hutan bakau yang luas. Saksi mata melaporkan bahwa tidak ada gelombang laut yang menembus bentangan hutan bakau. Pengembangan pariwisata memainkan peran lebih besar dalam bencana tsunami Asia [terutama Indonesia dan Thailand] daripada yang dilaporkan pada saat itu oleh media-media utama di Barat.[27]

"Jika tidak ada langkah-langkah yang diambil untuk melestarikan lingkungan, polusi dan kerusakan cagar alam, maka hal itu pada akhirnya akan mengurangi arus wisatawan," kata sebuah laporan PBB mengenai Asia dan Pasifik. "Di sisi lain, tindakan konservasi akan menghambat pertumbuhan pariwisata."[28] Tetapi di beberapa negara berkembang di mana pariwisata menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, kebijakan-kebijakan yang "menghambat pertumbuhan wisata" bisa disambut [sebagai sesuatu yang baik].

Air menjadi salah satu masalah di daerah-dearah wisata di beberapa negara berkembang. Kepulauan Karibia, Honduras, Timur Tengah, Afrika Selatan, Tanzania, dan India adalah negara-negara yang sering menderita kekurangan air bagi pariwisata, kata Pemerhati Pariwisata.[29]

27 Madeley, J., 'Nature's barriers to tsunamis', *Church Times* (11 March 2005).
28 PBB, *Services in Asia and the Pacific*, p. 369.
29 Tourisme Concern website (lihat catatan no 1).

Wisatawan menuntut penggunaan volume air yang besar, yang menambah beban pada sumber daya alam yang sudah terbatas. Seorang tamu hotel dapat menggunakan 500 liter air per hari, lebih dari sepuluh kali volume air yang digunakan seorang penduduk setempat dalam sehari. Penggunaan air di kamar mandi, di kamar mandi dengan bak kecil (*bath*), kolam renang, dan untuk penyiraman rumput taman hotel, bisa membuat keran air masyarakat lokal kering. Wisatawan mungkin tidak akan pernah berpikir bahwa penggunaan air di hotel menyebabkan penduduk setempat kekurangan air untuk minum dan untuk irigasi. Jika infrastruktur dibangun untuk memastikan air minum yang aman ke hotel-hotel wisata, maka hampir pasti penggunaannya tidak diperluas untuk kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Di daerah wisata Goa di India, "air dalam jumlah yang besar dipindahkan ke wilayah hotel-hotel mewah dari beberapa sumber air. Hal ini menyebabkan penurunan permukaan air dan sumur-sumur menjadi kering", kata Albertina Almeida dari Perkumpulan Wanita Goa. Dia juga mengatakan bahwa "Pemilik-pemilik hotel juga mengebor air dalam jarak 500 meter dari garis pasang naik, yang mengabaikan fakta bahwa hal ini bisa mengakibatkan intrusi air garam yang tak dapat diubah kembali, yang lagi-lagi berarti semakin jauh jaraknya, maka ia semakin menimbulkan pekerjaan banyak dan kesehatan yang buruk pada perempuan."[30] Oleh karena itu, beberapa pekerjaan sehari-hari yang biasanya dilakukan kaum wanita akan menjadi semakin berat dengan kehadiran industri pariwisata — misalnya pekerjaan menimba air. Permintaan dan penggunaan air yang tinggi oleh wisatawan hotel dapat berarti bahwa para petani lokal hanya mendapat air yang sisa dan dapat mengurangi produksi makanan mereka. Pariwisata karenanya dapat memengaruhi persediaan makanan lokal untuk penduduk setempat.

Lapangan-lapangan golf, yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan, semakin berkembang pesat di negara-negara berkembang di Asia, yang memberi beban berat pada persediaan air, dan juga

30 Albertina Almeida, dikutip dalam *Tourism in Focus* (Autumn 1995).

pada tanah dan hutan. Pada awal tahun 1980-an Asia memiliki sangat sedikit lapangan golf selain di Jepang. Sekarang lapangan golf tersebar di Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Beberapa di antaranya didanai oleh bantuan Jepang. Lapangan golf harus selalu disiram agar tetap hijau dan berada dalam kondisi yang baik. Sebuah lapangan golf dengan panjang standar (18-lubang) membutuhkan air penyiraman sampai sekurang-kurangya 525.000 galon [sekitar 1.989.750 liter atau 19.897 drum] air sehari — sama dengan jumlah air yang dibutuhkan oleh 60.000 orang penduduk desa dalam sehari. Untuk membangun lapangan golf di daerah tropis, maka hutan harus dipotong, wilayah-wilayah pesisir pantai di-buldoser, puncak gunung diratakan dan rawa-rawa dikeringkan.[31] Jaringan Lingkungan Penduduk Asia Pasifik memulai Gerakan Anti-Golf Global (yang berbasis di Malaysia) untuk menarik perhatian masyarakat tentang masalah ini.

Dampak pariwisata terhadap perubahan iklim juga semakin disadari banyak orang. Karena sebagian besar wisatawan dari Barat yang pergi ke negara-negara berkembang pergi dengan pesawat terbang, maka penerbangan mereka memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim, yang membuat hidup orang-orang miskin semakin sulit. Jikalau hal ini berjalan terus pada tingkat seperti saat ini, maka "penerbangan akan menjadi penyumbang utama pemanasan global pada tahun 2030".[32]

Pariwisata alternatif

Pariwisata alternatif, yang melangkahi TNCs yang berbisnis di bidang pariwisata dan yang mendorong pendapatan bagi masyarakat lokal, sekarang sedang berkembang dengan pesat. Dan hal tersebut dapat dilakukan di luar TNCs. "Hampir tidak mungkin bagi operator besar saat ini untuk menawarkan perdagangan pariwisata yang adil, karena model bisnis mereka saat ini dirancang untuk mencapai hasil sebaliknya," kata

---

31 Lihat Sexton, S. and P. Chatterjee, 'Fairway to heaven?', *The Guardian*, 17 September 1993; and Piercy, S. (ed.), *Ecotourism*, Panos Briefing Paper, January 1995.

32 Roddick, 'Travel that doesn't cost the earth'.

Anita Roddick.[33] Tetapi hal ini tidak menghentikan TNCs untuk mulai ikut-ikutan juga dalam gerakan "ekoturisme" [yaitu industri pariwisata yang berwawasan lingkungan]. Tapi dalam pelaksanaannya, label ekotourisme mempunyai arti yang sangat sedikit atau tidak ada artinya sama sekali. Costa Rica, misalnya, telah menjadi salah satu negara tujuan ekotourisme dunia paling top. Tapi di Costa Rica, sama seperti juga di tempat-tempat lain, ada keraguan tentang apakah masyarakat lokal mendapatkan manfaat yang adil dari perkembangan ekoturisme.

Pariwisata yang menguntungkan masyarakat setempat sedang ditawarkan oleh banyak perusahaan kecil dengan membangun mitra dengan masyarakat tuan rumah. Wisata alternatif telah dikembangkan di negara-negara seperti Senegal dan Sri Lanka di mana turis atau wisatawan tinggal di rumah-rumah penduduk lokal ketimbang di hotel. Partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci. Ketika sebuah komunitas dari suku Maasai di Kenya dipaksa keluar dari tanah mereka demi perencanaan pembangunan sebuah taman konservasi, mereka menjual empat ekor ternak, membeli beberapa tenda, dan mulai memasarkan diri sebagai sebuah tujuan wisata yang berbasis masyarakat. Dalam tempo beberapa tahun usaha mereka bisa menampung 50 pengunjung. Mereka menyiapkan sebuah apotek "dan menyajikan kepada wisatawan percakapan dalam budaya Maasai dan mendampingi mereka berjalan-jalan di dalam satwa liar".[34]

Traidcraft, seorang pelopor *fairtrade*, telah mengembangkan Tour Jumpa Masyarakat (*Meet the People Tours*) sebagai perusahaan patungan dengan operator independen *Saddle Skedalddle*. Kelompok-kelompok wisata kecil yang dipimpin oleh pemandu lokal meliputi alokasi waktu dengan produsen *fairtrade*, kunjungan ke situs-situs budaya, wisata ke pedesaan dan satwa liar, dan menikmati makanan yang diproduksi secara lokal. Para wisatawan tidur di hotel yang dimiliki orang lokal, rumah tamu dan bepergian dengan kendaraan lokal bila hal itu memungkinkan. Orang-

33 *Ibid.*

34 Litvinoff, M., and J. Madeley, *50 Reasons to Buy Fair Trade*, London: Pluto Press, 2007, p. 97.

orang yang telah pergi tour ke *Traidcraft* ini telah menggambarkannya sebagai sesuatu yang 'inspiratif', 'kesempatan istimewa', 'pengalaman yang luar biasa', 'tak terlupakan', 'salah satu pengalaman yang paling memuaskan dan berharga dalam hidup saya', dan 'sebuah perjalanan seumur hidup'.[35]

Seorang pemimpin dari pariwisata alternatif, *Tribes Travel*, menggambarkan dirinya sebagai perusahaan "Biro Perjalanan Adil... yang bertujuan untuk mengatur tour-tour liburan yang sempurna". Pariwisata alternatif ini menawarkan liburan di hampir dua puluh negara berkembang, dan memastikan bahwa 75% dari biaya liburan tetap tinggal dan diperoleh penyelengara wisata di tempat-tempat tujuan wisata. Pariwisata *Tribes Travel* telah mendirikan sebuah badan amal untuk mendukung pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan di kalangan masyarakat yang cukup rentan.[36]

Meskipun belum ada label *fairtrade* yang bersertifikat, Pemerhati Pariwisata (*Tourism Concern*) telah membentuk Promosi Perdagangan Internasional dalam Jaringan Pariwisata. Hal ini bertujuan untuk memperkuat posisi tawar kelompok kepentingan di tempat tujuan wisata, memfasilitasi akses pasar yang adil bagi stakeholder kecil, meningkatkan kesadaran di kalangan konsumen dan memengaruhi kebijakan perdagangan internasional.

> *Fairtrade* Pariwisata merupakan sebuah aspek kunci dari pariwisata yang berkelanjutan. Ia bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dari pariwisata bagi para pemangku kepentingan masyarakat lokal melalui kemitraan yang saling menguntungkan dan adil antara stakeholder pariwisata nasional dan internasional di daerah tujuan wisata. Ia juga mendukung hak masyarakat adat tuan rumah untuk berpartisipasi, entah mereka terlibat langsung dalam bisnis pariwisata atau tidak.[37]

Sebuah alternatif yang sedang berkembang adalah pelanggan-kepelanggan liburan. Para konsumen yang menginginkan pilihan yang

35 *Ibid.*
36 DariTribes Travel website. <http://www.tribes.co.uk> (accessed 7 February 2008).
37 Tourism Concern website (lihat catatan 1).

lebih banyak menggunakan Internet untuk membuat industri rumah mereka sendiri dan paket-paket sampingan. "Ini adalah tren yang dapat memotong jalur distribusi resmi, perusahaan biro perjalanan dan agen-agen, yang berarti bahwa pertukaran pandangan dan informasi di internet bisa menyebabkan seseorang mendapatkan sebuah pembayaran.[38]

Para konsumen menggunakan *webinternet* untuk memasuki *blog* dan meminta rekan-rekan konsumen apa yang mereka pikirkan. Para konsumen suka rekomendasi-rekomendasi yang diberikan secara lisan dan pengusaha-pengusaha kecil akan menjual rekomendasi-rekomendasi ini dan menggunakan pengetahuan mereka untuk mengumpulkan informasi liburan bagi para konsumen lainnya. Postingan seperti "apa yang saya ingin lakukan" (*What I'd like todo*) di *webinternet* sangat besar.[39]

Sejumlah pemerintah sudah menunjukkan kemauan untuk memikirkan kembali rencana untuk membangun hotel berbintang lima dan untuk mendorong fasilitas pariwisata pribumi ketimbang pariwisata yang dipimpin TNCs. Negara Gambia, misalnya, meminta Pemerhati Pariwisata untuk menulis ulang rencana industri pariwisata yang telah dikembangkan dengan bantuan dari Program Pembangunan PBB. Kelemahan rencana ini — terutama penekanannya pada pariwisata massal — telah menjadi jelas. Sebuah seminar tentang pariwisata alternatif melahirkan usaha kerja sama yang disebut DEEGOO (yang berarti kerja sama dan pemahaman). Pemerhati Pariwisata, *Voluntary Service Overseas*, sebuah LSM yang disebut Warisan Afrika, dan pebisnis berskala kecil terlibat dalam usaha ini yang memasarkan hotel-hotel kecil yang dijalankan oleh masyarakat setempat.[40] Inisiatif-inisiatif seperti ini merupakan alternatif penting untuk TNCs. Pariwisata yang tepat dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal ketimbang bagi korporasi-korporasi.

---

38 Trendwatching. Com, 'World Travel Market: C2C is new holiday buzz word', 2008. <www.trendwatching.com> (accessed 7 February 2008).

39 *Ibid.*

40 Lihat Madeley, J., *Foreign Exploits, Transnasionals and Tourism*, London: CIIR, May 1996.

Peraturan

Perjanjian internasional utama yang memengaruhi pariwisata adalah Perjanjian Umum WTO tentang Perdagangan Jasa (GATS). Badan dunia ini menetapkan kerangka hukum dan operasional untuk penghapusan bertahap hambatan-hambatan perdagangan internasional di bidang layanan jasa, termasuk pariwisata (lihat bahan Bab 5).

Pembatasan perdagangan saat ini memengaruhi perusahaan-perusahaan dalam beberapa hal, termasuk di antaranya: kemampuan mereka untuk memindahkan staf ke luar negeri, penggunaan merek dagang, kemampuan mereka untuk menciptakan dan mengoperasikan kantor cabang di luar negeri, dan repatriasi keuntungan. Pemerintah negara-negara Barat sedang mendesak untuk liberalisasi lebih lanjut ekonomi dunia di bawah perjanjian GATS. Ini bisa berarti bahwa pembatasan-pembatasan perdagangan akan dihapus seluruhnya. Untuk sektor hotel, ini akan memfasilitasi waralaba, kontrak manajemen dan perizinan. TNCs akan memenuhi syarat untuk menerima manfaat yang sama seperti perusahaan-perusahaan lokal, dan mereka akan diizinkan untuk melakukan pembayaran internasional dan transfer tanpa pembatasan-pembatasan yang macam-macam.

Perjanjian GATS bisa saja baik bagi industri pariwisata, tapi umumnya tidak baik untuk negara-negara berkembang. Walaupun penghasilan dari pariwisata dapat meningkat, tapi perjanjian tersebut akan membatasi kedaulatan negara penerima untuk mengontrol kegiatan TNCs yang berbisnis di bidang pariwisata. Halitu akan meningkatkan kekuatan TNCs dengan mengorbankan pemerintah. Jika TNCs mencoba untuk membuat pembangunan berkelanjutan sebagai kebijakan mereka secara keseluruhan, maka pemerintah mungkin perlu mempertimbangkan kembali kebijakan mereka pada pariwisata, dan mesti bersiap untuk mengatur kegiatan TNCs di bidang pariwisata.

Perusahaan-perusahaan telah membatasi horizon waktu. Para pemegang saham mengharapkan agar TNCs membuat keuntungan dalam jangka pendek. Hampir tidak ada tanda bahwa TNCs yang berbisnis di bidang pariwisata akan mengubah praktik untuk memastikan bahwa kegiatan mereka berkontribusi terhadap pembangunan jangka panjang dan

berkelanjutan dari negara tuan rumah. Keberlanjutan hanya mungkin terjadi jika TNCs setuju untuk menjaga lingkungan dan masyarakat setempat.

Pemerintah dari negara-negara berkembang yang ingin menarik wisatawan sedang bersaing satu sama lain demi bisnis pariwisata ini. Tapi kalau mereka mengatur TNCs, industri pariwisata mungkin tidak akan menjadi perdagangan yang berharga dan sebaliknya akan semakin merugikan kehidupan banyak orang.

"Pemerintah harus terima bahwa industri pariwisata tidak mungkin bisa mengatur diri sendiri. Hal ini terserah kepada pemerintah untuk mengatur industri menurut cara yang mereka pandang perlu," kata Tricia Barnett dari Pemerhati Pariwisata.[41] Pemerintah perlu memastikan bahwa industri pariwisata mesti beroperasi dengan cara yang dapat dipertahankan, dengan regulasi yang adil dan bebas dari kepentingan asing, dan bukan dengan cara yang merusak masyarakat lokal, budaya, dan lingkungan. Di negara-negara dengan sistem demokrasi voting, efek negatif pariwisata terhadap masyarakat setempat dapat menyebabkan reaksi pada jajak pendapat.

Kesimpulan

Pariwisata utama bagi negara-negara berkembang sedang mengeksploitasi orang miskin dan lingkungan, dan membuat sedikit link dengan beberapa sektor ekonomi lainnya. Ia tidak memperlihatkan industri pariwisata seperti yang kerap kali dipropagandakan. Peraturan diperlukan, tetapi ada alternatif tetap. Perlu pengembangan yang didasarkan pada partisipasi masyarakat.

"Ini saatnya untuk berhenti memperlakukan pariwisata sebagai sapi suci yang harus dilindungi dan dipelihara dengan menghabiskan semua biaya," kata Anita Pleumarom, yang mengoordinasikan Investigasi Pariwisata dan Tim Pemantau yang berbasis di Bangkok.

---

41 Tricia Barnett, dalam percakapan dengan pengarang, November 1995.

> Sebagian besar wisatawan tidak ingin melihat fakta bahwa mereka hanya menyusui industri multimiliar-dolar dan berkontribusi terhadap pola konsumsi dan produksi yang tidak menerapkan prinsip keberlanjutan. Dan ada sedikit kesadaran bahwa, seperti biasa, orang-orang miskin harus membayar biaya sosial dan lingkungan dari pariwisata yang berlebihan.[42]

Agar bisa menguasai industri pariwisata, pemerintah negara-negara berkembang harus berkonsultasi dengan masyarakat lokal pada tahap desain proyek pariwisata, mendorong pengembangan fasilitas wisata adat, pengenaan biaya pada hotel untuk penggunaan air untuk mendorong konservasi, dan bekerja sama dengan negara-negara lain di daerah untuk melakukan kontrol efektif terhadap TNCs yang berbisnis di bidang pariwisata. Mereka juga harus mendesak negara-negara Barat untuk meloloskan peraturan yang menyatakan tindak pidana bagi warga negaranya untuk mengeksploitasi anak-anak di luar negeri — termasuk. Misalnya, melalui wisata seks.

---

42 Pleumarom, A., 'Does tourism benefit the Third World?' *Resurgence* (November/December 2007), Malaysia: Third World Network.

BAB 7

Pengambilan Gelondongan Kayu dan Ikan

Jika mereka terus mengambil gelondongan kayu dari hutan kami, maka hidup kami akan layu seperti dedaunan di pohon-pohon, seperti ikan tanpa air. (Pemimpin Tribal)

Hutan

Fungsi hutan sangat penting bagi masyarakat miskin di negara-negara berkembang. Hutan yang dimiliki masyarakat miskin berfungsi mempertahankan iklim dan mencegah erosi tanah, bertindak seperti spons untuk menyerap kelembapan dan melepaskannya perlahan-lahan ke tanah pada bagian-bagian lain yang berdekatan. Ketika hutan dipunahkan, maka tanah kehilangan persediaan pasokan air alamiah dan kehilangan pelindungnya. Kemungkinan terjadi kekeringan dan banjir bandang akan semakin tinggi. Sungai dan ikan-ikan dapat terkena dampak sangat serius oleh sedimen yang dihanyutkan dari kawasan-kawasan hutan yang ditebang. Dalam menghadapi bencana-bencana seperti ini, masyarakat miskinlah yang selalu menjadi korbannya dan yang menderita paling banyak. Masyarakat adat yang tinggal di hutan termasuk di antara orang-orang yang terkena dampak paling parah.

Perusakan hutan dunia juga merupakan salah satu penyebab utama dari perubahan iklim. Hutan tropis mengandung hingga 40% dari karbon terestrial dunia dan memainkan peran yang kuat dalam mengurangi ketidakstabilan iklim. Perusakan hutan menyumbang sekitar seperlima dari total emisi gas rumah kaca.[1]

---

1 Greenpeace, 'Tropical deforestation and the Kyoto Protocol', 24 Sep-tember 2007. <http://www.greenpeace.org> (accessed 29 January 2008).

TNCs cukup menonjol keterlibatan mereka dalam penebangan dan pembakaran hutan. Sebagian dari hutan-hutan yang mereka tebang melalui pembakaran akan menciptakan ragut jangka pendek untuk ternak, dan sebagian dari kayu-kayu yang mereka tebang akan digunakan untuk membuat produk-produk sementara seperti sumpit dan tusuk gigi. Sejumlah besar kawasan hutan juga sedang ditebang oleh TNCs untuk menanam tanaman perkebunan seperti kelapa sawit dan kayu putih.

Kehilangan hutan saat ini semakin parah. Antara tahun 2000 dan 2005, sekitar 20.000 hektar hutan hilang setiap hari, kata organisasi PBB di bidang Pangan dan Pertanian (FAO), setara dengan areal yang besarnya dua kali luas kota Paris. Hal ini terjadi setiap hari. Atau kalau dihitung menurut tahun, pada tahun-tahun di atas — 2000 hingga 2005 — dunia kehilangan 7,3 juta hektar per tahun. Biarpun demikian, ada sejumlah daerah yang sekarang perlahan-lahan dihutankan kembali, demikian kata laporan FAO tahun 2007 tentang *Keadaan Hutan Dunia.*[2]

Tapi secara keseluruhan, 57 negara melaporkan peningkatan kawasan hutan, sedangkan 83 negara melaporkan penurunan kawasan hutan di wilayah mereka. Menurut David Harcharik, Wakil Direktur Jenderal FAO, "negara-negara yang sulit menjaga kelestarian hutan adalah negara-negara tingkat kemiskinan dan konflik sipil yang sangat tinggi".[3]

Menurut sebuah data dari FAO, hutan seluruh dunia sekarang berjumlah kurang dari empat miliar hektar, yang meliputi sekitar 30% dari luas daratan dunia. Dari tahun 1990 hingga 2005, dunia kehilangan 3% dari total luas hutan, sebuah penurunan rata-rata sekitar 0,2% per tahun.

Indonesia, Meksiko, Papua Nugini, dan Brasil mengalami kehilangan hutan primer paling tinggi dalam lima tahun dari tahun 2000 hingga 2005. Kehilangan kawasan hutan dipercepat di Asia Tenggara pada kelima tahun ini oleh pembalakan liar yang meningkat. Wilayah Afrika dan Amerika Latin termasuk Karibia telah mencatat kehilangan hutan yang sangat tinggi. Benua Afrika, yang menyumbang sekitar 16% dari total

---

2 Food and Agriculture Organization, *State of the World's Forests, 2007.* Rome: FAO.
3 *Ibid.*

luas hutan yang masih sisa di seluruh dunia, kehilangan lebih dari 9% hutannya antara tahun 1990 dan 2005.

Hutan cukup rentan terhadap ancaman serangga, penyakit, spesies invasif dan kebakaran. Transportasi yang cepat, kemudahan perjalanan dan pertumbuhan perdagangan internasional telah mempercepat penyebaran hama. Perubahan iklim dapat mempercepat kerusakan hutan yang disebabkan oleh insiden yang lebih besar seperti kebakaran, hama dan penyakit. Namun "investasi baru di bidang kehutanan untuk mengurangi perubahan iklim tertinggal jauh di belakang harapan banyak orang setelah berlakunya Protokol Kyoto pada tahun 2005".[4]

FAO melaporkan bahwa penebangan hutan untuk keperluaan pengambilan kayu, pertanian, dan pemukiman hanya bertanggung jawab sekitar 6% hingga 7% dari penurunan kawasan hutan dunia, dan bahwa hanya seperempat dari kerusakan ini terjadi karena masyarakat pindah dan menetap di hutan, menebang hutan untuk menjadikannya sebagai wilayah pemukiman baru dan petanian. Sebanyak 10% kawasan hutan yang lain telah dihancurkan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan bendungan-bendungan besar. Lebih lanjut FAO melaporkan sekitar 55% dari kerusakan hutan terjadi karena perambahan masyarakat manusia ke kawasan hutan, sistem ladang berpindah, berkebun dengan teknik "tebang dan bakar", peternakan dan pengambilan kayu bakar.

Akan tetapi, bukti menunjukkan bahwa penyebab utama deforestasi (penggundulan hutan) adalah penebangan hutan dengan mesin dalam rangka mengambil kayu untuk diperdagangkan. Masyarakat sederhana tidak memiliki mesin canggih untuk menebang pohon-pohon besar. Sebuah studi yang mendetail tentang deforestasi di Asia (oleh peneliti dari Universitas Rutgers, AS) menemukan bahwa para penebang hutan jenis ini (*loggers*) merupakan pelaku perusakan hutan yang paling besar. Penebangan hutan oleh perusahaan kayu, biasanya TNCs, dalam rangka

---

4 Food and Agriculture Organization, 'Global report cites progress in slowing forest losses. Progress in forest management welcomed'. Rome: FAO, March 2007.

untuk menjual gelondongan kayu ke Barat merupakan penyebab utama kerusakan hutan.[5]

Asia dan Pasifik

TNCs yang berbasis di Jepang paling bertanggung jawab atas deforestasi yang terjadi di negara-negara berkembang di Asia. Dalam rangka untuk melindungi hutannya sendiri, Jepang telah membeli produk-produk hutan dari negara-negara miskin di Asia dan perusahaan-perusahaannya telah menuai pahala.

Sejak tahun 1945, TNCs Jepang telah menebang dan membawa ke Jepang sebagian besar hutan Filipina. Pada tahun 1945 Filipina memiliki 17 juta hektar hutan tropis dan pada tahun 1989 [setelah 40 tahun kemudian] hanya 1juta hektar hutannya yang masih tersisa. Filipina termasuk salah satu negara berkembang yang mempunyai masalah deforestasi paling parah. Perusahaan-perusahaan Jepang terlibat dalam proses deforestasi di Filipina seperti Mitsubishi, Mitsui, dan Sumitomo. Mitsubishi, sebuah perusahaan dagang Jepang terbesar dan aktif di lebih dari 80 negara, mempunyai perusahaan cabang kayu di Malaysia, Indonesia, Papua Nugini, Thailand, dan Burma. Mitsubishi juga merupakan salah satu importir dunia terbesar di bidang perkayuan. Menurut *Rainforest Action Network* (terdiri atas 150 kelompok di 45 negara), Mitsubishi "bertanggung jawab terhadap likuidasi hutan primer yang begitu cepat yang pernah terjadi dalam sejarah manusia dengan penebangan di Sarawak di negara Malaysia tanpa peduli protes dari masyarakat setempat".[6]

Kamboja, salah satu negara termiskin di dunia, juga termasuk salah satu negara yang memiliki tingkat deforestasi yang sangat tinggi. Hutan tropis primer Kamboja menurun dari 70% pada tahun 1970 menjadi hanya sekitar 20% pada pertengahan tahun 2000-an. Penebangan hutan dipercepat secara dramatis selama tahun 1990-an ketika "sejumlah pabrik

---

5 Dikuti di Fred Pearce, 'The global chainsaw massacre', *The Observer*, 29 September 1996.

6 Informasi dari the Rainforest Action Network, San Francisco.

kayu dibangun [di Kamboja].... Sebagian besar penebangan kayu tersebut dilakukan untuk memenuhi permintaan internasional terhadap kayu tropis."[7] Kamboja kehilangan 2,5 juta hektar hutan antara tahun 1990 dan 2005 dan 334.000 hektar di antaranya merupakan hutan primer. Dan kini, kurang dari 322.000 hektar hutan primer masih tersisa.[8]

Di Indonesia juga, tanah-tanah yang luas telah dikosongkan untuk membuka jalan bagi rencana bisnis perusahaan-perusahaan. Menurut Pusat Penelitian Kehutanan Internasional yang berbasis di Indonesia, pemerintah Indonesia "telah memberi lisensi dan stimulasi kepada banyak perusahaan untuk mengembangkan tanaman industri baru seperti karet, kelapa sawit dan bubur kertas dan juga sebagai lokasi transmigrasi. Proyek ini mengharuskan pembebasan ratusan ribu hektar lahan, dan pembakaran dengan api lahan yang dibersihkan ini selalu merupakan cara yang paling gampang dan murah".[9]

Perusahaan-perusahaan Malaysia juga memiliki kepentingan di negara-negara Pasifik Selatan, termasuk di Kepulauan Solomon. Bagian-bagian tertentu dari kepulauan ini telah sangat terdeforestasi akibat penebangan yang tidak terkontrol oleh perusahaan-perusahaan asing. Pemerintah Kepulauan Solomon tampaknya tidak memedulikan temuan dari sebuah laporan ahli yang merekomendasikan bahwa Pemerintah Salomon seharusnya tidak boleh membiarkan lebih dari 325.000 meter kubik hutan tropis Kepulauan Solomon dipotong setiap tahun. Sebaliknya, pemerintah negara ini bahkan mengeluarkan lisensi untuk penebang hutan hingga 4 juta meter kubik per tahun. "Ini adalah sumber daya [hutan tropis] berharga yang tumbuh dari menit ke menit, dan mereka menjualnya seakan-akan itu hanya kayu bakar," demikian pernyataan Gordon Bilney, seorang menteri pemerintah Australia, sehubungan dengan keputusan pemerintah Kepulauan Solomon. Penebangan hutan ini akan membawa kutukan bagi ri-

---

7 Bona, S. and L. Dana, makalah untuk Workshop on Issues for the Sustainable Use of Biomass Resources for Energy, Colombo, Sri Lanka, 15–19 August 2005.

8 Mongabay.com (Cambodia), October 2007. <http://rainforests.mongabay.com/20cambodia.htm> (accessed 30 January 2008).

9 Lihat *International Agricultural Development* (November/December 1997).

buan nelayan pedesaan dan keluarga-keluarga mereka yang kehidupannya semakin menderita."[10] Laguna-laguna akan penuh oleh hempasan tanah dari lereng-lereng gunung yang terkikis dan longsor, dan sedimen dasar sungai akan semakin tebal. Dan ini baru dua dari sekian banyak masalah yang bakal menimpa masyarakat lokal akibat penebangan hutan yang tidak terkendali.

Perusahaan-perusahaan asing, terutama dari negara-negara Asia, telah mencoba menyuap orang-orang desa di Papua New Guinea untuk membiarkan mereka menebang hutan-hutan tropis mereka. Sebuah laporan yang belum diterbitkan tentang penyelidikan resmi mengenai penebangan hutan tropis PNG menemukan: "Beberapa perusahaan... menjelajahi wilayah pedesaan dengan jaminan keamanan diri dari perampok kaya, menyuap para politisi dan pemimpin setempat, menciptakan disharmoni sosial dan mengabaikan hukum supaya mereka bisa mencaplok dan mengekspor sisa-sisa terakhir dari hutan kayu [Papua Nuova Guinea].[11]

Amerika Latin

Dampak dari aktivitas bisnis TNC pada kaum miskin dapat dibuktikan oleh sebuah studi kasus. Di negara bagian Brasil Espirito Santo, sebuah perusahaan bernama Aracruz Celulose telah mengubah kawasan hutan menjadi perkebunan tanaman pohon-pohon eucalyptus dengan menggusur masyarakat setempat. Sebuah perusahaan Portugis (Safra), sebuah perusahaan Norwegia (Lorentzen) dan sebuah perusahaan Brasil (Votoranti) — semua memiliki 28% saham di Aracruz Celulose.[12] Ke-28% saham sebelumnya dipegang oleh sebuah perusahaan rokok Brasil yaitu Souza Cruz, sebuah anak perusahaan dari BAT.

Perusahaan Aracruz Celulose adalah eksportir terbesar di dunia di bidang perkayuan (untuk pembuatan kertas) dan mengirim 70% produk-

10 Snow, D. and J. Collee, 'The rape of an island paradise', *The Observer*, 29 September 1996.

11 Dikutip dalam N. Baird, 'Saying no to Asian loggers', *People and the Planet*, Vol. 5, No. 4 (1996).

12 Aracruz website. <http://www.aracruz.com> (accessed 30 January 2008).

nya untuk pabrik-pabrik pembuatan kertas di Amerika Utara, Eropa dan Jepang. Bubur kertas (*pulp*) terbuat dari pohon eucalyptus. Menurut beberapa LSM yang mewakili kaum buruh dan masyarakat Indian di Amerika Latin, hutan tropis di wilayah mereka juga telah ditebang untuk membuat ruang bagi penanaman eucalyptus. Mereka mengatakan bahwa aktivitas-aktivitas perusahaan ini menggusur ribuan orang suku Indian dan para penghuni hutan tropis dari rumah-rumah mereka, dan bahwa tanah, air dan ikan-ikan [di sungai atau danau mereka] telah rusak.

Pada tahun 1967, perusahaan Aracruz mengakuisisi sebagian besar kawasan hutan tropis yang dihuni oleh petani setempat dan oleh orang-orang Tupiniquim Indian, sebuah penyerobotan tanah yang sekarang berada di bawah pengawasan kelompok-kelompok seperti Serikat Industri Ekstraktif Kayu, Federasi Buruh Pertanian Negara Bagian Espirito Santo dan Dewan Misionaris Suku Indian. Aracruz sekarang memiliki 203.000 hektar lahan garapan di daerah tersebut, termasuk 132.000 hektar yang ditumbuhi pohon-pohon eucalyptus. Menurut kelompok ini, 70% dari tanah suku Indian yang telah diambil oleh Aracruz sebelumnya merupakan hutan tropis dan seluas 80.000 hektar hutan alam telah dipotong untuk membuat ruang bagi pembudidayaan pohon-pohon eucalyptus. Tapi Aracruz menyangkal hal ini dan mengklaim bahwa ia menanam pohon eucalyptus di lahan-lahan yang telah dieksploitasi, rusak, dan akhirnya ditinggalkan.

Masyarakat Indian sendiri mengklaim bahwa rumah-rumah mereka di hutan tropis dihancurkan untuk menciptakan ruang bagi perkebunan eucalyptus. Menurut José Luiz, salah seorang korban penggusuran perusahaan Aracruz: "Waktu itu kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya baru berusia tujuh tahun kala itu, tapi saya masih ingat, alat berat tiba-tiba datang dan orangtua saya diberi tahu bahwa perusahaan telah membeli hutan tempat kami tinggal dari pemilik tanah.[13]

Kelompok-kelompok di atas mengklaim bahwa sekitar 7.000 keluarga waktu itu dipaksa meninggalkan rumah-rumah mereka, termasuk

---

13 José Luiz, percakapan dengan pengarang, May 1992.

ribuan orang Tupiniquims tanpa menerima ganti rugi apa pun. Beberapa keluarga yang tergusur ini memilih untuk tetap tinggal di sekitar daerah ini, sedangkan yang lainnya tak ada pilihan lain kecuali pergi menetap dan mengadu nasib di kota-kota terdekat. "Kami waktu itu terlalu terkocar-kacir dan tidak bersatu untuk melawan perusahaan," kata Luiz. Hanya beberapa orang Indian yang tergusur ini bisa menemukan pekerjaan dengan Aracruz.

Pohon eucalyptus tumbuh dengan cepat di daerah tersebut. Kalau sudah besar, biasanya pohon-pohon ditebang hampir rata tanah dan akan tumbuh kembali hingga ketinggian hampir 40 kaki (12 meter lebih) dalam waktu tujuh tahun, yang memberikan perusahaan pasokan rutin bahan baku untuk pabriknya. Namun, pohon-pohon ini mencapai pertumbuhan yang cepat dengan mengisap air tanah dalam jumlah besar, yang tentunya merusakkan vegetasi sekitarnya dan bisa mengeringkan aliran air setempat.

Di daerah sekitar pabrik Aracruz, eucalyptus tampaknya memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Ia merusak makanan alam di hutan yang merupakan bagian diet utama orang Indian, mengeringkan sumber-sumber air dan mematikan ikan-ikan [di dalam air sungai]. Kelompok-kelompok organisasi sosial menyatakan bahwa 176 danau dan sejumlah besar sungai di daerah tersebut telah kering sebagai akibat dari perkebunan eucalyptus. Dalam kata-kata João Pedro Stedile dari Gerakan Kaum Buruh Tak Bertanah di Brasil:

> Dulu wilayah ini merupakan salah satu daerah terbaik di negeri ini untuk memancing ikan, tetapi ikan-ikan di tempat ini telah hilang karena kehancuran habitatnya. Sebanyak 50.000 orang masyarakat di daerah ini biasa mengonsumsi ikan setiap hari. Sekarang mereka tidak makan ikan lagi. Beberapa nelayan telah berhenti memancing ikan karena ikan terlalu sedikit untuk ditangkap.[14]

14 João Pedro Stedile, percakapan dengan pengarang, May 1992.

Pohon-pohon eucalyptus diubah menjadi bubur kertas (*woodpulp*) melalui proses lima tahap pemutihan yang menggunakan klorin dioksida. Kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan menyatakan bahwa 200.000 ton bahan kimia, termasuk dioxin yang sangat beracun, telah dibuang di laut Atlantik, yang membunuh dan meracuni ikan-ikan dan vegetasi. "Ikan-ikan yang bisa memberi makan kepada 30 juta rakyat Brasil diracuni oleh dioxin," demikian diperkirakan Luiz. Petani setempat mengatakan bahwa tanah mereka kini kering dan menghasilkan sedikit makanan. Pohon eucalyptus terkenal dengan tabiatnya yang bisa menurunkan debit air dalam tanah dan hal ini mendatangkan petaka bagi para petani.

Tapi berhubungan dengan keluhan ini, perusahaan Aracruz membela diri bahwa perusahaan sedang mengusahakan penghutanan yang berkelanjutan. Carlos Alberto Roxo, general manager perusahaan Aracruz untuk lingkungan dan hubungan kemasyarakatan, mengatakan bahwa Aracruz tidak setuju bahwa kegiatannya telah merusak perikanan. Ia percaya bahwa pengeringan aliran air di daerah ini disebabkan oleh deforestasi umum dan bukan oleh perkebunan-perkebunan eucalyptus, dan bahwa pohon-pohon eucalyptus tidak menurunkan debit air tanah. Dia setuju bahwa populasi suku orang Indian semakin lebih sedikit di daerah itu tetapi menurut dia penurunan populasi suku Indian merupakan gejala umum.[15] Menanggapi klaim perusahaan tentang bisnisnya sebagai sebuah usaha kehutanan yang berkelanjutan, Manuel Carol Gomes, mengatakan: "Apa yang perusahaan Aracruz pertahankan [supaya berkelanjutan]? Ia [perusahaan Aracruz] pertahankan [kelanjutan] kesengsaraan, dan degradasi hidup suku Indian."[16]

Pada tahun 1997, suku-suku Indian meminta pemerintah Brasil untuk memberikan kembali kepada mereka tanah seluas 1.300 hektar untuk membantu mereka bisa kembali kepada gaya hidup asli mereka. Badan resmi pemerintah untuk urusan masyarakat asli menyimpulkan bahwa klaim mereka dibenarkan. Perusahaan Aracruz menentang klaim itu dan

---

15 Carlos Alberto Roxo, percakapan dengan pengarang, May 1992.

16 Manuel Carol Gomes, percakapan dengan pengarang, May 1992.

memberikan tekanan besar pada pemerintah Brasil supaya menolak permintaan suku-suku Indian.[17] Pada bulan Maret 1998, pemerintah Brasil memutuskan untuk menolak permintaan suku-suku Indian dan selanjutnya menetapkan bahwa LSM-LSM yang telah mendukung perjuangan mereka dilarang masuk ke tanah-tanah adat dari suku Indian.

Tapi perjuangan tetap berjalan terus. Pada bulan Februari 2005 orang-orang Indian dari kelompok suku Tupiniquim memutuskan untuk mengambil kembali tanah yang diduduki oleh perkebunan eucalyptus dari Aracruz. Lebih dari 100 keluarga pribumi Indian kembali menetap di daerah pedesaan dari mana mereka telah diusir, "dengan demikian membuka pintu untuk harapan masa depan yang layak".[18]

Harapan suku asli Indian kembali pupus ketika pada bulan Januari 2006 traktor dari perusahaan Aracruz menghancurkan dua desa suku Indian dari kelompok Tupiniquim dan Guarani di negara bagian Espiritu Santo. Tampaknya dengan dukungan pemerintah dan polisi federal, traktor Perusahaan Aracruz menyapu semua saja yang dijumpainya di desa-desa penduduk Indian di Córrego D'Ouro dan Olho D'Água. Kedua desa itu hancur total. Pengusuran ini terjadi pada saat negosiasi panjang sedang berlangsung antara pemerintah Brasil, perusahaan, orang Indian dan masyarakat sipil. Departemen Kehakiman Brasil sendiri telah mengonfirmasi hasil studi antropologi yang dilakukan oleh organisasi nasional Brasil untuk suku Indian (Funal) bahwa daerah itu merupakan wilayah adat suku asli Indian [seturut undang-undang — termasuk deklarasi PBB bagian urusan suku asli — harus dilestarikan dan dilindungi].

Persis 40 tahun setelah perusahaan Aracruz menguasai hutan tropis di wilayah tersebut, sebuah jangka waktu penderitaan yang cukup panjang bagi suku Indian yang terlantar, kesepakatan akhirnya tercapai. Pada bulan Desember 2007 kesepakatan ditandatangani oleh Celulose Aracruz dan pemimpin adat Suku Indian yang mentransfer 11.000 hektar lahan

17 *Earth Matters*, No. 36 (Winter 1997), London: Friends of the Earth.

18 *World Rainforest Movement Bulletin*, No. 102 (January 2006). <http://www.wrm.org.uy/bulletin/102/SA.html> (accessed 30 January 2008).

kepada masyarakat adat Suku Indian.[19]

Afrika

Afrika telah kehilangan lebih dari setengah dari hutan tutupannya dalam 100 tahun terakhir. Hutan dari benua ini telah dilihat oleh perusahaan-perusahaan kayu sebagai sumber daya yang kaya. TNCs Eropa yang berbisnis di bidang kayu aktif berkeliaran di Republik Demokratik Kongo (DRC), Kamerun, Republik Afrika Tengah, Gabon, Pantai Gading, dan Liberia. DRC memiliki wilayah hutan tropis terbesar di Afrika dan terbesar kedua di dunia setelah hutan tropis Amazon di Brasil. Hutan sangat penting bagi para penduduknya. Dari 60 juta lebih penduduknya, sekitar 40 juta jiwa rakyat DRC menggantungkan hidup mereka pada hutan tropis untuk menyediakan makanan pokok, obat-obatan, dan produk-produk bukan kayu, di samping untuk bahan bangunan dan energi. Hutan DRC juga dianggap sebagai salah satu pertahanan penting dari planet bumi terhadap perubahan iklim.

Aktivitas penebangan kayu di DRC juga termasuk parah. Pada bulan April 2007 seluas sekitar 21 juta hektar hutan negara sedang dialokasikan untuk industri penebangan kayu — pada sebuah tempat yagn luasnya sekitar tujuh kali ukuran negara Belgia. Sebagian besar kayu negara itu diekspor ke Eropa, di mana Prancis dan Belgia saat ini menjadi importir terbesar. Perusahaan-perusahaan kayu internasional di negara DRC "menyebabkan kekacauan sosial dan mendatangkan malapetaka lingkungan", kata Greenpeace.[20] Perusahaan-perusahaan kayu meletakkan 'kerangka rute arteri melalui hutan-hutan tropis yang masih utuh. Petak-petak yang dibuat melalui hutan tropis untuk pembukaan jalan bagi perusahaan kayu bisa lebih luas dari beberapa jalan raya utama Eropa," kata laporan itu.[21]

---

19 Aracruz, 'Aracruz Celulose and indigenous communities sign agreement', pernyataan pers, 3 December 2007. <http://www.aracruz.com.br/show_ press.do?act=news&id=1000548& lang=1> (accessed 30 January 2008).

20 Greenpeace International, *Carving up the Congo*, Amsterdam, April 2007. <http://www.greenpeace.org>(accessed 30 January 2008).

21 *Ibid.*

Bank Dunia menghentikan bantuan keuangan kepada DRC pada 1990-an karena konflik bersenjata yang terjadi di sana, tetapi pinjaman itu kembali diberikan pada tahun 2001. Pada bulan Mei 2002, bank meyakinkan pemerintah DRC untuk menangguhkan kontrak yang baru dan membarui atau memperpanjang kontrak yang sudah ada. Moratorium ini menyusul review pajak yang diinvestigasi Bank Dunia sehubungan dengan kontrak di bidang bisnis kayu. Namun pada bulan April 2006, 107 kontrak baru telah disepakati antara pemerintah dan perusahaan kayu, yang meliputi lebih dari 15 juta hektar hutan.[22] Namun, menurut Bank Dunia, "produksi kayu industri memiliki rekor buruk di Afrika. Selama enam puluh tahun terakhir, hampir tidak ada bukti bahwa perusahaan perkayuan di negara ini telah mengangkat penduduk pedesaan keluar dari kemiskinan atau memberikan kontribusi lainnya dengan cara yang sungguh berarti dan berkelanjutan bagi pembangunan daerah dan nasional".[23]

Namun Bank Dunia juga telah gagal untuk mengontrol perluasan industri penebangan kayu, kata laporan Greenpeace. Dengan tidak adanya penegakan hukum, di belakang tetap ada desak-desakan untuk memiliki saham-saham hutan yang berharga berjalan terus. "Dukungan Bank Dunia untuk pembangunan melalui industri-industri ekstraktif, termasuk bisnis kayu, dibuat untuk berkompromi dengan masa depan hutan tropis di Kongo, dengan para penduduknya dan dengan iklim global."[24]

Negara DRC memiliki Kode Etik Kehutanan di mana sebuah perusahaan kayu mesti bernegosiasi langsung dengan masyarakat setempat mengenai layanan jasa yang akan diberikan kepada mereka sebagai sebuah pertukaran untuk penebangan kayu di daerah mereka. Tapi beberapa hasil investigasi menunjukkan bahwa pertukaran pengambilan kayu yang bisa bernilai hingga ratusan ribu dolar AS (US$100.000.00=Rp1 miliar), peru-

---

22 *Ibid.*

23 Dikutip oleh Stuart Wilson (Forest Monitor), Patrick Alley (Global Witness), Susanne Breitkopf (Greenpeace International) and Simon Counsell (Rainforest Foundation UK), 7 September 2007. <www.bicusa.org/proxy/Document.10542.aspx> (accessed 30 January 2008).

24 Greenpeace International, *Carving up the Congo.*

sahaan dapat memberikan masyarakat hadiah hanya sebesar $100 (sekitar 1 juta). Setelah penebangan dimulai, penyediaan layanan dinegosiasikan dengan masyarakat, seperti untuk gedung sekolah, yang sering kali tidak dilaksanakan sama sekali. Oleh karena itu, propaganda yang mengatakan bahwa perusahaan kayu akan membawa manfaat bagi masyarakat setempat tetap merupakan sebuah ilusi.

Pada bulan Juni 2000, terungkap dalam laporan *World Resources Institute* (WRI) bahwa hutan di Gabon sedang jatuh ke ribaan beberapa perusahaan kayu. Gabon adalah termasuk salah satu produsen minyak terbesar di Afrika dan termasuk negara kaya untuk ukuran Afrika. Laporan WRI mengatakan bahwa oleh karena pendapatan dari sektor minyak menurun, maka tekanan untuk mengeksploitasi hutan negara akan terus bertumbuh. Pada tahun 1957, kurang dari 10% dari hutan Gabon dialokasikan sebagai konsesi untuk perusahaan kayu. Pada tahun 2000 lebih dari setengah hutan di Gabon telah dialokasikan sebagai konsesi perusahaan kayu dan jumlah daerah konsesi adalah dua kali lipat dari konsensi lima tahun sebelumnya. Kelima pemegang konsesi terbesar adalah perusahaan Rougier-Gabon, Compagnie Forestiere du Gabon (CFG), Leroy-Gabon, Compagnie Equatoriale des Bois (CEB) dan Lutexfo/Soforga. Meskipun terdaftar di Gabon, perusahaan-perusahaan kayu tetap dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan induknya di Eropa.[25]

Industri kayu Gabon bergantung pada satu jenis pohon, Okoume (*Aucouméa kleineana*). Kayu ini hanya ditemukan di Gabon, di beberapa bagian Kongo dan Guinea Khatulistiwa. Meskipun kayu ini telah digunakan di Perpustakaan Nasional baru Paris dan di kereta api Eurostar, kayu ini terutama diekspor untuk pembuatan kayu lapis.

Lebih dari 90% dari produksi kayu Gabon diekspor dan sekitar setengahnya diekspor ke negara-negara Asia. Dari volume ini, 73% adalah kayu okoume [nama Latinnya: *aucoumea klaineana*, banyak tumbuh di Gabon, Afrika]. Cina kini telah mengantikan posisi Prancis sebagai pasar

25 World Resources Institute, *A First Look at Logging in Gabon*, Washington, DC: World Resources Institute, June 2000.

ekspor utama kayu dari Gabon. Masalah ini diperparah karena pemerintah dan lembaga-lembaga donor internasional menganggap eksploitasi kayu sebagai pusat kebijakan pembangunan. Sikap pemerintah negara Barat dan lembaga-lembaga donor ini yang mendorong penebangan kayu di hutan-hutan tropis negara berkembang terus meningkat.

Industri eksploitasi hutan dalam kerangka kebijakan [dari pemerintah negara-negara Barat dan lembaga-lembaga donor internasional] saat ini mengancam integritas dan keanekaragaman hayati masa depan negara Gabon. Tingkat produksi sudah jauh di atas perkiraan produksi resmi yang berkelanjutan dan sudah dirancang sekian rupa sehingga akan terus meningkat. Kontribusi dari pendapatan sektor kehutanan untuk penduduk negara Gabon secara keseluruhan dan secara khusus untuk masyarakat Gabon yang hidup di wilayah operasi industri kayu dipertanyakan, kata sebuah laporan tahun 2006.[26]

Lebih dari 90% hutan Ghana sudah ditebang industri kayu sejak tahun 1940-an. Korupsi dan penipuan dari pihak TNCs yang berbinis kayu telah diungkapkan oleh LSM *Friendsof the Earth* yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan kayu dari Inggris, Jerman, dan Belanda telah membohongi Negara Ghana sebesar £30 juta (sekitar Rp450 miliar) dari pendapatan hutan Ghana. Beberapa "agen yang korup" telah digunakan, kata laporan itu, untuk membuat deklarasi palsu tentang nilai kayu dari hutan Ghana yang sedang diekspor. Para agen ini memberikan harga-harga kayu kepada biro pemerintah Ghana lebih rendah daripada harga kayu yang sebenarnya di pasar dunia. Kayu-kayu yang diekspor kadang-kadang merupakan kayu-kayu dari kelas yang lebih tinggi daripada yang dilaporkan pihak TNCs Eropa kepada pemerintah Ghana. Sehingga dalam kedua kasus ini, perusahaan ekspor akan mendapatkan harga yang lebih tinggi, sedangkan pemerintah Ghana memperoleh angka harga yang lebih rendah.

Laporan itu [dari *Friendsand Earth*] juga menuduh bahwa perusahaan asing juga menaikkan harga mesin-mesin impor dan layanan jasa profe-

26 *Forest Monitor, Country Profiles — Gabon, 2006.* <http://www.forests monitor.org/en/reports/540539/549944>(accessed 30 January 2008).

sional dan mengirim tagihan kepada pemerintah Ghana biaya lebih besar dari biaya barang-barang dan layanan jasa yang telah diberikan TNCs di bidang bisnis kayu. Dengan metode ini dan juga dengan cara-cara lainnya, Negara Ghana telah dicurangi (ditipu) sehubungan nilai riil dari ekspor kayunya dan telah kehilangan sekitar £30 juta (sekitar Rp450 miliar). Setelah melakukangan investigasi dugaan kecurangan bisnis ini, pemerintah Ghana menemukan bahwa TNCs Barat telah menggunakan sejumlah cara untuk menipu pemerintah Ghana.[27] Semua ini terjadi pada saat Ghana berada di bawah tekanan dari IMF dan Bank Dunia supaya Ghana harus meningkatkan ekspor kayu sehingga bisa melunasi utang luar negeri.

Ada sebuah konsensus yang sedang berkembang bahwa "model industri kayu yang didasarkan pada konsesi tradisional tidak membawa keuntungan ekonomi, sosial dan lingkungan yang diinginkan".[28] Peran negatif TNCs lagi-lagi jelas. Bertentangan dengan semua ini, Bank Dunia saat ini malah sedang menyiapkan peluncuran program *Forest Carbon Partnership Facility* di bidang kehutanan yang para ahli khawatir justru akan menguntungkan perusahaan-perusahaan industri kayu.[29] Berdasarkan pengalamannya sendiri, Bank Dunia seharusnya mengakhiri dukungannya terhadap industri kayu [yang merusakan hutan tropis dunia].

Perikanan

Perikanan dunia juga sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penangkapan ikan yang berlebihan marak di mana-mana. Laut sedang dijarah demi keuntungan jangka pendek tanpa adanya

---

27 Friends of the Earth, *Plunder in Ghana's Rainforests for Illegal Profit*, London: Friends of the Earth, March 1992.

28 Baroness Amos, UK Government House of Lords spokesperson on international development, 25 July 2006, quoted on Rainforest Foundation website. <http://www.fern.org/media/documents/document_3760_ 3761.pdf> (accessed 30 January 2008).

29 Bretton Woods Project, 'Deforestation and double standards', London: Bretton Woods Project, 2 July 2007. <http://brettonwoodsproject.org/forests57> (accessed 30 January 2008).

pemikiran soal keberlanjutan populasi ikan untuk masa depan atau soal efeknya pada orang miskin. Teknologi yang digunakan oleh kapal-kapal perusahaan transnasional negara Barat dan perusahaan-perusahaan yang berbasis di Asia sedang menyebabkan masalah besar bagi jutaan orang di negara-negara berkembang di mana ikan bagi mereka sangat vital. Menurut perkiraan FAO, ikan menyediakan 29% total protein hewani yang dikonsumsi oleh orang-orang Asia, 18,6% oleh orang Afrika, dan oleh 7,6% Amerika Latin. Sekitar satu miliar orang bergantung pada ikan sebagai sumber utama protein hewani yang mereka perlukan. Tapi penangkapan ikan yang berlebihan oleh kapal pukat asing merusak daerah penangkapan ikan di pinggir dekat pantai dari negara-negara berkembang dan menyebabkan penurunan jumlah ikan tangkapan [dari para nelayan dengan alat sederhana]. Hal ini memiliki efek sangat besar pada perekonomian masyarakat pesisir pantai, karena hal itu menyebabkan kurangnya jumlah populasi ikan bagi masyarakat setempat.

TNCs ikut berbisnis penangkapan ikan dalam rangka mengamankan pasokan ikan segar yang dijual ke pasar ikan dunia. Tapi penangkapan ikan secara berlebihan oleh perusahaan transnasional berkontribusi terhadap masalah pangan dunia. Tangkapan ikan global telah meningkat lima kali lipat antara tahun 1950 dan 1989, yaitu naik dari sekitar 20 juta ton [1950] menjadi lebih dari 100 juta ton [1989]. Tangkapan sempat mengalami stagnasi pada tahun 1990-an, di mana jumlahnya hanya mencapai sedikit di atas 100 juta ton, dengan kualitas ikan yang menurun dan dengan proporsi yang lebih rendah datang dari laut. Gejala ini masih berjalan terus. Hasil tangkapan ikan laut pada tahun 1999 adalah 93,6 juta ton, pada tahun 2006 penangkapan yang dicapai hanya 93,2 juta ton. Tangkapan menjadi stagnan karena hampir setiap laut telah terjadi penangkapan yang berlebihan, bahkan ikan habis, telah sepenuhnya dieksploitasi atau telah dieksploitasi secara berlebihan.

Namun tangkapan dari perikanan budi daya (budi daya ikan) telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 1980, 9% dari hasil tangkapan dunia berasal dari perikanan budi daya dan jumlah ini merupakan kelipatan lima kali dalam 25 tahun terakhir. Pada tahun 2006

sektor perikanan budi daya menyumbang sekitar 44% dari seluruh hasil tangkapan. Tangkapan dari perikanan budi daya waktu itu menjadi 48,1 juta ton, yang membuat total tangkapan ikan sebanyak 141,3 juta ton.[30]

Negara-negara berkembang mengekspor sekitar seperempat dari total ikan hasil tangkapan mereka. Pada tahun 2004, kontribusi negara-negara berkembang dalam ekspor ikan ke seluruh dunia adalah 48% dari segi nilai dan 57% dari segi volume. Ekspor ikan netto dari negara-negara berkembang telah meningkat luar biasa selama dua dekade terakhir, dan sekarang melebihi nilai ekspor komoditas tradisional seperti kopi, teh, beras, dan pisang.

"Liberalisasi pasar ikan internasional dan permintaan yang tinggi akan ikan untuk diekspor juga telah mengubah cara bagaimana ikan dipasarkan dan mendorong masuknya pelaku-pelaku baru," kata Brian O'Riordan:

> Permintaan-permintaan pasar internasional memengaruhi cara operasi penangkapan ikan yang diatur (untuk menangkap ikan berkualitas, dan untuk menjaga kualitas), bagaimana ikan diawetkan di darat (di fasilitas pusat yang sesuai dengan standar internasional), dan bagaimana ikan diproseskan selanjutnya (dikemas dan kadang dikirim melalui angkutan udara ke luar negeri). Hal ini mempunyai dampak negatif pada keamanan pangan bagi masyarakat setempat karena kurangnya jumlah ikan yang masuk ke pasar lokal.[31]

Lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia bekerja sebagai buruh nelayan, yang berada hanya di bawah 3% dari tenaga buruh di sektor pertanian dunia. Lebih dari 90% dari nelayan ini tinggal di negara-negara berkembang, yang bekerja di perusahaan-perusahaan perikanan berskala kecil, berbasis rumah tangga atau rakyat.[32] Nelayan-nelayan ini

---

30 Fish statistics, 2007, issued by Food and Agriculture Organization, Rome, 2007. <http://www.fao.org/fishery> (accessed 30 January 2008).

31 O'Riordan, B., 'Artisanal fishing communities in the 21st century: caught between the devil and the deep blue sea', *Ecologia Politica* (February/March 2007), Vilanova i la Geltrú, Spain.

32 Institute for Development Studies, 'The importance of fisheries for development', *Id21 Insight 65* (December 2006).

menyediakan makanan penting bagi masyarakat lokal, tapi sayangnya mereka terhitung sebagai kelompok paling miskin di dunia orang miskin. Menurut sebuah perkiraan, 98% nelayan tradisional India, misalnya, hidup di bawah garis kemiskinan. Perempuan memainkan peran kunci dalam masyarakat nelayan, terutama dalam pengolahan, pemasaran dan distribusi ikan.

Para nelayan di negara-negara berkembang menyumbang sekitar seperlima dari ikan global yang ditangkap tapi sekarang mereka mulai menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap mata pencaharian mereka. Puluhan ribu pekerjaan dalam sektor perikanan berskala kecil hilang setiap tahun karena hasil tangkapan menurun dan kalah dalam bersaing dengan kapal-kapal ikan besar. Menurut para ahli perikanan: "Cara-cara hidup tradisional, yang selama berabad-abad telah ditopang oleh perikanan, kini sedang perlahan-lahan runtuh. Masyarakat nelayan tradisional telah berhasil dengan cukup baik pertahankan hidup mereka sampai kedatangan teknologi modern [di bidang penangkapan ikan].[33]

Di banyak negara berkembang, terutama di Afrika Barat, "perikanan laut dan pengolahan hasil laut dan perdagangannya dikombinasikan dengan aktivitas-aktivitas lain, yang vital untuk mendukung kehidupan masyarakat pedesaan," kata Brian O'Riordan:

> Di negara-negara berkembang, pekerjaan melaut juga memberikan sebuah pilihan sebagai sandaran terakhir pada saat pilihan lain gagal. Hal ini terutama terjadi di negara-negara yang sering ditimpa konflik (seperti Mozambik), dan di mana pertanian kerap gagal (seperti Senegal). Perlu dicatat bahwa sebagian besar migran dari Afrika Barat yang mendarat di Kepulauan Canary adalah laki-laki muda, pengungsi dari sektor pertanian di Afrika Barat, yang telah terlantar dari sektor pertanian di Afrika Barat, yang tidak mampu mencari nafkah dengan melaut. Ini adalah sebuah gejala baru, dan muncul pertanyaan, apakah orientasi produksi ekspor perikanan untuk menghasilkan

33 Fairlie, S., M. Hagler, and B. O'Riordan, 'The politics of overfishing', *The Ecologist* (March/April, May/June 1995).

tanaman pangan dan akses bagi perusahaan-perusahaan asing telah memicu kematian peluang-peluang untuk melaut bagi masyarakat setempat.[34]

Teknologi kapal pemukat

Teknologi modern dimiliki sebagian besar oleh perusahaan perikanan TNCs. Kapal-kapal pukat [dengan teknologi tinggi] dari Spanyol, Jerman, Norwegia, Korea, Jepang, dan USA menangkap ikan di laut lepas milik dunia dengan menggunakan perlengkapan alat pukat besar, yang kerap kali besarnya hingga beberapa kali lebih besar dari luas sebuah lapangan bola kaki. Sehingga praktisnya pukat ini bisa menyedot dan menangkap hampir segala sesuatu dalam radius beberapa km. Ikan-ikan hampir tidak bisa luput dari sergapannya. Meskipun ada peraturan mengenai ukuran besar pukat, banyak ikan kecil yang seharusnya tetap dibiarkan hidup ikut ditangkap juga.

"Pemukatan ikan di dasar laut yang dalam," kata Greenpeace, "adalah salah satu bentuk praktik penangkapan ikan yang paling merusakkan saat ini." Pemukatan ikan di dasar laut di wilayah batas laut sejauh 200 mil (sekitar 320 km) dari Zona Ekonomi Eksklusif dari setiap negara (lihat bahan di bawah ini) "dilakukan dengan relatif sedikit peralatan berbendera sejumlah kecil negara anggota OECD. Industri pukat dasar laut yang sangat modern sedang menyebabkan tingkat penghancuran kehidupan dasar laut demi keuntungan segelintir orang".[35] Armada kapal pukat super (supertrawler), misalnya, meliputi kapal-kapal yang ukuran panjangnya bisa sampai 140 meter dan bisa memukat ikan-ikan kecil seperti ikan sarden di pantai-pantai Afrika dan membekukan [awetkan mereka dalam lemari es] dalam 20 kilo blok.

TNCs menguasai "sebagian besar stok ikan dunia, mendominasi perdagangan global, dan mempunyai kekuasaan besar untuk memengaruhi

34 O'Riordan, B., 'Netting profits, reaping disbenefits', World Seafood Congress brochure, Inshore Ireland, Dublin, September 2007. <http://www.inshore-ireland.com> (accessed 1 November 2007).

35 Greenpeace, 'Murky waters', 2006. <http://www.greenpeace.org> (accessed 1 November 2007).

pemerintah.[36] Perusahaan Pescanova yang berbasis di Spanyol memiliki armada penangkapan ikan terbesar di dunia, dengan 120 kapal freezer (kapal pengawet ikan) dan 3.400 karyawan. Perusahaan ini menjelaskan bahwa aktivitasnya meliputi "penangkapan ikan, pengolahan, distribusi dan pemasaran produk ikan".[37] Perusahaan ini telah menonjol dalam pengembangan budi daya perikanan. Beberapa TNCs (Unilever, misalnya) sekarang menjauhkan diri dari sektor penangkapan ikan.[38]

Pantai-pantai Afrika merupakan salah satu tujuan utama bagi kapal-kapal perusahaan di bidang penangkapan ikan dunia. Senegal di pantai barat Afrika merupakan tujuan favorit. Ikan merupakan penghasil devisa terbesar untuk Senegal. Hampir seluruh pendapatan Senegal berasal dari ekspor ikan dan pendapatan ini umumnya digunakan untuk pembayaran bunga utang luar negeri. Ikan-ikan ditangkap di zona ekonomi eksklusif negara sejauh 200 mil (230 km) ke arah laut, kebanyakan oleh kapal pukat Spanyol, yang menangkap ikan-ikan yang sedang berenang ke daerah dekat pantai Senegal. Penangkapan besar-besaran ini merugikan penangkapan dan penghidupan para nelayan lokal. Walaupun kapal pukat modern tidak boleh menangkap ikan di laut hingga jarak 10 kilometer dari pantai, tapi tarikan pukat maut milik perusahaan Barat bisa mengangkut tangkapan dalam jumlah besar sehingga sangat sedikit ikan berenang masuk di daerah 10 km dari pantai. Para nelayan lokal karenanya dipaksa untuk berlayar lebih jauh ke laut dengan perahu-perahu kecil yang tidak dirancang untuk perairan laut yang lebih dalam, dan beberapa dari mereka tewas dalam kecelakaan yang melibatkan kapal-kapal pukat besar milik TNCs.

Penurunan jumlah tangkapan ikan telah secara drastis memengaruhi struktur sosial masyarakat desa di wilayah pesisir Senegal. Orang-orang muda menolak tawaran orangtua mereka untuk melaut. Mereka menginginkan

---

36 Le Sann, Alain, *A Livelihood from Fishing*, London: Intermediate Technology Publications, 1998.

37 Informasi dari Pescanova website. <http://www.alacrastore.com/company-snapshot/Pescanova_S_A-1048991> (accessed 30 January 2008).

38 Mereka fokus pada pemasaran dan pada percobaan untuk meyakinkan publik bahwa mereka memperoleh suplai-suplai mereka dari bahan-bahan yang dapat diperbaharui," kata Brian O'Riordan. Korespondensi dengan pengarang, March 2008.

jenis pekerjaan lain karena mereka telah melihat masalah pekerjaan orangtua mereka sebagai nelayan. Para nelayan lokal menginginkan agar pemerintah mereka memperluas zona penangkapan ikan nelayan lokal dari 10 hingga 20 kilometer dari pantai ke arah laut lepas dan meningkatkan investasinya untuk mendapatkan peralatan pengawasan untuk mendeteksi kehadiran pukat-pukat raksasa milik perusahaan asing.

Menurut Koalisi Perjanjian Penangkapan Ikan yang Adil (*Coalition for Fair Fisheries Agreements* atau CFFA), sebuah kelompok LSM Uni Eropa yang berbasis di Brussels, perjanjian penangkapan ikan antara Uni Eropa dan Afrika telah menyebabkan menipisnya stok ikan, pemiskinan masyarakat nelayan pesisir pantai dan penghancuran peluang-peluang untuk pembangunan yang berkelanjutan di negara-negara ACP (Afrika, Caribia, dan Pasifik). Perjanjian penangkapan ikan antara Uni Eropa dan Afrika juga tidak konsisten dengan kebijakan pembangunan Uni Eropa sendiri, yang bertentangan dengan ketentuan yang disepakati oleh Perjanjian Maas-Tricht.[39] Dukungan terhadap kampanye-kampanye melawan kemiskinan dan pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan dari negara-negara berkembang adalah salah satu tujuan dari perjanjian ini. Uni Eropa sekarang sedang mengejar kebijakan Kesepakatan Kemitraan Perikanan yang akan mematuhi prinsip koherensi.

Melalui sebuah perjanjian, kapal-kapal pukat TNCs hanya dapat melaut di Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil (230 km) dari wilayah pantai pesisir negara-negara berkembang. Zona ini disepakati pada tahun 1982 di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Negara-negara memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya laut dalam zonal 200 mil dari pinggir pantai sebelum masuk lautan bebas — dan itu berarti bahwa seharusnya sekitar 80% dari stok ikan laut dunia berada di bawah kontrol mereka. Laut lepas di luar 200 mil, hingga belum lama ini, menjadi zona bebas untuk semua nelayan, dan telah menimbulkan perselisihan serius antara kapal-kapal pukat asing (TNCs) dan pemerintah negara-negara

39 Lihat, 'Fishing deals impoverish communities', *International Agricultural Development* (May/June 1997).

berkembang. Negara-negara yang mempunyai wilayah pantai memiliki minat yang besar dalam industri penangkapan ikan, karena ikan sering bermigrasi dan mengangkang antara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas. Ikan-ikan yang tertangkap lebih banyak di laut lepas yang melampaui ZEE suatu negara dapat berarti ikan-ikan menjadi sangat kurang dalam zona ekonomi eksklusif seluas 230 km dari pantai itu. Laut-laut ini sekarang harus tunduk pada peraturan internasional (lihat bahan di bawah ini).

Pembajakan

Penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*Ilegal, Unreported and Unregulated* atau selanjutnya IUU) meliputi perburuan ikan di perairan nasional dan penangkapan yang tidak diatur di laut lepas. Penangkapan ikan yang IUU sering terjadi ketika sistem manajemen lemah atau sangat korup, di mana nilai ikan tinggi dan penegakan hukum sulit diindahkan, seperti terjadi di wilayah laut terpencil dan di sepanjang pantai negara-negara berkembang. Industri penangkapan ikan modern yang berada di tangan TNCs sangat besar dan dampaknya terhadap kaum miskin sugguh memprihatinkan.

Menurut perkiraan yang dibuat oleh sebuah kelompok studi kelautan dari di Inggris pada tahun 2005, total nilai global dari penangkapan ikan ilegal yang tak sesuai aturan dunia adalah antara US$4 miliar dan US $9 miliar (atau sekitar Rp90 triliun) per tahun. "Hal ini penting untuk negara-negara berkembang, karena nilai kekayaan laut yang hilang ini bisa sampai 5% dari Produk Nasional Bruto."[40] Sekitar US $1,25 miliar dari US$4 miliar berasal dari laut lepas, sisanya diambil dari Zona Ekonomi Eksklusif pesisir pantai negara-negara berkembang.

Kerugian karena IUU dipikul terutama oleh negara-negara berkembang yang menyuplai lebih dari 50% dari semua produk perikanan yang diperdagangkan di pasar internasional. Secara signifikan, kekayaan laut

40 Institute for Development Studies, 'Time to tackle illegal fishing', *Id21 Insight 65* (December 2006).

yang hilang dari perairan Afrika sub-Sahara adalah sebesar US$1 miliar (sekitar Rp10 triliun) per tahun — kira-kira setara dengan seperempat dari total ekspor perikanan seluruh negara Afrika per tahun. Penangkapan ikan yang ilegal, karenanya, menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi beberapa negara paling miskin di dunia di mana kebergantungan tinggi pada sektor perikanan untuk memperoleh makanan, mata pencaharian dan pendapatan. Penangkapan ikan yang IUU menguras stok ikan sebagai sumber pegangan hidup orang-orang miskin di negara-negara miskin. Para nelayaan IUU, yang umumnya menggunakan kapal pukat raksasa, sangat lincah untuk bergerak di laut lepas dan bisa menangkap setiap peluang. Pada tahun 2001, survei dari udara atas wilayah perairan laut Guinea memperlihatkan bahwa 60% dari 2.313 kapal pukat raksasa terlihat sedang melakukan pelanggaran.[41] Multilapis bisnis memastikan bahwa operasi penangkapan ikan yang IUU:

> dapat kendalikan dari jauh oleh TNCs yang dibentuk khusus untuk melayani armada, mengatur pengiriman tangkapannya lintas batas negara dan memastikan bahwa armada tetap berlabuh secara permanen di stasiunnya di Lautan Selatan. Perusahaan-perusahaan ini pada gilirannya dikendalikan oleh sindikat-sindikat yang membeli ikan tangkapan mereka melalui perjanjian pemasaran yang rahasia, yang memungkinkan mereka untuk mencuci ikan ilegal yang telah ditangkap dengan mencampurkan mereka dalam kontainer-kontainer yang dingin dengan hasil tangkapan ikan yang legal atau menjualnya melalui hubungan perdagangan yang sah, terutama ke Cina daratan, Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa.[42]

Di perairan Afrika sub-Sahara, para pelaku "sering kali kapal-kapal pukat raksasa Cina, Korea, dan Taiwan yang memiliki lisensi untuk menangkap ikan di salah satu zona tetapi kemudian mengeksploitasi juga di tempat-

---

41 High Seas Task Force, *Closing the Net: Stopping Illegal Fishing on the High Seas*, High Seas Task Force (Governments of Australia, Canada, Chile, Namibia, New Zealand, and the UK, WWF, IUCN and the Earth Institute at Columbia University), 2006. <www.oecd.org/dataoecd/2/28/39375276.pdf> (accessed 30 January 2008).

42 *Ibid.*

tempat lain".[43] Penangkapan ikan yang IUU adalah sebuah bentuk pembajakan internasional (*international piracy*). Pembajakan ini mirip dengan aktivitas-aktivitas lintas batas lainnya yang sesungguhnya dilarang oleh hukum seperti perdagangan kayu ilegal dan satwa langka. Masyarakat internasional perlu segera menghentikan kejahatan ini, antara lain secara radikal meningkatkan kualitas informasi dan intelijen untuk memantau penangkapan ikan yang IUU.[44]

Budi daya pengembangan ikan

Budi daya pengembangan ikan berskala kecil dapat membantu keluarga nelayan, tetapi kebanyakan budi daya ini dibuat dalam skala yang besar. Praktik ini mempunyai konsekuensi yang serius bagi masyarakat nelayan tradisional, antara lain karena hal itu menutup akses mereka untuk menangkap ikan di wilayah penangkapan tradisional di sepanjang pesisir pantai dan juga bisa merusak lingkungan pesisir pantai. TNCs juga melihat budi daya pengembangan ikan yang intensif ini sebagai peluang bisnis yang baik dan hingga saat ini 40% dari ikan budi daya berasal dari TNCs. Tapi budi daya pengembangan ikan juga bisa mengancam para nelayan untuk menjadi sumber hanya sekadar tenaga kerja murah. Selain itu, praktik pembudayaan ikan yang intensif juga bisa merusak lingkungan.

Pengembangan budi daya ikan yang serampangan, terutama udang dan salmon di Asia dan Amerika Latin, telah menimbulkan masalah sosial-ekonomi yang serius:

> Dalam kasus pengembangan udang, masalah-masalah yang timbul bisa meliputi konflik dan bahkan bisa terjadi tindakan kekerasan terhadap masyarakat lokal, khususnya yang berhubungan secara khusus dengan masalah pengambilan tanah, pengalihan lahan pertanian, terganggunya akses ke wilayah air perikanan, berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, merusakkan hutan bakau,

---

43 Ethical Corporation, 'Special Reports — Sustainability and the sea', 7 June 2007. <http://www.ethicalcorp.com/content.asp?ContentID=5148> (accessed 30 January 2008).

44 High Seas Task Force, *Closing the Net.*

salinisasi dan eksploitasi air yang berlebihan termasuk air tanah, dan polusi. Dalam kasus pembudidayaan salmon, masalah-masalah yang bisa muncul meliputi polusi dan kemungkinan penyebaran penyakit pada ikan-ikan liar. Industri pembudidayaan udang dan salmon, yang dibuat terutama untuk memenuhi pasar ekspor, telah memberikan kontribusi terhadap perolehan devisa asing dan keuntungan yang tinggi bagi para investor asing, meskipun imbas keuntungan bagi buruh kerja dan masyarakat lokal hingga saat ini amat kecil.[45]

Keterlibatan TNCs dalam pembudayaan ikan salmon di Chile merupakan salah satu contoh. Di negara ini industri pembudidayaan ikan salmon bertumbuh secara spektakuler antara tahun 1990 dan hingga tahun 2000-an dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis. Tapi rencana untuk memproduksikan ikan salmon tiga kali lipat hingga tahun 2013 telah mengalami kemunduran besar karena beberapa sebab seperti tersendatnya produksi dan bahaya ikan salmon diserang wabah penyakit dan infestasi parasit.

"Ini adalah krisis yang dialami sektor ini pada dirinya sendiri. Ini menunjukkan sebuah pengabaian yang tinggi baik untuk lingkungan maupun untuk pembangunan sosial yang berkelanjutan dan adil di daerah di mana budi daya ikan salmon diperkenalkan," kata Brian O'Riordan. Sebuah seminar di Chile pada Mei 2007 tentang "Penggunaan Antibiotik dan Kesehatan Pekerja Salmon" mengkritik TNCs karena kelalaian mereka dalam mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan, dan menyebutkan adanya antibiotik yang masif dan pelanggaran kesehatan keselamatan di tempat kerja.[46]

Seminar ini mencatat bahwa di Amerika Serikat dan Uni Eropa penggunaan antibiotik pada umumnya sangat dibatasi. Tapi di Chile kimia tersebut digunakan dalam dosis besar, terutama dalam pembudidayaan

---

45 Pernyataan Bersama Internasional untuk Mendukung Parah Nelayan, Sessi Ketiga dari Sub-Komisi tentang Budidaya Perikanan, FAO, New Delhi, September 2006.

46 O'Riordan, B., 'Multinational firms precipitate Chile's salmon farm crisis, seminar told', *Ecoceanos News*, 21 May 2007. <http://www.icsf.net/icsf2006/Controller Servlet? handler= EXTERNAL NEWS&code=get Details&id=34264&userType= &fromPage=> (accessed 1 November 2007).

ikan salmon. Menurut *Ecoceanos*, sebuah LSM yang berbasis di Chile yang mempromosikan pembudidayaan ikan yang bertanggung jawab, Chile menggunakan antibiotik 75 sampai 100 kali lebih per ton dibanding untuk ikan salmon Norwegia. Dampak-dampaknya penggunaan antibiotik yang berlebihan ini meliputi tingkat infeksi yang semakin meningkat dari bakteri yang resisten antibiotik, dan kontaminasi dari residu antibiotik dalam salmon yang kemudian dikonsumsi manusia.

Regulasi

Peraturan internasional tentang penangkapan ikan oleh TNCs masih lemah. Sebuah Kode Etik yang ditetapkan FAO untuk Perikanan yang Bertanggung Jawab, yang disetujui pada Oktober 1995, mengatur hal-hal yang meliputi penangkapan, pengolahan, dan perdagangan ikan dan produk ikan, operasi penangkapan, budi daya, penelitian perikanan dan integrasi perikanan ke dalam pengelolaan kawasan pesisir pantai. Kode Etik FAO ini memberikan prinsip-prinsip dan standar yang berlaku untuk manajemen, konservasi, dan semua pengembangan perikanan:

> Hak untuk melaut atau untuk menangkap ikan datang bersamaan dengan kewajiban untuk melakukannya [penangkapan ikan] secara bertanggung jawab untuk menjamin konservasi dan pengelolaan yang efektif dari semua sumber daya yang hidup dalam air.... Semua pemerintah negara harus mencegah setiap tindakan penangkapan ikan yang berlebihan dan menerapkan langkah-langkah manajemen... untuk memastikan upaya penangkapan yang sebanding dengan kapasitas produktif dari sumber daya dan pemanfaatannya yang berkelanjutan.... Praktik penangkapan ikan yang selektif mesti lebih dikembangkan dan diberlakukan.[47]

Juga pada tahun 1995, pemerintah negara-negara mengadopsi Perjanjian PBB mengenai Saham Mengangkang (*Straddling Stocks*) dan Saham Beruaya (*Highly Migratory Stocks*) untuk mengelola dan melestarikan ikan

---

47 Doulman, D. J., '1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries: underpinning concepts, goals and principles', Rome: FAO. <http://www.fao.org/DOCREP/006/Y5260E/y5260e0k.htm> (accessed 30 January 2008).

yang berenang di laut lepas — yang meliputi sekitar 10% dari stok ikan laut dunia. Ketika diratifikasi, perjanjian ini akan menjadi sebuah konvensi yang mengikat semua negara secara internasional. Berdasarkan perjanjian tersebut, negara-negara akan bekerja sama untuk mengatur penangkapan ikan di laut lepas, atau kapal-kapal mereka tidak akan diizinkan untuk menangkap ikan di laut lepas. Jika sebuah negara memiliki alasan untuk percaya bahwa sebuah kapal penangkap ikan di laut lepas sedang melanggar aturan konservasi, maka pemerintah negara itu dapat naik ke atas kapal dan lakukan pemeriksaan atas kapal dan, jika perlu, memberi tahu bendera negara kepada negara mana kapal bersangkutan didaftarkan. Jika negara yang memiliki bendera tidak merespons dalam waktu tiga hari kerja, maka negara yang melakukan pemeriksaan dapat menahan kapal tersebut di pelabuhan untuk tindakan lebih lanjut. Perjanjian-perjanjian internasional ini lebih bersifat sukarela ketimbang mengikat, dan implementasinya telah berjalan lambat. Krisis dalam penangkapan ikan berjalan terus meskipun hukum dan lembaga internasional beriktikat untuk mengatur dan mengendalikan penangkapan ikan, dan meskipun semua pembicaraan tentang "pembangunan berkelanjutan", Hukum Laut PBB, Kode Etik FAO tentang Perikanan yang Bertanggung Jawab, dll.," kata Brian O'Riordan.[48]

Regulasi tingkat nasional dapat membantu. Negara Namibia memberikan contoh yang baik. Dalam rangka menjaga kapal-kapal pukat asing agar tetap berada di luar wilayah perairan yang kaya ikan, negara Namibia menolak perjanjian perikanan dengan Uni Eropa dengan beberapa syarat yang ditawarkan kepadanya dan bahwa Namia telah mengembangkan sektornya sendiri. Pada hari kemerdekaan pada tahun 1990, stok ikan Namibia turun ke tingkat yang sangat rendah karena penangkapan ikan yang berlebihan oleh perusahaan asing, terutama oleh armada-armada Spanyol. Pemerintah baru Namibia menyusun peraturan yang secara ketat membatasi hak kapal pukat asing untuk menangkap ikan di Zona Eknomi Eksklusif negara Namibia. TNCs Spanyol sekarang hanya bisa melakukan penangkapan ikan secara patungan.

---

48 Percakapan dengan pengarang, Maret 2008.

Faktor-faktor lain yang lebih luas

Kenaikan permukaan laut, yang disebabkan oleh perubahan iklim, menimbulkan ancaman tersendiri bagi masyarakat nelayan wilayah pesisir pantai di seluruh dunia. Subsidi Uni Eropa untuk perusahaan-perusahaanpenangkapan ikan untuk membuat lebih banyak kapal merupakan sebuah ancaman yang lain lagi. Advokasi laut Kelompok Oceana dan WWF mendesak supaya subsidi yang mendorong penangkapan ikan secara berlebihan dilarang.

Kekuatan yang ingin mengeksploitasi laut tidak hanya kapal-kapal penangkap ikan. Ketika cadangan minyak bumi di darat atau di perairan pantai menjadi semakin kurang, maka perusahaan-perusahaan minyak mulai mencari peluang-peluang di wilayah laut lepas. Perusahaan-perüsahaan pertambangan mineral mulai menunjukkan minatnya di bidang pertambangan mineral lepas pantai.

Pembuangan limbah di laut juga menjadi keprihatinan tersendiri. Pada bulan November 2007, misalnya, sebuah perusahaan yang berbasis di Australia, perusahaan Gizi Laut, diberi lampu hijau oleh pemerintah Filipina untuk secara eksperimental membuang ratusan ton urea yang nyake Laut Sulu yang terletak antara Filipina dan Kalimantan. Ini bisa membahayakan lingkungan hidup perairán laut dan mata pencaharian para nelayan.[49]

Contoh-contoh ini menggambarkan sebuah kesimpulan yang lebih luas — yaitu lautan dunia adalah sebuah sumber daya yang semakin berada di bawah kekusaan dari TNCs [dirambah, dieksploitasi].

---

49 Action Group on Erosion, Technology and Concentration, 'Geoengineers target Southeast Asia: pissing for profit in the Pacific', ETC Group, 5 November 2007. <http://www.etcgroup.org> (accessed 30 January 2008).

BAB 8

Menambang Orang Miskin

Aku belum pernah melihat sesuatu yang begitu merusakkan secara sistematis seperti program pertambangan di Filipina. Dampak-dampaknya terhadap lingkungan dan terhadap kehidupan masyarakat sama-sama mengerikan. (Clare Short, mantan Menteri Pembangunan Internasional Inggris)

Investor tidak terlalu peduli banyak soal melestarikan lapangan kerja dari para penambang emas.... Kami hanya ingin tahu apa yang kami peroleh dalam bentuk pendapatan dan dividen. (Investor)

Pertambangan adalah industri terbesar dunia urutan kelima. Industri ini telah membantu memberikan kepada manusia: emas, listrik, televisi, kendaraan, pesawat, lemari es, senjata, peluru, dan pasta gigi yang lebih putih. Namun industri ini juga banyak menyebabkan masalah bagi masyarakat miskin yang kerap tidak diberitakan secara lengkap oleh media cetak. Dalam rangka menggali keluar mineral dari dalam tanah untuk membuat produk baik yang bertahan lama maupun yang tidak bertahan lama [sekali dipakai dan sesudah bisa dibuang di tempat sampah], pertambangan telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan sosial yang sangat besar, yang sebagian besar dilakukan oleh TNCs di negara-negara berkembang, di mana sumber daya mineral masih ada. Sebanyak 70% emas, misalnya, ditambang di negara-negara berkembang.

Kebanyakan pertambangan menggunakan teknologi tinggi dan menyebar di wilayah-wilayah yang luas. Ini adalah awal dari masalah. Ada kemungkinan di mana pertambangan dilakukan dengan penebangan

daerah hutan pegunungan dalam jumlah hektar yang luas dan peledakan batu-batuan, setelah itu gunung-gunung diterowongi atau dibongkar ke luar. Di mana mineral sekali digali, maka lubang-lubang besar yang kosong menganga ditinggalkan begitu saja. Pertambangan sering mengambil tanah yang sedang digunakan masyarakat untuk bercocok tanam. Banyak petani kakao di Ghana, misalnya, harus menyerah tanah pertanian leluhur mereka "yang meliputi 4–5 generasi kepada perusahaan-perusahaan pertambangan".[1]

Volume air yang digunakan oleh pertambangan terbuka juga sangat besar dan dapat menguras habis air sungai dan bahkan cadangan air di bawah tanah, yang bisa mengurangi atau menghabiskan air yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk minum dan pertanian. Polusi limbah dari tambang sering lolos hingga ke sungai-sungai. Untuk pembuatan setiap cincin emas, ada 18 ton limbah yang harus dibuang.[2]

Pertambangan merupakan sebuah kegiatan yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga sebuah industri yang sangat menguntungkan investor. "Di seluruh dunia saat ini ada sekitar 4.000 lebih perusahaan pertambangan, yang sebagian besar bergerak di bidang eksplorasi dan ekstraksi."[3] Dari jumlah ini, sekitar 149 buah perusahaan dianggap pemain-pemain utama di bidang ini dan menguasai sekitar 60% produksi pertambangan. Sebagian besar pemain-pemain utama ini adalah perusahaan-perusahaan transnasional atau TNCs.

Pertambangan seharusnya memberi keuntungan bagi negara-negara berkembang. Beberapa negara yang digolongkan sebagai negara-negara termiskin di dunia dalam kenyataannya merupakan negara-negara yang

1 Dogbevi, E. K., 'Mining in Ghana: paradox of profits, pollutions and poverty', *myjoyonline* (October 2007). <http://www.myjoyonline.com/features/200710/9715.asp> (accessed 20 November 2007).

2 Catholic Agency for Overseas Development, 'Unearth Justice campaign', London: CAFOD, 2007. <www.cafod.org.uk/get_involved/campaigning/unearth_justice> (accessed 10 January 2008).

3 United Nations Conference on Trade and Development, *World Investment Report 2007*, Geneva: UNCTAD, 2007, p. 108.

kaya akan sumber daya alam mineral. Zambia, misalnya, memiliki cadangan tembaga yang banyak, tetapi penambangan tembaga telah diprivatisasi [dan diserahkan untuk dikelola perusahaan swasta asing] atas desakan Bank Dunia dan IMF. Harga tembaga di pasaran dunia telah meroket sejak tahun 2005, namun rakyat Zambia hampir tidak mendapat keuntungan karena kenaikan harga tembaga yang menjadi kekayaan utama negara mereka. Pendidikan dan kesehatan di Zambia tetap semakin memprihatinkan. Keseimbangan yang ideal antara perusahaan-perusahaan tambang dan masyarakat tuan rumah belum tercapai.[4]

Kurangnya regulasi industri-industri pertambangan di negara-negara Selatan merupakan bagian dari masalah. Standar-standar lingkungan yang diharapkan dari perusahaan-perusahaan milik negara-negara Utara tidak berlaku di kebanyakan negara-negara Selatan. Dan era munculnya politik liberalisasi dan privatisasi ekonomi dunia, industri pertambangan juga ikut berkembang dengan kecepatan tinggi, di mana TNCs pertambangan mengerahkan pengaruhnya yang besar pada pemerintah negara-negara berkembang. Pemerintah negara-negara berkembang sebaliknya melihat TNCs pertambangan terutama sebagai sumber pendapatan keuangan baru dan pencipta lapangan kerja. Beberapa negara berkembang sekarang malahan mengubah undang-undang mereka, melunakkan peraturan negara mereka dan menawarkan perjanjian pajak yang murah untuk menarik TNCs masuk ke negara mereka. Sebaliknya perusahaan pertambangan TNCs "sedang membangun kembali kontrol mereka atas perusahaan-perusahaan lokal di negara tuan rumah".[5] Karena tergiur oleh prospek keuntungan yang tinggi, TNCs memiliki dana besar untuk dihabiskan pada tahap eksplorasi pada saat pemerintah negara-negara berkembang membuka diri terhadap perusahaan asing dan saling bersaing dalam manarik TNCs untuk masuk ke negara mereka.

4 Mathiason, N., 'Zambia's new bid to cash in on copper', *The Observer*, 8 October 2007.

5 Moody, R., 'Mining the world: the global reach of Rio Tinto Zinc', *The Ecologist* (March/April 1996), pp. 46–52.

Budaya

Isu tentang pembangunan yang berkelanjutan bukan prioritas dari TNCs pertambangan. Sebagian besar ekonomi pertambangan berumur pendek (*short-lived*) dan nasibnya bergantung pada pasar yang sering tidak stabil. Terlepas dari manfaat mineral yang sangat penting bagi manusia, sebagian besar industri pertambangan membawa malapetaka terhadap budaya dan kehidupan masyarakat miskin serta alam lingkungan mereka. Faktor-faktor budaya merupakan sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat asli. Sebuah penambangan yang mengancam budaya mereka dapat dianggap sebagai ancaman yang sangat serius bagi kehidupan komunitas mereka. Hal ini sering kali hampir tidak dipahami oleh perusahaan-perusahaan pertambangan [dan bersikap tidak mau peduli].

Sebuah pemindahan (*displacement, resettlement*) berkaitan erat dengan budaya. Selama seratus tahun terakhir, pertambangan telah membuat sekitar 100 juta orang, sebagian besar dari mereka ini di negara berkembang, telah dipindahkan secara paksa dari tanah tempat mereka hidup dan bertani. Dalam banyak kasus, tanah yang menjadi lokasi pertambangan — merupakan kawasan hutan dan juga harus ditebang demi pertambangan. Tak terbilang banyaknya manusia di sekitar wilayah pertambangan yang telah menderita sakit akibat pertambangan:

Tambang menghasilkan pembuangan limbah besar, yang membahayakan kesehatan dan keselamatan, dan bisa, misalnya, turun mengalir besar-besaran dari gunung ke bawah di lereng-lereng bukit. Limbah-limbah yang dibuang dapat mencemari sumber-sumber air, baik air di dekat pertambangan maupun air yang letaknya jauh dari sebuah daerah kegiatan pertambangan. Ia berdampak serus pada kesehatan. Sebuah penyakit yang disebut *leishmaniasis*, yang disebarkan oleh agas (*sandflies*), terjadi di lebih dari 80 negara di dunia, dan disebarkan oleh kegiatan seperti pertambangan, pembangunan jalan, pembangunan bendungan, dan program pembangunan lainnya "yang membuat banyak orang berkontak dengan agas yang membawa sebuah parasite".[6]

---

6 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), *1996 Annual Report*, Geneva: WHO, 1996.

Walau pada saat awal, masuknya pertambangan dan personel-personel subkontraktor ke daerah pertambangan dapat memberikan dorongan bagi ekonomi lokal, tapi hal ini akan cepat berlalu dan meninggalkan dampak kerugian besar untuk jangka panjang. Meskipun ada protes dari masyarakat setempat, TNCs sering mengabaikan atau paling tepat tidak memedulikan dampak negatif pertambangan terhadap alam lingkungan dan budaya masyarakat setempat. Dampak pertambangan dapat melampaui daerah di mana ia dioperasikan dalam beberapa bentuk. Jalan raya, real kereta api, dan kota-kota bagi para buruh tambang harus dibangun, dam-dam untuk bangun listrik bertenaga air masuk sebagai sebagai bagian dari sebuah aktivitas pertambangan, dan aliran air serta tempat-tempat sakral masyarakat setempat bisa terkena dampak yang serius. Di Ghana, rasionalisasi pertambangan mengakibatkan lebih dari setengah para buruh tambang dipecat. Bagi buruh tambang yang masih bisa bekerja, sistem penggajian mereka bersifat diskriminatif. Buruh-buruh lokal orang Ghana sendiri mendapatkan gaji per bulan atau per hari sebesar sepersepuluh dari gaji buruh berkulit putih "untuk jenis pekerjaan yang sebanding atau pekerjaan yang sama," kata Thomas Akabzaa dari Sekretariat Jaringan kerja Dunia Ketiga yang berbasis di Afrika. Dia mengatakan bahwa banyak pertambangan besar di Ghana kini dioperasikan dengan penggalian pada permukaan tanah yang mengakibatkan penghancuran alam lingkungan. Selain ia menghancurkan hutan-hutan dan lahan-lahan pertanian yang luas dari masyarakat setempat, hal-hal lain seperti sianida, merkuri, sulfida, dan logam berat lainnya yang dihasilkan dan digunakan dalam pengolahan mineral bisa mencemari sungai, tanah dan udara [dan selanjutnya mengancam keselamatan masyarakat setempat].[7]

Penambangan tembaga dan emas secara besar-besaran di Pasifik telah membawa gaya hidup Barat yang tidak sedap dan tidak baik dalam pandangan masyarakat setempat. Sistem sosial tradisional telah terganggu oleh pengenalan uang, makanan impor dan alkohol. Pengerjaan kaum pria di

7 Kata sambutan pada Konsultasi Pertambangan dan Masyarakat Penduduk Pedesaan, London, May 1996.

lokasi pertambangan, di satu sisi bisa membawa kesempatan untuk berpartisipasi dalam ekonomi sistem uang tunai, namun di sisi lain juga meningkatkan beban pada pertanian dan kaum wanita yang tetap tinggal di desa-desa asal. Beban-beban kerja ekstra, kekerasan rumah-tangga dan penyalahgunaan alkohol menunjukkan bahwa kualitas hidup kaum perempuan sering kali memburuk sebagai akibat dari kegiatan penambangan. "Hubungan yang baik antara pribadi kini telah diganti oleh konsep kompetisi".[8] Menurut masyarakat setempat yang terkena dampak pertambangan:

> Kami khawatir bagaimana hak-hak yang dasar dan melekat pada kami sebagai penduduk asli di sini secara sistematis diinjak, diabaikan, dan dilanggar oleh ekonomi neo-liberal yang dominan melalui perusahaan-perusahaan transnasional mereka atas nama keserakahan dan profit.... Kehancuran udara, hutan, air tanah, dan wilayah atau kehancuran hidup kami tidak bisa dibenarkan sedikit pun.[9]

Perusahaan Tambang Terbesar Dunia (2006)

Nama Perusahaan	Nilai Pasar	Omzet	Laba Bersih/ US$juta
1. BHP Billiton, Australia/Inggris	137.202,1	32.153,0	10.450,0
2. Rio Tinto, Australia/Inggris	86.345,6	22.465,0	7.438,0
3. Vale do Rio Doce, Brasil	86.144,4	21.996,6	6.523,1
4. Anglo American, Inggris	77.953,3	33.072,0	6.186,0
5. Xstrata, Inggris/Switzerland	49.692,6	17.632,0	1.947,0
6. Anglo Platinum, Afrika Selatan	37.450,2	5.362,2	1.632,0
7. Barrick Gold, Canada	24.665,1	5.636,0	1.506,0
8. Freeport-McMoran, USA	23.763,0	5,790,5	1.456,5
9. Newmont Mining, USA	20.126,8	4.987,0	791,0

8 Melanesian Environment Foundation, 'Mining development, environ-mental pollution and social changes in Melanesia, Papua New Guinea', sebuah makalah yang dipresentasikan pada Konsultasi Pertambangan dan Masyarakat Penduduk Pedesaan, London, May 1996.

9 Dari Deklarasi Konsultasi Pertambangan dan Masyarakat Penduduk Pedesaan, London, May 1996.

Beberapa dari perusahaan tambang terbesar yang ditunjukkan pada tabel di atas merupakan perusahaan-perusahaan baru untuk daftar sejak tahun 1996. Sebagian dari perubahan itu terjadi sebagai akibat penggabungan (*merger*). Xstrata baru dibentuk pada tahun 2002. Pada awal 2008 terjadi serentetan aktivitas pengambilalihan dalam industri. BHP Billiton meluncurkan tawaran £75 miliar (sekitar Rp1.125 triliun) untuk saingannya Rio Tinto. Xstrata menjadi sasaran tawaran sebesar £40 miliar (sekitar Rp600 triliun) dari Vale do Rio Doce. Ini bisa menjadi pola untuk masa depan. Sejumlah perusahaan besar tampaknya akan semakin menjadi lebih besar.

Perusahaan

BHP Billiton merupakan hasil penggabungan pada tahun 2001 antara perusahaan *Broken Hill Proprietary* Australia (BHP) dan Billiton dari Inggris, sebuah perusahaan dengan latar belakang Afrika Selatan. Dengan 39.000 karyawan, BHP Billition memiliki lebih dari 100 operasi pertambangan di 25 negara di dunia. Perusahaan ini adalah ekstraktor (penggali) terkemuka sumber daya alam seperti besi, batu bara, bauksit, tembaga, dan minyak bumi. Ia juga menguasai sepertiga dari pertambangan uranium dunia [bahan utama pembuatan tenaga nuklear]. BHP Billiton telah mengambil bagian dalam kontroversi di Papua New Guinea, masalah masyarakat asli di Filipina, masalah pertambangan di kawasan hutan lindung di Indonesia, dan dalam perselisihan industri di Chile.

Kedekatan BPH Billiton dengan pemerintah negara tuan rumah bisa disaksikan pada tahun 2002 ketika pemerintah Papua Nugini mengesahkan undang-undang yang mencegah setiap instansi pemerintah Papua Nugini untuk mendukung setiap tindakan melawan BHP-Billiton sehubungan dengan tuduhan perusakan lingkungan hidup oleh pertambangan Ok Tedi, yang telah lama menjadi sumber kontroversi (lihat di bahan bawah ini).

Rio Tinto, (sebelumnya RTZ-CRA), perusahaan tambang terbesar kedua di dunia, lahir pada tahun 1995 ketika RTZ bergabung dengan Perusahaan CRA Australia. Perusahaan Rio Tinto dijalankan bersama dari

London (Inggris) dan Melbourne (Australia). Kelompok perusahaan ini menguasai perusahaan tambang yang terlibat dalam penggalian aluminium, tembaga, berlian, dan berbagai mineral lainnya di berbagai lokasi di seluruh Australia, Amerika, Eropa, dan Afrika. Banyak aktivitasnya digolongkan sebagai pertambangan terbuka (*open-pitmining*). "Filosofi dari perusahaan ini didorong oleh keyakinannya bahwa keberhasilan dalam bisnis komoditas seperti logam seluruhnya bergantung pada kemampuan untuk memproduksi barang lebih murah daripada orang lain."[10] Rio Tinto telah dituduh melakukan perusakan lingkungan alam yang besar, penghindaran pajak dan perlakuan buruk terhadap para buruh tambang dan masyarakat lokal. Kasus-kasus meliputi tambang uranium Jabiluka di Australia, dan diskriminasi ras terhadap para buruh tambang kulit hitam di Namibia.[11]

Anglo American/AngloGold Ashanti adalah produsen paling terkemuka di dunia untuk tambang emas, berlian (De Beers), platinum dan kromit, produsen terbesar ketiga untuk tambang kobalt dan mangan, dan produsen terbesar keempat untuk tambang nikel. Dengan akarnya di apartheid Afrika Selatan, perusahaan ini lahir dari sebuah gabungan pada tahun 1999 dan ia beroperasi di Eropa, Afrika, Asia, Australia, dan Amerika [Utara dan Latin]. Meskipun anak perusahaannya AngloGold Ashanti telah resmi tidak menjadi bagian dari *AngloAmerican*, tapi ia [AngloGold] masing memegang berapa direktur dengan induknya dan masih dihitung oleh *AngloAmerican* sebagai salah satu dari "anggota kelompoknya" bilamana perlu. Perusahaan *AngloAmerican* berusaha menunjukkan dirinya sebagai model perusahaan yang bertanggung jawab [misalnya terhadap keadilan buruh, ketataan terhadap regulasi dan alam lingkungan]. Banyak dari masyarakat lokal yang terkena dampak negatif dari operasi pertambangan *AngloAmerican* merasakan sebuah perbedaan. Pada bulan Juni 2005 Pemerhati Hak Asasi Manusia (*Human Rights Watch*) menerbitkan sebuah laporan yang menuduh AngloGold Ashanti berkolaborasi dengan

10 'Deep appetite for deposits', *Financial Times*, 11 August 1993.

11 Corporate Watch, 'Mine All Mine', Newsletter 32: 6/7 (undated). <http://www.corporatewatch.org/?lid=2728> (accessed 21 November 2007).

panglima perang di Republik Demokratik Kongo (lihat bahan di bawah ini).

Xstrata, yang bermarkas di Swiss, didirikan pada bulan Maret 2002 dan telah menjadi pemain utama dan kontroversial dalam bisnis pertambangan di Filipina, Argentina, dan Kolombia. Penekanan perusahaan jelas dari situs internetnya: "Kami akan mengembangkan dan mengelola logam dan bisnis tambang dengan portfolio yang beranekaragam dengan tujuan tunggal memberikan industri terkemuka ini pengembalian keuntungan bagi para pemegang saham kami."[12]

Pertambangan kontroversial di Asia

Ok Tedi di Papua Nugini (PNG) dikembangkan oleh BHP pada awal tahun 1980-an pada sebuah wilayah kandungan emas dan tembaga terbesar di dunia, di mana bijih emas menutup di atas kandungan utama tembaga. Tempat pertambangan emas dan tembaga ini terletak tinggi di hutan tropis yang menutup Pegunungan Bintang PNG, sebuah daerah terisolasi yang dimiliki oleh dan menjadi wilayah pertanian dari para masyarakat petani setempat.

Dari awal, ada banyak hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Pada mulanya sudah direncanakan bahwa limbah tambang (tailing) nanti akan ditampung dulu dalam sebuah bendungan, dan bahwa setelah pengendapan partikel padat, air bersih akan mengalir menyusuri Sungai Ok Tedi, kemudian ke Sungai Fly yang menempuh perjalanan sepanjang 1.000 kilometer ke laut. Untuk bisa mewujudkan proyek besar demikian, perusahaan BPH memerlukan sebuah teknik luar biasa untuk membangun sebuah bendungan besar demikian di sisi gunung di mana hujan turun lebih dari 10 meter per tahun dan gempa bumi terjadi cukup sering. Bendungan penampung limbah tambang yang telah dibangun setengahnya runtuh pada tahun 1984 dan pertambangan jalan terus tanpa rencana pembuangan limbah.

12 Dari Xstrata website. <www.xstrata.com> (accessed 21 November 2007).

Tailings (limbah kotor tambang) dari 200.000 ton tembaga yang diproduksi setiap tahun terdiri atas bebatuan halus yang mengandung sulfida tembaga dan sisa sianida. Penumpukan *tailing* di Sungai Ok Tedi telah menyebabkan peningkatan pengendapan dasar sungai, banjir dan sedimen pada dataran banjir, yang pada gilirannya merusakkan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman sepanjang sungai. Lebih dari 2.040 km^2 hutan pada akhirnya terkena dampaknya yang merusakkan. Hutan-hutan ini akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa pulih kembali setelah penutupan pertambangan.

Sekitar 50.000 orang hidup dan bermukim di sepanjang Sungai Ok Tedi-Fly. Pengendapan dari tambang telah mengurangi jumlah ikan di sungai Ok Tedi dan Sungai Midle Fly sebesar 80%.[13] Perubahan dasar sungai telah meningkatkan laju aliran sungai dan menimbulkan jeram-jeram berbahaya — bahaya besar bagi penduduk setempat yang transportasi utama adalah kano [sampan panjang kecil tak bercadik]. Lumpur tebal yang menyelimuti pesisir sepanjang sungai telah menghancurkan kebun-kebun tradisional masyarakat setempat. Lumpur ini juga membuat masyarakat setempat sulit untuk turun ke sungai untuk mengambil air minum, mandi dan untuk menangkap ikan. Namun, seiring dengan kehancuran ini kemakmuran telah dinikmati banyak orang juga. Fasilitas pendidikan telah meningkat dan bisnis lokal sudah mulai menggeliat.

Pada tahun 1999, BHP melaporkan bahwa "kerusakan lingkungan besar" telah disebabkan oleh tambang, dengan 80 juta ton limbah terkontaminasi mengalir ke sungai setiap tahun. Pembuangan limbah ini menyebabkan kerusakan luas dan beragam, baik pada lingkungan dan secara sosial merugikan 50.000 jiwa manusia yang tinggal di 120 desa di wilayah hilir lokasi tambang di pegunungan. Bahan kimia dari *tailing* membunuh atau meracuni ikan di sungai, yang selanjutnya merusakkan semua spesies hewan yang hidup di wilayah itu serta membawa penderitan

13 Informasi dari Program Lingkungan Hidup PBB, *Waste from Consumption and Production: the Ok Tedi Case – a Pot of Gold*, UNEP, 2002. <http://www.vitalgraphics.net/waste/html_file/18-19_ consumption_oktedi.html> (accessed 22 February 2008).

bagi penduduk setempat. Pembuangan limbah tambang ke sungai mengubah dasar sungai, yang menyebabkan sungai yang relatif dalam dan lambat menjadi dangkal dan menimbulkan jeram-jeram yang deras, sehingga mengganggu dan membahayakan jalur transportasi masyarkat setempat. Banjir yang disebabkan oleh dasar sungai yang terangkat meninggalkan lapisan lumpur tebal dan terkontaminasi di dataran aliran sungai di mana terkonsentrasi perkebunan talas, pisang, dan sagu — yang merupakan makan pokok dari penduduk setempat. Sebuah wilayah sekitar 1.300 km^2 rusak karena lumpur ini. Sebuah hamparan seluas 700-km^2 dari sungai OK Tedi dilaporkan menjadi "mati secara biologis".[14]

Pada pertengahan Desember 2001, Undang-Undang Pertambangan Lanjutan Ok Tedi (*OK Tedi Mine Continuation Act*) dipresentasikan di Parlemen dan diikuti oleh pemungutan suara pada hari itu juga. Isi pokok dari undang-undang ini adalah sebuah ketentuan yang mengizinkan BHP untuk menyerahkan 52% saham tambang OK Tedy — yang dijadwalkan untuk ditutup tahun 2010 — dalam sebuah kepercayaan pengembangan sebagai imbalan bagi BHP untuk tidak perlu bertanggung jawab lebih lanjut atas kerusakan lingkungan.

Undang-undang ini "merupakan cara khas BHP untuk mendikte ketentuan-ketentuan kepada pemerintah PNG sejak kedatangannya ke Papua New Guinea," kata seorang tuan tanah, Gabia Gagarimab, "jika kita membiarkan BHP pergi begitu saja tanpa bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat yang telah dirugikan sekarang, akan datang saatnya di mana Papua Nugini akan menyesali keputusan ini selama-lamanya".[15] Yang jelas adalah bahwa tambang Ok Tedi akan meninggalkan warisan suram akan kerusakan lingkungan yang menghancurkan kehidupan generasi-generasi yang yang akan datang di PNG.

Kontroversi lain menyangkut tambang di pulau kecil PNG bernama Bougainville. Perang saudara, yang dipicu oleh operasi tambang tembaga-

14 *Multinational Monitor*, '1995's 10 worst corporations', December 1995.

15 Dikuti dalam World Rainforest Movement, 'Papua New Guinea: the power of mining corporations', *Bulletin*, No. 54 (January 2002). <http://www.wrm.org.uy/bulletin/54/PapuaNG.html> (accessed 30 January 2008).

emas di Pulau Panguna, telah memakan korban sekitar 10% dari penduduk pulau itu, sebagian besar dari mereka warga sipil tak berdosa. Tambang, yang sahamnya 53,6% dimiliki oleh Rio Tinto, telah "menghancurkan hutan tropis, menghancurkan semua kehidupan dari Sungai Jaba dan menimbun lumpur Ratu Augusta Bay hingga kedalaman 30 meter," kata Roger Moody.[16] Perasaan pilu di pulau itu bisa disimpulkan oleh Perpetua Serero, salah seorang aktivis perempuan terkemuka: "Kami tidak bisa menanam tanaman yang sehat lagi, adat istiadat dan nilai-nilai hidup kami sudah dirusakkan dan kami telah hanya menjadi penonton ketika tanah kami sedang digali, diambil dan dijual dengan nilai jutaan [dolar]".[17] Setelah tuntutan mereka untuk kompensasi ditolak, warga setempat yang marah mulai menyerang lokasi pertambangan pada tahun 1988 dan memaksanya untuk tutup. Pemerintah PNG mengirim pasukan ke sana dan ribuan nyawa hilang dalam konflik. Tambang yang telah memicu kontroversi masih tertutup hingga kini.

Tambang Freeport di Gunung Ertsberg di Indonesia adalah tambang tembaga terbesar kedua di dunia, dan juga telah terbukti juga mengandung deposit emas terbesar, senilai lebih dari US$40 miliar (sekitar Rp400 triliun). Wilayah sekitar tambang tertutup untuk orang luar, termasuk tertutup bagi suku setempat yang merupakan pemilik tradisional dari wilayah itu dan telah direbut dari mereka. Freeport adalah pembayar pajak yang besar di Indonesia. Perusahaan induk, Freeport McMoran Amerika Serikat, berbasis di New Orleans.

Pertambangan Tembaga Emas Tampkan di Mindanao, Filipina, adalah 62,5%n dimiliki oleh perusahaan Xstrata. Tampkan berpotensi menjadi salah satu lokasi kandungan tembaga-emas terbesar di dunia. Proyek ini dimulai pada tahun 1995 oleh sebuah perusahaan *Western Mining Cooperation* dari Australia. Pengelolaannya sedang direncanakan sekarang. Tapi menurut seorang uskup di Filipina, penambangan ini akan

16 Moody, "Mining the world".

17 Lydersen, K., 'Fighting corporate copper in Bougainville', *Inthesetimes*.com., 31 May 2007. <http://www.inthesetimes.com/article/3193/fighting_corporate_copper_in_bougainville> (accessed 22 February 2008).

mengancam ketahanan pangan di Mindanao. Lokasi penambangan yang diusulkan adalah di daerah DAS (Daerah Aliran Sungai) yang memasok air untuk lima sungai di empat provinsi. Kotabato Selatan dikenal sebagai sumber makanan dari Mindanao.

Uskup Gutierrez dari Keuskupan Marbel percaya bahwa penambangan tembaga-emas yang direncanakan di Tampkan akan menyebabkan pencemaran wilayah hilir Danau Buluan dan wilayah hulu Liguasan Marsh, yang pada gilirannya akan merusakkan lahan pertanian dan perikanan. Selanjutnya, proyek pertambangan ini akan berdampak serius pada sumber pangan dan mata pencaharian dari penduduk setempat — Muslim dan penduduk asli. Akhirnya, Uskup Gutierrez meningatkan, proyek pertambangan ini akan menimbulkan keresahan sosial yang besar.[18]

Pertimbangan-pertimbangan perubahan iklim mengemuka sehubungan dengan proyek pertambangan batu bara seperti tambang batu bara Phulbari di Bangladesh. Tambang ini adalah sebuah proyek GCM *Resources*, yang didanai oleh UBS [*Union Bank of Switzerland*] yang berbasis di Swiss, Barclays dan bank-bank lainnya. GCM *Resources* adalah sebuah perusahaan yang berbasis di London dengan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya di Bangladesh — *Asia Energy Corporation* (Bangladesh). Pertambangan bisa memicu pergolakan. sosial dan lingkungan, yang mengakibatkan 50.000 warga masyarakat harus dipindahkan secara paksa — dan sekitar 200.000 warga yang juga berpotensi untuk mengalami nasib buruk serupa — [dipindahkan secara paksa] — jikalau rencana ekspansi pertambangan berskala penuh direalisasikan. Phulbari adalah sebuah operasi *open-cut*, "yang berarti bahwa antara 140 sampai 300 meter, tanah perlu dibongkar untuk mengakses lapisan batu bara yang berada jauh di bawah tanah". Produksi energi dari batu bara menimbulkan dampak besar pada perubahan iklim, dan "menjadi sesuatu tidak pantas pada saat Bangladesh menyerukan kepada seluruh dunia untuk mengurangi emisi gas

18 Uskup Gutierrez, kata sambutan pada sebuah forum internasional forum di London, 17 September 2007.

rumah kaca".[19] Sudah ada perlawanan lokal yang kuat terhadap tambang batu bara ini. Pada bulan Agustus 2006, ketika 50.000 orang protes di luar kantor lokal perusahaan *Asia Energy*, sebuah kekuatan paramiliter menghujani kerumunan masa dengan peluru, yang menewaskan lima orang, termasuk seorang bocah berumur empat belas tahun.

Sorotan sedang diarahkan kepada para pendukung keuangan dari proyek serta perusahaan pertambangan batu bara sendiri. "UBS telah menunjukkan sikap tidak peduli terhadap kewajibannya bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders* seperti masyarakat lokal), secara selektif dan tidak bertanggung jawab bersembunyi di balik undang-undang kerahasiaan bank," kata Andreas Missbach dari Deklarasi LSM Berne yang berbasis di Swiss.[20]

Filipina

Filipina diperkirakan memiliki cadangan emas terbesar ketujuh dan cadangan tembaga terbesar kesepuluh di dunia. Tapi pada saat yang sama, pertambangan memiliki catatan buruk di Filipina sebagai akibat dari masalah sosial dan lingkungan yang disebabkannya. Catatan Program Lingkungan Hidup PBB (*United Nations Environment Programme* atau UNEP) mengungkapkan bahwa Filipina merupakan salah satu negara terburuk di dunia berkaitan dengan *tailings*, yang mengandung limbah beracun dari proses penambangan. Ini dapat memiliki konsekuensi bencana bagi masyarakat setempat dan lingkungan.[21]

Meskipun demikian, pemerintah Filipina, sejak tahun 1992, telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agresif untuk menghidupkan kembali industri pertambangan. Para kritikus mengatakan bahwa hampir tidak

19 BankTrack statement, 17 December 2007, Utrecht. <http://www.banktrack.org> (accessed 10 January 2008)

20 *Ibid.*

21 Lihat 'Mining in the Philippines: concerns and conflicts. Report of a NGO fact-finding trip to the Philippines', July–August 2006. <http://www.iucn.org/themes/ceesp/Wkg_grp/Seaprise/Mining %20in%20the%20Philippines%20-%20Concerns%20and%20Conflicts. pdf> (accessed 11 March 2008).

ada bukti yang memperlihatkan manfaat pertambangan bagi ekonomi Filipina pada tingkat nasional. Sedangkan pada tingkat lokal, bukti dampak negatif dari pertambangan terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial sangat jelas dan tersebar luas di banyak tempat. "Perampingan" dari proses aplikasi pertambangan telah menjadi identik dengan pelonggaran undang-undang lingkungan hidup yang dikombinasikan dengan upaya untuk melemahkan perlindungan hukum terhadap masyarakat penduduk asli.[22]

Undang-Undang Pertambangan yang baru disahkan pada tahun 1995 yang memberikan *segala* sesuatu yang diinginkan TNCs. Hal ini bisa dimengerti karena memang draff atau rancangan UU itu disiapkan dan disusun oleh TNCs. Sejak saat itu, TNCs telah mencoba untuk meloloskannya sebagai model juga bagi negara-negara berkembang lainnya untuk diikuti. Tapi UU ini menjadi salah satu UU yang sangat memihak kepentingan bisnis TNCs yang telah disahkan oleh pemerintah mana pun di dunia. UU ini antara lain menetapkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, 100% saham sebuah proyek pertambangan dapat dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan-perusahaan asing. Kedua, sebuah perusahaan asing dapat mengklaim wilayah seluas 81.000 hektar untuk proyek pertambangan di daratan atau 324.000 hektar untuk proyek pertambangan lepas pantai. (Padahal perusahaan-perusahaan domestik yang berbasis di Filipina dibatasi hanya sampai 8.000 hektar dalam satu provinsi dan 16.000 hektar di dalam negeri.) Ketiga, perusahaan-perusahaan asing dapat membawa pulang ke negara asal mereka semua keuntungan yang diperoleh, peralatan dan investasi. Keempat, perusahaan-perusahaan asing dijamin untuk tidak diambil alih (atau dinasionalisasi) oleh negara. Kelima, perusahaan-perusahaan pertambangan asing harus diberi prioritas untuk akses kepada sumber daya air dalam konsesi tambang mereka. Keenam, perusahaan-perusahaan pertambangan memiliki hak untuk mengusir penduduk desa dari rumah-rumah dan kebun-kebun mereka atau apa saja yang merintangi operasi pertambangan mereka.

22 *Ibid.*

Menyusul pemberlakuan UU pertambangan 1995 itu, perusahaan-perusahaan tambang menyatakan konsesi yang meliputi lahan seluas sekitar seperempat dari luas seluruh daratan Filipina. Banyak dari wilayah-wilayah yang diklaim untuk pertambangan merupakan tanah leluhur dari 8,5 juta penduduk asli dan dari penduduk Moro (Muslim). Sebuah sumber menyebutkan bahwa Program Pembangunan PBB atau UNEP dan lembaga-lembaga internasional lainnya "telah mendanai — dan mendorong — pemerintah Filipina untuk menarik investor asing untuk sektor pertambangan, meskipun operasi pertambangan mereka menelantarkan banyak orang miskin di negara-negara miskin karena mereka dicabut dari tanah dan mata pencaharian mereka".[23]

Pemerintah Filipina telah berada di bawah tekanan terus-menerus dari masyarakat dan mendesaknya untuk mencabut kembali UU [yang memihak TNCs] ini. Tapi perusahaan-perusahaan pertambangan tetap berkelit. Mereka, misalnya, menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan lingkungan dalam UU Pertambangan Filipina Tahun 1995 itu sebanding dengan praktik-praktik terbaik di seluruh dunia, dan menyarankan bahwa komitmen pemerintah untuk mengembangkan industri pertambangan emas dan tembaga secara luas di Filipina akan berada dalam bahaya jika pemerintah menyerah terhadap tekanan hijau [kelompok environmentlist dan aktivis penegak hak-hak asasi manusia].

Kelompok aktivis lingkungan hidup dan masyarakat penduduk asli telah melawan pemerintah dan TNCs dengan menyerukan bantuan internasional untuk menghentikan ekspansi pertambangan yang menggila di Filipina. Mereka mengatakan bahwa di sebuah wilayah, yaitu daerah Cordillera, UU Pertambangan/1995 bisa mengancam mata pencaharian dari 100.000 penambang berskala kecil yang kini dilarang oleh perusahaan dari kegiatan menambang di tanah yang mereka sudah gunakan selama berpuluh-puluh tahun. Kelompok-kelompok masyarakat di Filipina tetap terus berkampanye melawan piagam TNC ini — UU

23 Corpuz, C., Jr and C. Links, 'Mining standoff in the Philippines', press release, World Development Movement, London, November/December 1996.

Pertambangan/1995 — dan pada tahun 2004 berusaha menyatakan UU ini tidak konstitusional.

Akan tetap pada bulan Desember 2004, Mahkamah Agung Filipina menyatakan bahwa UU ini tidak bertentangan dengan konstitusi Filipina. Masyarakat penduduk asli dan kelompok-kelompok peduli percaya bahwa perlawanan mereka semakin dibenarkan ketika entri, re-operasi, atau perluasan perusahaan pertambangan menjadi ancaman yang mencolok bagi masyarakat, khususnya kepada masyarakat penduduk asli dan lingkungan hidup.

Mereka menunjuk pada operasi ketat dari *TVI PacificInc*, sebuah perusahaan pertambangan Kanada yang berencana untuk menempatkan US$12 juta (sekitar Rp120 miliar) investasi tambahan ke pertambangan seng dan tembaga di Gunung Canatuan di Mindanao Barat. Daerah ini merupakan bagian dari tanah leluhur masyarakat penduduk asli Subanen yang telah diberi sebuah Sertifikat Gelar Wilayah Leluhur (*Certificate of Ancestral Domain Title* atau CADT), sebuah dokumen yang menyatakan hak Suku Subanen atas tanah yang TVI klaim untuk pertambangan. Karena ketidakmampuan dari sertifikat seperti ini untuk melindungi hak atas tanah leluhur masyarakat penduduk asli, dan juga karena kenyataan pemerintah sudah dikooptasi oleh kepentingan perusahaan-perusahaan pertambangan transnasional,"para penduduk Suku Subanen dipindahkan secara paksa dari tanah leluhur mereka, operasi penambangan dari perusahaan-perusahaan pertambangan asing dinyatakan benar secara konstitusional".[24]

Pada bulan Januari 2006, para Uskup Katolik di Filipina mendesak pencabutan Undang-Undang Pertambangan 1995:

> Kami percaya bahwa Undang-Undang Pertambangan menghancurkan kehidupan. Hak untuk hidup orang tidak terlepas dari hak mereka terhadap sumber-sumber makanan dan mata pencaharian. Membiarkan kepentingan perusahaan pertambangan besar untuk menang atas hak masyarakat terhadap

24 Mines and Community website, press statement, 29 October 2005. <http://www.minesandcommunities.org/Action/press790.htm> (accessed 22 February 2008).

> sumber-sumber kehidupan ini sama dengan melanggar hak-hak mereka untuk hidup. Selain itu, pertambangan mengancam kesehatan masyarakat dan keselamatan lingkungan melalui pembuangan limbah dan *tailings* yang tak bertanggung jawab di sungai dan laut.... Kita melihat tidak ada bantuan yang terlihat... keuntungan ekonomis pertambangan yang dijanjikan oleh perusahaan-perusahaan transnasional tidak sebanding dengan pemindahan penduduk secara paksa dari komunitas-komunitas mereka terutama di kalangan saudara-saudari kita penduduk asli, risiko terhadap kesehatan dan mata pencaharian dan kerusakan lingkungan yang besar.... Kebudayaan masyarakat penduduk asli juga sedang dihancurkan oleh masuknya perusahaan pertambangan.[25]

Afrika

Sejak awal tahun 1990-an, lebih dari 30 negara di Afrika telah membuka pintu mereka bagi perusahaan-perusahaan pertambangan internasional, dan pemerintah telah dengan cepat menjual BUMN di bidang pertambangan. Keadaan umum di mana di negara-negara ini belum ada undang-undang yang mengatur pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup sungguh menggairahkan TNCs. Pemerintah negara-negara Afrika ini telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan berhubungan dengan industri pertambangan tanpa mempertimbangkan [aspek-aspek pentingnya perlindungan dan pelestarian] lingkungan.Orang-orang Afrika saat ini sedang memikul akibatnya, tetapi pada saat yang sama mereja juga berusaha memberikan perlawanan.

Di Negara Namibia, antara tahun 1976 dan 1982, tambang uranium dari perusahaan RTZ [Rio Tinto Zinc) di Rossing mengejar produksi untuk memenuhi kontrak nuklir. Dua puluh tahun kemudian, para buruh tambang di Rossing tampaknya telah membayarnya dengan kesehatan mereka. Serikat Buruh Tambang Namibia mengklaim bahwa ratusan buruh tambang di Rossing [milik perusahaan RTZ] sekarang menderita

---

25 Konferensi Para Uskup Katolik Filipina: sebuah pernyataan bersama tentang isu dan keprihatianan pertambangan, 29 Januari 2006.

sakit paru-paru dan kanker yang disebabkan oleh kondisi kerja mereka yang memprihatinkan antara tahun 1976 dan 1982.

Sebuah pertambangan batu besi titan (*ilmenite* atau *titanium dioxide ore*) senilai US$585 juta (sekitar Rp5.850 miliar) di Fort Dauphin, Madagaskar, yang dioperasikan oleh Pertambangan SA QIT (Quebec Iron & Titanium) di Madagaskar — sebuah anak perusahaan dari perusahaan induk Rio Tinto — adalah yang pertama dari serangkaian proyek yang direncanakan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan transnasional dan Bank Dunia di Madagaskar untuk mengeksploitasi cadangan-cadangan mineral di sana. Bank Dunia mengklaim bahwa pengembangan, atau lebih tepat, eksploitasi pertambangan mineral akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Madagaskar. Akibatnya, lebih dari 1.000 orang Madagaskar kini telah menjadi korban dari dampak proyek pertambangan ini secara permanen, dan bagian pendapatan bagi pemerintah Madagaskar juga tidak seberapa besar.[26]

Proyek pertambangan di Madagaskar ini mengharuskan pembongkaran fragmen-fragmen hutan yang langka sepanjang pesisir pantai dan di wilayah daratan lainnya. Banyak orang telah kehilangan tanah karena penambangan, pelabuhan, dan jalan-jalan besar menuju lokasi proyek pertambangan. Sejumlah masyarakat Madagaskar yang lain telah kehilangan tempat-tempat pemakaman leluhur dan yang lain harus mengungsi tinggalkan rumah-rumah mereka. Pada akhir 2006, frustrasi karena pembayaran kompensasi yang terlambat, yang diperparah oleh kurangnya informasi, menyebabkan masyarakat Madagaskar yang telah terlantar memblokade pembangunan jalan pelabuhan baru dan menuntut ganti rugi diberikan bentuk tunai langsung. Sebuah laporan yang dibuat oleh Institute Panos menemukan bahwa banyak masyarkat sederhana di Madagaskar memiliki pengetahuan sangat sedikit tentang seluk-beluk proyek

26 Lihat 'Rio Tinto's Madagascar mining project', Friends of the Earth press release, 24 October 2007. <http://www.foe.co.uk/resource/press_releases/rio_tintos_madagascar_ mini_22102007.html> (accessed 10 January 2008).

pertambangan yang sedang berlangsung di wilayah mereka dan alasan-alasan mengapa [dan untuk siapa] proyek ini.[27]

Republik Demokratik Kongo (DRC) memiliki cadangan mineral yang luas, termasuk emas, berlian, 10% dari tembaga dunia dan lebih dari sepertiga coltan yang digunakan dalam pembuatan ponsel. Perusahaan AngloGold Ashanti sedang mengeksplorasi pertambangan di wilayah timur-utara DRC — bagian dari negara ini yang sering dilanda konflik. Namun, sejak Maret 2007, negosiasi kontrak pertambangan baru ditangguhkan karena harus menunggu publikasi dari tinjauan pemerintah atas kontrak pertambangan yang masih berlaku.

Untuk beberapa negara di Afrika, tambang mineral — dan bukan hasil pertanian — merupakan penghasil ekspor utama. Contohnya adalah Ghana di mana mineral-mineral yang diekstraksinya meliputi emas, berlian, mangan, dan bauksit. Sejak liberalisasi ekonomi Ghana pada pertengahan tahun 1980-an, semua pertambangan yang dimiliki negara dan dikelola oleh pemerintah negara telah diprivatisasi dan sektiar 200 TNCs di bidang pertambangan telah menyerbu masuk Ghana. Perkembangan sektor emas telah menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi Ghana sejak tahun 1985.

Penduduk Ghana di dekat sebuah tambang emas di Obuasi, 100 mil (sekitar 160 km) dari ibu kota Ghana, Accra, telah menderita dampak negatifnya secara sosial dan kerusakan lingkungan hidup mereka sebagai akibat dari penambangan emas oleh anak perusahaan Anglo American, kata sebuah laporan oleh ActionAid. Lebih lanjut ActionAid melaporkan bagaimana sungai-sungai dan kali air telah tercemar oleh arsenik, besi, mangan, dan logam berat dari aktivitas pertambangan emas masa lalu oleh anak perusahaan Anglo American, AngloGold Ashanti, dan pendahulunya perusahaan Ashanti Goldfields. Sungai-sungai yang sebelumnya digunakan oleh ribuan penduduk desa di Ghana untuk air minum, memancing ikan dan irigasi, kini tidak bisa digunakan lagi. Penduduk Ghana juga

27 Panos Institute, 'A mine of information?', London, October 2007. <http://www.panos.org.uk/PDF/reports/madagascar_mining.pdf> (accessed 10 January 2008).

mengatakan bahwa kasus-kasus baru pencemaran air dan banjir masih terus terjadi.[28]

Operasi tambang lubang terbuka (*open-pit mining*) Taparko-Bouroum di Negara Burkina Faso mulai menghasilkan produksi komersialnya pada bulan Oktober 2007. Perusahaan High River Gold yang bermarkas di Kanada berharap bahwa 140.000 ons [sekitar 4.000 kg atau 4 ton, kalau 1kg = 35,27 ons] emas akan ditambang pada tahun ketiga produksi. Pertambangan ini menandai kebangkitan industri pertambangan emas di Burkina Faso, karena ia merupakan pertambangan emas pertama yang dioperasikan secara komersial di negara ini sejak tambang emas terakhir ditutup pada tahun 1999," kata perusahaan High River Gold. Proyek penambangan ini diperkirakan akan berumur tujuh tahun. Perusahaan mengatakan bahwa proyek tersebut akan mendapatkan keuntungan dari pasokan air sepanjang tahun dari sebuah sungai besar. Tidak disebutkan apakah tindakan penggunaan air oleh perusahaan ini akan menyebabkan pengurangan debit air untuk keperluan pertanian dan rumah tangga masyarakat di daerah itu.[29] Selain itu, perusahaan High River Gold juga menjajaki tambang mineral di Bissa, bagian lain dari Burkina Faso, yang diharapkan menjadi dua atau tiga kali lebih besar [dari tambang emas Taparko Bouroum]. Beberapa perusahaan pertambangan emas lainnya sedang melakukan pengembangan industri pertambangan di Burkina Faso.

Amerika Latin

"Sebelumnya ada air di lembah sungai ini. Sekarang, air sudah tak ada sama sekali," demikian kata wakil presiden komisi pembangunan akar rumput

28 'Gold mining companies accused of abuse in Ghana', ActionAid, 2006.

29 Frank Jomo, 'High River achieves commercial gold production at Taparko-Bouroum', Mineweb, 26 September 2007. <http://www.mineweb.net> (accessed 10 January 2008). See also 'Etruscan's Youga gold mine nears completion', 3 October 2007. <http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2007/03/c8051.html> (accessed 10 January 2008).

di bagian wilayah Cajamarca, Peru.[30] Di daerah Cajamarce terdapat sebuah lokasi tambang emas terbesar di Amerika Latin, namanya Yanacocha. Orang-orang dari desa Combayo, sebuah desa pertanian di dekat lokasi tambang emas Yanacocha, mengatakan bahwa mereka telah mengalami kekurangan air akibat dari penambangan emas itu. Beberapa dari mereka melaporkan bahwa pemerintah Peru hingga saat itu belum memenuhi 11 butir janji kesepakatan yang ditandatangani dengan masyarakat desa Combayo dan perusahaan tambang pada bulan September 2006. Salah satu dari 11 janji itu adalah studi tentang keamanan sumber daya air setempat.

Proyek pertambangan Yanacocha dimiliki oleh perusahaan Newmont Amerika Serikat dan perusahaan Buenaventura Peru, dan merupakan tambang emas terbesar di Amerika Selatan. Di dekat Lembah Sungai Chonta, yang merupakan sumber air yang vital untuk masyarakat desa Combayo, ditemukan konsentrasi aluminium, arsenik, dan timah yang yang jumlahnya berada di atas batas ketentuan internasional dan membuat air sungai itu berbahaya — tidak baik — untuk diminum oleh hewan [dan juga dengan sendirinya oleh manusia], kata laporan Korporasi Keuangan Internasional Bank Dunia tahun 2004–2005.[31]

Proyek tambang emas Yanacocha telah secara signifikan menurunkan kuantitas air di sungai sekitar, kata sebuah studi oleh perusahaan Kolombia, INGETEC. Studi ini menemukan bahwa perusahaan-perusahaan pertambangan mengatakan bahwa volume air yang mereka gunakan untuk memproses mineral tidak banyak dibandingkan dengan air yang diperlukan untuk pertanian masyarakat setempat — sebuah sikap yang sulit dibantah.

Antara tahun 1993 dan 2004, Yanacocha memproses 624.800.000 metrik ton mineral dengan sekitar 125 juta meter kubik air. Jumlah air sebanyak ini sama dengan jumlah air yang dikonsumsikan oleh sebuah kota

30 Salazar, M., 'Water more valuable than gold', Latin America Press, 4 November 2007.

31 Dari International Finance Corporation website. <www.ifc.org> (accessed 10 January 2008).

berpenduduk 6,5 juta orang selama satu tahun, kalau diperkirakan 50 liter per orang, demikian menurut sebuah studi oleh Kelompok Pembentukan dan Intervensi untuk Pembangunan Berkelanjutan yang disebut Grufides, yaitu sebuah LSM yang berbasis di Cajamarca. LSM Peru Red Muqui, yang anggotanya juga termasuk Grufides dan lembaga-lembaga nasional dan lokal lainnya yang membela masyarakat yang terkena dampak negatif pertambangan, mengatakan bahwa semua tambang terbuka yang menggunakan proses kimia seperti lixiviation oleh sianida (seperti yang dilakukan Pertambangan eams Yanacocha) adalah "sangat meracuni" [lingkungan, tanah, dan air].

"Pertambangan merusakkan sumber air, entah karena air bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain untuk memisahkan mineral dari bahan-bahan bumi lainnya, yang sering dapat ditemukan di dasar sebuah danau, atau karena air dibelokkan penggunaan untuk pengolahan logam," kata Patricia Rojas dari Grufides, yang memimpin studi tentang pertambangan dan air.[32]

Di Honduras, pertambangan emas Lembah Siria, yang dioperasikan oleh perusahaan Goldcorp dari Kanada, menghasilkan sekitar satu gram bijih besi dari setiap metrik ton batu yang ditambang. Untuk mencapai hasil sejumlah ini, dibutuhkan peledakan setengah dari sebuah gunung menjadi puing-puing, lalu menggiling batu-batu itu menjadi potongan-potongan halus, dan kemudian menuangkan larutan air dan sianida di atas tumpukan-tumpukan yang dihasilkan itu untuk mencuci emas atau memisahkan emas dari bahan bebatuan yang lain yang tidak bermanfaat.

Tambang ini mulai produksi pada tahun 2000. Warga masyarakat asli di sekitar pertambangan itu dipindahkan ke lahan-lahan lain yang telah disiapkan dan dimiliki oleh perusahaan. Tak lama kemudian, masalah kesehatan segera muncul karena penggalian dengan sistem peledakan menyebar debut-debut terkontaminasi logam berat ke masyarakat desa-desa terdekat. Penduduk desa sekitar lokasi pertambangan mengalami

---

32 Lihat websites<http://www.cao-ombudsman.org/pdfs/Chap_2.pdf> and <http://www.grufides.org> (accessed 22 February 2008).

berbagai penyakit kulit dan tenggorokan, dan jumlah ibu yang mengalami keguguran kandungan dan melahirkan anak cacat meningkat. Penggunaan air yang begitu tingggi dari pertambangan emas ini telah mengeringkan beberapa air kali di wilayah sekitarnya dan memaksa penduduk asli di daerah itu untuk mengandalkan air pada sumur bor dan air sumur ini pun banyak yang telah terbukti terkontaminasi oleh residu logam berat dari tambang. Pada bulan Januari 2005, Kantor Negara Honduras dari Penuntut Khusus yang berhubungan dengan masalah Lingkungan Hidup menyerukan supaya diadakan penyelidikan yudisial untuk perusahaan tambang Lembah Siria "atas kejahatan merusakkan lingkungan, kejahatan merusakkan hutan dan kejahatan merampas air".[33]

Tambang San Martin di Honduras dimiliki oleh Entre Mares, sebuah perusahaan Honduras yang sepenuhnya dimiliki oleh Glamis Gold, sebuah perusahaan yang dimiliki bersama oleh Amerika Serikat-Kanada. Tambang ini adalah tambang dengan sistem operasi terbuka (*open-pit mining*) aktif sejak tahun 2001. Warga di Lembah Siria, di mana tambang beroperasi, sedang mengalami masalah kesehatan secara umum akibat operasi pertambangan. Mereka telah menderita berbagai penyakit serius: penyakit-penyakit kulit jenis baru yang tak dikenal [oleh dokter], rambut rontok, penyakit pernapasan yang akut, serta sejumlah masalah kesehatan mental. Bukti yang dikumpulkan oleh para medis profesional dan kelompok studi ilmiah independen telah diterima oleh hampir semua orang kecuali oleh mereka yang secara langsung menikmati keuntungan pertambangan.

Selain masalah kesehatan, pelanggaran lain yang disebabkan oleh tambang termasuk kontaminasi, polusi udara, penebangan ilegal atas ribuan pohon dan mengubah aliran beberapa sungai. Kantor Kejaksaan Khusus secara resmi menuduh perusahaan Entre Mares telah melakukan tindakan kejahatan seperti perampasan air, merusak hutan dan tidak me-

33 Heinberg. R., 'The future is Green', November 2007. <http://greenfuture.blogspot.com/2007/11/resource-exhaustion-human-price.html> (accessed 10 January 2008).

matuhi otoritas publik/pemerintah negara. Kantor Kejaksaan ini berhasil menuntut penangkapan perwakilan Entre Mares Simon Pridway, seorang warga negara Kanada. Namun surat perintah penangkapan itu tidak pernah dilakukan, karena "investigasi masih berjalan terus". "Sistem peradilan di Honduras cenderung untuk tidak bekerja untuk orang-orang miskin. Dalam banyak kasus, para investor adalah yang selalu dilindungi.

"Sungguh, apa yang terjadi di (lembah) Siria mengerikan. Hal ini sungguh menyakitkan hati dan membuat orang ingin menangis saja setelah menyaksikan ketidakpedulian pemerintah terhadap pelanggaran hukum, penyakit-penyakit, dan bencana yang disebabkan oleh perusahaan tambang. Kita harus bersuara; negara kita sedang dihancurkan [oleh industri tambang asing]," kata Dokter Juan Almendares, pemimpin tim medis.[34]

Emas

Lebih daripada logam-logam lainnya, emas memberikan contoh kasatmata soal jurang besar antara mereka yang menggalinya dari tanah dan mereka yang memakai dan menggunakannya. Emas telah lama dikaitkan dengan kekayaan. Sekitar 85% dari emas diolah hingga menjadi barang perhiasan.

Emas juga merupakan sektor yang paling menguntungkan dari industri pertambangan. Namun kondisi dan daerah-daerah di mana emas diproduksi, dan dampaknya pada masyarakat di daerah pertambangan emas, adalah sebuah dunia yang jauh dari kegemerlapan yang memesona. Penindasan terhadap buruh tambang emas adalah sejarah suram peradaban manusia: mereka dibayar upah rendah untuk bekerja dalam kondisi yang tidak aman dan sering berada dalam lingkungan logam yang rawan menimbulkan pelbagai penyakit.

Pertambangan emas adalah sebuah kegiatan yang berisiko tinggi yang dapat merusakkan kesehatan dan alam lingkungan yang sangat besar. Penggalian emas mengharuskan pemindahan miliaran ton bebatuan,

---

34 Dari Revistazo website. <http://www.revistazo.com/Articulos/home.php> (accessed 22 February 2008).

menghilangkan pepohonan, tanah lapisan atas [yang lazimnya subur untuk pertanian] dan vegetasi, dan "juga mengharuskan penggunaan entah sianida atau merkuri. Sekitar tiga dari empat buruh tambang emas di Filipina yang terkena merkuri selama beberapa waktu menunjukkan gejala keracunan".[35] Pada pertengahan tahun 1995, tambang emas terbesar kedua di Amerika Selatan, yaitu Omai di Guyana, pecah dan tiga juta meter kubik air yang tercemar sianida dan residu-residu lainnya, termasuk logam-lobal berat, mengalir tumpah keluar. Tambang ini sebagian besar dimiliki oleh perusahaan Kanada Cambior Inc., dan *Golden Star Resources*. Pemerintah Guyana mengumumkan daerah itu sebagai zona bencana, dan sebuah laporan mengatakan bahwa kehidupan di dua sungai yang terkena tumpah beracun itu rusak serius. Beberapa orang dirawat di rumah sakit yang diperkirakan karena keracunan sianida, sementara sejumlah penduduk yang lain mengeluh mulut melepuh setelah minum air yang tercemar mercury atau sianida. Ada bahaya bahwa logam beracun ini — mercury dan sianida — mungkin masuk dalam rantai makanan seperti ikan menelan mikro-organisme yang telah tercemar [lalu manusia makan ikan itu dan akhir mercury atau sianida masuk tubuh manusia]. Enam bulan setelah tumpahan itu, tambang emas tetap dibuka kembali.

Pendapatan dari tambang emas membawa keuntungan bagi sejumlah negara berkembang, tetapi sering dibayar dengan sebuah harga tinggi. Negara pulau Fiji bisa menjadi contoh. Industri pertambangan emas di Fiji tetap bertanggung jawab untuk berbagai macam masalah kesehatan dan bencana ekologi/lingkungan — seperti kebocoran kolam dari sisa-sisa mineral racun berbahaya, pengotoran udara dan air, dan daftar masalah kesehatan yang diderita buruh tambang dan keluarga mereka".[36]

Permintaan global akan emas tinggi dan pertambangan emas karenanya akan tetap ekspansif. Tempat-tempat kandungan emas kelas dunia tampaknya ada di lebih dari selusin negara Afrika termasuk, misalnya,

35 Panos Institute, 'A mine of information?'

36 Emberson-Bain, A., *Panning Fiji's Gold Industry*, Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Ghana, Pantai Gading, Senegal, Burkina Faso dan Mali. Prospek untuk penemuan-penemuan tempat kandungan emas baru dikatakan sangat baik.

Sementara kegemerlapan emas di wilayah yang miskin mungkin membawa sukacita bagi neraca TNC, pertanyaannya adalah apakah orang-orang biasa di negara-negara ini, yang juga merupakan negara-negara termiskin di dunia, akan melihat manfaatnya untuk kehidupan mereka. Dengan harga emas dunia mencapai US$1.000 (sekitar Rp10 juta) per ons pada bulan Maret 2008, laju penambangan emas tetap akan meningkat. Pertambangan yang sebelumnya dianggap tidak ekonomis sekarang bisa dianggap layak. Tapi biarpun demikian, pertambangan tetap mengancam akan membawa lebih banyak polusi lingkungan [tanah, air, udara, hewan, tanaman, hutan dan manusia sendiri] dan perusakan mata pencaharian masyarakat miskin.

Efeknya pada wanita

Dampak kegiatan pertambangan terhadap wanita dapat sangat berat, namun jarang dipertimbangkan dalam perencanaan industri pertambangan. Menurut Kerima Mohideen, koordinator konferensi internasional tentang perempuan dan pertambangan, kaum perempuan sering menanggung beban berat dari setiap proyek yang dibangun manusia. Kerusakan lingkungan yang disebabkan ole pertambangan sering merusakkan kesehatan wanita, merusakkan mata pencaharian tradisional, dan meningkatkan beban kerja kaum perempuan.

Keberatan kaum perempuan terhadap tambang sering kali diabaikan bahkan sekalipun mereka memiliki hak atas tanah. Masyarakat matrilineal di Bougainville, Papua Nugini, misalnya, memberikan kaum perempuan kata akhir dalam segala keputusan menyangkut penggunaan lahan pertanian dalam suku mereka. Tapi ketika perusahaan tambang tembaga Bougainville melakukan negosiasi pada tahun 1960-an untuk mengeksploitasi tambang tembaga di Panguna, perusahaan tambang tidak memedulikan hak kaum perempuan menurut hukum adat masyarakat setempat dan

hanya menandatangani perjanjian dengan kaum pria. Begitu perusahaan mulai melakukan kegiatan pertambangan waktu itu, perempuan daerah Bougainville berada di garis depan untuk menentang pertambangan. Perpetua Serero, ketua asosiasi pemilik tanah (lihat bahan di atas), menuntut ganti rugi dan akhirnya mendorong masyarakat pemilik tanah yang telah dirugikan melakukan perang gerilya.

Di Filipina, kaum wanita di Itogon berjuang untuk menghentikan pertambangan emas terbuka oleh perusahaan Benguet yang telah menambang pada lahan-lahan masyarakat setempat dalam skala kecil selama berabad-abad. Menurut Kerima Mohideen: "Sebagai kaum yang melahirkan anak, kaum wanita telah mengalami efeks sampingan yang menghancurkan dari polusi yang disebabkan oleh tambang terbuka dan smelter. Peneliti kesehatan Filipina di wilayah Cordillera telah mendokumentasikan peningkatan tajam dalam tingkat keguguran kandungan pada kaum ibu di sekitar lokasi tambang emas dan tembaga."[37]

Andaikan sebuah proyek pertambangan harus memindahkan sekelompok masyarakat dari desa mereka ke sebuah daerah lain, maka kaum wanita yang telah bekerja sebagai petani atau penggembala ternak sangat mungkin akan terpaksa mencari cara lain untuk mempertahankan hidup, termasuk dengan melacurkan diri — prostitusi. Di daerah-daerah demam-tambang emas di Brasil, perdagangan ilegal atas wanita dan anak-anak untuk tujuan seksual telah dipraktikkan sangat luas. Di Bolivia, ribuan wanita bekerja untuk mengatur *tailings* dari tempat-tempat pertambangan lama dan memilah mineral dari kotoran yang telah dibuang. Mereka sering bekerja dalam suhu yang dingin pada ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut dan kaki mereka telanjang, tanpa sendal atau sepatu, tenggelam dalam air-air yang penuh dengan zat kimia. Beberapa dari kaum wanita ini adalah janda-janda yang dipaksa untuk berkerja sebagai buruh tambang setelah sebelumnya suami-suami mereka tewas dalam kecelakaan sebagai buruh tambang atau meninggal karena penyakit yang berkaitan

37 Mohideen, K., 'Women undermined', World Development Movement, September/October 1996.

dengan racun tambang seperti *silikosis* [sakit paru-paru karena hirup bahan kimia yang bernama *silica*]. Proyek-proyek besar, seperti kompleks pertambangan besar di Cerro de Pasco di Peru, dan smelter di dekatnya di La Oroya, juga telah menciptakan daerah bencana lingkungan yang telah mengganggu kehidupan kaum perempuan.

Kesimpulan: pertambangan yang bertanggung jawab

Walaupun tampaknya masa yang akan datang ini tetap akan diwarnai ekspansi besar bisnis pertambangan TNCs, masyarakat yang akan menjadi wilayah pertambangan kemungkinan akan mulai menentang setiap aktivitas pertambangan baru, dan mereka bisa tunjukkan bahwa pertambangan bisa dihentikan jika pertambangan dioperasikan dengan cara yang membahayakan masyarakat setempat dan lingkungan mereka. Tetapi di pihak lain, perusahaan [termasuk TNCs] akan berjuang keras untuk mempertahankan kepentingan dan keuntungan mereka. Pertambangan di negara-negara berkembang telah menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan-perusahaan besar tapi tidak membawa keuntungan besar bagi pemerintah nengara-negara tuan rumah.

Pertambangan yang bertanggung jawab tidak akan melanggar hak-hak atas tanah, [lingkungan yang sehat dan berkelanjutan] dari masyarakat setempat. Sebaliknya, perusahaan pertambangan akan meminta persetujuan mereka sebelum penambangan dimulai. Bank Dunia dan IMF sesungguhnya membuat kekeliruan untuk memberikan pinjaman bagi operasi pertambangan kecuali setelah berkomunikasi dengan masyarakat lokal. Sebuah kode etik internasional pada pertambangan diperlukan untuk menjamin hak atas tanah dan tenaga buruh, dan standar lingkungan yang ketat. Tapi hal ini akan mungkin berjalan hanya kalau ada komisi pemantauan yang independen. Dunia boleh-boleh saja membutuhkan bahan-bahan material yang dihasilkan industri pertambangan, tetapi kebutuhan itu tidak bisa dicapai dengan mengorbankan orang-orang miskin dan hak-hak mereka.

Dari kodratnya, pertambangan adalah kegiatan yang berumur pendek. Ketika deposit mineral telah diekstrak habis, tambang ditutup. Biasanya orang, terutama perusahaan, tidak berpikir banyak tentang apa yang terjadi sesudahnya di tempat itu. Tampaknya masuk akal untuk menuntut bahwa ketika mereka telah kehabisan mineral tambang, perusahaan harus diwajibkan untuk mengembalikan lokasi yang sudah dihancurkan itu ke keadaan semula seperti sebelum penambangan dimulai [sesuatu yang hampir tak mungkin: gunung dan ratusan hektar hutan yang dihancurkan harus kembali seperti semula dengan biodiversitasnya? Tak mungkin! Itu hanya sebuah ilusi!]. Keadilan menuntut bahwa orang-orang di negara-negara berkembang yang kaya mineral tidak harus menjadi semakin miskin akibat pertambangan, atau melihat kekayaan negara mereka dijarah [oleh perusahaan transnasional asing]. Orang seharusnya tidak boleh membayar mineral dengan harga kehidupan mereka.

BAB 9

Barang-Barang Pabrik: Kemiskinan di Tengah Kemewahan

Pakaian, alas kaki, alat mainan, bahan kimia, peralatan elektronik dan peralatan transportasi adalah barang-barang pabrik (manufaktur) utama yang dihasilkan oleh TNCs, oleh anak perusahaan mereka dan subkontraktor-subkontraktor mereka di negara-negara berkembang. Di beberapa negara, afiliasi atau anak perusahaan TNCs mengusai lebih dari setengah total barang-barang yang diproduksikan oleh pabrik-pabrik. Namun hampir tidak ada statistik bisa memberikan data yang lengkap mengenai jumlah dan jenis barang-barang yang diproduksikan. Khususnya di negara-negara Asia — terutama Cina, Thailand, Bangladesh, India, dan Kamboja — bisnis TNCs di sana sangat besar dan dampaknya juga besar.

Statistik-statistik "tidak mengungkapkan dampak dari bentuk-bentuk baru dari rencana-rencana kontrak, di mana TNCs memperluas pengaruh mereka melintasi batas-batas," demikian kata Evers dan Kirkpatrick. Subkontraktor adalah salah satu rencana tersebut. "TNCs sering terlibat dalam desain, produksi dan perencanaan perusahaan [ekonomi] dari negara berkembang," kata Evers dan Kirkpatrick lebih lanjut.[1] Rencana seperti ini sudah biasa; dan TNCs suka akan hal-hal seperti ini karena mereka dapat melakukan kontrol sejumlah saham yang minimal — tanpa risiko bahwa mereka akan kehilangan uang dan juga tanpa investasi keuangan secara langsung. Dalam dua dekade terakhir kita menyaksikan sebuah pertumbuhan yang besar di mana TNCs menyubkontrakkan kegiatan

1 Evers, B., and C. Kirkpatrick, *New Forms of Foreign Investment in Developing Countries*, Bradford: University of Bradford Press, 1990, pp. 12–14.

bisnis mereka kepada perusahaan-perusahaan kecil di Asia dan Amerika Latin, dan "tampaknya juga di beberapa wilayah Afrika".[2]

Dengan subkontraktor komersial, sebuah produk dibuat dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh sebuah TNC dan setelah itu produk akan dijual di bawah nama merek korporasi asing bersangkutan. Perusahaan subkontraktor akan cenderung menekan upah tenaga buruh "karena subkontrak lazimnya dibuat dengan perusahaan-perusahaan kecil di mana upah yang relatif rendah biasanya dipraktikkan secara cukup dominan", demikian dilaporkan oleh sebuah studi di Kepulauan Fiji.[3] Masalahnya universal. Upah rendah, bahkan sering lebih rendah dari tingkat upah minimum resmi yang ditetapkan negara tuan rumah, jam-jam kerja yang panjang dan kondisi-kondisi lingkungan kerja yang buruk merupakan hal-hal yang umum terjadi di pabrik-pabrik di negara-negara berkembang yang telah disubkontrakkan [oleh perusahaan asing atau TNCs] untuk membuat alat mainan anak-anak, pakaian dan alas kaki (sendal, sepatu) untuk TNCs [dan akan dijual oleh TNCs di pasar-pasar internasional]. Banyak dari barang-barang yang di pabrik [di negara-negara berkembang ini] memiliki merek-merek berkualitas tinggi untuk dijual dengan harga tinggi di toko-toko pasar internasional. Namun praktik ini bisa berakibat pada eksploitasi tingkat tinggi, di mana tenaga-tenaga buruh yang membuat barang-barang ini menikmati keuntungan yang sangat sedikit. Karena umumnya, orang-orang yang dipekerjakan di pabrik-pabrik pembuatan barang-barang ini adalah anggota masyarakat yang paling rentan dan marginal. Pabrik-pabrik ini sering mempekerjakan kaum wanita, anak-anak di bawah umur, dan imigran karena umumnya kelompok pekerja ini gajinya bisa lebih murah. Upah perempuan biasanya lebih rendah dari upah laki-laki. Perempuan sering dibayar upah begitu rendah hingga tidak cukup untuk menutupi kebutuhan dasar mereka seperti perumahan, makanan, dan kesehatan bagi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka (lihat bahan tentang 'Pakaian' di bawah ini).

2 Mayne, R., 'Adjustment and small bisnises', *Appropriate Technology* (December 1995).

3 Evers and Kirkpatrick, *New Forms of Foreign Investment.*

Persaingan antara perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembuatan barang-barang pabrik di negara-negara berkembang sering kejam. David Korten menggambarkannya sebagai "perlombaan hingga ke dasar" (*race to the bottom*). Hampir tidak ada perusahaan yang mendapatkan kontrak dari salah satu pengecer besar tanpa mempekerjakan tenaga buruh anak-anak di bawah umur, praktik curang terhadap upah lembur, memaksakan kuota tanpa belas kasihan dan operasi pekerjaan-pekerjaan berbahaya."[4] Mempekerjakan buruk anak-anak untuk membuat barang yang diperlukan bangsa-bangsa Barat di pabrik-pabrik di negara berkembang, baik di perusahaan-perusahaan domestik maupun di perusahaan-perusahaan transnasional — merupakan sebuah praktik yang sangat menjijikkan. Masalah ini mulai disoroti sejak terbongkarnya kasus anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan di pabrik-pabrik pembuatan karpet atau permadani di India, Pakistan, dan Nepal (lihat bahan di bawah ini).

Pakaian

Ia menghabiskan ratusan miliar dolar setahun untuk pembuatan pakaian. Sebagian besar pakaian di pabrik di negara-negara berkembang, di mana gaji tenaga buruh sangat rendah. Sering kali mereka datang dari "zona-zona perdagangan bebas" aturan hukum longgar (tentang hal ini lihat bahan di bawah ini). Pada tahun 2004 lebih dari setengah dari impor garmen Uni Eropa berasal dari Cina, Turki, Rumania, Bangladesh, dan Tunisia.

Pakaian adalah sebuah produk dengan kerja intensif dan menggunakan teknologi rendah. Biaya tenaga kerja sering kurang dari 5% — kadang-kadang di bawah 1% — dari harga eceran produk bersangkutan. Industri pakaian menjadi terkenal karena praktik buruk yang disebut "*sweatshop*" — yaitu pabrik atau tempat kerja yang melanggar undang-undang tenaga kerja seperti praktik pemberian upah di bawah upah minimum, mempekerjakan anak-anak dan tak ada keselamatan di tempat kerja. Upah yang terlalu rendah, kerja lembur yang dipaksa, kondisi kerja yang tidak aman dan tidak sehat, dan tidak ada cuti hamil/bersalin bagi tenaga buruh wani-

---

4 Korten, D. C., *When Corporations Rule the World*, London: Earthscan, 1995, p. 229.

ta dan tidak ada jaminan bagi tenaga buruh untuk berserikat merupakan sejumlah praktik-praktik buruk yang berada di balik pembuatan sejumlah pakaian yang mempunyai merek keren.

Sebagian besar tenaga buruh di industri pakaian adalah perempuan dan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak gadis muda dari desa yang belum menikah. Kaum perempuan merupakan 85% dari tenaga buruh pabrik pakaian di Bangladesh dan 90% di Kamboja. Tenaga buruh perempuan yang tidak terampil atau tidak berkeahlian [tidak berpendidik tinggi] dilihat oleh perusahaan-perusahaan sebagai sebuah sumber upah murah dan tenaga kerja yang terbuang. Tenaga buruh perempuan sering kali tidak ada kontrak kerja [sehingga dapat diberhentikan kapan saja karena alasan-alasan apa saja], tak ada cuti bersalin atau asuransi kesehatan, dan bisa bekerja di pabrik hanya untuk beberapa tahun. Kecelakaan pabrik sering terjadi. Pada bulan April 2005, misalnya, pabrik baju *Spectrum Sweater* berlantai sembilan di Bangladesh, sebuah pabrik yang dibangun tanpa izin perencanaan, runtuh pada malam hari dan menewaskan 64 tenaga buruh yang sedang dapat giliran bekerja malam hari saat itu. Para korban mengatakan bahwa keluhan mereka tentang keadaan buruk dari bangunan pabrik itu sebelumnya diabaikan oleh manajemen.[5]

Banyak pakaian yang dijual di Eropa dan Amerika Utara dibuat di negara-negara berkembang yang pengerjaannya dikontrakkan oleh sebuah TNC kepada sebuah pabrik lokal. Baju-baju itu dijual dengan harga yang begitu murah kepada konsumen — termasuk konsumen orang kaya di Eropa — sehingga jelas bahwa mesti ada orang lain yang telah membayar biaya riil dari pembuatan pakaian tersebut yang dalam dalam praktiknya adalah produser atau kaum buruh pabrik [misalnya dengan menekan gaji buruh sangat rendah]. Jeans-jeans berkualitas tinggi yang dibuat di Bangladesh, misalnya, dijual di pengecer-pengecer besar di Inggris seperti toko Tesco hanya dengan harga £3.00 (sekitar Rp45.000) per potong.

---

5 Clean Clothes Campaign, 'Bangladeshi garment workers buried alive', press release, 12 April 2005. <http://www.cleanclothes.org> (accessed 31 January 2008).

Masalah juga terjadi seputar kontrakan. Pada bulan Oktober 2007 sebuah investigasi surat kabar *Observer* mengungkapkan bahwa anak-anak berumur 10 tahun di New Delhi telah dipekerjakan sebagai tenaga buruh pada pabrik pembuatan pakaian dalam kategori *sweatshop* untuk Gap Kids yang memiliki lebih dari 3.000 toko di seluruh dunia.[6] Perusahaan ini, yang memiliki kontrak-kontrak yang besar di India, menyatakan di situs web-nya di internet bahwa para tenaga buruh yang bekerja di pabrik-pabrik pakaian berhak untuk diperlakukan secara bermartabat dan berhak atas kondisi kerja yang aman dan adil.

"Perusahaan Gap barangkali merupakan salah satu pabrik pakaian dengan merek terbaik dan terkenal dengan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial, tetapi dalam praktik ia mempekerjakan (oleh subkontraktor yang akhirnya memasok rantai utama toko pengecer pakaian internasional) anak-anak kecil berumur 10 di *sweatshop-sweatshop* ilegal di India," kata Bhuwan Ribhu, seorang pengacara di Delhi. "Kenyataannya adalah bahwa sebagian besar perusahaan eceran melakukan hal yang sama, yaitu memotong biaya [serendah-rendahnya] dan tidak mempertimbangkan akibat-akibatnya."[7] Perusahaan mengatakan bahwa mereka telah menarik pakaian-pakaian yang dibuat oleh pekerja anak-anak dari pasar. New Delhi memiliki 15.000 pabrik garmen yang tidak diatur baik oleh undang-undang pemerintah.

Eksploitasi di industri garmen (pakaian) mengakibatkan persaingan sengit di antara para supplier untuk pesanan pakaian. Para pembeli, merek dan pengecer-pengecer besar membuat kontraktor-kontraktor saling berebut satu terhadap yang lain. "Lelang terbalik (*reverseauctions*) bisa membuat harga barang turun. Pesanan tidak bisa diramalkan dalam rentang waktu yang singkat. Pabrik garmen biasanya tidak dapat merencanakan atau mempertahankan beban kerja di pabrik secara tetap. Tenaga buruk sering harus bekerja dengan bermalam di pabrik untuk mengejar

---

6 McDougall, D., 'Child sweatshop shame threatens Gap's ethical image', *The Observer*, 28 October 2007.

7 *Ibid.*

batas waktu yang ditentukan. Kontraktor-kontraktor bisa menyewakan subkontraktor-subkontraktor lagi dan tenaga buruh lepas lainnya, yang berarti ketidakamanan dan peluang terjadinya pelanggaran hak-hak buruh semakin bisa terjadi. Tingkat-tingkat masalah [yang sering terjadi di industri garmen] sulit diketahui secara pasti. Pengungkapan satu dua masalah pelanggaran hak-hak kaum buruh merupakan sebagian kecil dari segudang masalah yang sesugguhnya. Selama ada permintaan pasar akan pakaian-pakaian murah, ada bahaya di mana pabrik-pabrik akan cenderung mempekerjakan tenaga murah termasuk tenaga kerja anak-anak di bawah umur.

Bangladesh kini telah muncul sebagai pemain utama dalam bisnis garmen, dengan biaya tenaga kerja yang berada di bawah Cina sebagai saingan utamanya. Para aktivis yang memperjuangkan hak-hak kaum buruh di Bangladesh telah memperingatkan konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi sebagai akibat dari gaji dan kondisi kerja dari tenaga kerja yang buruk. Upah minimum telah turun setengahnya lagi selama dekade terakhir. Frustrasi tenaga kerja bertumbuh, hingga bulan Mei 2006 hal ini memanas yang memicu terjadinya demonstrasi di Bangladesh akibat dari penurunan pembayaran upah buruh untuk setiap bagian dari pakaian yang diproduksi. Sepuluh butir tuntutan kaum buruh meliputi antara lain bayaran upah hidup yang layak, hak untuk berorganisasi, dan hak untuk dibayar cuti bersalin untuk kaum buruh perempuan.[8]

Pada bulan September 2007, terjadi demonstrasi kekerasan di pabrik-pabrik di Bangladesh yang membuat barang pakaian untuk perusahaan Tesco, di mana para kaum buruh melakukan aksi protes untuk menuntut upah lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik. Demonstrasi berlangsung di pabrik-pabrik yang dimiliki oleh Grup Nassa bagian produksi barang pakaian.

---

8 Labour Behind the Label, 'Who pays for cheap clothes? Five questions the low-cost retailers must answer', 5 July 2006. <http://www.labourbehind thelabel.org/resources/123-5questions> (accessed 31 January 2008).

Asia Selatan merupakan fokus dari kampanye-kampanye untuk menarik perhatian soal kondisi-kondisi *sweatshop*. "Para kaum buruh sering menderita karena bekerja dengan jumlah jam yang berlebihan, jam-jam kerja lembur yang tidak dibayar dan kondisi-kondisi tempat kerja yang berbahaya — tidak sehat — di bawah pengawasan bos-bos perusahaan yang anti terhadap adanya organisasi serikat kaum buruh. Supermarket-supermarket umumnya tidak peduli tentang hal-hal buruk seperti ini, karena pada dasarnya mereka didirikan hanya untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin [untuk diri mereka, untuk perusahaan]," kata Mark Osborn dari kelompok kampanye *No Sweat* [menentang pabrik-pabrik yang langgar hak kaum buruh]. Sebagai tanggapan atas semua ini, perusahaan Tesco mengatakan bahwa ia telah melakukan audit terhadap lebih dari 40 pabrik yang dioperasikan oleh subkontraktor-subkontraktor suppliernya di Bangladesh dan mengklaim bahwa standar-standar etika perdagangannya "telah memberikan kontribusi peningkatan standar hidup yang lebih tinggi bagi karyawan-karyawan yang bekerja di pabrik-pabrik subkontraktor kami di negara-negara berkembang".[9]

Pada tahun 2005, para buruh pada sebuah pabrik di Bangladesh, yang memproduksi garmen untuk Primark — sebuah pengecer yang berbasis di Inggris — dipecat dalam sebuah managemen konflik yang dipicu oleh seorang supervisor yang melakukan tindakan kekerasan secara fisik terhadap tiga karyawan karena melakukan kekeliruan dalam pekerjaan mereka.[10] Primark "mengoperasikan 173 toko di Irlandia — yang berdagang di bawah merek Penneys — di Spanyol dan Inggris".[11] Perusahaan Primark sendiri adalah anak perusahaan Asosiasi Makanan Inggris *(Associated British Foods)*, yaitu sebuah perusahaan transnasional pengecer makanan dan bumbu-bumbuan.

9 Buncombe, A., 'Tesco to investigate riots at Bangladeshi factories', *The Independent*, 24 September 2007.

10 Hickman, M., 'Asda, Tesco and Primark: where the clothes come from', *The Independent*, 8 December 2006.

11 Informasidari Primark website. <http://www.primark.co.uk> (accessed 8 February 2008).

Perusahaan Primark telah menandatangani perjanjian perdagangan internasional, di mana ia menyatakan bahwa ia tidak menggunakan mempekerjakan anak-anak di bawah umur atau *sweatshop*. Semua pekerja di pabrik-pabrik mereka harus dibayar "upah yang layak" (*livingwage*), yang berarti dengan upah bersangkutan mereka mampu menghidupi diri mereka sendiri dan masih memiliki uang sisa [untuk ditabung]. Semua pabrik harus memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan lingkungan akomodasi yang bersih pula. Akan tetapi, kendati telah menandatangi perjanjian perdagangan internasional ini, rekor perusahaan Primark, misalnya di Bangladesh di mana sebagian besar barang pakaian untuk perusahaan ini di pabrik, terus dikecam oleh kelompok pengamat hak-hak asasi manusia. Pada tahun 2004, 22 anggota serikat buruh pada Pabrik Asda, yang menuntut pembayaran upah lembur mereka yang sah, diduga telah dipukuli, dipecat, dan dipenjarakan atas dasar tuduhan palsu. Kaum buruh ini mengklaim bahwa pabrik mengharuskan pertukaran kerja 19 jam, jam kerja lembur mereka tidak dibayar, dan hak cuti kerja karena hamil buruh wanita tidak diakui.[12]

Pabrik-pabrik di negara-negara berkembang lainnya, termasuk Honduras, Maroko, Kamboja, Kolombia, Kenya, dan Zimbabwe, memproduksi pakaian untuk bisnis besar. Hanya nama negara bervariasi. Kondisi bersifat universal. "Saya ingin supaya orang-orang yang membeli pakaian ini mengetahui pengorbanan yang kami berikan dalam menghasilkan pakaian-pakaian ini," kata seorang mantan buruh pabrik garmen di Honduras.[13]

Beberapa usaha terpadu telah dibuat oleh LSM-LSM untuk menghimbau TNCs supaya lebih bertanggung jawab dalam tindakan mereka dan sejumlah bukti menunjukkan bahwa tekanan dari warga masyarakat sedang menunjukkan hasilnya. Kampanye Pakaian Bersih (*Clean Clothes Campaign* or CCC) didirikan pada tahun 1989 untuk mendukung perjuangan kaum buruh perempuan di pabrik-pabrik yang memproduksi

---

12 Labour Behind the Label, 'Who pays for cheap clothes?'

13 Oxfam, *Trading Away Our Rights*, Oxford: Oxfam, 2004, p. 48.

garmen di negara-negara berkembang dan di Eropa. CCC sekarang memfokuskan kampanyenya pada peningkatan kondisi kerja di industri-industri garmen secara umum dan pakaian olahraga. Kampanye ini berbasis di beberapa negara Eropa dan memiliki kelompok-kelompok proyek di India dan Bulgaria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana merek dan para pengecer mengejar keuntungan dengan mengorbankan hak-hak kaum buruh, dan dengan demikian berusaha memengaruhi pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur perusahaan-perusahaan dan menegakkan standar-standar perburuhan yang mereka telah setujui melalui konvensi internasional.

Dalam kampanyenya untuk meningkatkan kondisi-kondisi lingkungan kerja, CCC telah menyusun sebuah Piagam Perdagangan Garmen yang Adil (*Fair Trade Charter for Garments*), sebuah kode etik bagi pengecer-pengecer yang menjual pakaian di Belanda. "Gagasan utamanya adalah bahwa pengecer, sebagai subkontraktor dan pembeli, bertanggung jawab dan, melalui kebijakan mereka, mampu mewujudkan lingkungan dan kondisi-kondisi kerja yang lebih baik."[14]

Globalisasi dan persaingan sengit menyebabkan tekanan pada standar-standar perburuhan di Barat maupun di negara-negara berkembang. Karena dalam kenyataannya, eksploitasi terhadap tenaga kerja buruh tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang. Di Inggris, beberapa tenaga buruh di pabrik-pabrik garmen di East End dari kota London hanya diberi upah sebesar £1.00 (Rp15.000) per jam. Di Amerika Serikat, Departemen Tenaga Kerja menemukan 67% dari pabrik garmen di Los Angeles dan 63% di New York melanggar undang-undang upah minimum dan upah lembur.[15]

Kapas, bahan baku utama untuk buat jeans, merupakan sebuah tanaman yang kontroversial. Harga-harga jeans yang rendah telah

---

14 Informasi dari Clean Clothes Campaign website. <http://www. clean clothes.org> (accessed 8 February 2008).

15 Vegan Peace, 'Sweatshops and child labor – responsible shopping', 2008. <http://www.veganpeace.com/sweatshops/responsible_shopping.htm> (accessed 8 February 2008).

menyebabkan peningkatan yang besar dalam permintaan akan kapas dan dalam jumlah areal tanah untuk budi daya tanaman kapas. Diperkirakan, perkebunan kapas menempati sekitar 5% dari areal lahan pertanian yang sedang diolah di seluruh dunia — sekitar 34 juta hektar. Kelemahan tanaman kapas adalah bahwa ia sangat disukai hama penyakit. Dan karena itu dalam pembudidayaannya, pestisida digunakann paling banyak untuk penyemprotan kapas daripada pada tanaman-tanaman lainnya — sekitar 25% dari semua pemakaian pestisida dalam dunia pertanian. Bagi orang-orang yang hidup dekat dengan ladang kapas, hal ini sering menimbulkan masalah kesehatan. Padahal TNCs sebenarnya bisa mengurangi penggunaan pestida beracun ini dengan menggunakan kapas yang diproduksikan secara organik untuk pembuatan jeans. Tapi mereka telah menunjukkan minat yang sangat sedikit dalam hal ini.

Alas kaki

Fakta kemiskinan di tengah kemakmuran ekonomi dunia dapat dilihat terutama pada alas kaki [macam-macam jenis sepatu dan sandal]. Produksi [sepatu dan sandal] adalah industri padat karya, intensif, dan banyak dioperasikan di negara-negara berkembang, di mana industri ini sering kali menjadi sebuah sektor kunci. Industri ini dengan sendirinya menciptakan lapangan kerja dan uang, dan dapat menjadi batu loncatan untuk sebuah basis pabrik-pabrik lainnya.

TNCs sekali lagi memiliki keterlibatan yang cukup besar, di mana subkontraktor memainkan peran utama dalam pelaksanaannya. Sebagian besar dari industri alas kaki dewasa ini adalah sepatu olahraga — 'trainers', sebagaimana mereka lazimnya disebut. Padahal hanya sekitar 10% dari sepatu-sepatu ini benar-benar digunakan untuk olahraga. Perusahaan TNCs besar memimpin pemasaran dari sepatu Nike, Adidas, Hi-Tec, Puma, dan Reebok. Sekitar 99% dari sepatu bermerek atletik atau olahraga dibuat di Asia. Puluhan ribu orang Asia bekerja di pabrik-pabrik sepatu berkualitas tinggi yang sangat diminati oleh TNCs. Tenaga kerja kontrak perusahaan sepatu Nike telah berkembang menjadi 653.000 orang di lebih

dari 50 negara. Pesaing utamanya, Adidas, perusahaan sepatu orahraga terbesar kedua di dunia, membayar €3,200.000.000 (Rp41,6 triliun) untuk Reebok pada Januari 2006.

Pada tahun 1990-an, Nike dikritik keras oleh banyak pihak karena dugaan buruh upah rendah dan kondisi kerja yang buruk di pabrik-pabriknya. Sebagian besar dari subkontraktor pembuatan sepatu Nike berada di Indonesia, Korea dan Taiwan. Dalam menanggapi tuduhan yang dilancarkan oleh para buruh yang bekerja membuat sepatu Nike di pabrik-pabrik subkontraktornya di Indonesia, perusahaan Nike meng-adopsi kode etik sukarela pada tahun 1992, dan menjadikannya sebagai 'nota kesepahaman bersama' dengan semua supplier atau perusahaan sub-kontraknya di Indonesia untuk memastikan mereka menegakkan standar-standar etika bisnis perusahaan sepatu Nike.

Kerusuhan kaum buruh di Indonesia pada pertengahan tahun 1990-an mendorong meningkatkan kekuatan daya tawar para buruh pekerja, dan memaksa para pengusaha untuk membayar upah buruh dengan mengikuti standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan Nike dan perusahaan-perusahaan terkemuka lainnya menyetujui sebuah Kode Etik baru pada bulan April 1997 yang isinya meliputi kondisi kerja dan ketentuan-ketentuan kemungkinan untuk masuknya monitor luar [untuk memantau kinerja perusahaan]. Semua perusahaan Nike setuju bahwa jumlah maksimum jam kerja selama 1 seminggu adalah 60 jam dan bahwa semua perusahaan tidak akan mempekerjakan tenaga buruh yang berusia di bawah 14 tahun (lihat juga bahan di bawah ini).[16]

Perusahaan Nike telah membuat beberapa kemajuan dalam dekade terakhir dan hal ini terjadi sebagian besar karena tekanan publik. Tapi ada banyak hal yang masih harus dipenuhi oleh perusahaan Nike. "Apa yang mereka telah eliminasikan adalah eksploitasi super atau eksploitasi yang kelewat batas, dan sekarang mereka hanya turun ke tingkat eksploitasi yang wajar-wajar," demikian kata Medea Benjamin, direktur pendiri dari

16 Usborne, D., 'Nike swears off slave labour', *The Independent*, 15 April 1997.

Global Exchange, yang dalam hal ini mengacu pada Cina[17]. Benjamin mengatakan bahwa Nike sebenarnya mampu membayar upah yang lebih baik bagi para buruhnya di perusahahaan-perusahaan subkontraknya, dan bahwa perusahaan harus menghindari Cina dan negara-negara lain yang melarang adanya organisasi Serikat Buruh. Manajer-manajer Nike menyatakan bahwa mereka bisa berbuat lebih banyak untuk mendukung kebebasan berserikat dengan melibatkan Cina di dalamnya.[18]

Jeff Ballinger, direktur Media untuk Perubahan, sebuah organisasi aktivis di Toronto, mengatakan bahwa pegawai-pegawai eksekutif Nike seharusnya memberdayakan kaum buruh dan bukan sebaliknya. "Mereka sedang berseluncur dengan beberapa tanggung jawab sosial perusahaan yang telah disepakati oleh konsultan-konsultan yang mahal."[19] Global Exchange mengatakan bahwa perusahaan Nike "tetap tidak bersedia untuk mengatasi penyebab-penyebab pelanggaran *sweatshop*".[20] Ia sedang mendorong pemerintah-pemerintah kota AS untuk membeli produk-produk yang bebas dari *sweatshop*.

Laporan Oxfam tahun 2006, yang berjudul "Offside! Hak buruh dan produksi sepatu olahraga di Asia", mengungkapkan eksploitasi dan kadang-kadang penindasan yang keji terhadap para buruh Asia yang bekerja di pabrik-pabrik sepatu sepak bola dan kota-kotak olahraga yang bermerek global. Oxfam mengkritik perusahaan Adidas karena gagal memerintahkan perusahaan subkontraktornya di Indonesia mempekerjakan kembali 33 pekerja yang sebelumnya dipecat karena melakukan pemogokan selama sehari yang dinyatakan ilegal oleh Komnas HAM Indonesia.[21]

---

17 Read, R., 'Cina: at Nike plant, no sweatshop, plenty of sweat', *The Oregonian*, 27 June, 2005.

18 Global Exchange, Nike campaign. <http://www.globalexchange.org/campaigns/sweatshops/nike> (accessed 8 February 2008).

19 Read, R., 'Cina .plenty of sweat'.

20 Global Exchange, Nike campaign.

21 Oxfam, *Offside! Labour Rights and Sportswear Production in Asia*, Oxford: Oxfam, May 2006.<http://www.oxfam.org/en/policy/briefingnotes/offside_labor_report> (accessed 31 January 2008).

Karpet: tenaga kerja buruh anak-anak

India, Pakistan dan Nepal menguasai sebagian besar industri karpet atau permadani dunia saat ini yang dibuat dengan tangan (*handmade carpet industri*). Hampir semua karpet yang dibuat negara-negara ini diekspor, termasuk ke negara-negara Eropa dan dijual oleh perusahaan-perusahaan bisnis besar. Industri permadani adalah sebuah idustri yang paling banyak mempekerjakan tenaga kerja anak-anak di bawah umur. Anak-anak berusia 4 sampai 14 tahun diculik, diperdagangkan, atau terpaksa dijual karena lilitan utang [orangtua] atau dipekerjakan secara paksa. Mereka sering menderita kekurangan gizi, gangguan penglihatan dan kelainan bentuk [tubuh] karena duduk berjam-jam di gudang tenun karpet yang sempit. Mereka sangat rentan menderita penyakit pernapasan karena menghirup udara yang terkontaminasi serat-serat wol dan luka karena menggunakan alat-alat tajam.

Permadani adalah salah satu produk ekspor top dari Asia Selatan dan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak bagi orang-orang miskin. Jika eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur merupakan norma dalam industri utama dari sebuah negara, maka harapan untuk memutuskan siklus kemiskinan yang ekstrem amat kecil. Karena setelah diperdagangkan ke dalam satu bentuk kerja, ada kemungkinan kuat bahwa anak-anak di bawah umur ini kemudian dapat dijual lagi ke tempat lain dan ke sektor lain. Misalnya, sebagian besar anak-anak perempuan dari pedesaan Nepal, yang direkrut untuk bekerja di pabrik-pabrik karpet, diperdagangkan lagi ke dalam industri seks di perbatasan dengan India.

Di Pakistan, anak-anak yang orangtuanya mengambil uang di muka untuk pekerjaan mereka di pabrik karpet akan menjadi korban dari sistem perbudakan utang. Biasanya, tenaga buruh anak-anak hanya digaji setengah dari upah tenaga buruh dewasa. Tenaga buruh anak-anak juga tidak akan diizinkan untuk meninggalkan kontrak kerja sampai utang pinjaman orangtua dibayar lunas. Tenaga buruh dewasa kerap melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak ini, di mana sekitar seperempat dari

mereka adalah anak perempuan berumur 15 tahun atau di bawah usia 15 tahun.[22]

Pada pertengahan tahun 1980-an, sejumlah gerakan di India mulai berusaha memerangi eksploitasi ini. LSM-LSM India, UNICEF, sejumlah produsen karpet dan Dewan Promosi Ekspor Jerman menyiapkan sebuah proyek untuk merancang label yang disebut *'Rugmark'* dan semua produsen karpet tidak mempekerjakan tenaga buruh anak-anak harus melampirkan label *Rugmark* pada karpet produksi mereka. Gerakan ini kemudian melahirkan terbentuknya Yayasan Rugmark pada Oktober 1994.[23] Walaupun gerakan ini telah membantu mengurangi kasus eksploitasi tenaga buruh anak-anak, namun di tempat-tempat tertentu masalah mempekerjakan anak-anak di bawah umur tetap berjalan.

Alat mainan anak-anak

Alat-alat mainan juga merupakan arena bisnis besar bagi TNCs. Permintaan akan alat-alat mainan meningkat bersamaan dengan meningkatnya kemakmuran [untuk sekelompok masyarakat atau negara maju]. Anak-anak di Amerika Serikat rata-rata menerima alat-alat mainan dengan nilai sekitar US$300 (sekitar Rp3 juta) setiap tahun. Sebagian besar dari alat mainan yang paling laris dibuat oleh TNCs atau oleh perusahaan yang telah disubkontrakkan untuk memproduksinya.

Perusahaan-perusahaan transnasional mainan terbesar adalah 1) Perusahaan Mattel (USA) yang memabrikkan alat mainan atau boneka *Barbie*, *Barney*, *Disney*, *Fisher-Price*, dan *Scrabble*, 2) Perusahaan Hasbro (USA) yang memproduksikan alat mainan *Sindy*, *ActionMan* dan Monopoli, 3) Perusahaan Bandi (Jepang) yang membuat alat mainan *Power Rangers* dan *StarTrek*, 4) Perusahaan Lego (Denmark) yang membuat alat mainan *Lego*

22 International Labour Office, *A Rapid Assessment of Bonded Labour in the Carpet Industri of Pakistan*, Geneva: ILO, March 2004.

23 Lihat Rugmark Foundation website.<http://www.rugmark.org/home. php> (accessed 31 January 2008). Dan lihat juga Anti-Slavery International, 'Campaign against exploitation of child labour in the carpet industri', London: Anti-Slavery International, September 1995.

bali, termasuk alat mainan *Tank Enginecharacters* dan alat main pedang di *Knights of Sword*. Penarikan-penarikan kembali ini juga merusakkan kepercayaan dan mengundang banyak pertanyaan tentang kondisi lingkungan di pabrik-pabrik Cina.

Perusahaan-perusahaan Cina "mengeluh bahwa mereka diintimidasi oleh manajer pembelian asing untuk memotong biaya. Hal ini akan memaksa mereka untuk menekan supplier-supplier mereka sendiri dengan konsekuensi tak terduga."[26] Sebuah panel Senat Amerika Serikat diberi tahu pada bulan Oktober 2007 bahwa penarikan kembali alat mainan yang tidak aman (*unsafetoys*) "boleh jadi merupakan bagian dari harga pembelian produk yang diproduksi di Cina di bawah kondisi *sweatshop* atau dengan kerja paksa".[27]

"Ketika produksi diserahkan kepada pabrik-pabrik Cina yang tersohor karena membayar buruh mereka dalam hitungan sen per jam, [karena] membuang limbah beracun ke lingkungan alam dan karena menyembunyikan segala macam risiko bahaya kesehatan, maka seharusnya bukan merupakan sebuah kejutan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik ini bisa menimbulkan bahaya bagi kesehatan kita sendiri," kata Senator Byron Dorga.[28] Dia mendesak untuk merancang undang-undang yang akan melarang impor produk-produk yang dibuat dalam kondisi lingkungan *sweatshop*. Tenaga kerja di sekitar 8.000 pabrik alat mainan di Cina tidak diberikan alat pelindung kesehatan untuk digunakan saat membuat alat-alat mainan Amerika, kata Bama Athreya, direktur eksekutif dari Forum Hak Buruh Internasional.[29] "Alat-alat mainan yang beracun dan dibuat di lingkungan *sweatshop* adalah dua sisi dari mata uang yang

---

26 'Chinese manufacturing: plenty of blame to go around', *The Economist*, 27 September 2007.

27 Holland, J., 'Senate panel looks at Chinese toy makers', USATODAY.com, Washington, DC, 25 October 2007. <http://www.usatoday.com/news/washington/2007-10-25-4011788949_x.htm> (accessed 31 January 2008).

28 *Ibid.*

29 *Ibid.*

sama, dan harus diatur oleh undang-undang," kata Charles Kernaghan, direktur eksekutif Komite Nasional Tenaga Kerja AS.[30]

Dewan Internasional Industri Alat Mainan (*International Council of Toy Industries* atau ICTI), yang mempromosikan kepentingan pembuatan alat mainan di 21 negara anggotanya, mengatakan bahwa dewan internasional ini melakukan yang terbaik atas nama perusahaan-perusahaan anggotanya:

> untuk pengoperasian pabrik-pabrik alat mainan secara legal, aman, dan sehat... bahwa tidak akan mempekerjakan anak-anak di bawah umur, tidak ada kerja paksa, atau buruh tahanan penjara; bahwa tidak ada orang yang akan ditolak untuk menjadi buruk kerja karena alasan gender, etnis, agama, afiliasi atau asosiasi, dan bahwa pabrik-pabrik akan mematuhi hukum yang melindungi lingkungan. Perjanjian dengan perusahaan-perusahaan manufaktur atas nama anggota ICTI juga harus memberikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini.[31]

ICTI juga mengatakan bahwa ia akan mendorong pemerintah lokal dan nasional untuk menegakkan pelaksanaan aturan hukum soal upah, kesehatan pabrik dan undang-undang keselamatan.

Pada bulan Oktober 2007 perusahaan Mattel merupakan salah satu dari empat perusahaan yang menerima sebuah Penghargaan Produk Internasional yang Buruk dari para Konsumen Internasional. Penghargaan bertujuan untuk menyoroti kegagalan tanggung jawab sosial perusahaan dan penyalahgunaan kepercayaan konsumen dengan merek yang diakui secara internasional. Perusahaan Mattel diberi penghargaan "karena telah menghalang-halangi investigasi Kongres AS dan menghindari tanggung jawab terhadap penarikan 21 juta produk".[32]

---

30 *Ibid.*

31 The International Council of Toy Industries, Code of Bisnis Practices, 2004. <http://www.toy-icti.org/info/codeofbisnispractices.html> (accessed 1 February 2008).

32 Consumers International, 'Global consumer movement announces winners of International Bad Product Awards', pernyataan pers, October 2007. <http: www. consumersinternational.org> (accessed 27 November 2007).

Zona pengolahan ekspor

Dalam rangka mencoba memaksimalkan ekspor barang-barang manufaktur, lebih dari 130 negara berkembang telah menyiapkan zona pengolahan ekspor (*Export Processing Zones* atau EPZ). EPZ tampak dalam banyak bentuk dan dengan nama yang berbeda, termasuk zona perdagangan bebas, zona ekonomi khusus, *bonded warehouse* (gudang simpanan barang sampai cukai lunas dibayar), pelabuhan bebas, kota industri dan *maquiladora*. Mereka telah menjadi lebih umum sebagai akibat dari globalisasi. Biasa terletak di daerah perkebunan industri dan dekat pelabuhan laut atau bandara undara, mereka meminta TNCs untuk membawa teknologi mereka untuk membuat produk-produk manufaktur dan melatih penduduk setempat sejumlah keterampilan yang diperlukan.

ILO mendefinisikan EPZ sebagai "zona-zona industri dengan insentif-insentif khusus yang dibentuk untuk menarik investor-investor asing, di mana bahan-bahan yang diimpor mengalami beberapa tingkat pengolahan lagi sebelum diekspor kembali".[33] Sementara banyak lembaga publik yang masih membangun zona-zona, ada sebuah tren yang khusus terhadap perkembangan zona swasta, sering kali oleh ahli-ahli bangunan asing," kata ILO. Ini sama sekali bukan sebuah tren yang baik. Zona-zona publik biasanya menawarkan infrastruktur yang lebih baik daripada yang tersedia dalam perekonomian domestik. Namun masalahnya dengan pemerintah EPZ adalah bahwa undang-undang nasional yang mengatur pajak dan hak-hak kaum buruh tidak berlaku. Mereka terkenal juga karena memfasilitasi eksploitasi dan memberikan kontribusi yang sangat sedikit terhadap pengembangan secara keseluruhan dari ekonomi negara-negara berkembang di mana mereka berada.

Menurut ILO, jumlah EPZ telah meningkat dari 79 buah di 25 negara pada tahun 1975 menjadi sekitar 3.500 zona di 130 negara pada tahun 2006. EPZ diperkirakan telah mempekerjakan 66 juta pekerja pada tahun 2006 dan dari jumlah ini sekitar 40 juta adalah tenaga buruh di Cina.

---

33 Dari website Organisasi Buruh Internasional (ILO). <www.ilo.org> (accessed 27 November 2007).

EPZ juga beroperasi di 25 negara Afrika sub-Sahara. Di Mauritius, seluruh wilayah negara ini telah dibagi ke dalam zona-zona untuk pengolahan barang-barang ekspor.[34] Cina telah melihat pertumbuhan yang paling pesat. Beberapa zona pengolahan barang ekspor di Cina mempunyai ukuran besar seperti layaknya sebuah kota tersendiri dan pengembangan industri, yang lengkap dengan infrastruktur-infrastruktur seperti sekolah, transportasi, dan pelayanan-pelayanan sosial. India dan Rusia juga telah mengadopsi undang-undang baru EPZ untuk menanggapi perubahan kebijakan-kebijakan industri dan perdagangan global. Sri Lanka, Filipina, dan Pakistan memiliki strategi-strategi EPZ yang luas. Tampaknya, EPZ tidak lagi hanya melayani manufaktur tradisional tetapi juga mulai melirik sektor-sektor layanan jasa sebagai targetnya.[35]

EPZ telah menyebabkan peningkatan ekspor dan penciptaan semakin banyak lapangan kerja bagi beberapa negara berkembang. Di Amerika Latin (di mana zona atau EPZ ini dikenal dengan nama *maquilas),* keuntungan-keuntungan penyerapan tenaga kerja telah diperoleh sebagian besar oleh Amerika Sentral dan negara-negara Kepulauan Karibia. Di Asia, di mana sebagian besar negara telah memiliki EPZ, keuntungan yang diperoleh dari EPZ tersebar lebih merata. Namun dari semua negara di Asia, zona-zona di Cina, Hong Kong, Malaysia, Korea Selatan, Filipina, dan Sri Lanka mendapat porsi keuntungan secara signifikan dari investasi global yang sedang berjalan.

Sebuah survei pada tahun 2004 menunjukkan bahwa EPZ menguasai sekitar 8,3% dari ekspor barang-barang manufaktur dan 0,2% total penyerapan tenaga kerja pada industri-industri manufaktur di negara-negara yang program EPZ-nya aktif. "Akan tetapi, tidak semua program EPZ berhasil. Investasi di bidang infrastruktur dan insentif pajak murah [yang diberikan pemerintah negar berkembang kepada TNCs] belum tentu menyebabkan peningkatan FDI [*Foreign Direct Investment*]. Bahkan

34 *Ibid.*

35 Organization for Economic Cooperation and Development, 'Export processing zones: past and future role in trade and development', OECD Trade Policy Working Paper No. 53, Paris: OECD, May 2007.

di mana ada FDI, nilai tambah sering rendah, dan keterkaitan keterbelakangan dan teknologi transfer sangat terbatas."[36]

Upah kerja di EPZ biasanya rendah dan kondisi kerja sering buruk. Hak-hak serikat buruh dibatasi, dan keterampilan yang diperoleh [para pekerja] cenderung spesifik dan penggunaannya di sektor-sektor lain amat terbatas. Jumlah lapangan kerja yang diciptakan di EPZ lebih kecil dibandingkan dengan sekitar 300 juta orang yang bekerja di 'sektor-sektor informal'. Sayang sekali bahwa pemerintah negara-negara berkembang tetap mengalokasikan sejumlah besar dana yang sudah terbatas untuk menarik perusahaan-perusahaan transnasional untuk berbisnis ke dalam wilayah-wilayah EPZ.

Coba bayangkan. Keadaannya sudah demikian, pemberintah sebuah negara berkembang biasanya menawarkan kepada perusahaan TNCs sebuah bangunan gratis, "bebas pajak" (*tax-free holiday*) selama lima tahun [untuk setiap bisnis mereka], tawarkan buruh yang rendah dan beberapa kemudahan lainnya. Untuk mengembangkan sebuah EPZ di Bataan, misalnya, pemerintah Filipina menawarkan perusahaan-perusahaan transnasional 100% kepemilikan, mengizinkan TNCs untuk memberlakukan upah minimum mereka sendiri yang lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan dan diberlakukan pemerintah di ibu kota Manila, pembebasan pajak atas bahan-bahan baku dan peralatan industri yang diimpor, pembebasan pajak ekspor, sewa rendah atas pemakaian tanah, dan beberapa tawaran bujukan lainnya.[37] Enam bulan pertama kerja di Bataan [bagi tenaga buruh] adalah sebuah masa percobaan, yang digaji dengan 75% dari upah minimum. Beberapa bangunan pabrik mengakhiri pengerjaan tenaga buruh setelah masa ini telah selesai dan mengganti para pekerja lama dengan tenaga kerja baru yang lebih segar dan terlatih.

Pabrik-pabrik di wilayah EPZ sangat mungkin memiliki kontrak dengan perusahaan-perusahaan transnasional untuk produk pakaian dan

---

36 *Ibid.*

37 Bello, W., 'Behind the success of Asia's export-orientated industrialisation', Third World Network, Malaysia, January 1992.

barang-barang lainnya yang membanjiri toko-toko di Eropa dan Amerika Utara. Pabrik Planet Perak di Al Tajamouat Industrial City, Jordania, yang memproduksikan 'Faded Glory' Wal-Mart, mempekerjakan 1.200 tenaga kerja, dan dari jumlah ini setengahnya berasal dari Bangladesh dan sepertiganya berasal dari Sri Lanka. Komite Buruh Nasional yang berbasis di Amerika Serikat, yang membantu usaha pembelaan hak asasi manusia dari tenaga kerja buruh dalam ekonomi global, menuduh bahwa tenaga kerja buruh telah digaji di bawah upah minimum yang sah dan upah lembur yang tak berarti, paspor-paspor tenaga buruh disita atau disimpan oleh perusahaan dan bahwa mereka yang menuntut hak-hak hukum mereka telah dipecat dan dideportasi. Juga, bertentangan dengan apa yang mereka janjikan, para pekerja di Perak Planet tidak menerima tunjangan hari raya nasional atau waktu-waktu liburannya.[38]

EPZs dalam kenyataan lebih menguntungkan perusahaan transnasi-onal daripada negara-negara tuan rumah. "Terlepas dari beberapa penge-cualian," kata sebuah survei ILO, "proses industrialisasi yang berorientasi ekspor di negara-negara berkembang memberikan sumbangan kemajuan yang relatif kecil... meskipun fakta sebagian besar dari infrastruktur yang tersedia dan dana yang diinvestasikan telah digunakan untuk produksi barang-barang yang berorientasi ekspor."[39] Dan wilayah-wilayah EPZ telah menyebabkan diversifikasi ekonomi yang sedikit. Survei dari ILO lebih lanjut mengatakan bahwa EPZs "terus menuntut pengerjaan tenaga kerja buruh yang tidak terlatih (*unskilled workers*) atau semi terlatih (*semi-skilled workers*) dan keterampilan-keterampilan yang diperoleh tenaga buruh di tempat kerja mereka — di pabrik-pabrik — sering terbatas dan keterampilan itu hampir pasti tidak dapat digunakan di luar pabrik.[40]

---

38 Komisi Perburuhan Nasional, 'US-Jordan Free Trade Agreement: progress on worker rights, but much remains to be done', 30 March 2007. <http://www.nlcnet.org/article.php?id=241> (accessed 27 November 2007).

39 Kreye, O., J. Heinricks and F. Frobel, *Multinational Enterprises and Employment*, Geneva: ILO, Starnberg Institute, 1988.

40 *Ibid.*

Walaupun barang-barang biasanya dapat bergerak bebas masuk dan keluar dari wilayah EPZ tanpa harus bayar bea cukai, namun mereka harus tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum negara Barat sebagai barang-barang yang di pabrik di luar zona [Eropa]. Negara Mauritius dapat diambil sebagai contoh. Sering dilihat sebagai sebuah contoh sukses dari EPZ, Mauritius mengesahkan Undang-Undang Zona Pengolahan Ekspornya (EPZ) pada tahun 1970. Dan sejak itu hampir 90% dari investasi EPZ di Mauritius telah terpusat pada industri tekstil (pakaian, garmen) terutama baju sweater dan kemeja. Sebagian besar ekspor garmen Mauritius masuk ke Prancis, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Besar upah [tenaga buruh] di EPZ Mauritius hanya sekitar seperempat dari upah tenaga buruh di Hong Kong, sehingga upah murah ini membuat EPZ Mauritius sangat menarik minat para investor asing. Tetapi ketika pakaian wol dari Mauritius mulai meraih pangsa yang cukup besar di pasar-pasar Eropa pada awal tahun 1980-an, negara ini diminta untuk secara 'sukarela' membatasi ekspornya ke negara-negara Eropa. Bagi negara Mauritius, hal ini tentu lebih merupakan sebuah kemunduran ketimbang sebuah kemajuan.

Sebuah Kertas Kerja IMF mencatat bahwa "pengeluaran untuk infrastruktur yang berkaitan dengan EPZ akan menjadi beban jangka panjang yang cukup besar dari anggaran negara tanpa jaminan akan adanya sebuah pengembalian modal", dan bahwa "kerugian ekonomi tidak bisa sepenuhnya dikesampingkan".[41] Serikat Buruh saat ini sedang mulai memberontak untuk menentang EPZs. "Gerakan serikat buruh sangat prihatin terhadap meningkatnya jumlah zona di mana jutaan tenaga buruh, di mana bagian terbesar anak-anak perempuan muda, dipekerjakan di dalam lingkungan kerja yang terlalu represif," kata Konfederasi Internasional Serikat Perdagangan Bebas dari PBB.[42]

Tetapi ekspansi [dari EPZs] tetap berjalan terus. Pemerintah negara-negara berkembang telah menghabiskan sumber dana untuk pengembang-

41 Alter, R., 'Export processing zones for growth and development', IMF Working Paper, P/90/122, Washington, DC: International Monetary Fund, 1990.

42 Konfederasi Persatuan Perdagangan Bebas International, penyataan untuk Komisi Pembangunan Social PBB, Mei 1996.

an EPZs. Padahal dengan kebijakan itu, mereka mengabaikan kesempatan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan menggunakan jumlah dana yang sama dengan membuat investasi dalam dan mendukung sektor-sektor usaha kecil yang melayani pasar-pasar lokal. Proyek EPZs menyedot dana pemerintah negara yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun proyek-proyek lain yang secara langsung dapat membantu orang miskin. Kalaupun EPZs mendorong pertumbuhan ekonomi, maka hampir pasti pertumbuhan itu dicapai dengan mengorbankan kaum miskin.

EPZ adalah sebuah "kebijakan suboptimal dari sudut pandang ekonomi karena menguntungkan segelintir orang dan mendistorsi alokasi sumber daya negara, tetapi mungkin ia berguna sebagai batu loncatan untuk liberalisasi perdagangan secara nasional. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan semua pilihan kebijakan yang ada di negaranya, dan melakukan analisis biaya/manfaat yang menyeluruh sebelum mulai mengimplementasikannya," kata laporan OECD.[43]

Apakah mereka beroperasi di dalam atau di luar zona pengolahan ekspor (EPZs), TNCs yang terlibat dalam pembuatan barang-barang belum membantu sebagian besar negara-negara berkembang untuk meningkatkan perdagangan mereka atau membantu meringankan beban penderitaan orang-orang miskin.

Kesimpulan: kode etik

Sesungguhnya ada kesepakatan umum bahwa perusahaan-perusahaan manufaktur mesti bertanggung jawab atas keselamatan para tenaga kerja dan untuk maksud itu perusahaan-perusahaan memiliki kode etik. Kode etik-kode etik tersebut telah bermunculan, termasuk model kode etik yang dirancang oleh serikat buruh dan LSM-LSM, kode etik perusahaan dan pemerintah. Kode etik mencakup hal-hal seperti pengaturan upah minimum, kondisi kerja yang aman dan kebijakan jam kerja lembur. Di

43 Organization for Economic Cooperation and Development, 'Export processing zones: past and future role'.

dalam industri alat-alat mainan dan pakaian, sejarah singkat kode etik secara sukarela adalah kode etik yang sedang diseret-seret oleh TNCs di mana mereka hampir tidak ada antusiasme dan kemauan untuk mematuhinya kecuali mereka terpaksa — sementara mereka tegas mempertahankan hal-hal sebaliknya.

Kelemahan dari kode etik adalah bahwa mereka bersifat sukarela dan terbuka untuk ditafsirkan secara berbeda-beda. Untuk sejumlah TNCs, kode etik adalah sebuah cara yang baik dan aman untuk menghindari peraturan hukum yang mengikat — sebuah jalan aman menuju peraturan "halus" atau hukum "tak bertaring" (*"soft" laws*). Keberadaan kode etik dalam satu sektor tertentu tidak memiliki arti apa-apa. Bahkan ketika benar-benar diimplementasikan dan dipantau secara independen, kode etik belum terbukti bisa menghilangkan ketidakadilan di tempat-tempat kerja. Karena itu, peraturan yang dibuat pemerintah negara dan pemantauan independen tetap sangat diperlukan. Demikian juga tekanan konsumen pada perusahaan sangat diperlukan. Para konsumen yang memiliki kekuasaan besar untuk menolak membeli barang-barang dari TNCs yang tidak bersedia mengakhiri tindakan-tindakan ketidakadilan di perusahaan-perusahaan mereka (lihat bahan Bab 12).

BAB 10

Energi: Tak Ada Paksaan bagi Orang Miskin

Kita sedang bergerak dari sebuah dunia "percayalah-saya" (trust-me) ke dunia "tunjukkan kepada saya" (show-me). (John Jennings, mantan pemimpin perusahaan Shell)

Bendungan

Antara 40 sampai 80 juta jiwa manusia telah diusir secara paksa dari tanah mereka untuk membuka ruang masuk bagi pembuatan bendungan-bendungan besar, yang biasanya untuk rencana pembangkit listrik tenaga air. Sebagian besar bendungan ini dibangun oleh TNCs. Dalam prosesnya, rencana pembangunan ini menghasilkan waduk-waduk yang besar dan menutup rumah-rumah dan lahan-lahan pertanian yang subur milik masyarakat setempat yang tentunya sangat mengganggu kehidupan mereka. Sebagian dari mereka harus pindah. Para penduduk di wilayah yang kemudian berubah menjadi waduk besar itu sering kali menjadi orang-orang yang paling akhir untuk diberi tahu tentang rencana proyek bendungan air dan kemudian memaksa mereka untuk pindah ke tempat lain. Ada yang harus dipindahkan ke kawasan hutan dan harus menebang hutan supaya bisa bertahan hidup. Karena listrik yang dihasilkan oleh bendungan itu dimaksudkan untuk kepentingan pabrik-pabrik dan rumah-rumah penduduk di daerah perkotaan, maka masyarakat miskin di pedesaan yang tanahnya telah diambil untuk proyek tersebut hampir pasti tidak memperoleh keuntungan daripadanya. Walaupun semua ini direncanakan untuk meningkatkan pembangunan, tapi dalam kenyataannya proyek-proyek besar ini justru memperparah tingkat kemiskinan, lingkungan

alam terdegradasi dan pelanggaran hak-hak asasi manusia. "Banyak bukti menunjukkan bahwa masyarakat desa yang diterlantarkan telah mengalami kehancuran secara ekonomis, budaya dan psikologis."[1]

Proyek-proyek bendungan air besar selama ini sekian sering telah menimbulkan kekecewaan besar secara ekonomis, di samping korban kerugian kerusakan lingkungan, sosial, dan kemanusiaan. Pada bulan November tahun 2000, Komisi Dunia untuk Bendungan Air merilis sebuah laporan sangat kritis yang menunjukkan bahwa bendungan-bendungan besar ternyata menghasilkan listrik, air untuk irigasi pertanian dan air minum lebih kurang dari yang diproyeksikan semula. Walaupun bendungan-bendungan besar dapat mencegah terjadinya banjir, Komisi ini menemukan bahwa bendungan juga dapat memperburuk kerusakan yang disebabkan banjir."[2]

Sejumlah proyek bendungan besar yang telah menelantarkan banyak masyarakat pedesaan di sekitarnya telah didanai sebagian oleh bantuan dari Bank Dunia dan lembaga-lembaga donor lainnya. Sebuah faktor yang sering kali tidak banyak diketahui adalah keterlibatan dari perusahaan-perusahaan konstruksi besar internasional. Untuk TNCs yang bergerak di bidang konstruksi, rencana-rencana pembangunan dam yang dibiayai dengan dana bantuan dari lembaga internasional merupakan bisnis besar. Sebagian besar dari dana yang diberikan untuk proyek-proyek besar tersebut akan berakhir di rekening bank mereka.

Rencana-rencana bendungan di seluruh dunia sering dibaca seperti sebuah panggilan bagi TNCs raksasa di bidang konstruksi. Perusahaan-perusahaan ini merupakan sebuah mata rantai vital dalam pembuatan "bendungan besar". Pengalaman mereka dalam membangun proyek-proyek tersebut selalu berarti bahwa mereka dapat memberikan seorang tenaga ahli yang perusahaan-perusahaan nasional biasanya tak bisa memilikinya.

---

1 Dari International Rivers Network website. <http://internationalrivers. org/en/node/234> (accessed 4 February 2008).

2 World Commission on Dams, *Dams and Development: a New Framework for Decision Makers* (the WCD Report), London: Earthscan, 2000. <http://www.dams.org> (accessed 14 March 2008).

Tanpa TNCs, rencana-rencana bendungan besar yang dibiayai dana bantuan dalam 50 tahun terakhir tidak bisa terlaksana dengan penuh keyakinan. Rencana-rencana proyek memberikan jaminan pembayaran yang pasti bagi TNCs, karena dana proyek sebagian besar berasal dari bantuan luar negeri, dan karena itu TNCs mempunyai peluang tinggi untuk mendapat keuntungan besar dengan risiko kerugian yang rendah. Jika biaya proyek terlalu melambung tinggi,TNCs biasanya lewatkan saja proyek bersangkutan. Selain itu, biaya pembangunan bendungan raksasa sering-kali lebih besar dari perkiraan semula, yang memaksa pemerintah negara-negara berkembang untuk membayar tagihan ekstra dari TNCs.

Tiga Bendungan Gorges di Sungai Yangtze, Cina, adalah dam pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Sebagian dari total dana untuk pembangunan bendungan senilai US$25 miliar (Rp250 triliun) ini telah datang dari bank-bank transnasional. Lebar bendungan Gorges ini lebih dari dua km dan tinggi menara 185 meter di atas sungai. Waduk penampungan air memiliki panjang lebih dari 650 km. Konstruksi bangunan dimulai pada tahun 1994 dan selesai pada tahun 2006. Waduk penampungan air terisi secara bertahap sebelum mencapai ketinggian akhir dan mulai beroperasi pada tahun 2009. Sebanyak dua kota besar, 11 kabupaten, 116 kota kecil dan ratusan tempat budaya di Provinsi Hubei dan daerah sekitarnya telah dibanjiri air untuk menciptakan waduk. Sekitar 1,4 juta jiwa manusia telah terlantar akibat pembangunan bendungan ini. Sekitar empat juta jiwa manusia di sekitar kawasan waduk ini mungkin masih akan direlokasi lagi dalam waktu sepuluh tahun ke depan karena bahaya ketidakstabilan geologi di ngarai-ngarai dan ancaman tanah longsor yang serius [di sekitar kawasan bendungan].[3]

Banyak masyarakat yang terlantar ini hidup dalam kondisi-kondisi yang memprihatinkan. Mereka hampir tidak bisa menemukan jalan untuk mendapat kompensasi dan tempat-tempat pemindahan baru yang layak. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa mereka telah berkali-

---

3 Yardley, J., and A. Chang, 'Cina's giant dam unleashes landslide disasters', *The Scotsman*, 24 November 2007.

kali pergi menghadap pemerintah setempat untuk meminta para pejabat pemerintah menyelesaikan masalah mereka, tapi para pejabat ini mengatakan bahwa hal itu hampir mustahil. "Mereka telah mengancam untuk menangkap kami jika kami meminta bantuan dari pejabat-pejabat pemerintah yang lebih tinggi".[4]

Bendungan, dana bantuan, dan TNCs

Pembiayaan pembangunan bendungan-bendungan besar telah menelan banyak uang bantuan lembaga internasional dan muncul sebagai sebuah praktik yang perlu dipertanyakan. Pada tahun 1980, Bendungan Victoria yang direncanakan di Sri Lanka dialokasikan dana sebesar £100 juta (sekitar Rp1.500 miliar) dari bantuan Inggris — alokasi bantuan Inggris terbesar yang pernah terjadi untuk satu proyek tunggal pada masa itu. Bendungan ini kemudian diharapkan untuk memakan biaya sebesar £137 juta (sekitar Rp2.055 miliar). Dengan demikian pemerintah Sri Lanka harus mencari lagi kekurangannya sebesar £37 juta (sekitar Rp555 miliar). Pada saat bendungan selesai pada tahun 1984, biaya ternyata telah melonjak menjadi £240 juta (sekitar Rp3.650 miliar). Pemerintah Inggris memberikan Sri Lanka sedikit bantuan tambahan lagi untuk kompensasi sekitar £13 juta. Pemerintah Sri Lanka harus tetap mencari dana sisanya sebesar £127 juta dan bukan sebesar £37 juta seperti dalam rencana awal proyek. Sehingga pada akhirnya, seluruh warga masyarakat Sri Lanka [antara lain melalui pajak mereka] harus mencari uang untuk membayar kekuarangan sebesar £127 juta.

Lima belas perusahaan Inggris mendapat keuntungan hampir £200 juta (sekitar Rp3.000 miliar atau Rp3 triliun) dari seluruh pembangunan bendungan (yang menghasilkan listrik untuk kawasan industri dan perkotaan). Di antara kelima belas perusahaan Inggris itu adalah *Balfour Beatty Construction*, *Edmund Nuttall*, dan *Costain*. Ketika bendungan mulai membanjiri mengisi daerah yang luas, sekitar 50.000 penduduk harus

4 International Rivers Network website. <http://www.irn.org/programs/threeg/> (accessed 4 February 2008).

tercabut dari rumah-rumah mereka. Mereka diberi tanah di bagian lain dari negara Sri Lanka. Kerap kali mereka berakhir di daerah yang masih hutan di mana mereka pertama-tama harus tebang hutan dahulu sebelum mereka bisa menanam tanaman pangan.

Bendungan Victoria merupakan salah satu dari empat bendungan besar dalam rangka mengembangkan penggunaan Sungai Mahaweli di Sri Lanka. Kanada, Jerman, dan Swedia membantu secara finansial untuk pembangunan tiga bendungan besar lainnya, yang juga menderita karena pembengkakan biaya. Pada tahun 1977, seluruh rencana pembangunan ketiga bendungan ini diharapkan menelan biaya sekitar £700 juta (sekitar Rp10,5 triliun), di mana £400 juta (sekitar Rp6 triliun) dari total ini diperoleh Sri Lank melalui bantuan luar negeri. Dengan demikian, Sri Lanka mesti mengusahakan sendiri biaya sebesar £300 juta (sekitar Rp4,5 triliun) yang sisa. Akan tetapi pada tahun 1984, total biaya untuk ketiga bendungan telah membengkak menjadi lebih dari £2.000 juta (sekitar Rp30 triliun). Sehingga dari total pembengkakan biaya ini, negara tuan rumah Sri Lanka harus mengap-ngap mencari sendiri biaya yang bengkak sebesar £1.600 juta (sekitar Rp24 triliun) — lebih dari lima kali lipat total biaya yang direncana pada awal proyek.

Pembangunan bendungan-bendungan di Sungai Mahaweli ujung-ujungnya menyebabkan sebuah pemindahan yang besar atas kekayaan dari penduduk salah satu negara berkembang paling miskin di dunia ke kantong-kantong TNCs raksasa dunia. "Kami adalah sebuah negara miskin," kata seorang kritikus Sri Lanka terhadap proyek bendungan ini, "Kami tidak sanggup menanggung beban bantuan luar negeri seperti ini."[5] Kompensasi minimal mesti pertama-tama dibayar untuk anggota masyarakat pedesaan yang dipindahkan secara terpaksa, dan sekali lagi masyarakat miskin selalu yang menjadi paling menderita. Dengan uang mereka sendiri dan ditambah dengan uang kompensasi, masyarakat yang diungsikan dalam kenyataannya membutuhkan biaya yang jauh lebih besar untuk bisa beradaptasi dengan wilayah tempat tinggal mereka yang

5 Percakapan dengan pengarang di Sri Lanka, March 1983.

baru. Masyarakat miskin yang mengungsi ke tempat baru tanpa uang tentu sangat malang hidupnya.

Rencana pemerintah Inggris untuk menggunakan dana bantuan asing untuk membiayai pembuatan Bendungan Pergau di Malaysia bagian utara diblokir oleh pengadilan Inggris pada tahun 1994 tak lama setelah kampanye yang dilancarkan oleh Gerakan Pembangunan Dunia (*World Development Movement* atau WDM). Inggris ingin memberikan £234 juta (sekitar Rp3,51 triliun) dalam bentuk bantuan pinjaman untuk pembangunan bendungan tersebut, tapi dua hakim Pengadilan Tinggi Inggris menyatakan keputusan pemerintah tidak sah dan menghentikan semua pemberian pinjaman lebih lanjut kepada Malaysia dari anggaran negara yang telah direncanakan. Padahal sudah sekitar £30 juta (sekitar Rp450 miliar) telah dikirim ke pemerintah Malaysia untuk membantu membangun bendungan Pergau dan waktu itu sudah ada sekitar 200 perusahaan Inggris yang sedang mengerjakan proyek bendungan ini ketika Pengadilan Tinggi Inggris tiba-tiba memerintah untuk menghentikannya.

Menanggapi keputusan Pengadilan Tinggi Inggris, WDM melakukan gugatan hukum karena WDM percaya bahwa pendanaan bagi Dam Pergau bertentangan dengan Undang-Undang Ingggris Tahun 1980 tentang Kerja sama dan Pembangunan Luar Negeri. Undang-undang ini mengatakan bahwa tujuan utama pemberian bantuan pinjaman ke luar negeri adalah untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dari sebuah negara atau demi kesejahteraan rakyatnya.

Padahal Pemerintah Inggris sebelumnya telah sepakat memberikan bantuan pinjaman untuk bendungan Pergau sebagai pelicin untuk mengamankan kesepakatan penjualan senjta senilai £1,3 miliar (sekitar Rp19,5 triliun) dengan Malaysia. Lagi-lagi kali ini, biaya pembangunan bendungan Pergau membengkak. Parlemen Inggris sangat heran karena perusahaan-perusahaan Inggris yang mengerjakan proyek bendungan Pergau telah menaikkan biaya proyek ini dari £316 juta (sekitar Rp4,74 triliun) menjadi £397 juta (sekitar Rp5,955 triliun) hanya dalam waktu dua minggu setelah mendapat persetujuan pemerintah Inggris. Para pejabat Malaysia menuduh perusahaan-perusahaan Inggris mencoba untuk

melakukan kecurangan pada pemerintah Malaysia dalam pembangunan proyek besar ini.[6]

Tidak lama setelah kontroversi atas rencana bendungan Pergau mereda, sebuah rencana bendungan lain yang lebih besar di Malaysia mendapat kecaman keras dari kelompok-kelompok lingkungan di negara Malaysia. Mereka marah atas keputusan pemerintah Malaysiaatas rencana proyek bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Bakun, Sarawak, negara bagian timur Malaysia. Bendungan ini telah melakukan perusakan ekologis yang cukup besar terhadap hutan tropis. Pembangunannya mengharuskan pemindahan 10.000 jiwa penduduk setempat di Serawak yang tinggal di daerah-daerah yang menjadi areal bendungan. Banyak penduduk setempat telah dipindahkan ke pemukiman rumah-rumah panjang, namun mereka tetap harus membayar perumahan yang mereka diami. Padahal sebagian besar dari mereka adalah petani-petani subsisten yang tidak perlu menggunakan uang dalam pengelolaannya. Hutan-hutan tropis sebelumnya, yang kini diubah menjadi bendungan air, merupakan tempat persediaan makanan dan tempat berlindung bagi masyarakat setempat di Bakun.

Orang-orang Bakun yang diterlantarkan tidak dikonsultasikan mengenai rencana bendungan itu, kata LSM *Friends ofthe Earth Malaysia.* Juga tidak ada proposal yang diajukan pemerintah menyangkut pemukiman kembali orang-orang Bakun. Mereka juga memperingatkan bahwa volume air di daerah tersebut bisa jatuh secara signifikan, yang berarti bahwa proyek bendungan itu akan mengancam persediaan air bagi masyarkat setempat. *Asea Brown Boveri* (Swedia-Swiss), *Comphania Brasileira de Projetos e Obras* (Brasil) dan *Dong-Ah* (Korea Selatan) adalah TNCs utama yang terlibat dalam pengerjaan bendungan ini.

Kelayakan ekonomis dari bendungan Bakun dipertanyakan oleh spesialis bendungan air dari Universitas Dortmund (Jerman), Dr. Weillou Wang, yang yakin bahwa keuntungan ekonomis tahunan bendungan

6 Untuk informasi yang rinci tentang BendunganPergau, lihat World Development Movement website. <http://www.wdm.org.uk/campaigns/past/pergau/> (accessed 30 October 2007).

Bakun bisa hanya sekitar setengah total yang diproyeksikan. Menurut FOE Malaysia, pemerintah negara Malaysia mengharapkan akan menjual listrik yang dihasilkan bendungan itu ke negara-negara tetangga untuk membayar utang pembangunan bendungan tersebut. Akan tetapi, FOE memperingatkan bahwa permintaan listrik dari tetangga-tetangga Malaysia kemungkinan akan sangat kecil, mengingat masalah jarak: "Tampaknya, satu-satunya cara bagi bendungan Bakun bisa menguntungkan secara ekonomis adalah bahwa pemerintah Malaysia menaikkan tarif listrik.... Konsumen listrik bendungan Bakun mungkin harus membayar tarif listrik lebih tinggi."[7] Yang jelas, orang miskin sekali lagi yang menjadi yang paling terpukul karena kenaikan tarif listrik.

Di India tengah, pembangunan bendungan besar di Sungai Narmada, dan dampaknya terhadap jutaan orang yang tinggal di lembah sungai itu, menjadi sebuah masalah yang sangat kontroversial. Dalam bagan Rencana Pembangunan Lembah Narmada, pemerintah India berencana untuk membangun 30 dam besar, 135 dam sedang menengah dan 3.000 bendungan kecil untuk memanfaatkan air sungai Narmada dan anak-anak sungainya. Dua bendungan terbesar adalah Proyek Sardar Sarovar dan Proyek Narmada Sagar. Pemerintah mengklaim bahwa Bendungan Sardar Sarovar akan mengairi lahan pertanian seluas lebih dari 1,8 juta hektar. Para penentang proyek bendungan ini mengklaim bahwa keuntungan ekonomis yang diproyeksikan ini terlalu dibesar-besarkan. Padahal proyek bendungan ini akan menelantarkan lebih dari 320.000 warga masyarakat setempat dan memengaruhi kehidupan ribuan orang lainnya. Secara keseluruhan, karena pemindahan nanti berhubungan dengan sistem-sistem kanal dan proyek-proyek terkait lainnya, setidaknya sekitar satu juta warga masyarakat lainnya mungkin akan terkena dampaknya.[8]

Warga masyarakat yang terpaksa dipindahkan akibat rencana bendungan besar sering menerima kompensasi sangat sedikit atas perpin-

7 "Bakun is not economically viable", *Utusan Konsumer* (Penang), July 1995.

8 Whirled Bank Group, 'Dams and the World Bank'. <http://www.whirledbank.org/environment/dams.html> (accessed 4 February 2008).

dahan mereka ke tempat baru yang kadang-kadang ratusan mil jauhnya [1mil = 1,6 km]. Bendungan Danau Kaptai di Bangladesh adalah sebuah contoh yang lain. Didanai oleh Amerika Serikat, bendungan ini dibangun untuk menyediakan listrik demi kepentingan industrialisasi, tetapi dibangun dengan menghancurkan 40% dari lahan pertanian yang bisa diolah di daerah itu. "Penderitaan manusia dan kerusuhan yang disebabkan oleh proyek bendungan itu sangat besar," kata Andrew Gray dari Universitas Oxford.[9] Sekitar 100.000 orang harus dipindahkan dan, meskipun mereka dijanjikan kompensasi, lebih dari setengah dari mereka tidak menerima apa-apa. Mereka yang menerima kompensasi diberi hanya tiga hektar tanah untuk menggantikan enam hektar tanah yang mereka miliki sebelum bendungan dibangun.

Minyak dan gas

TNCs yang berbisnis di sektor minyak menempati jumlah cukup menonjol dalam daftar perusahaan raksasa dunia, meskipun perusahaan-perusahaan negara seperti Gazpom (Rusia) juga kini telah memasuki barisan produsen minyak dan gas. Exxon/Mobil, BP dan Royal Dutch/Shell tetap menduduki tujuh produsen utama. Penduduk di negara-negara berkembang yang kaya minyak seharusnya bisa memperoleh keuntungan banyak dari minyak negara mereka, tetapi sering kali hal ini tidak terjadi. Perkembangan perusahaan sumber daya minyak di negara-negara berkembang telah menyebabkan biaya sosial dan lingkungan yang memprihatinkan dan malah jutaan rakyat menjadi semakin terpuruk dalam kemiskinan. Untuk negara-negara miskin yang sepenuhnya bergantung pada pendapatan minyak, minyak dan gas tidak hanya menyebabkan mereka semakin miskin, tetapi membuat korupsi semakin meningkat dan kemungkinan timbulnya perang atau perselisihan warga sipil.[10]

9 Andrew Gray, dalam sebuah pidato pada konferensi tentang 'Development-Induced Displacement and Impoverishment', Oxford, January 1995.

10 Christian Aid, *Fuelling Poverty: Oil, War and Corruption*, London: Christian Aid, 2003.

Sebagian besar 'pembangunan' minyak terjadi di daerah terpencil yang dihuni oleh masyarakat desa, dan telah dilakukan dengan cara yang tidak memperhitungkan efek-efek sampingannya. Mata pencaharian tradisional dari masyarakat setempat telah berubah secara fundamental dan sering rusak parah karena 'kota minyak', kejahatan dan prostitusi telah menjamur dengan pengenalan sebuah cara hidup baru yang asing.

Lingkungan fisik alam telah mendapat tekanan yang cukup besar. Perusahaan-perusahaan minyak mengeluarkan racun-racun seperti hidrokarbon, logam berat dan *bactericides* [racun yang bisa memusnahkan bakteri]. Mereka mencemari daerah-daerah di mana mereka beroperasi dengan kontaminasi-kontaminasi yang rutin, yang sering disebabkan oleh fasilitas yang dioperasikan dan dimonitor secara buruk, dan juga oleh kecelakaan misalnya debit minyak terlalu besar. Banyak perusahaan telah secara tradisional membuang ke udara atau ke langit gas-gas yang dihasil oleh pembakaran minyak [bdk cerobong-cerobong pabrik yang tinggi]. Pembakaran minyak adalah masalah polusi yang serius bagi orang-orang yang tinggal dekat dengan kilang-kilang minyak dan di tempat pembuangan limbah pemakaian energi dari sebuah negara. Ia juga merupakan salah satu faktor penyumbang pemanasan global. Masyarakat lokal kerap kali menjadi pecundang besar dari bisnis TNCs di bidang minyak dan gas.

Sangat sedikit negara-negara berkembang yang kaya minyak bumi dan gas di benua Afrika "telah melihat manfaat yang berkelanjutan dari hasil kekayaan minyak dan gas mereka", kata Rashmi Mistry dari Lembaga Katolik untuk Pembangunan Luar Negeri (*Catholic Agency for Overseas Development* atau CAFOD). "Melihat tiga negara penghasil minyak dan gas bumi terbesar di Afrika Sub-Sahara — Nigeria, Angola, dan Guinea Baru Equatorial — harapan hidup sangat rendah yaitu antara 43, 41, dan 43 tahun. Hingga saat ini, kelompok masyarakat sipil masih belum bisa berbicara dan mengkritik atau menantang pemerintah-pemerintah negara mereka tentang bagaimana seharusnya penghasilan dari kekayaaan alamnegara mereka digunakan."[11]

---

11 Dikutip dalam John Madeley, 'All that glisters', *Church Times*, 17 November 2006.

Angola berpotensi menjadi salah satu negara terkaya di Afrika dengan cadangan besar minyak lepas pantai. Namun sekitar 70% dari penduduknya tidak memiliki akses ke air bersih. Angola juga merupakan contoh kasus tragis sebagai dampak destruktif dari industri minyak di mana TNCs telah memainkan perannya. Hampir semua perusahaan besar dunia di bidang minyak terlibat dalam bisnis pengolahan minyak di negara Angola — seperti BP Amoco, Chevron, ExxonMobil, Esso Exploration Angola, Agip Angola, Norsk Hydro, Petrofina, dan TotalFinaElf.

Industri minyak di Angola dimulai pada tahun 1955 ketika minyak ditemukan di lembah darat oleh Petrofina, yang mendirikan sebuah perusahaan yang dimiliki bersama dengan pemerintah Angola. Namun, ekspansi utama datang pada akhir tahun 1960, ketika minyak ditemukan di lepas pantai Cabinda, sebuah wilayah kecil di utara Angola.

Angola hampir sepenuhnya bergantung pada minyak, di mana sektor ini menyumbang sekitar 90% dari pendapatannya. Dalam transaksi-transaksi antara pemerintah Angola dan perusahaan-perusahaan minyak transnasional tampaknya ada pembayaran-pembayaran jaringan kusut "yang tidak muncul dalam setiap detail komprehensif dalam laporan-laporan tahunan perusahaan. Hal ini menyababkan pengalihan dana dalam skala cukup besar dari anggaran Negara Angola".[12] Menurut IMF, sebesar US$1 miliar (sekitar Rp10 triliun) per tahun hilang dari total pendapatan minyak pemerintah sebesar US $5 miliar (sekitar Rp50 miliar).

Pemerintah Angola mengharuskan investor-investor asing untuk memberikan kontribusi pada dana bantuan sosial yang dikelola oleh perusahaan minyak nasional Sonangol. Tapi baik pemerintah Angola maupun BUMN Sonangol tidak mengungkapkan jumlah dana bantuan sosial yang dikumpulkan ini. "Pemerintah dan perusahaan minyak bekerja sama dalam hal ini," kata Daniel Ntoni-Nzinga dari Komite Antar-Gerejani untuk Perdamaian di Angola, yang mendukung kampanye untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan minyak untuk memublikasikan setiap pembayaran mereka kepada pemerintah Angola. Ntoni-Nzinga percaya

12 Christian Aid, *Fuelling Poverty.*

bahwa informasi tentang bukti penerimaan pemerintah dari sektor minyak "akan mendorong penduduk Angola untuk memberikan tekanan menuju perubahan".[13] Menanggapi desakan ini, perusahaan-perusahaan minyak transnasional di Angola mengklaim bahwa mereka tidak dapat memublikasikan apa yang dituntut masyarakat karena pemerintah Angola mewajibkan mereka untuk menandatangani undang-undang tentang kerahasiaan.

Sekitar 60% dari minyak Angola terdapat di daerah Cabinda. Kondisi hidup masyarakat Angola di daerah minyak ini tampaknya tidak lebih buruk daripada masyarakat di provinsi-provinsi Angola lainnya, tetapi kontras antara kelompok masyarakat yang miskin dan yang kaya cukup mencolok. Biaya hidup sangat tinggi, dan wilayah-wilayah pantai mereka menjadi hitam sebagai akibat dari tumpahan-tumpahan minyak yang tak terhitung jumlahnya. Karyawan-karyawan perusahaan hidup dalam sebuah kompleks perumahan yang dijaga khusus yang letaknya sekitar 15 kilometer di luar kota. Dari kompleks perumahan khusus ini mereka berangkat ke tempat kerja dengan helikopter dan terbang melewati udara di atas kota. Perusahaan-perusahaan minyak merupakan sumber lapangan kerja, tetapi penduduk setempat melaporkan bahwa mereka hanya dipekerjakan sebagai koki — tukang masak — dan tukang sapu dan tidak dipekerjakan untuk posisi-posisi manajerial dengan keahlian khusus. Angola yang secara potensial kaya ini sekarang termasuk di antara 25 negara termiskin di dunia yang diukur dari segi jumlah pendapat negara.

Nigeria telah memperoleh pendapatan negara dari minyak sekitar US$400 miliar (sekitar Rp4.000 triliun) sejak minyak ditemukan di negara ini pada akhir tahun 1950-an. Tapi hingga saat ini, kebanyakan penduduk Nigeria belum merasakan manfaat dari ekstraksi minyak di negara mereka, dan malah sebaliknya mereka telah jatuh menjadi semakin miskin.

Nigeria adalah negara penghasil minyak terbesar Afrika dan menjadi eksportir minyak terbesar kelima di dunia. Eksplorasi minyak di Negeria

13 Jeffrey, P., 'Oil pressure — in peacetime, Angolans fight for fair share', Pacific News Service, 24 September, 2002.

telah memberi keuntungan yang besar bagi TNCs, terutama untuk perusahaan Shell. Perusahaan ini telah mulai bekerja di Delta Niger pada tahun 1958. Delta ini, dengan hutan tropis, habitat hutan bakau dan cadangan minyak, telah dikenal banyak kalangan sebagai salah satu ekosistem dunia yang paling rapuh. Shell terutama menguasai cadangan minyak yang melimpah di wilayah Ogoni dari Delta Niger. Dalam sebuah usaha patungan dengan Perusahaan Minyak Nasional Nigeria (*Nigerian National Petroleum Corporation* atau NPC) dan dengan perusahaan minyak Elf Aquitaine dan Agip, Shell membentuk anak perusahaan yaitu *Shell Petroleum Development Company*.

Delta Niger telah menjadi sebuah daerah kerusuhan selama setengah abad. Masyarakat setempat hampir tidak melihat keuntungan dari minyak yang dieksploitasi dari wilayah mereka, yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang cukup besar. Sejak awal operasinya, Shell telah mendatangkan malapetaka pada masyarakat setempat dan kerusakan lingkungan mereka, kata sebuah laporan *Greenpeace*. Pipa-pipa minyak perusahaan yang bertekanan tinggi melewati "di atas tanah, melintasi desa-desa dan melintang-pukang di atas tanah yang dulunya digunakan untuk keperluan pertanian, yang membuatnya kini hampir tidak berguna".[14] Total panjang pipa minyak di Delta Niger adalah sekitar 2.100 km. Kasus minyak yang tumpah [antar lain karena pipa bocor] sering terjadi: masyarakat di Delta Niger telah mengalami kerusakan harta benda dan lingkungan hidup mereka.

Pada awal tahun 1983 Divisi Inspektorat NPC mengatakan: "Kami menyaksikan peracunan sumber-sumber air secara perlahan-lahan di negara ini, dan kehancuran vegetasi dan lahan pertanian oleh tumpahan minyak."[15] Tetapi hingga saat ini, belum ada upaya bersama dari pihak pemerintah dan perusahaan minyak untuk mengendalikan masalah lingkungan ini.

---

14 A. Rowell, 'Shell-shocked: the environmental and social costs of living with Shell in Nigeria', London: Greenpeace, July 1994, p. 10.

15 *Ibid.*, pp. 11–12.

Pembakaran gas telah menjadi sebuah masalah besar. Ladang-ladang minyak Nigeria pada dasarnya adalah ladang-ladang gas yang berminyak. Shell melepaskan 1.100 kaki kubik gas setiap hari di Nigeria atau sekitar sepersepuluh dari semua gas yang dibakar di seluruh dunia. Pembuangan limbah gas ini ke udara berkontribusi terhadap pemanasan global dan memiliki dampak buruk terhadap tanah yang dekat dengan tempat pembakaran minyak.

Menurut Ken Saro-Wiwa, Presiden Gerakan untuk Kelangsungan Hidup Rakyat Ogoni (*Movement for the Survival of the Ogoni People* atau MOSOP) yang diadili dan dieksekusi oleh pemerintah Nigeria tahun 1995:

> Pembakaran gas... telah menghancurkan satwa liar, dan tanaman hidup, meracuni atmosfer dan penduduk di sekitarnya, dan membuat warga menjadi setengah-tuli dan rentan terhadap penyakit pernapasan. Setiap kali hujan turun di Ogoni, maka hujan yang kita miliki adalah hujan asam [*acid-rain*] yang selanjutnya meracuni aliran-aliran air, sungai, anak sungai, dan lahan pertanian. Hujan asam akan kembali lagi ke tanah, dan Delta yang merupakan keranjang roti selama ini kini telah benar-benar menjadi tanah mandul.[16]

Masalah yang lain adalah pembuangan sampah. Lubang-lubang terbuka yang digali untuk menyimpan limbah pengeboran dilaporkan mengotori [orang dan daerah] Ogoni, namun masyarakat setempat merasa tidak berdaya untuk mencegah praktik-praktik tersebut. Peneliti-peneliti independen menemukan bahwa tingkat limbah minyak dalam air minum di daerah Ogoni adalah 680 kali lebih tinggi dari batas yang diizinkan di Eropa Barat.

Perusahaan Shell telah menghentikan eksploitasi minyak di daerah Ogoni dan masyarakat setempat — suku Ogoni — menuntut kompensasi [atas kerugian dan kerusakan lingkungan hidup mereka], tapi tuntutan mereka belum ditangani dengan baik, entah oleh perusahaan Shell mau-

16 Ken Saro-Wiva, dikutip dalam Rowell, 'Shell-shocked', and Channel 4 TV, *Without Walls*, 14 November 1995

pun oleh pemerintah Nigeria. Orang-orang Ogoni mengatakan bahwa mereka belum menerima apa pun sebagai imbalan untuk minyak [yang dieksploitasi dari wilayah mereka], kecuali desa-desa mereka menjadi semakin suram, tanah dan anak-anak sungai tercemar, dan sungai tanpa ikan-ikan lagi — singkatnya, yang ada hanya bencana ekologis. "Cara bagaimana perusahaan Shell melaksanakan bisnis di Ogoni merupakan sebuah indikasi di mana perusahaan minyak raksasa beroperasi di luar negeri tanpa peraturan yang tepat," kata Greenpeace.[17]

Daerah lain di Nigeria yang juga menghadapi masalah adalah Negara Bagian Lagos. Di wilayah ini "telah terjadi kehilangan banyak nyawa manusia dan harta benda seperti belum pernah terjadi sebelumnya... masalah lingkungan dan keselamatan jarang dibicarakan dalam proyek-proyek pipa minyak yang sedang berlangsung di kota,"demikian diingatkan Aksi Hak Lingkungan/*Friends of the Earth Nigeria* pada bulan September 2007. Yang sangat dikhawatirkan adalah sebuah proyek pipa minyak Nigeria Gaslink yang berjalan melintas melalui daerah berpenduduk padat, di mana pipa-pipa minyak sangat dekat dengan rumah-rumah penduduk.[18]

Sementara itu, Amerika Selatan telah mengalami apa yang disebut 'kasus pencemaran minyak terburuk di planet bumi'. Hal itu terjadi di wilayah Oriente, Negara Ekuador dan merupakan contoh suram dampak yang sangat merugikan dari perusahaan minyak terhadap masyarakat penduduk asli dan masyarakat miskin — "barangkali merupakan bencana lingkungan terbesar di dunia akibat pencemaran oleh perusahaan minyak... yang mengancam untuk memusnahkan lima kelompok suku asli di negara itu, dan luput dari perhatian dari media di dunia".[19]

Oriente, yang dikenal sebagai Amazonnya Ekuador, membentang lebih dari 13 juta hektar hutan tropis. Wilayah ini memiliki penduduk suku asli sekitar 95.000 jiwa, tetapi perkembangan perusahaan minyak

---

17 *Ibid.*

18 Haruna, G., 'Group raises alarm over gas pipelines', *This Day* (Nigeria), 5 September 2007.

19 Dari Amazon Defense Coalition website.<http://www.texacotoxico.org> (accessed 4 February 2008).

telah menarik 250.000 imigran sejak penemuannya pertama pada tahun 1967. Sebuah konsorsium perusahaan, termasuk *Texaco, Gulf* dan *Elf Aquitaine,* mengembangkan pengeboran minyak di wilayah ini tanpa sebuah perencanaan yang baik pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun1970-an, dan dengan infrastruktur yang minim. Akibatnya, telah timbul masalah sosial dan lingkungan yang sangat besar.

Perusahaan-perusahaan minyak menjanjikan lapangan-lapangan kerja untuk masyarakat lokal tetapi umumnya lapangan kerja yang sifatnya hanya jangka pendek karena kontrak yang tidak pasti, tidak ada jaminan keamanan atau tenaga kerja kasual, dan dengan kondisi keselamatan kerja yang buruk. Kota-kota pusat minyak menjamur dan bersamaan dengan itu pelbagai tindakan kejahatan dan prostitusi juga turut berkembang. Kilang-kilang minyak cenderung berlokasi di daerah-daerah yang lebih miskin dan jauh, dan sekali kontrak selesai, masyarakat lokal ditinggalkan begitu saja tanpa mendapat apa-apa. Karena ladang-ladang pertanian mereka telah lama diabaikan, maka mereka hampir tidak bisa memanen apa pun. Texaco — yang bergabung dengan Chevron pada tahun 2001 — telah meninggalkan wilayah tersebut. Banyak warga lokal juga pergi meninggalkan daerah Orienta, tapi hal ini terjadi bukan atas sebuah pilihan bebas. Kerusakan telah dilakukan terhadap mereka dan terhadap hutan tropis wilayah itu.

Perusahaan Texaco telah membuang miliaran galon [1 galon = 3,8 liter] limbah beracun di hutan tropis dari tahun 1964 sampai 1992 ketika melakukan operasi pengeboran ratusan sumur minyak, kata Amazon Pertahanan Koalisi. "Sekarang limbah ini mengancam akan memunahkan lima kelompok suku asli dan telah menciptakan apa yang para ahli percaya bisa menjadi bencana lingkungan terburuk di planet bumi selain bencana kebocoran reaktor nuklear Chernobyl [di Rusia pada tahun 1986]. Perusahaan Chevron dengan sengaja membuang ke hutan tropis Ekuador lebih dari 30 kali jumlah minyak yang ditumpah dalam bencana *Exxon Valdez*" [pada 24 Maret 1989 di Laut Alaska].[20] Sekurang-kurangnya satu

20 Yasuni website. <http://www.sosyasuni.org/en/General/The-worst-case-of-oil-pol-

penduduk suku asli, yaitu Suku Tetetes, telah menjadi punah sama sekali. Penduduk sebuah suku asli yang lain, Suku Cofan, telah turun dari 15.000 jiwa menjadi hanya sekitar 300 orang.[21]

Texaco telah membantah bahwa operasi perusahaannya telah merusak wilayah tersebut dan mengklaim bahwa mereka memiliki standar internasional dan bertanggung jawab terhadap standar ini. Pada tahun 2003, sebanyak 30.000 jiwa penduduk hutan tropis mengajukan gugatan *classaction* di Ekuador terhadap perusahaan Texaco Chevron. Gugatan ini (Aguinda vs Chevron Texaco) memiliki potensi untuk sebuah preseden hukum yang penting. Ini merupakan yang pertama dalam sejarah di mana penduduk suku asli yang mendiami hutan telah mampu memperoleh yurisdiksi dalam sistem pengadilan mereka sendiri melawan sebuah perusahaan minyak asing yang besar.

Para penduduk penghuni wilayah hutan Ekuador menegaskan bahwa Chevron secara sistematis membuang 18,5 miliar galon [sekitar 72,3 miliar liter atau 723 juta drum kalau 1 drum berisi 100 liter] limbah beracun yang sangat karsinogenik dalam lubang-lubang, di rawa-rawa, kali sungai dan sungai-sungai besar. Akibat dari bencana ini — dijuluki sebagai "Chernobyl hutan tropis" oleh penduduk setempat — "tampak dalam banyaknya kematian karena kanker dan keguguran kandungan kaum ibu yang tak tak terhitung jumlahnya dan bayi-bayi yang dilahirkan dalam keadaan cacat atau tidak normal secara genetik".

Selama bertahun-tahun, racun dari lubang-lubang pembuangan limbah minyak telah merembes masuk ke dalam aliran air kali dan sungai, sehingga mencemari ekosistem yang luas dan membawa racun-racun ini hingga ke wilayah negara tetangga Peru. Karena tidak ada pilihan lain, masyarakat setempat kini bergantung pada sumber-sumber air yang terkontaminasi untuk keperluan air minum. Ribuan orang secara perlahan-lahan meracuni diri mereka hingga beberapa kali sehari karena mereka harus

---

lution-on-the-planet.html> (accessed 4 February 2008).

21 Jochnick, C., 'Amazon oil offensive', *Multinational Monitor* (January/February 1995).

mengonsumsi air kotor ini, baik untuk minum maupun untuk mandi, dan menghirup uap dari limbah minyak di lubuang-lubang pembuangan. Tingkat masalah leukemia [penyakit kanker darah] pada masa kanak-kanak empat kali lebih tinggi dari daerah-daerah lain di Ekuador. Banyak anak yang barusan berusia hanya beberapa bulan telah meninggal karena leukemia.

"Apa yang perusahaan Chevron lakukan di Ekuador adalah akibat langsung dari keputusan perusahaan untuk memprioritaskan laba keuntungan jangka pendek bagi mereka sendiri dengan mengorbankan kehidupan masyarakat setempat dan lingkungan mereka."[22] Hal lain yang menjadi dasar dari masalah ini "adalah kurangnya integrasi dari kegiatan-pengolahan minyak ke dalam lingkungan setempat", kata sebuah laporan dari ILO: "Masalahnya meliputi infrastruktur fisik dan sosial yang tidak memadai, obat-obatan, prostitusi dan ketegangan antara para karyawan perusahaan minyak yang relatif hidup makmur di satu pihak dan seluruh penduduk Ekuador yang lain."[23] Kurangnya perawatan dalam eksploitasi minyak bumi merupakan salah satu faktor utama yang menyebakan terjadinya masalah ini.

Perusahaan-perusahaan minyak di Burma dituduh karena secara langsung mendukung rezim yang ilegal, dan mendapat keuntungan dari eksploitasi masyarakat penduduk asli yang dipekerjakan sebagai tenaga kerja budak untuk membangun jalan raya dan instalasi perusahaan minyak. Sejak akhir tahun 2004, rezim pemerintah Burma telah memberikan perusahaan-perusahaan minyak asing kesempatan-kesempatan yang semakin banyak untuk ekspansi dan sejumlah perusahaan secara aktif melakukan ekstraksi minyak pada tahun 2007, di mana perusahaan minyak Prancis — Total — yang merupakan perusahaan minyak keempat terbesar di dunia, menjadi pioneernya.

---

22 Amazon Defense Coalition website (lihat catatan kaki 19).

23 Laporan Organisasi Buruh Internasional, dikutip dalam PBB, *TransnasionalCorporations in World Development*, New York: UN, 1988, p. 224.

Perusahaan Total telah berinvestasi secara besar-besaran di Burma pada saat perusahaan-perusahaan minyak lainnya menarik diri. Perusahaan Total memainkan peranan penting dalam "mendanai dan melindungi kediktatoran brutal militer di Birma", kata sebuah Kampanye untuk Burma di Inggris.[24] Perusahaan Total merupakan perusahaan penyandang dana terbesar dari Eropa untuk rezim diktator Burma. Keberadaan perusahaan ini di Burma memengaruhi kebijakan politik pemerintah negara-negara Uni Eropa terhadap Burma. Ketika pemerintah Uni Eropa, misalnya, hendak melakukan sanksi [ekonomi dan politik terhadap permerintah diktator Burma], Pemerintah Prancis secara efektif menolaknya dengan menggunakan hak veto untuk melindungi perusahaan Total yang berbinis di Burma. "Pelanggaran kejam terhadap hak-hak asasi asasi manusia (telah) dilakukan di daerah pipa-pipa minyak dari perusahaan Total oleh pasukan keamanan yang ditugaskan khusus untuk menjaga pipa-pipa minyak", dan penjualan senjata di Burma berhubungan erat dengan bisnis minyak dari perusahaan ini.

"Perusahaan Total merupakan sebuah perusahaan yang telah banyak membantu memberikan penopangan terhadap rezim diktator di Burma," kata John Jackson, direktur Kampanye untuk Burma di Inggris. "Rezim diktator Burma tahu bahwa ia aman dari kebijakan politik pemerintah Uni Eropa yang keras" [karena ia dilindungi Perancis melalui Perusahaan Total].[25] Pemerintah Amerika Serikat melarang menanam investasi baru di Burma pada tahun 1997, tetapi [larangan ini tidak efektif karena] perusahaan minyak Amerika Serikat Chevron juga merupakan bagian dari konsorsium dengan rezim dikator Burma dan perusahaan Total dari Prancis.

Aung San Suu Kyi, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian dan pemimpin gerakan demokrasi di Burma, telah berulang kali meminta perusahaan-perusahaan seperti Total untuk meninggalkan Burma. Dia telah mengatakan bahwa: "Perusahaan Total telah menjadi pendukung utama

24 Burma Campaign UK, 'Totalitarian oil — Total Oil: fuelling the oppression in Burma', 2005.<http://www.burmacampaign.org.uk/pm/weblog.php?id=P152> (accessed 30 October 2007).

25 *Ibid.*

rezim militer Burma."[26] Protes-protes besar di jalan-jalanan di Burma pada bulan September akhir tahun 2007, yang dipimpin para biksu, ditindas dengan kejam oleh rezim diktator Burma. Perusahaan Total mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas situasi saat itu, namun tidak mengutuk tindakan represif pemerintah Burma terhadap rakyatnya.[27]

Geoffrey Chandler, ketua Pendiri Kelompok Bisnis Amnesti Internasional Inggris, mengatakan bahwa kebisuan perusahaan Total dalam menghadapi rangkaian pelanggaran hak asasi manusia:

> menyiratkan persetujuan dan memberikan dukungan moral untuk kelanjutan [bisnis] mereka.... Pengklaiman Total... bahwa ia berusaha untuk menegakkan prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan suatu pernyataan yang jelas-jelas palsu. Perusahaan Total memiliki dua pilihan: berbicara [menentang pelanggaran hak asasi manusia] atau menarik diri [keluar dari Burma]. Jika perusahaan tidak melakukan salah satu dari kedua pilihan ini, maka perusahaan Total layak dianggap dan diperlakukan sebagai sebuah *paria* [yang paling dijijikkan atau *social outcast*], yang menempatkan laba keuntungan bisnis di atas prinsip apa pun.[28]

Pada bulan Oktober 2007, pemerintah Belgia membuka kembali sebuah kasus yang dibawa oleh pengungsi Burma bahwa perusahaan Total terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan di negara mereka. Empat pengungsi menuduh perusahaan telah menggunakan tenaga kerja paksa yang diberikan oleh rezim militer Burma untuk membangun pipa-pipa minyak, dan telah memberikan dukungan logistik dan keuangan pada 1990-an terhadap junta militer Burma. Sebuah kasus semacam ini sebelumnya telah diberhentikan [perkaranya] di Prancis.[29]

---

26 *Ibid.*

27 Pernyatan oleh Perusahaan Total, 26 September 2007. <http://burma.total.com/en/news/p_5_4.htm> (accessed 30 October 2007).

28 Bisnis and Human Rights Resource Center, October 2007. <www.bisnis-humanrights.org/Links/Repository/162701> (accessed 4 February 2008).

29 'Belgium reopens Myanmar humanity crimes probe against oil giant Total', Agence France-Presse, 2 October 2007. <http://www.bisnis-humanrights.org/Links/Repository/553117> (accessed 30 October 2007).

ExxonMobil, sebuah perusahaan minyak terbesar di dunia, merusak kehidupan masyarakat miskin dengan sebuah cara yang berbeda. Ia telah menjadi satu-satunya perusahaan minyak terbesar yang menyangkal adanya pemanasan global bumi (*global warming*). Sekarang ini ada sejumlah besar bukti yang menunjukkan bahwa perubahan iklim merupakan sebuah fakta yang sedang terjadi dan masyarakat-masyarakat miskin di dunia paling banyak menderita sebagai konsekuensinya. Beberapa petani tidak dapat menanam lagi seperti biasanya karena curah hujan tidak cukup. Persediaan makanan mereka semakin ketat dan ketersediaan air menurun. Cuaca yang tidak menentu, banjir, kekeringan, dan badai sedang meningkat terus, dan banyak orang yang meninggal setiap tahun akibat penyakit yang dipicu oleh perubahan iklim (lihat bahan Bab 4).

Perusahaan ExxonMobil "telah berjuang melebihi perusahaan-perusahaan lainnya untuk menghentikan dunia dari usaha mengatasi perubahan iklim", kata Greenpeace:

> Selama lebih dari sepuluh tahun, ExxonMobil telah mencoba menyabotase negosiasi-negosiasi tentang perubahan iklim internasional dan memblokir perjanjian-perjanjian yang akan mengarah pada pengurangan emisi gas rumah kaca. [Ia] juga mendanai kelompok-kelompok tertentu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan tandingan yang sebetul ilmu sampah (*junk science*) yang menyangkal fakta-fakta perubahan iklim dunia dan mendukung kelompok skeptis iklim yang menunda tindakan yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan perubahan iklim.[30]

Sebuah studi oleh Persatuan Ilmuwan Peduli Amerika Serikat (*US Union of Concern Scientist*) menemukan bahwa ExxonMobil telah mendanai 29 kelompok yang menyangkal fakta perubahan iklim pada tahun 2004. Sejak tahun 1990, kata laporan itu, perusahaan ExxonMobil telah menghabiskan dana lebih dari US$19 juta (sekitar Rp190 miliar) untuk memdanai kelompok-kelompok organisasi yang mempromosikan

30 Greenpeace, 'Stop Esso', October 2007. <http://www.greenpeace. org.uk/climate/stop-esso> (accessed 30 October 2007).

pandangan mereka melalui publikasi dan situs web internet yang tidak di-review secara bersama oleh komunitas ilmiah.[31]

Bantuan Bank Dunia

Kelompok Bank Dunia adalah penyandang dana utama dari ekstraksi pengeboran minyak di negara-negara berkembang. Pada tahun 2007, Korporasi Keuangan Internasional (*International Finance Corporation* atau IFC), sebuah sayap Bank Dunia yang memberi pinjaman kepada sektor swasta [dalam hal ini TNCs], memberikan lebih dari US$645 juta (sekitar Rp6,45 triliun) kepada perusahaan-perusahaan minyak dan gas. Ini merupakan peningkatan minimal 40% dari pinjaman yang diberikannya pada tahun 2006. Bank Dunia meningkatkan komitmennya memberikan pinjaman kepada sektor energi pada tahun 2006 dari US$2,8 miliar (sekitar Rp28 triliun) menjadi US$4,4 miliar (sekitar Rp44 triliun). Sektor minyak, gas, dan listrik masih menguasai 77% dari total program sektor energi, sedangkan "energi yang dapat diperbarui" — seperti energi angin, matahari, dan air — hanya menguasai 5%.[32]

Asosiasi Pembangunan Internasional (*International Development Association* atau IDA), yaitu salah satu sayap lain dari Bank Dunia dengan fungsi utama memberikan pinjaman keuangan kepada negara-negara miskin, juga terlibat. IDA dan MIGA (*Multilateral Investment Guarantee Agency* — satu sayap lain lagi dari Bank Dunia) memberikan pinjaman garansi masing-masing kepada pemerintah Ghana dan perusahaan Saluran Pipa Afrika Barat. Pinjaman-pinjaman ini adalah garansi risiko keuangan dan politik untuk proyek Saluran Pipa Minyak di Afrika Barat sebesar US$600 juta (sekitar Rp6 triliun) dan "bertujuan untuk melindungi investasi dari perusahaan transnasional minyak Chevron Texaco dan Shell".[33]

---

31 SourceWatch website. <http://www.sourcewatch.org/index.php?title= Exxon_Mobil> (accessed 4 February 2008).

32 Lihat End Oil Aid website.<http://www.endoilaid.org/category/oil-subsidies> (accessed 4 February 2008).

33 Bretton Woods Project, 'The World Bank and the West Africa Gas Pipeline Project', 5 October 2007. <www.brettonwoodsproject.org/art-557175-29k> (accessed 30 October 2007).

Proyek ini akan mengalirkan minyak dari Nigeria melalui pipa sepanjang 680 km ke titik terminalnya di Takoradi, Ghana. Pipa ini melintasi dan meninggalkan bekasnya pada masyarakat di negara bagian Ogun dan Lagos di Nigeria Barat Daya. Tapi ia bisa mengintensifkan degradasi lingkungan alam setempat dan "mengalihkan perhatian dari isu yang sangat penting tentang pengurangan pembakaran minyak". Padahal ada konsensus umum bahwa pembakaran minyak seharusnya berhenti. Tapi anehnya bahwa Bank Dunia tetap mendukung sebuah proyek yang justru akan meningkatkan pembakaran minyak dalam komunitas-komunitas masyarakat ini".[34]

Tidak puas dengan respons dari Bank Dunia terhadap keprihatinan-keprihatinan mereka, komunitas lokal dan kelompok-kelompok masyarakat sipil mengajukan petisi kepada Panel Inspeksi Bank Dunia dan minta untuk membuat investigasi atas kegagalannya untuk mengikuti kebijakan-kebijakan dan prosedur yang dibuatnya sendiri. Panel ini telah mengadakan tiga kunjungan ke Nigeria, di mana kunjung yang terakhir adalah pada bulan Juli 2007.

Tampaknya, Bank Dunia sama sekali tidak tertarik untuk memastikan bahwa ia akan patuh terhadap kebijakan keamanannya yang dibuatnya sendiri:

> Tampaknya kepentingan Bank Dunia di dalam proyek ini tidak meliputi pengurangan kemiskinan atau perlindungan sosial dan lingkungan hidup. Kepentingan utamanya dapat dilihat dengan jelas dalam dokumen penilaian proyek seperti dokumen yang 'mengharmonisasikan kerangka hukum dan kebijakan negara-negara peserta Afrika Barat'. Melalui kolusi dengan perusahaan-perusahaan minyak transnasional dan dengan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional lainnya, Bank Dunia mau meletakkan fondasi masa depan dari proyek-proyek energi yang tersentralisir di mana pasokan energi dipastikan akan berada di tangan segelintir lembaga atau segelintir perusahaan terpilih, dengan memberikan lembaga atau perusahaan-perusahaan ini kendali tak terbatas atas kedaulatan energi dunia kita.[35]

34 *Ibid.*
35 *Ibid.*

Pada akhir bulan Oktober 2007, lebih dari 200 organisasi dari 56 negara meminta Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional untuk mengakhiri pemberian subsidi untuk industri minyak. Kelompok-kelompok yang dimaksudkan menunjuk kepada 'bantuan minyak' (*oil aid*) sebagai salah satu hambatan untuk memerangi perubahan iklim dan mengatasi akses energi di negara-negara berkembang.[36]

Di satu pihak Bank Dunia mendukung kempanye penyelamatan dan pemeliharaan lingkungan hidup, tapi di pihak lain kebijakan-kebijakan Bank Dunia terhadap industri ekstraksi mineral tidak banyak berubah. "Kebijakan Bank Dunia terhadap masalah perubahan iklim di satu pihak dan energi di pihak lain tidak konsisten dan saling bertentangan," kata Jennifer Kalafut dari *Oil Change International*, sebuah LSM yang berkampanye untuk mengekspos biaya riil pengeboran dan pengolahan minyak. "Meskipun ada komitmen untuk memotong emisi gas rumah kaca secara global, Bank Dunia tetap terus meningkatkan dukungannya terhadap proyek-proyek ekstraksi minyak di seluruh dunia.[37]

> Dengan mendanai proyek-proyek pengolanan minyak, Bank Dunia merusakkan tujuan-tujuannya sendiri untuk memerangi kemiskinan energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Bank Dunia juga melanggengkan masalah-masalah konflik dan pelanggaran HAM yang sering berhubungan erat dengan proyek-proyek ekstraktif, seperti dalam kasus pipa minyak Chad-Kamerun.[38]

Kesimpulan

Kesan keseluruhan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan minyak adalah bahwa mereka tidak sensitif terhadap mata pencaharian dan kebu-

---

36 Oil Change International, 'Hundreds say World Bank needs an oil change: Global coalition calls for an end to oil aid'. <http://www.endoilaid.org/2007/10/19/hundreds-say-world-bank-needs-an-oil-change-global-coalition-calls-for-an-end-to-'oil-aid'/> (accessed 30 October 2007).

37 *Ibid.*

38 Horta, K., 'Environmental defence' in Oil Change International, 'Hundreds say World Bank needs an oil change'.

tuhan-kebutuhan masyarakat setempat yang kebetulan hidup di mana cadangan-cadangan minyak sedang disadap. Mereka juga tidak peduli dengan apa yang akan terjadi warga masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah ini setelah cadangan minyak habis. Sebagian besar masyarakat yang hidup di wilayah penyadapan minyak termasuk kelompok warga masyarakat termiskin dan paling rentan di dunia. Tetapi ketika masyarakat lokal hidup dan tinggal di daerah-daerah yang membawa keuntungan bagi TNCs, maka masyarakat ini tampaknya dapat digadai atau dikorbankan untuk dibuang seperti pion-pion dalam papan catur bisnis perusahaan. TNCs minyak, sama halnya dengan TNCs di bidang pertambangan, seharusnya mesti peka terhadap kehidupan warga masyarakat setempat dan diwajibkan untuk membersihkan daerah setelah ekstraksi dan harus meninggalkannya seperti keadaannya yang semula.

BAB 11

Pembujuk-Pembujuk Korporasi

Mereka menyewa konselor-konselor untuk melawan mereka [rakyat] dan menggagalkan rencana mereka. (Ezra 4:5)

Jika sebuah bisnis ingin memengaruhi apa yang terjadi di pemerintahan, orang seperti saya dapat sangat menolong. (Derek Draper, pelobi politik yang berbasis di Inggris)

Di kota Brussel, ibu kota atau markas pemerintahan negara-negara Uni Eropa (selanjutnya UE), lebih dari 10.000 pelobi hilir-mudik menjalankan bisnis mereka. Mereka adalah pelobi-pelobi profesional yang bekerja untuk kepentingan perusahaan-perusahaan. Dibayar tinggi, dengan sikap penuh pengorbanan, mereka berusaha untuk memengaruhi Parlemen Eropa, Komisi, anggota-anggota Parlemen Eropa, dan lembaga-lembaga UE lainnya. Para pelobi ini dibayar untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah negara UE menguntungkan industri dan perusahaan-perusahaan transnasional yang mereka wakili. Mereka tidak secara otomatis bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi biasanya mereka memakai uang untuk mencapai target yang mereka inginkan. Dan jika lobi-lobi mereka tidak berjalan baik di Brussel, maka para CEO (*Chief Executive Officer*/President perusahaan besar) dari TNCs selalu dapat berkontak langsung melalui telepon dengan orang-orang yang berada pada tingkat yang sangat tinggi [mislanya dengan presiden atau perdana menteri sebuah negara UE].

Brussel dilihat oleh Washington [pemerintah Amerika Serikat] sebagai sebuah arena lobi perusahaan. Kedua kota ini [Brussel dan Washington

DC] merupakan dua arena bagi pembujuk-pembujuk (pelobi) perusahaan. TNCs memiliki akses yang sangat tinggi kepada para pembuat kebijakan yang paling senior. Mereka dapat menelepon dan memanggil seorang presiden [dari sebuah negara], para perdana menteri dan pimpinan utama dari lembaga-lembaga internasional untuk memperhatikan kepentingan bisnis mereka, dan permintaan mereka ini hampir pasti akan diperhatikan. Mereka tahu bahwa menteri-menteri pemerintah kerap dapat dibujuk untuk meluluskan klaim kepentingan sebuah TNC jika TNC bersangkutan menjanjikan akan membuka banyak lapangan kerja, atau bahkan jika bisnis kelapa sawit dikelola dengan cara yang halus atau tidak begitu halus [artinya: sering tak peduli apakan bisnis itu dalam prosesnya akan langgara HAM atau tidak]. Aneh bin aneh! Walaupun perusahaan besar di satu pihak sering membayar dengan uang untuk mendapatkan kepentingan bisnis yang mereka inginkan, negara-negara berkembang di pihak lain sering hampir bangkrut. Di sebuah negara miskin khususnya, para menteri sering tidak menolak untuk menerima kesepakatan yang memberi mereka tingkat keuntungan pribadi.

Para pembujuk perusahaan telah sangat sukses. Mereka telah menetralisir PBB dan berselingkuh dengan pemerintah negara dan bisa ikut menyusun seperangkat gagasan tentang regulasi atau undang-undang (lihat bahan Bab 12). Pada KTT Bumi di Rio de Janeiro (Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan) pada tahun 1992, misalnya, ketetapan-ketetapan yang mengatur bisnis TNCs absen dari diskusi PBB. Tapi orang tidak perlu terkejut dan heran. Karena sebelum KTT PBB ini dimulai, perusahaan-perusahaan telah berjuang melalui para pelobi mereka supaya isu tentang mereka tidak dimasukkan dalam agenda sidang.

Memengaruhi PBB

Kebijakan-kebijakan PBB dan lembaga-lembaganya sesungguhnya telah sangat dipengaruhi oleh TNCs. Dalam bulan-bulan sebelum KTT Rio de Janeiro tahun 1992, Kamar Dagang Internasional dan anggota-anggotanya — di mana banyak di antara mereka adalah TNCs — mendesak supaya

Agenda 21, yaitu dokumen tentang pembangunan berkelanjutan yang akan disepakati oleh para pemimpin pada puncak KTT Rio, tidak boleh mengandung referensi yang berbicara tentang TNCs atau mengandung undang-undang yang mengatur TNCs. Semua referensi dalam draft asli yang mengandung hal-hal yang berhubungan dengan masalah bisnis TNCs akhirnya dihapus.

Pengaruh TNCs di PBB sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Masalah ini pernah disoroti pada tahun 1978 ketika sebuah organisasi yang berbasis di Swiss, *Asosiasi pour un Développement Durable et Solidaire* (Asosiasi Pembangunan yang Berkelanjutan dan Solidaritas), yang kutipannya diterbitkan dari sebuah dokumen internal menunjukkan bagaimana korporasi-korporasi beroperasi dalam tubuh PBB. Dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa TNCs telah berhasil "secara sembunyi-sembunyi menyusup ke dalam sistem kerja PBB dan lembaga-lembaganya dan menetralkan mereka sebagai kekuatan potensial yang menyeimbangkan, atau bahkan mereka dapat memanfaatkan badan PBB dan lembaga-lembaga bertindak memihak kepentingan-kepentingan perusahaan dunia".[1]

Selama akhir tahun 1970-an dan 1980-an, perusahaan-perusahaan berhasil membunuh [memboikot] kode etik yang diusulkan untuk mengatur tingkah laku TNCs, pada saat itu sedang dibahas di badan PBB. Di PBB sendiri pada waktu itu ada sebuah badan khusus yang bertugas untuk memantau dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan TNCs yang disebut *United Nations Centre on Transnasional Corporations* (UNCTC). Kala itu badan PBB telah mencoba menyusun kode etik atau aturan yang "menetapkan standar-standar untuk TNCs dari semua negara dalam rangka melindungi kepentingan negara-negara tuan rumah, memperkuat kemampuan negosiasi pemerintah negara dan memastikan kesesuaian antara operasi bisnis perusahaan-perusahaan transnasional dengan cita-cita pembangunan nasional pemerintah negara tuan rumah". Kode etik ini juga bertujuan untuk "menetapkan standar-standar perlakuan

1 Von Bern, E., *The Infiltration of the UN Sistem by Multinational Corporations*, Zurich: Association pour un Développement Durable et Solidaire, 1978.

terhadap TNCs oleh pemerintah negara setempat untuk melindungi kepentingan yang sah dari para investor... dan menciptakan iklim yang baik bagi investasi langsung asing (*Foreing Direct Investment* atau FDI) yang bermanfaat bagi semua pihak dalam hubungan dengan investasi".[2]

Akan tetapi, pengaruh TNCs sangat kuat. Negara-negara Barat mendesak dalam setiap negosiasi internasional supaya negara-negara berkembang mendorong TNCs dan melindungi investasi-investasi mereka. Para pemerintah negara-negara berkembang pada saat yang sama menuntut agar perusahaan-perusahaan asing internasional mematuhi tujuan pembangunan mereka. Para pemerintah negara berkembang menginginkan ada peraturan internasional yang mengatur tanggung jawab TNCs terhadap ekonomi, penduduk, dan lingkungan alam negara mereka. Dalam diskusi-diskusi internasional, aspek yang dituntut ini mendapat perhatian yang sangat kurang dibandingkan aspek-aspek lain yang mengatur bagaimana seharusnya pemerintah negara-negara berkembang memperlakukan perusahaan-perusahaan asing secara baik.

Ketika, pada tahun 1980-an, semakin banyak negara berkembang menghapus undang-undang yang dianggap menghambat perdagangan internasioanl, dan mulai menawarkan jaminan-jaminan proteksi yang melindungi bisnis TNCs, negara-negara Barat, yang telah dipengaruhi oleh TNCs asal negara mereka, mulai kehilangan minat terhadap kode etik atau regulasi internasional yang mengatur tingkah laku bisnis TNCs. Pada tahun 1992, negosiasi-negosiasi tentang kode etik ini ditinggalkan secara resmi, dan lebih tragis lagi UNCTC itu diturunkan derajat wewenangnya dan diganti namanya dari sebelumnya *United Nations CentreonTransnasional Corporations* (Pusat PBB untuk Mengatur TNCS) menjadi "*Transnasional Corporations and Management Division*" (Korporasi Transnasional dan Divisi Manajemen). Ketidakmampuan UNCTC untuk menyusun kode etik yang mengatur tingkah laku bisnis TNCs sangat menggambarkan betapa selama ini TNCs memiliki pengaruh yang kuat terhadap

2 United Nations Centre on Transnasional Corporations leaflet, DESI E. 130, New York: UNCTC, 1986.

sistem kerja badan PBB dan terhadap sistem kepemerintahan setiap negara. TNCs, dan bukan pemerintah, yang membuat pemerintahan sebuah negara berjalan. TNCs telah menggunakan kekuasaan mereka yang besar untuk memengaruhi agenda PBB sekian rupa sehingga perundingan atas kode etik bisnis itu akhirnya bermuara pada titik akhir yang justru lebih menguntungkan kepentingan bisnis mereka. Mereka membuat sebuah kudeta besar dan secara efektif mengubah UNCTC menjadi sebuah institusi PBB untuk kepentingan TNCs [*UN Centre for TNCs*] ketimbang sebelumnya sebuah institusi PBB yang mengatur TNCs [*UN Centre on TNCs*].

Alih-alih kode etik yang mengatur tingkah laku bisnis TNCs, akhirnya yang muncul justru apa yang mereka sebut sebuah "*Global Compact*". Ini merupakan sebuah perebutan kekuasaan (kudeta) publik yang sangat besar oleh dunia korporasi. Gagasan tentang *Global Compact* diluncurkan pada tahun 1999 oleh Kofi Annan, Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu. Tujuannya adalah bahwa perusahaan menyetujui prinsip-prinsip tertentu mengenai hak asasi manusia, perburuhan, lingkungan hidup, dan aksi anti-korupsi. *Global Compact* secara sempurna sesuai dengan kepentingan bisnis TNCs. *Global Compact* bersifat sukarela. Ia tidak seperti aturan hukum atau undang-undang yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan [dan bila dilanggar bisa ditindak secara hukum pula]. Pada bulan Desember 2007, lebih dari 600 TNCs mendaftarkan diri menjadi anggotanya.[3] TNCs bangga akan keanggotaan mereka dalam *Global Compact*. Mereka suka berpikir bahwa *Global Compact* menganugerahkan mereka kehormatan publik yang mereka butuhkan, yaitu keistimewaan bisa berelasi secara formal dengan PBB. *Global Compact* berfungsi untuk menghalang setiap kemungkinan adanya regulasi dan membantu TNCs untuk menangkal keinginan dari pihak siapa saja [terutama PBB] untuk menciptakan peraturan-peraturan yang mengikat secara hukum setiap aktivitas bisnis mereka. Sehubungan dengan ini Jean Ziegler, Pelapor Khusus PBB menyangkut Hak atas Pangan, menyimpulkan: "Kita mesti

3 Lihat United Nations Global Compact, list of participants. <http://www.unglobalcompact.org> (accessed 15 January 2008).

melawan *Global Compact*, tidak hanya mengkritiknya, karena ia adalah operasi relasi publik dari perusahaan-perusahaan multinasional besar."[4]

Pada tahun 2003, alih-alih regulasi, yang lahir adalah justru "Norma-norma PBB tentang Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional" (*UN Norms of the Responsibilities of TNCs*). Norma-norma dari PBB ini dimaksudkan untuk menjadi patokan untuk menilai undang-undang nasional sebuah negara untuk menentukan apakah pemerintah negara tersebut menjalankan kewajibannya melindungi hak asasi manusia. Tapi Norma PBB ini telah gagal menyaring seperangkat prinsip yang bisa berlaku untuk semua perusahaan. Dalam teori, Norma-norma yang ditetapkan PBB memberikan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pasar dengan kriteria sosial dan lingkungan yang autoritatif, tapi dalam kenyataannya pelanggaran HAM oleh TNCs tetap berjalan terus. Tingkat dan jenis pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan-perusahaan "bisa dibuktikan secara luas", kata Geoffrey Chandler dari Kelompok Bisnis Inggris Amnesti Internasional.[5]

Global Compact telah dibandingkan dengan "*happy-go-lucky club*" (orang yang tak kenal susah) dan Norma PBB memenangkan sangat sedikit dukungan dari kalangan LSM yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Inisiatif PBB yang juga ternyata gagal ini — Norma PBB — seharusnya tidak dibiarkan mengaburkan perlunya regulasi yang mengikat bisnis TNCs dan gerakan masyarakat untuk menentang kekuasaan TNCs (tentang hal ini, lihat bahan Bab 12).

Perusahaan-perusahaan telah menikmati "status khusus" dengan lembaga besar badan khusus PBB, yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agricultural Organization* atau FAO). Melalui Program Kerja Sama Industri (*Industri Cooperative Programme* atau ICP) dari FAO, TNCs memiliki "pengaruh yang kuat" terhadap kebijakan FAO, kata Zafrullah Chowdhury. Dia mengutip Profesor Eric Jacoby, yang bekerja

4 Dikutip dalam Capdevila, G., 'UN Global Compact with bisnis "lacks teeth" — NGOs', InterPress News Agency, 6 July 2007.

5 Chandler, Geoffrey, press statement. <http://www.ethicalcorp.com/content.asp?ContentID=5420> (accessed 15 January 2008).

pada FAO selama bertahun-tahun: "Melalui wakil-wakil mereka di Komite Sentral FAO/ICP... TNCs telah memperoleh informasi berharga mengenai peluang-peluang investasi di masa-masa yang akan datang. Sejak ICP telah menjadi bagian integral dari Sistem PBB, FAO sebenarnya berperan sebagai sebuah agen yang melayani kepentingan bisnis perusahaan-perusahaan transnasional di negara-negara yang sedang berkembang".[6]

Kritikan Profesor Eric Jacoby ini sangat penting, walaupun tidak semua proyek FAO selama ini hanya melayani kepentingan bisnis TNCs (proyek pemberantasan hama terpadu FAO di Asia, misalnya, dapat me-nyebabkan penurunan penjualan pestisida oleh TNCs). Tapi link FAO dengan industri terlihat jelas pada KTT Pangan Dunia pada bulan November 1996, ketika FAO mengeluarkan sebuah kotak media yang bertuliskan nama "*New Holland Agricultural machinery worldwide*" (Mesin pertanian New Holland seluruh dunia). New Holland adalah pembuat alat-alat/mesin pertanian terkemuka di dunia yang berbasis di Belanda.

Sejumlah kebijakan dari WHO juga menunjukkan keengganan untuk mengecewakan TNCs, bahkan jika TNCs coba mencegah pemerintah negara-negara untuk mengeluarkan kebijakan yang didukung oleh WHO. Pada tahun 1978, Majelis Kesehatan Dunia dari WHO secara resmi merekomendasikan Program Aksi bagi Obat-Obat Esensial (lihat bahan ini pada Bab 4). Pada tahun 1981 program ini dilembagakan secara resmi oleh WHO dan baru pada tahun 1988 Majelis Kesehatan Dunia dari FAO mengadopsi kriteria-kriteria etis untuk promosi obat-obatan.

Demikian juga halnya dengan WHO. Hingga belum lama ini WHO dalam kerjanya tidak memberikan perhatian yang serius terhadap masalah merokok, meskipun merokok merupakan penyebab tunggal terbesar dari penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Pada tahun 1980-an, ketika WHO memproklamirkan "Kesehatan untuk Semua Orang hingga sebelum Tahun 2000", WHO mempekerjakan hanya satu orang pegawai paruh waktu untuk program kontrol merokok. Hal ini menunjukkan bahwa WHO tidak serius menahan kepentingan-kepentingan TNCs. Mestinya

6 Chowdhury, Z., *ThePoliticsofEssentialsDrugs*, London: Zed Books, 1995, p. 140.

jelas bagi WHO bahwa sebelum rokok dan bisnis rokok berhenti, maka program WHO yang berjudul "Kesehatan untuk Semua Orang" tidak akan pernah ada hasilnya. TNCs — bersama dengan Amerika Serikat dan sejumlah pemerintah negara-negara Eropa — tampaknya telah membujuk WHO untuk memberikan prioritas yang rendah terhadap masalah yang begitu besar terhadap kesehatan manusia. Namun, pada bulan Juli 1998 Dr. Gro Harlem Brundtland yang mengambil alih jabatan direktur jenderal WHO mulai melakukan kampanye melawan tembakau sebagai salah satu prioritas program kerjanya.

Karena kebutuhan untuk mengumpulkan uang bagi pekerjaan mereka, badan-badan pembangunan bisa tergoda untuk menerima dana-dana dari TNCs. Bagi perusahaan-perusahaan, penerimaan dana-dana tersebut oleh pemerintah sebuah negara merupakan sebuah kemenangan mereka di bidang hubungan kemasyarakatan. Tapi ia bisa juga menyebabkan distorsi yang serius terhadap prioritas-prioritas tertentu.

Penjinakan terhadap UNCTAD

Didirikan pada tahun 1964 sebagai pelaksanaan dari sebuah resolusi Majelis Umum PBB pada tahun1961 yang mengungkapkan keprihatinan menyangkut prospek-prospek perdagangan negara-negara berkembang, Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (*United Nations Conferences on Trade and Development* atau UNCTAD) telah berpakaian seperti perusahaan. Mandat yang diberikan kepada UNCTAD pada mulanya adalah untuk membantu negara-negara miskin dengan usaha-usaha perdagangan dan pembangunan. Pada awalnya UNCTAD mulai menjalankan misinya dengan ide-ide mau meningkatkan pendapatan devisa asing melalui ekspor komoditas-komoditas primer seperti tembaga dan kopi, dan memampukan negara-negara miskin untuk memperoleh pendapatan dari ekspor bahan makanan yang telah diolah (di pabrik) terlebih dahulu. Bertemu dalam sebuah konferensi besar sekali setiap empat tahun, pekerjaan UNCTAD hampir tidak menghasilkan hal-hal yang penting, meskipun akhir-akhir ini ia dipandang sebagai sebuah lembaga PBB yang berada pada pihak orang miskin. Salah satu dari prestasi yang

sangat sedikit dari konferensi-konferensi UNCTAD adalah pembentukan Dana Bersama untuk Komoditas, sebagai pelaksanaan dari konferensi UNCTAD IV pada tahun 1976. Dalam teori, UNCTAD tetap menjadi badan penting PBB yang berkaitan dengan komoditas utama yang sangat penting bagi sebagian besar negara-negara berkembang.

Pada awal tahun 1990-an beberapa pemerintah negara Barat berniat menutup UNCTAD, kecuali kalau sejumlah perubahan dalam tubuh UNCTAD mesti dibuat. Perubahan tersebut meliputi beberapa hal, seperti mengambil alih tanggung jawab untuk menjalankan Komisi PBB tentang Perusahaan-perusahaan Transnasional dari UNCTC yang telah mati. Setelah rencana pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1994, para pemimpin negara Barat merekomendasikan supaya peran UNCTAD ditinjau kembali, sebuah proses yang efektif terlaksana pada konferensi UNCTAD kesembilan tahun 1996. Pada waktu itu diputuskan bahwa UNCTAD tetap menjalankan fungsinya, meskipun dengan mandat yang sangat berbeda.Tugas utamanya sekarang tampaknya menjadi salah satu jalan mulus bagi kepentingan investasi TNCs di negara-negara berkembang.

Dukungan UNCTAD terhadap kepentingan bisnis TNCs bisa dilihat dalam satu bagian dari *Laporan Investasi Dunia* pada tahun 1995 yang berjudul: "Peran perusahaan-perusahaan transnasional dalam restrukturisasi di Asia". Laporan ini menekankan, misalnya, pada apa yang disebut "kontribusi positif" dari TNCs, dan bukan "hal-hal yang negatif dari bisnis TNCs, seperti penelantaran usaha-usaha lokal, penguasaan pasar dan dampak sosial budaya".[7] Dengan judul laporan investasi dunia tahun 1995 di atas, tampaknya UNCTAD tidak lagi berperan membela kaum miskin dan tidak berkerja seturut cita-cita yang dimandatkan kepadanya.

Sebaliknya, UNCTAD telah berubah menjadi sebuah organisasi yang pro-industri [dan pro-kepentingan TNCs]. Komunike yang dikeluarkan oleh para pemimpin dari Kelompok Tujuh Negara Industri

7 United Nations Conference on Trade and Development, *World Investment Report, 1995*, Geneva: UNCTAD, 1995, p. 256.

(G7), yang menyusul pertemuan puncak mereka di Prancis pada Juni 1996, mengatakan bahwa mereka telah "berhasil mereformasikan mesin kerja UNCTAD dan memfokuskan kembali pembangunan melalui perdagangan dan investasi". Dengan pernyataan ini, menjadi jelas bahwa pemerintah negara-negara Barat dan TNCs telah mengubah UNCTAD sesuai dengan yang mereka inginkan.

Suap

Persuasi dapat dibuat lebih jauh dengan sedikit atau banyak uang. Suap merupakan sebuah perbuatan buruk tapi dipratikkan cukup umum dalam dunia perusahaan.TNCs kadang-kadang membayar suap yang besar untuk memenangkan sebuah bisnis. Tetapi kelompok yang rugi dan kalah selalu orang-orang sederhana, karena korupsi berskala besar bisa membuat kerusakan besar di negara-negara berkembang. Sebuah suap, biasanya antara 10 dan 20% dari biaya kesepakatan proyek, dibayarkan kepada menteri-menteri pemerintah dan pejabat-pejabat negara lainnya dan menambahkan, setidaknya sebagian, dengan biaya yang TNCs cari untuk untuk menutup kembali pengeluarannya — dalam bentuk suap tadi. Sebuah TNC dapat saja memenangkan sebuah kontrak, dan segelintir orang di sebuah negara berkembang akan memperoleh keuntungan dari suap, tetapi negara secara keseluruhan membayar lebih banyak uang dari yang seharusnya. Ini berarti bahwa dana yang tersedia untuk keperluan lain menjadi lebih kurang, seperti dana untuk bidang kesehatan dan pendidikan.

Suap dalam jumlah besar sebanyak US$20 juta (sekitar Rp200 miliar) dapat dibayarkan pada sebuah kesepakatan tunggal saja. Dalam bisnis penawaran persenjataan, kata George Moody-Stuart, seorang mantan ketua Booker Pertanian, suap sekitar US$3 miliar (sekitar Rp30 triliun) per tahun telah ditawarkan dan diterima. Dana dalam jumlah besar telah "dilucuti keluar dari perekonomian negara-negara berkembang", katanya. "Dalam banyak kasus ia [suap] sebagian besar telah bertanggung jawab

atas beban utang luar negeri."[8] Tetapi semakin besar uang yang disuap, "kerusakan yang ditimbulkannya terhadap pengambilan keputusan juga semakin besar. Begitu seorang pengambil keputusan memiliki kepentingan pribadi dalam menempatkan sebuah pesanan dengan sebuah perusahaan yang bersedia membayar suap, maka penilaiannya keluar dari jendela. Itu artinya bahwa prioritas-prioritas publik terdistorsi.

Peluang-peluang untuk suap dan korupsi bisa terjadi melalui penjualan barang-barang modal, proyek-proyek teknik sipil besar, pasokan-pasokan tetap untuk barang-barang tertentu atau konsultasi-konsultasi layanan jasa "biasanya seturut kepentingan dari penerima keuntungan", kata Moody-Stuart. Dan apa yang dulu hanya merupakan masalah di sejumlah kecil negara "kini telah menjadi masalah yang luas bagi negara-negara Selatan".

Korupsi besar telah menjadi "hal-hal umum dan tidak hanya terjadi sehubungan dengan kontrak-kontrak besar yang dipengaruhi pemerintah di negara-negara Selatan". Mereka yang menerima uang besar [dari suap atau korupsi] melakukannya secara tidak langsung dan memiliki perlindungan terhadap nomor rekening bank mereka di Swiss. [Mesti diakui bahwa] tidak semua TNCs terlibat dalam kasus penyuapan dan korupsi dan TNCs yang biasa terlibat dalam praktik penyuapan dan korupsi pasti tidak akan mengakuinya. Praktik penyuapan biasanya dilakukan dengan sangat hati-hati dan dikerjakan melalui agen-agen agar tidak sampai ketahuan.

Hubungan kemasyarakatan

Untuk dunia TNCs, hubungan kemasyarakatan (*public relations* atau PR atau humas) mendapat tempat yang sangat penting. Alih-alih mengubah kebijakan-kebijakan mereka yang merugikan warga masyarakat miskin serta lingkungannya dan berusaha mengatasi sebab-sebab dari pelbagai masalah yang diciptakan oleh bisnis mereka, TNCs malah memilih mengeluarkan uang untuk membangun PR. Memutarbalikkan fakta atau

8 Moody-Stuart, George, talk to the Development Journalists Group, London, April 1997, about his book *Grand Corruption: How Bisnis Bribes Damage Developing Countries*, Oxford: WorldView Publishing, 1997.

berusaha memperlihatkan sisi lain dari masalah kepada media dan publik merupakan bagian penting dari aktivitas bisnis TNCs.

TNCs biasanya berusaha menunjukkan kepada publik sebuah wajah [bisnis] yang dapat diterima atau sebuah gambaran [bisnis] yang membuat mereka seakan-akan tampil untuk melakukan sebuah pekerjaan yang baik. Bagi TNCs, citra mereka merupakan sesuatu yang sangat penting dan mereka memberikan banyak perhatian terhadap hal ini. Mereka tidak akan tanggung-tangung menghabiskan banyak uang untuk menciptakan citra diri yang baik di mata masyarakat. [Untuk kepentingan propaganda citra baik ini], TNCs akan mempekerjakan orang sebagai juru bicara yang ramah-tamah, orang yang bisa berbicara "sebagai orang kita atau tetangga kia", orang-orang yang bisa mencairkan ketulusan, dan orang-orang yang tahu memberi jawaban cerdik terhadap media yang selalu menyelidiki [tingkah laku bisnis mereka]. Masyarakat bisa saja tertipu untuk berpikir bahwa gambar yang disajikan oleh para dokter pemutarbalikan fakta ini (*spin doctors)* adalah gambaran wajah perusahaan yang sebenarnya. Jika media massa jatuh ke dalam ribaan kepentingan bisnis TNCs, seperti yang telah biasa terjadi, maka masyarakat akan melihat citra perusahaan sesuai dengan gambaran yang mereka inginkan, yaitu sebuah gambaran yang mungkin sangat jauh dari kenyataan yang sesungguhnya. Perusahaan-perusahaan menyadari bahwa yang paling penting adalah anggapan (*perception*) dan bukan realitas (*reality*) yang sesungguhnya.

Bentuk modern dari PR mulai berkembang pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua. "Industri Humas lahir dari konteks perang. Para pelopor pertama dari praktik ini... telah mempelajari keterampilan mereka untuk melakukan propaganda perang."[9] Lahir dari konflik senjata, PR menggunakan kata-kata bijak, persuasif, ketimbang menggunakan peluru di garis depan peperangan untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan media. Didanai dari kantong-kanton besar, aktivitas PR perusahaan ada di mana-mana. Karena begitu pentingnya peran PR sampai ia [PR] telah

---

9 Corporate Watch, 'PR without end', Corporate Watch Newsletter 10 (August/September 2003), Oxford.

menjadi sebuah industri tersendiri [dan sekolah tersendiri]. Selain memiliki divisi PR mereka sendiri, TNCs masih juga harus menyewa perusahaan-perusahaan yang khusus spesialis di bidang PR untuk menyebarluaskan pesan mereka kepada masyarakat luas. Bisnis PR telah menjadi salah satu sektor yang berkembang amat cepat dalam ekonomi global, yang aktif memberikan konsultasi-konsultasi bagi TNCs yang beroperasi di negara-negara berkembang.

Perusahaan-perusahaan PR telah mengembangkan jenis-jenis keterampilan yang unik. Mereka sering bereaksi terhadap kritikan-kritikan, misalnya, dengan membuat pernyataan seperti "masalah ini sedang dikaji", atau "perusahaan yang mereka wakili menaati aturan-aturan dan kode etik". Mereka juga mungkin akan mengumumkan bahwa perusahaan telah menyetujui kode etik secara sukarela, dan berusaha menggeser perdebatan dari masalah politis menjadi hanya sekadar masalah teknis, sambil menggunakan argumentasi teknis yang bertele-tele untuk mengaburkan masalah, dan mengalihkan perhatian publik dari soal utama ke soal yang sifatnya sekunder. Kebenarannya yang hanya setengah dan tindakan menghindar yang masuk akal merupakan norma yang mereka rancang untuk menenangkan kekhawatiran masyarakat atas masalah seputar pabrik makanan bayi, alat mainan, sepatu, pakaian, dan produk-produk kontroversial lainnya. Tujuan PR, kata seorang eksekutif perusahaan *Mobil Oil*, "adalah membuat orang untuk berperilaku sesuai dengan apa yang Anda inginkan dengan membujuk mereka bahwa sesungguhnya sebuah TNCs berbisnis demikian demi kepentingan masyarakat".[10]

Perusahaan-perusahaan PR yang besar telah beroperasi layaknya sama seperti TNCs lainnya. Perusahaan Burson Marsteller, salah satu perusahaan PR terbesar di dunia, merupakan salah satu perusahaan PR yang paling banyak dikenal. Perusahaan ini adalah bagian dari *Young & Rubicam Brands*, "salah satu lembaga terkemuka di dunia di bidang komunikasi pemasaran", dan anak perusahaan dari WPP, "salah satu kelompok

10 Richter, Judith, *Engineering of Consent: Uncovering Corporate PR*, Sturminster Newton, UK: The Corner House, March 1998.

perusahaan layanan komunikasi terbesar di dunia", yang mempekerjakan 91.000 orang di lebih dari 2.000 kantor di 106 negara di dunia.[11]

Perusahaan PR Burson Marsteller terkenal karena manajemen krisis yang dilakukannya terhadap perusahaan *Union Carbide* setelah bencana pabrik di Bhopal-India dan perusahaan Exxon setelah tumpahan minyak *Exxon Valdez* di laut Alaska. Tampaknya perusahaan Burson Marsteller juga telah memainkan peranan kunci dalam diskusi agar masalah seputar tingkah laku bisnis TNCs tidak masuk dalam agenda KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Pada tahun 1997, perusahaan Burson Marsteller telah mengembangkan hubungan yang erat dengan kepentingan perusahaan tembakau dan perusahaan bioteknologi. Burson Marsteller membantu TNCs untuk menciptakan strategi PR yang sukses bagi industri bioteknologis Eropa. Buah dari usaha mereka adalah berlakunya sebuah direktif Parlemen Eropa yang memungkinkan pengakuan hak-hak paten terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan tertentu. Sebuah dokumen strategi perusahaan Marsteller Burson (yang dibocorkan ke Greenpeace) tentang bagaimana bio-industri dapat memenangkan penerimaan publik atas bio-produk menunjukkan bagaimana sisi-sisi lemah dan kuat dari sebuah produk diidentifikasi. Dokumen yang terbocor ini, misalnya, mengakui bahwa "isu-isu publik tentang risiko kerusakan kesehatan dan lingkungan hidup manusia adalah komunikasi-komunikasi yang mematikan usaha-usaha bio-industri di Eropa.... Semua bukti penelitian menegaskan bahwa persepsi dengan motivasi demi profit secara fatal merusakkan kredibilitas industri pada pertanyaan-pertanyaan ini."[12] Dokumen tersebut menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan berusaha memanipulasi perdebatan ini.

Hill & Knowlton, sebuah perusahaan PR besar lainnya, mendaftar perusahaan GlaxoSmith-Kline Singapore, McDonald, Procter & Gamble, dan Starbucks Muan Jai sebagai para kliennya. Perusahaan PR Hill &

---

11 Informasi dari Burson Marsteller website. <http://www.burstonmarsteller.com> (accessed 10 January 2008). 12

12 Communications programmes for Europabio', leaked strategy document, Burson Marsteller, January 1997.

Knowlton disewa oleh perusahaan Nestlé pada 1980-an untuk mengirim materi-materi kepada para pendeta gereja dan badan-badan keagamaan guna menghalangi mereka dari tindakan memboikot sebuah produk utama Nestlé (tentang masalah ini lihat bahan Bab 3).

Segera setelah WHO mengadopsi kode etik tentang pemasaran produk pengganti ASI pada tahun 1981, kata Judith Richter,"TNCs menjadi cemas tentang kebangkitan kekuatan global warga masyarakat. Mereká telah... beberkan secara terbuka apa yang mereka anggap sebagai praktik-praktik bisnis yang berbahaya dan menggunakan boikot konsumen untuk mengeritik praktik bisnis [tak sehat] dari perusahaan".[13] Pada bulan Agustus 1980, wakil presiden Nestlé, Ernest Saunders, menulis dalam sebuah memo rahasia untuk manajer umum perusahaan Nestlé:

> Dalam pandangan propaganda secara keluruhan yang sekarang sedang dilancarkan melalui IBFAN, dan profesionalisme dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, selalu tetap ada kemungkinan bahwa kita bahkan bisa memenangkan sebuah pertempuran di AS dan kalah dalam peperangan ini sebagai akibat dari tekanan yang gigih pada pemerintah dan otoritas-otoritas medis di negara-negara berkembang. Jelas bahwa kita memiliki kebutuhan mendesak untuk mengembangkan operasi propaganda yang melawan semua ini secara efektif, dengan sebuah jaringan konsultan yang tepat di tempat-tempat kunci, berpengetahuan dalam teknologi mengenai gizi bayi di negara-negara berkembang, dan dengan kontak-kontak yang tepat untuk mendapatkan artikle/tulisan yang dapat diterbitkan [di majalah atau koran untuk menjelaskan soal ini dari sudut pandangan yang lain].[14]

Pernyataan presiden Nestlè "profesionalisme dari pihak-pihak yang terlibat" sungguh menyanjung LSM-LSM yang telah melancarkan pro-

---

13 Richter, *Engineering of Consent.*

14 *Ibid.*, mengutip Saunders dari Baby Milk Action, 'Nestlégate, secret memo reveals corporate cover-up', Cambridge: Baby Milk Action, 1981. (Pada waktu buku ini hampir mau diterbitkan, saya menerima telepon dari kantor Tuan Saunders jika saya dapat pergi makan siang dengan dia. Akan tetapi tawaran ini kemudian ditariknya kembali pada hari berikutnya, rupanya karena Nestlé melihat bahwa saya akan menghadapi sebuah kontak yang tidak pantas.)

paganda melawan keburukan produk pengganti ASI dari Nestlè. Tapi pernyataan ini menyembunyikan dana dan kekuatan TNCs. Karena perusahaan-perusahaan umumnya memiliki sarana untuk mempekerjakan sebanyak mungkin pegawai dan kekuatan profesional untuk melawan LSM-LSM yang sering kali pasukannya hanya terdiri atas segelintir orang. "Operasi propaganda untuk lawan" dilancarkan ketika perusahaan Nestlé mulai mendirikan sebuah "Pusat Koordinasi Nutrisi" untuk meningkatkan citra perusahaan dan menangkis kritik dari kalangan masyarakat luas. TNCs akan berusaha untuk menjaga isu-isu kontroversial tetap tersembunyi dari pandangan umum, kata Richter, tetapi jika usaha ini gagal maka mereka akan menggunakan "sebuah paduan dari empat strategi berikut untuk memengaruhi debat publik: menunda-nunda persoalan, mendepolitisasikan persoalan, mengalihkan persoalan dan kemungkinan yang terakhir adalah bertindak curang".[15]

Akan tetapi dalam beberapa masalah tertentu, sebuah TNC akan menggunakan metode langsung untuk mencoba membujuk publik tentang sebuah masalah. Pada bulan Juni 1998, perusahaan Monsanto (tentang hal ini lihat Bab 2) meluncurkan kampanye £1 juta (sekitar Rp15 miliar) untuk biaya PR di Inggris dalam rangka meyakinkan orang bahwa pangan hasil rekayasa genetika itu pada dasarnya baik. Iklan-iklan berhalaman penuh di koran-koran broadsheet, yang berlangsung selama tiga bulan, coba melunakkan sikap para oposisi. Lalu dengan dana yang terbatas, LSM-LSM berjuang melakukan serangan balik dengan menyoroti kelemahan-kelemahan dari persoalan mengenai bahan makanan yang dimodifikasi secara genetik.

Oleh karena LSM-LSM menggunakan kekuatan argumen yang solid dan kredibel, TNCs sebaliknya menggunakan uang dan seperangkat cara yang licik untuk memenangkan persoalan. Perusahaan-perusahaan tembakau merupakan sebuah contoh, yang menggunakan setiap trik dalam pembukuan untuk menangkal pengaturan yang mengontrol kegiatan bisnis mereka. Akan tetapi, persoalan berubah ketika warga masyarakat men-

15 Richter, *Engineering of Consent.*

jadi sadar dan marah atas kenyataan bahwa mereka sudah sering dimanipulasi. Orang-orang sekarang mulai mengajukan semakin banyak pertanyaan tentang aktivitas bisnis TNCs. Pemutarbalikan fakta yang sering dibuat perusahaan-perusahaan tidak lagi diterima begitu saja.

Pengaruh pada WTO

Negara-negara, dan bukan perusahaan-perusahaan, adalah yang menjadi anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Namun TNCs telah cukup kuat untuk memengaruhi agenda WTO. Keputusan-keputusan WTO biasanya sesuai dengan harapan dunia perusahaan. Menteri-menteri dan pejabat-pejabat pemerintah negara lainnya melaksanakan kerja mereka di pertemuan-pertemuan WTO di bawah tatapan para wakil dari perusahaan-perusahaan besar yang bahkan mungkin menjadi bagian dari delegasi resmi. Orang-orang perusahaan berharap untuk didengarkan ketika mereka melobi untuk keputusan-keputusan yang membantu bisnis mereka. "Peran yang TNCs mainkan dalam perekonomian suatu negara dapat membuat pemerintah negara tuan rumah menjadi pendengar mereka yang sangat akomodatif dan penuh perhatian. Perusahaan-perusahaan memiliki akses yang banyak kepada para pembuat keputusan di WTO dibandingkan kelompok-kelompok warga masyarakat dan LSM-LSM."[16]

Perdagangan adalah bisnis kunci bagi TNCs dan karena itu mereka telah mengembangkan hubungan yang erat dengan para pembuat kebijakan di bidang perdagangan. Dalam negosiasi-negosiasi untuk kesepakatan perdagangan dunia yang kemudian hasilnya mendirikan WTO pada tahun 1995, perusahaan-perusahaan dunia waktu itu aktif dalam merancang format akhir WTO — format yang mengantar dunia masuk ke dalam era perdagangan bebas. Selama pembicaraan [tentang pembentukan WTO], "anggota perwakilan dari TNCs menempati semua 15 kelompok penasihat yang dibentuk oleh pemerintahan Reagan untuk menyusun posisi AS [dalam WTO]."[17] PerwakilanTNCs "menyiapkan draft kesepakatan

---

16 Stichele, Myriam Vander, speech to NGO meeting in Geneva, May 1998.
17 Watkins, K., 'Global market myths', *Red Pepper* (June 1996), p. 14.

tentang TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights* [regulasi tentang hak paten]) yang kritis."[18] "Di AS, Departemen Administrasi Perdagangan International mengidentifikasi tujuan utama WTO untuk... didedikasikan sebagai instrumen yang membantu bisnis AS bersaing di pasar global", kata Myriam Vander Stichele. Persatuan Konfederasi Industri dan Pengusaha Eropa atau UNICE (*Union of Industrial and Employers's Confederationsof Europe*) yang berbasis di Brussel — yang terdiri atas "16 juta perusahaan kecil, menengah dan besar di Eropa" — memiliki kontak yang sering dengan Komisi Eropa [di WTO] baik melalui telepon atau melalui kunjungan-kunjungan pribadi yang dilakukan oleh para pejabat.[19]

UNICE tetap berpengaruh secara aktif pada sidang-sidang perundingan WTO. UNICE telah membuka sebuah *website* khusus "yang didedikasikan untuk keperluan kegiatan UNICE bagi Agenda Pembangunan WTO di Doha yang diluncurkan pada bulan November 2001".[20] Ia [UNICE] mendesak supaya perdagangan internasional sedapat mungkin harus bebas dari semua hambatan regulasi dari setiap pemerintah negara. Pada tahun 2007, UNICE diubah namanya menjadi *Bisnis Europe*.

Aturan-aturan WTO lebih condong memihak pentingan bisnis TNCs dan menguntungkan orang-orang di negara-negara Barat ketimbang kebanyakan masyarakat di negara-negara berkembang. Prinsip non-diskriminasi WTO sangat menguntungkan bisnis TNCs. Karena prinsip ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan asing harus diberikan perlakuan yang sama dengan perusahaan-perusahaan domestik. Pemerintah negara tuan rumah tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi dengan mendukung perusahaan lokal saja. Prinsip ini harus diutamakan di atas kepentingan nasional negara tuan rumah seperti kebutuhan pembangunan, dampak-dampak sosial ekonomi, pertimbangan masalah lingkungan hidup dan

18 Stichele, Myriam Vander, *Towards a World Transnasionals' Organisation?* Amsterdam: Transnasional Institute, 1998, p. 9.

19 *Ibid.*, p. 5.

20 Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe, 'UNICE and the new WTO Round', Brussels: UNICE, 2004. <wto.unice.org> (accessed 11 February 2008).

bahkan undang-undang negara tuan rumah sekalipun. Memerintah demi kepentingan warga masyarakat negara tuan rumah mendapat tempat kedua dalam prinsip mengejar pertumbuhan ekonomi pasar bebas. Para mania liberalisasi perdagangan dunia memastikan bahwa warga masyarakat diorganisir sekian sehingga mereka [digiring langsung atau tidak langsung] bekerja untuk keuntungan bisnis TNCs.

TNCs cukup berkuasa untuk mengubah lamaran sebuah negara untuk menjadi anggota WTO demi keuntungan mereka sendiri — yang menuntut bahwa sebuah negara berkembang yang ingin bergabung seharusnya tidak boleh diterima sebagai anggota WTO kecuali kalau negara itu harus meliberalisasi ekonominya seluas-luasnya. Sebuah perusahaan yang dilarang menjual produknya ke sebuah negara yang ingin menjadi anggota WTO, misalnya, dapat menuntut bahwa keanggotaan negara tersebut dapat diterima di WTO hanya kalau larangannya terhadap TNC tersebut mesti dicabut dahulu. Lobi oleh TNCs telah mengamankan aturan-aturan perdagangan internasional baru yang dimaksudkan untuk menciptakan "sebuah tatanan dunia yang dibentuk seturut keinginan perusahaan-perusahaan multinasional".[21]

Berdasarkan aturan WTO, negara-negara berkembang diperbolehkan untuk memberikan para petani mereka sebuah perlindungan terhadap barang-barang impor di bidang pertanian. Tapi Program Penyesuaian Struktural (*Structural Adjustment Programs* atau SAPs) yang diberlakukan Bank Dunia dan IMF tidak memungkinan mereka untuk mengimplementasikan kebebasan ini.

Ketika pemerintah negara telah mundur dan mengurangi peran mereka di bidang ekonomi dan sosial dalam beberapa tahun terakhir, maka pada saat yang sama peranan TNCs bertumbuh kuat. Pertanyaannya adalah apakah TNCs, oleh kekuasaan mereka semata-mata, lebih memperhitungkan pandangan masyarakat umum yang tidak memiliki akses kepada para pembuat kebijakan. TNCs juga coba memperlihatkan diri mereka sebagai penolong-penolong yang mampu membantu negara-negara mis-

---

21 Watkins, 'Global market myths'.

kin di bidang ekonomi. Hal ini terlihat, misalnya, ketika seorang wakil dari Enron, sebuah TNC AS yang berbisnis di bidang energi minyak, mengatakan kepada Komite Kongres AS bahwa pihak-pihak swasta, "seperti perusahaan kami dan perusahaan-perusahaan lain, kini mampu mengembangkan, membangun, memiliki, dan mengoperasikan proyek-proyek infrastruktur swasta di pelbagai negara".[22] Wal-Mart juga telah mengambil "peran utama dalam melobi pada perdagangan internasional, yang mempromosikan penurunan tarif dan liberalisasi perdagangan", kata sebuah laporan [LSM] *War on Want.*[23]

Perdagangan adil

Perdagangan yang adil (*fairtrade*) berkembang pesat — nilai penjualan di Inggris meningkat lebih dari 60% pada tahun 2007.[24] Ketertarikan berapa TNCs dalam perdagangan yang adil terjadi karena hal ini merupakan suatu hal yang sedang bertumbuh pesat dan juga karena mereka melihat hal ini sebagai hal yang baik demi menjaga citra perusahaan mereka.

Kopi, salah satu komoditas terbesar di dunia yang diperdagangkan, merupakan salah satu produk pertama yang bersertifikat *fair trade* di Belanda pada tahun 1989. Perusahaan kopi — Max Havelaar — membuka jalan untuk *fair trade* dan pada tahun 1997 mempioneer pendirian sebuah organisasi di seluruh dunia yang bernama Organisasi Internasional Berlabel Perdagangan yang Adil (*Fair trade Labelling Organizations International* atau FLO). FLO menetapkan standar-standar perdagangan internasional yang adil untuk produksi yang bersertifikasi, mengaudit perdagangan menurut standar-standar ini, dan pelabelan produk-produk. Keanggotaan FLO terdiri atas 20 negara. Yayasan *Fairtrade* (perdagangan yang adil) dari FLO adalah negara Inggris.

---

22 Enron representative addressing a US Congressional Committee, quoted in *The Ecologist* (July/August 1996), p. 179.

23 War on Want, *Asda Wal-Mart: the Alternative Report*, London: War on Want, 2005. <www.waronwant.org> (accessed 11 February 2008).

24 FairTrade Foundation, 'Fairtrade sales reach half a billion pounds', press release, 25 February 2008. <http://www.fairtrade.org.uk> (accessed 10 March 2008).

Berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkannya, FLO berhak untuk mengeluarkan para pedagang yang terlibat dalam perilaku dagang yang merusakkan legitimasi *Fairtrade*. Tapi sebuah kontroversi muncul pada tahun 2005 ketika perusahaan Nestlé meluncurkan sebuah perdagangan kopi yang adil yang bernama *Nescafé Partners' Blend*. Yayasan *Fairtrade* memutuskan untuk memberikan logo *fair trade* untuk kopi Nestlé. Peru-sahaan Nestlé sendiri memiliki 8.500 produk, yang semuanya, selain *Nescafé Partners' Blend*, terus diperdagangkan seperti sebelumnya. Nestlé adalah perusahaan Inggris yang paling diboikot dan dinilai sebagai perusahaan dunia yang "paling tidak bertanggung jawab" oleh sebuah pemungutan suara global melalui Internet.[25]

Para aktivis sangat kritis terhadap tindakan Nestlè dan percaya bahwa beberapa praktik bisnis Nestlè tidak cukup baik bagi FLO untuk diberikan label *Fairtrade*, dan bahwa proses untuk masuk menjadi anggota perdagangan yang adil dari FLO harus ditempuh melalui sebuah usaha dan rekor prestasi bisnis yang baik. Para aktivis menyebut "pemasaran agresif makanan untuk bayi oleh Nestlé sebagai contoh dan juga menyoroti aktivitas perdagangannya yang gagal, keterlibatannya dalam mempekerjakan anak-anak di bawah umur, kerusakan lingkungan oleh bisnis pembotolan air [dan] penggunaan teknologi modifikasi genetik". Menurut seorang peneliti dengan Serikat Buruh Pangan Kolombia, 150.000 keluarga petani kopi telah kehilangan mata pencaharian akibat kebijakan-kebijakan bisnis dari Nestlé. Karena pemberian label *Fairtrade* kepada perusahaan Nestlè yang rekor bisnisnya yang demikian buruk, maka para peneliti ini mengkritik bahwa produk-produk berlabel *Fairtrade* hanya sebagai sebuah lelucon belaka".[26]

Pernyataan publik dari Nestlé sebelumnya mengkritik *fair trade*, tetapi sekarang ia mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan pasar telah berubah

25 Baby Milk Action, 'Nestlé to be awarded Fairtrade mark?', Cambridge: Baby Milk Action, September 2005. <http://www.babymilkaction.org> (accessed 11 February 2008).

26 Baby Milk Action, press release, 6 October 2005. <www.babymilk action.org/press/press6oct05.html> (accessed 10 January 2008).

pikiran. "Kami menemukan bahwa ada konsumen di tengah masyarakat yang sangat tertarik pada isu-isu pembangunan yang mungkin tidak sedang membeli produk *Fairtrade*, dan mereka akan tertarik ke dalam pasar ini oleh kekuatan merek perusahaan Nescafé," kata seorang juru bicara perusahaan Nestlé.[27]

Benediktus Southworth, direktur dari Gerakan Pembangunan Dunia (seorang anggota pendiri Yayasan *Fairtrade*) menjawab:

> Peluncuran kopi dari Nestlé Partners' Blend lebih merupakan sebuah upaya untuk menggunakan pasar yang berkembang untuk kepentingannya atau sebuah praktik pemasaran yang sinis daripada mewakili sebuah awal pergeseran mendasar di dalam model bisnis Nestle. Jika Nestlé benar-benar percaya dalam kopi *Fairtrade*, maka ia akan mengubah praktik bisnisnya, dan melobi strategi dan secara radikal merombak bisnisnya untuk memastikan bahwa semua petani kopi di dunia mesti mendapatkan keuntungan hasil yang adil bagi usaha mereka. Kalau hal-hal ini belum tercapai, maka perusahaan Nestlé akan tetap menjadi bagian dari masalah, bukan solusi.[28]

Yayasan *Fairtrade* membela keputusan untuk menyertifikasi produk Nestlè dan mengatakan bahwa produk ini telah:

> memenuhi standar-stnadar internasional untuk sertifikasi *Fairtrade* dan karena itu layak menyandang Logo *Fairtrade.* Kopi berasal dari lima koperasi petani kecil di Ethiopia dan El Salvador yang disertifikasi secara independen oleh lembaga internasional kami, yaitu Organisasi Internasional Pelabelan *Fairtrade* (FLO). Semua pedagang dalam rantai pasokan [barang] telah terdaftar dengan sistem dan cara kerja *Fairtrade* seturut standar-standar perdagangan kami.[29]

27 Dikutip dalam Litvinoff, M., and J. Madeley, *50 Reasons to Buy Fair Trade*, London: Pluto Press, 2007, p. 120.

28 World Development Movement, 'Statement by WDM on Nestlé FAIRTRADE Partners' Blend coffee', London: WDM, 7 October 2005. <www.wdm.org.uk/news/presrel/current/nestle.htm> (accessed 10 January 2008).

29 Fairtrade Foundation, 'Questions and answers about Nescafé Partners' Blend coffee', 7 October 2005 <http://www.fairtrade.org.uk/qa071005.htm> (accessed 10 January 2008).

Penganugerahan logo untuk salah satu produknya, tanpa ragu, merupakan sesuatu yang baik bagi perusahaan Nestlé. Dengan tindakan ini, FLO memberikan semacam sebuah kehormatan kepada Nestlè, karena dengan itu perusahaan Nestlè diasosiasikan dengan gerakan perdagangan yang sehat dan adil. Perusahaan Nestlè akhirnya bisa membubuhkan logo *Fairtrade* pada guci-gucinya — meskipun sisa dari produk kopinya diperdagangkan melalui sistem yang berubah-ubah dan tidak adil. Ada sebuah alasan yang kuat untuk memperluas kriteria *Fairtrade,* sehingga apakah sebuah TNC layak mendapat sebuah tempat dalam sistem FLO akan ditentukan oleh perilaku bisnis TNC bersangkutan secara keseluruhan.

TNCs telah meluncurkan produk-produk yang tampaknya merupakan produk-produk perdagangan yang adil, tetapi dalam kenyataan yang sebenarnya tidaklah demikian. Kraft, misalnya — perusahaan makanan terbesar kedua di dunia, yang memiliki Kenco dan Maxwell House — telah meluncurkan sebuah merek kopi yang disebut *Kenco Sustainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan Kenco).

Perusahaan Kraft mengatakan bahwa kopi mereka seluruhnya terbuat dari biji kopi dari sumber pertanian berkelanjutan yang bersertifikat dan disertifikasi secara independen oleh Aliansi Hutan Tropis, sebuah organisasi non-profit. Perusahaan Kraft mengklaim bahwa pada hasil pertanian yang disertifikasi oleh Aliansi Hutan Tropis, hutan dan satwa liar yang dilindungi dan dijaga, sedangkan para pekerja pertanian diperlakukan dengan baik dan mereka memiliki akses kepada air bersih, perawatan kesehatan dan pendidikan bagi mereka sendiri dan keluarga-keluarga mereka.

Kraft membayar para petani yang mematuhi kriteria etika perusahaannya sebuah premi sebesar 20% pada harga biji kopi hijau di pasar terbuka. Ketika harga kopi dunia berada di bawah 100 sen (sama dengan US$1.00) per 1 *pound* (sekitar ½ kg) — dari 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2007 harga rata-rata hanya berada di bawah 98 sen per *pound* — para petani kopi karenanya menerima kurang dari 126 sen yang dibayarkan kepada mereka seturut sistem yang disertifikasi *Fairtrade.*[30]

30 Prices from International Coffee Organization website. <http://www.ico.org/prices> (accessed 17 March 2008).

Cara kerja perusahaan Kraft telah dikritik oleh Yayasan *Fairtrade*, yang yakin bahwa sebuah proliferasi dari sertifikasi saingan "sangat berpeluang membingungkan warga masyarakat... Ketika warga masyarakat memberi kesan bahwa inisiatif-inisiatif ini adalah seperti *Fairtrade*, kita harus tunjukkan bahwa dalam kenyataannya mereka bukan *Fairtrade*".[31]

Keterlibatan TNCs dalam perdagangan yang adil dapat menyebabkan sejumlah orang didorong untuk membeli produk-produk *fairtrade* yang dibuat oleh sebuah perusahaan yang aktivitas bisnisnya merusak mata pencaharian warga masyarakat miskin. TNCs mesti menunjukkan komitmen untuk melakukan perdagangan yang adil. [TNCs seperti] *Marks & Spencer, Topshop, Monsoon, Next,* dan *Debenhams* menjual barang-barang pakaian berlogo *Fairtrade* atau FLO. Tapi untuk menunjukkan bahwa mereka serius dengan sistem perdagangan yang adil, mereka perlu mengonversi semua atau sebagian besar dari sistem bisnis mereka ke dalam sebuah perdagangan yang adil.

Perkembangan yang paling signifikan sampai saat ini mengenai perusahaan dan perdagangan yang adil terjadi pada bulan Februari 2008 ketika pabrik pengolah gula Tate & Lyle mengumumkan bahwa semua gula mereka akan layak menyandang label produk-produk *fair trade* pada tahun 2009. Bahan dasar pabrik gula Tate & Lyle berasal dari 6.000 petani tebu berskala kecil di Belize. Tate & Lyle adalah perusahaan publik pertama yang mengubah seluruh sistem bisnisnya seturut standar-standar FLO. Langkah yang dibuat Tate dan Lyle ini menyebabkan "akan ada semakin banyak orang yang memilih gula *Fairtrade* setiap kali mereka berbelanja di pasar atau toko".[32] Hal ini membutuhkan sebuah perusahaan publik di luar relasi kemasyarakatan. Untuk menunjukkan komitmen terhadap perdagangan yang adil, perusahaan-perusahaan lain perlu mengikuti langkah yang sama ini.

31 Bowers. S., 'Forget Maxwell House. Would you like a cup of Kenco Sustainable?', *The Guardian*, 22 November 2004.

32 Fairtrade Foundation, 'Tate & Lyle's Fairtrade commitment is sweet news for 6,000 farmers in Belize', 23 February 2008. <http://www.fairtrade.org.uk> (accessed 10 March 2008).

Tanggung jawab sosial perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) kini dipromosikan oleh pemerintah dan oleh beberapa TNCs. Definisi CSR yang diberikan Pemerintah Inggris adalah sebagai berikut:

> Pada dasarnya, ia [CSR] adalah tentang bagaimana bisnis memperhitungkan dampak-dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan sewaktu sebuah bisnis bero-perasi — yang memaksimalkan keuntungan-keuntungannya dan meminimalkan kerugian-kerugiannya [yang ditimbulkannya]. Secara khusus kita melihat CSR sebagai tindakan sukarela yang dapat dilakukan pebisnis, atas dan sesuai dengan persyaratan-persyaratan hukum minimum, untuk tujuan kepentingan kompetitif pebisnis sendiri dan kepentingan masyarakat yang lebih luas.[33]

Tapi pertanyaannya adalah seberapa jauh CSR hanya merupakan sebuah tindakan pele-pele angin (*smokescreen*), dan bagian dari aktivitas hubungan kemasyarakatan. Hingga saat ini telah terjadi sebuah proliferasi instrumen CSR seperti kode etik, sejumlah prinsip, pedoman, standar, dan instrumen-instrumen lainnya. Walaupun instrumen-instrumen CSR ini "dimaksudkan untuk mempromosikan praktik bisnis perusahaan yang lebih bertanggung jawab dan akuntabel", pelaksanaan aktualnya tetap masih terbatas.[34]

"Tujuan dari CSR", kata George Monbiot, "adalah untuk menghindari regulasi atau undang-undang. CSR memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk percaya bahwa aturan wajib undang-undang tidak perlu, karena hal-hal yang sama telah dipenuhi dengan cara lain... CSR adalah sebuah perangkat hubungan kemasyarakatan dari perusahaan yang dirancang untuk membuang pasir di mata kita."[35]

---

33 UK government website.<http://www.csr.gov.uk/whatiscsr.shtml> (accessed 11 January 2008).

34 Goel, R. and W. Cragg, 'Guide to instruments of corporate responsibility', pamphlet, Universities of Toronto and York, 2005.

35 Monbiot, George, 'Some see a beacon of care, others a PR smokescreen', *The Observer*, 2 February 2003.

TNCs masih harus menunjukkan bahwa CSR adalah lebih dari sekadar sebuah kegiatan untuk pele-pele angin (*smokescreen)*.... Sebuah perseptif seperti ini diberikan oleh Joel Bakan, yang mengatakan bahwa CSR pada saat ini bersifat ilegal, "setidaknya ketika ia asli". CSR adalah ilegal, kata Bakan, karena direktur-direktur perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan uang bagi para pemegang saham mereka, untuk menempatkan kepentingan pemegang saham di atas segala-galanya "Sebuah perusahaan bisa berbuat baik hanya untuk membantu dirinya sendiri untuk berbuat baik bagi dirinya, sebuah batas yang dalam seberapa hal yang baik dapat perusahaan lakukan", kata Bakan.[36] (Tentang hal lihat juga bagian Kesimpulan.) Memang perusahaan perlu melakukan apa yang disebut CSR yang sungguh autentik. Tetapi agar hal ini dapat terealisasi, hukum perusahaan [*corporate charter*] mesti diubah dahulu.

Kesimpulan

Bagi mereka, dunia kaum miskin tidak akan pernah menjadi klien dari perusahaan-perusahaan yang berbisnis di bidang hubungan kemasyarakatan (*public relations*). Masyarakat miskin justru malah menjadi korban bisnis mereka, sering kali menjadi korban dua hal buruk *(a double whammy*) — yaitu berhubungan dengan sebuah kegiatan bisnis TNC [demi laba keuntungannya sendiri] dan kegiatan hubungan masyarakat yang pada dasarnya dilakukan untuk mempertahankan laba keuntungan perusahaan juga. Meskipun ia tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah konspirasi melawan kaum miskin, tapi efek yang ditimbulkannya tidak berbeda dengan kerja dari sebuah konspirasi.

36 Bakan, J., *The Corporation*, London: Constable, 2004, pp. 37 and 50.

BAB 12

Tanggulangi Kekuasaan: Regulasi, Jalan Pintas, Aksi

Apakah Anda pernah berharap sebuah perusahaan untuk memiliki hati nurani padahal ia tidak memiliki jiwa untuk dikutuk dan tidak mempunyai tubuh untuk ditendang? (Edward, Pertama Baron Thurlow)

Mereka saling mendorong satu sama lain dalam rencana-rencana jahat... tapi secara tiba-tiba mereka akan dipukul jatuh. (Mazmur 64:5–7)

Sesungguhnya kekuasaan telah berpindah dari pemerintah negara ke ribaan TNCs, dari badan-badan kenegaraan yang terpilih [melalui pemilu] ke pangkuan perusahaan-perusahaan yang hanya bertanggung jawab kepada para pemegang saham mereka. Kekuasaan telah berbaring bersama perusahaan-perusahaan [maksudnya telah terjadi perselingkuhan antara pemerintah negara dan bisnis TNCs]. TNCs menggunakan kekuasaan mereka untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dan untuk mengubah aturan undang-undang sebuah negara yang menguntungkan mereka. Mereka mengusung ide privatisasi dan telah mengambil alih beberapa peran ekonomi pemerintah negara yang pernah dijalankannya. Mereka menggunakan posisi mereka untuk memengaruhi negosiasi-negosiasi internasional dan menggunakan kekuatan-kekuatan perusahaan mereka dengan cara sedemikian rupa sehingga menyebabkan penderitaan bagi masyarakat miskin. Mereka menggunakan kekuatan hubungan kemasyarakatan atau *public relations* untuk meyakinkan kita bahwa semuanya baik-baik saja. Dan, dalam beberapa kasus, TNCs bahkan telah didanai oleh proyek-proyek bantuan internasional [yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat publik].

TNCs telah menjadi sangat kuat dan telah merusakkan usaha-usaha melawan kemiskinan di negara-negara berkembang. Ada tiga cara yang umum untuk mengatasi/menanggulangi kekuatan mereka: regulasi, *bypass* perusahaan, dan tindakan tertentu oleh kelompok-kelompok berkepentingan seperti pemegang saham dan para petani, misalnya. Regulasi melibatkan pemerintah. *Bypass* perusahaan melibatkan warga masyarakat — dan hal ini tampaknya merupakan pilihan yang lebih efektif daripada regulasi. Tiga cara ini dapat berjalan secara bersama-sama.

Peraturan

Walaupun di satu pihak perusahaan-perusahaan dunia telah mengglobal, tapi hal ini tidak disertai dengan aturan dan undang-undang yang mengatur tingkah laku bisnis mereka. Tidak ada peraturan internasional yang mengatur perusahaan-perusahaan, dan sejumlah tindakan TNCs banyak berlalu tanpa dicatat dan tidak dipertanggungjawabkan. Ada alasan kuat untuk membawa TNCs ke dalam sebuah kerangka kepemerintahan global, dan bukan hanya sebuah tambal sulam dari hukum dan peraturan nasional sebuah negara yang sering kali lemah. Perusahaan-perusahaan global perlu diatur oleh rambu-rambu aturan dan undang-undang global pula.

Peraturan internasional untuk mengatur TNCs sulit karena aturan-aturan dunia yang ada lebih menempatkan peningkatan usaha perdagangan di atas usaha peningkatan pembangunan dan di atas kebutuhan soal perlunya peraturan yang mengatur tingkah laku bisnis perusahaan. Pergerakan bebas dari barang-barang dan layanan jasa melintasi tapal batas negara-negara telah ditempatkan lebih tinggi di atas kepentingan warga masyarakat. Pemerintah, dan para akademisi pro-pasar bebas yang memengaruhi cara berpikir pemerintah, melihat supremasi pasar bebas sebagai suatu yang sangat penting dan melebihi segala-galanya. Segala sesuatu yang mengganggu perdagangan internasional — dan segala sesuatu yang mengganggu para pedagang yaitu perusahaan-perusahaan transnasional — umumnya ditentang oleh lembaga-lembaga dunia yang sudah berdiri mapan. Nilai aturan-aturan hukum berada pada tempat sekunder di belakang kepentingan pasar bebas.

Pemimpin-pemimpin negara Barat sering melihat peraturan-peraturan yang ada sebagai sesuatu yang harus dihapus dan bukannya untuk diperkuat. Kanselir Inggris dari Menteri Keuangan mengatakan ini pada Februari 2005:

> Peraturan [adalah] sebuah masalah yang dibesarkan di setiap negara industri selama bertahun-tahun... untuk semua bisnis besar dan kecil kami telah menghapus atau mereformasi lebih dari 400 peraturan secara terpisah... kami akan terus berusaha menghilangkan semua hambatan... menempatkan setiap peraturan baru dan yang sudah ada melalui tes baru yang ketat untuk dampaknya terhadap perusahaan dan daya saing.... Saya ingin berkonsultasi pada setiap tahap dengan Anda, bisnis dari Eropa.[1]

Para pebisnis akan ditanyai [untuk dimintakan pendapat, dll.], tapi warga masyarakat miskin yang terkena dampak dari aktivitas bisnis mereka umumnya tidak pernah ditanyai. TNCs memiliki kekuasaan begitu besar sehingga pemerintah negara-negara Barat juga bisa dibujuk untuk tidak mengatur tingkah laku bisnis mereka. Pada bulan Februari 2008, misalnya, terungkap bahwa pemimpin dari beberapa TNCs Inggris yang paling kuat dan juga kontroversial, termasuk di antaranya perusahaan Shell, BAT dan GlaxoSmithKline, merupakan bagian dari sekelompok pelobi rahasia yang memiliki akses pribadi kepada Perdana Menteri Inggris. Keberadaan kelompok pelobi rahasia dari TNCs ini, dan dokumentasi mereka yang disensor secara ketat, baru ketahuan setelah Komisi Informasi Inggris memutuskan bahwa warga masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pelobi-pelobi memengaruhi para menteri mereka. Para pemimpin TNCs melobi agar TNCs tidak terlalu diberatkan dengan tuntutan birokratis, dan "ingin membujuk Perdana Menteri Toni Blair untuk tidak menetapkan peraturan yang lebih ketat setelah skandal yang melibatkan Perusahaan Enron dan perusahaan-perusahaan Amerika lainnya".[2]

---

1 Pidato dari Gordon Brown, 4 February 2005, UK government Treasury website. <http://80.69.6.120/newsroom_and_speeches/press/2005/press_15_05.cfm> (accessed 12 February 2008).

2 Cookson, R., R. Evans and T. Levene, 'Ultra-rich lobby group with influence at No 10', *The Guardian,* 12 February 2008.

Dengan menempati sebuah posisi yang kuat di dalam masyarakat, perusahaan perlu diatur. Mereka sama sekali tidak bisa dipercaya untuk mengatur diri mereka sendiri. Salah satu pelajaran utama yang menyebabkan runtuhnya Perusahaan Enron adalah bahwa regulasi terhadap diri sendiri (*self-regulation*) tidak akan pernah berjalan. Ketika dibiarkan sendiri, paling tidak beberapa perusahaan akan cenderung untuk berperilaku tidak bertanggung jawab. Saat ini, seruan datang dari mana-mana supaya dibuatkan peraturan global yang mengikat perilaku bisnis perusahaan-perusahaan transnasional.

Ada enam alasan untuk meregulasi perusahaan-perusahaan pangan global yang telah diajukan oleh LSM Action Aid. Alasan yang diajukan ini sebagian besar berlaku untuk semua perusahaan:

1. TNCs menggunakan dan menyalahgunakan kekuatan pasar mereka untuk menguras kekayaan dari masyarakat miskin.
2. TNCs membayar dengan harga rendah dan menangkap nilai yang dihasilkan.
3. TNCs memarginalisasi para petani miskin dan para pekerja pedesaan.
4. TNCs sangat tidak bertanggung jawab atas dampak negatif bisnis mereka terhadap hak asasi manusia dan lingkungan.
5. Tanggung jawab sosial perusahaan bersifat opsional dan jauh dari memadai.
6. Warga masyarakat yang dirugikan oleh aktivitas perusahaan ditolak akses terhadap keadilan.[3]

Di sektor pangan dan pertanian, TNCs yang berbisnis di bidang pertanian menunjukkan kekuatan pasar mereka dengan menaikkan harga *input* pertanian [seperti benih, pupuk, pestisida] dan terlibat dalam praktik pembelian yang tidak adil, membentuk kartel penetapan harga, menutup perusahaan lokal untuk keluar pasar, dan menekan rendah harga barang-barang hasil pertanian para petani. Kesenjangan antara harga barang di

3 ActionAid, *Power Hungry: Six Reasons to Regulate Global Food Corporations*, Johannesburg: ActionAid, 2005, pp. 4–5.

tangan para petani dan harga eceran di pasar semakin melebar, dan hal ini terjadi semakin luas di negara-negara di mana TNCs telah memusatkan kekuatan mereka. Bank Dunia memperkirakan bahwa kesenjangan harga ini merugikan negara-negara pengekspor komoditas lebih dari US$100 miliar (sekitar Rp1.000 triliun) setiap tahun. TNCs yang menguasai bisnis di sektor pertanian memungkinkan mereka untuk menentukan "aturan main", dan memaksakan standar-standar yang para petani miskin umumnya sulit untuk memenuhinya.

Hukum-hukum domestik hanya bersifat tambal sulam dan tidak diterapkan atas cara yang sama di negara-negara miskin, dan TNCs dapat menghindari di dari tuntutan perkara bisnis mereka dengan memanfaatkan pemisahan hukum antara perusahaan induk dan anak perusahaan-anak perusahaan mereka. Hingga saat ini, TNCs sesungguhnya beroperasi di dalam sebuah "ruang kosong tanpa peraturan" (*regulatory void*) di mana mereka dapat melecehkan tenaga kerja buruh, tidak peduli terhadap undang-undang lingkungan hidup dan kesehatan warga masyarakat setempat, dan praktik standar ganda di mana mereka akan berperilaku lebih bertanggung jawab waktu berbisnis di negara-negara dengan regulasi yang lebih ketat, dan kurang bertanggung jawab di tempat lain. Ketika TNCs melanggar hak asasi manusia dan lingkungan hidup, masyarakat yang terkena dampak negatif dari bisnis mereka kerap kali ditolak pengadilan sewaktu mereka dan menuntut kompensasi kerugian melalui hukum negara mereka sendiri atau hukum negara di mana perusahaan bersangkutan bermarkas. Pemerintah nasional dari negara mereka sendiri sering kali tidak mau atau tidak mampu mengadili perusahaan-perusahaan asing, sementara di pihak lain tidak ada mekanisme internasional yang dapat dipakai untuk mengikat perusahaan-perusahaan ini.[4]

TNCs "terlalu penting dan terlalu dominan bagi ekonomi global sehingga kode etiki sukarela cukup untuk menuntun mereka", kata Laporan Pembangunan Kemanusiaan UNDP pada tahun 1999.[5] Menurut Chris-

---

4 *Ibid.*

5 United Nations Development Programme, *Human Development Report 1999.* New

tian Aid, "tampaknya regulasi terhadap bisnis transnasional merupakan masalah yang paling mendesak dari globalisasi... tak pernah dalam sejarah manusia di mana sekelompok kecil perusahaan swasta bisa mempunyai kekuasaan begitu besar... kekuasaan TNCs mesti berada di bawah kontrol demokrasi".[6] Diyakini bahwa sebuah badan internasional baru diperlukan untuk mengawasi regulasi bisnis perusahaan-perusahaan multinasional, untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan bisnis mereka menghormati hak-hak dasar warga masyarakat, dan harus ikut berkontribusi terhadap usaha pengentasan kemiskinan secara global. Dalam membuat rekomendasi ini, Christian Aid mengusulkan sebuah Badan Hukum Global (*Global Regulatory Authority* atau GRA) yang akan berkuasa untuk:

- Menyusun dan menetapkan sebuah kode etik bagi TNCs.
- Memantau kepatuhan TNcs terhadap kode etika yang telah diberlakukan.
- Memiliki sebuah unit dukungan warga masyarakat untuk membantu organisasi-organisasi membawa kasus-kasus pelanggaran ke pengadilan nasional.
- Melakukan penyelidikan pelanggaran.
- Memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang secara hukum mengikat melawan TNCs yang melanggar kode etik atau perundang-undangan global.
- Menetapkan standar-standar minimum untuk mengungkapkan informasi tentang kegiatan-kegiatan bisnis TNCs.
- Memantau pelanggaran-pelanggaran pasar seperti kartel dan monopoli.
- Memantau investasi asing langsung (FDI) dan mempertanyakan apakah ia akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan.[7]

York: UNDP, 1999, p. 100.

6 Christian Aid, *Master or Servant? How Global Trade Rules Can Work to the Benefit of Poor People*, London: Christian Aid, 2001, pp. 37, 45.

7 *Ibid.*

Forum Internasional tentang Globalisasi menekankan sebuah program dua cabang dari tindakan terhadap TNCs. Pada tempat pertama, ia menyerukan penghapusan kesejahteraan korporasi,[8] hak-hak khusus perusahaan, dan mekanisme yang selama ini digunakan perusahaan-perusahaan untuk memengaruhi kebijakan publik:

> Dominasi korporasi dalam proses politik tidak hanya menghalangi warga masyarakat untuk membuat suaranya berarti, ia juga mengucilkan suara untuk bisnis lokal yang didukung oleh kebijakan-kebijakan publik. Sementara para eksekutif perusahaan-perusahaan besar [TNCs] memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik sebagai warga negara, perusahaan-perusahaan itu sendiri tidak memiliki tempat yang sah secara hukum dalam proses politik yang demokratis kecuali kalau pejabat pemerintah atau kelompok masyarakat dapat meminta mereka untuk memberikan masukan-masukan.[9]

Kedua, kebijakan-kebijakan diperlukan untuk membangun kembali perekonomian yang responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia. "Tindakan-tindakan yang perlu diambil meliputi pembatasan mobilitas perusahaan, penguatan kepemilikan lokal dan reformasi sistem keuangan secara radikal untuk mengakhiri, atau setidaknya membatasi secara ketat, spekulasi keuangan, dan mengembalikan integritas keutuhan keuangan."[10]

Jalan lain yang dapat ditempuh adalah pemerintah dapat menetapkan bahwa beberapa transaksi ekonomi seperti sektor layanan jasa atau isu-isu pengelolaan sumber daya 'dibatasi' atau tertutup untuk TNCs, dan mengatur sumber daya-sumber daya alam ini untuk ditangani hanya oleh mekanisme non-korporasi atau non-pasar. Usaha penyediaan air minum dan layanan kesehatan bisa masuk dalam kategori ini. Sumber daya-sumber daya seperti ini seharusnya tidak boleh dikelola oleh TNCs dan

---

8 Kesejahteraan korporasi adalah sebuah istilah yang diciptakan oleh activist konsumen Ralph Nader untuk menggambarkan pemberian hadiah bebas pajak dan macam-macam keistimewaan lainnya yang diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan.

9 International Forum on Globalization, 'Alternatives to Economic Globalization', San Francisco: IFG, 2002, pp. 131–40.

10 *Ibid.*

tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas yang bisa tersedia hanya bagi mereka yang mampu membeli, melainkan mereka diperlakukan sebagai sesuatu yang diberikan kepada semua warga negara sebagai sebuah hak dasar mereka.[11]

Sebuah konvensi akuntabilitas korporasi telah diusulkan oleh LSM *Friends of the Earth*. Hal ini menuntut TNCs untuk mempertimbangkan masalah-masalah sosial dan lingkungan dan mengukuhkan, dalam hukum internasional, hak warga masyarakat untuk mendapat ganti rugi dari perusahaan. Kalau TNCs dapat dituntut di depan pengadilan di bawah hukum internasional, maka mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas bisnis mereka.[12]

Beberapa kebijakan baru di tingkat nasional sehubungan dengan peraturan yang mengatur perusahaan telah menyebabkan sedikit kesulitan bagi TNCs. Pada bulan Oktober 2006, pemerintah Inggris mengeluarkan Undang-Undang tentang Perusahaan. Pemberlakuan UU ini diikuti kampanye dukungan yang intensif dari LSM-LSM. Pada bulan Oktober 2007 beberapa pasal UU ini mulai diimplementasikan. Bagian 417 berisi mengenai kewajiban hukum para direksi perusahaan publik untuk mempertimbangkan dampak-dampak sosial dan lingkungan kegiatan bisnis mereka dan memasukkan semua hal ini dalam laporan tahunan perusahaan mereka. Dalam teori, perusahaan-perusahaan juga diharapkan untuk melaporkan usaha-usaha yang mereka tempuh untuk mengurangi emisi karbon dioksida atau legitimasi praktik kerja mereka. Pabrik-pabrik makanan juga harus melaporkan semua tindakan yang mereka tempuh untuk memastikan bahwa bahan-bahan ramuan makanan seperti minyak kelapa sawit diproduksi secara etis dan menjunjung tinggi prinsip hidup berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan pertambangan harus melaporkan apakah kegiatan

---

11 Lihat David Bollier, 'Common sense: community ownership and the displacement of corporate control', and Patrick Bond, 'An answer to marketization: decommodification and the assertion of rights to essential services', *Multinational Monitor* (July/August 2002).

12 Friends of the Earth International, 'Towards binding corporate accountability', October 2001. <http://www.foei.org/en/publications/corporates/accountpr.html> (accessed 12 February 2008).

bisnis mereka melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan kerusakan lingkungan atau tidak, dan bagaimana mereka berkomunikasi dengan masyarakat lokal untuk mengatasi masalah tersebut. Jika mereka tidak patuh terhadap ketentuan-ketentuan ini, maka secara teoretis, mereka dapat diminta untuk bertanggung jawab secara hukum.

Tapi celah besar dalam UU ini tetap sangat jelas. Menurut mantan eksekutif perusahaan Shell Paddy Briggs:

> Bagian 417 ada kendala lubang menganga. Kelemahan yang sangat jelas adalah bahwa standar-standar yang mendiktekan secara persis kegiatan-kegiatan apa saja yang sebuah perusahaan harus laporkan belum ditetapkan [secara jelas dalam UU ini]. Oleh karena itu, [UU] tetap menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing perusahaan untuk memilih apa yang harus mereka laporkan, yang tidak hanya membuat mustahil bagi pembukuan perusahaan untuk dibandingkan, tetapi juga membuat perusahaan lebih mudah untuk menempatkan spin pada laporan mereka. Selain itu ia juga menciptakan masalah verifikasi... anak perusahaan dari perusahaan asing, seperti Wal-Mart milik Asda, dapat dikecualikan dari peraturan tersebut.[13]

Tapi kemudian, TNCs tetap menempuh segala macam usaha untuk mendapatkan Undang-Undang Perusahaan yang sesuai dengan keinginan mereka. Selama mereka memiliki kekuatan untuk memengaruhi pembuatan kebijakan publik pada setiap level dan "memiliki akses istimewa kepada para pembuat kebijakan-kebijakan publik dan forum internasional mengenai isu-isu global, kita tidak mempunyai harapan memaksa mereka bertanggung jawab terhadap kehancuran yang mereka terus lakukan atau menghentikan mereka sama sekali", kata Paddy Briggs.[14]

Kenyataan menunjukkan bahwa ada masalah besar dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perusahaan-perusahaan di tingkat nasional — apalagi di tingkat internasional. Kebalikan justru

---

13 Corporate Responsibility (CORE) Coalition, 'Former Shell executive decries "the myth of corporations' commitments to human rights"', September 2007. <www.corporate-responsibility.org> (accessed 12 December 2007).

14 *Ibid.*

yang telah terjadi menjelang akhir abad kedua puluh dan di tahun-tahun awal abad kedua puluh satu. Program penyesuaian struktural (SAPs) dari IMF dan Bank Dunia dan ditambah lagi dengan kekuatan TNCs sendiri telah membawa era deregulasi secara besar-besaran — pembongkaran kontrol hukum dan administratif yang perusahaan-perusahaan, para pemerintah Barat, IMF, dan Bank Dunia klaim mengganggu pelaksanaan ekonomi pasar bebas. Aturan-aturan yang mengontrol aktivitas bisnis TNCs telah dihapus semuanya dan pemerintah [negara-negara berkembang] dipaksa mendukung deregulasi.

Sebuah brosur dari Investasi Pemerintah Inggris di Biro Inggris, misalnya, meyakinkan calon-calon investor bahwa "tidak ada undang-undang baru atau peraturan dapat diberlakukan tanpa memastikan dan meminimalkan biaya-biaya yang dikeluarkan dunia bisnis".[15] Dalam rangka menarik investor asing, sejumlah pemerintah negara malah telah memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan menegakkan hak-hak buruh.

Perusahaan-perusahaan mengklaim bahwa mereka juga percaya pada regulasi, "regulasi yang pantas".[16] Namun, ketika perusahaan berbicara tentang regulasi yang "pantas", apa yang mereka maksud dengan itu sebenarnya adalah regulasi atau peraturan yang "ompong tak bergigi dan tidak berguna". Peraturan seharusnya disusun dan diberlakukan oleh pemerintah negara, tetapi TNCs telah merusakkan sistem politik sebegitu sejauh sehingga pemerintah berselingkuh dengan perusahaan. Hubungan antara pemerintah dan TNCs begitu dekat, sehingga pemerintah sangat enggan untuk membatasi TNCs dengan seperangkat peraturan. Kalaupun pemerintah terpaksa harus membuat peraturan untuk mengatur TNCs, pemerintah harus berkonsultasi dengan TNCs tentang bentuk peraturan tersebut. Perusahaan-perusahaan akan menolak peraturan atau Undang-Undang yang mengatur mereka pada tingkat nasional sama seperti mereka juga telah menolak kode etik internasional yang beriktikad mengatur

15 Invest in Britain Bureau, 'Britain: the preferred location — an introduction for investors', London: Department of Trade and Industri, 1993, p. 7.

16 Holme, R., 'Giants tread carefully', *The Guardian*, 7 August 2002.

tingkah laku TNCs. Mereka dapat saja menyetujui beberapa hal, namun TNCs akan melakukan segala macam usaha untuk memastikan bahwa regulasi apa pun tidak akan menahan kegiatan bisnis mereka.

Keterampilan perusahaan-perusahaan untuk menghindari apa yang mereka tidak suka tidak boleh dianggap remeh. TNCs sudah sangat berhasil menemukan jalan untuk menghindari undang-undang nasional yang mereka anggap merugikan bisnis mereka. Dalam era globalisasi ini, undang-undang di tingkat nasional memiliki keterbatasan yang serius. Karena TNCs itu sangat mobile — [selalu berpindah-pindah]. Sebuah TNC yang tidak menyukai undang-undang dari sebuah negara tuan rumah dapat menghindarinya dengan memindahkan basis bisnisnya ke sebuah negara lain yang undang-undangnya lebih menguntungkan.

Meskipun peraturan internasional diperlukan, TNC akan berjuang keras untuk mempertahankan posisi istimewa mereka dan untuk mencegah apa pun untuk menjadi undang-undang yang menurut mereka tidak "pantas". Mereka memiliki dana untuk membayar pengacara yang hebat untuk memblokir setiap peraturan dan untuk mencari celah dalam setiap undang-undang.

Tekanan publik supaya dibuatkan regulasi internasional [untuk mengatur tingkah laku TNCS] pada akhirnya akan memaksa pemerintah untuk bertindak, tapi untuk mencapai hal ini kita masih akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Maka tidak heran kalau TNCs tidak memiliki rasa sedikit pun terhadap regulasi. "Kami tidak takut regulasi, apa yang kita takuti adalah pemberontakan para pelanggan," demikian kata seorang pejabat perusahaan Shell.[17]

Jalan pintas perusahaan

Orang di seluruh dunia berjuang melawan kekuasaan korporasi. Mereka menunjukkan bahwa perusahaan yang jalan pintas adalah sesuatu yang mungkin. Karena walaupun regulasi diperlukan, maka jalan untuk mengontrol TNCs yang lebih menjanjikan dan lebih cepat berada di luar

---

17 Dikutip dalam Anita Roddick, *Take It Personally*, London: Thorsons, 2001, p. 30.

faktor-faktor yang dapat dikontrol oleh perusahaan-perusahaan. Faktor-faktor itu adalah warga masyarakat sendiri dan pemboikotan pelanggan.

Warga masyarakat merupakan faktor penting dalam setiap rencana bisnis perusahaan dan dapat memainkan peran sentral dalam mengacaukan keranjang apel perusahaan. Ketika jutaaan warga masyarakat, misalnya, memutuskan berhenti membeli sebuah produk TNCs, atau mengubah kebiasaan belanja, maka perusahaan mau tidak mau harus meresponsnya atau perusahaan akan mati. TNCs telah menunjukkan bahwa mereka beraksi ketika warga masyarakat beraksi.

Pemberontakan warga, sesungguhnya, sedang memainkan perannya. Walaupun TNCs mempunyai kekuatan besar, tapi pada saat yang sama mereka juga sebenarnya rapuh. Keberlangsungan bisnis mereka bergantung pada pasar, pada warga masyarakat yang membeli barang-barang dan jasa yang mereka tawarkan. Jika warga masyarakat tidak membeli barang-barang mereka, maka sebuah perusahaan bisa tamat riwayatnya. Hal ini telah semakin tampak dari kenyataan di mana semakin banyak orang menolak membeli produk-produk tertentu dari TNCs dan telah melancarkan kampanye untuk memprotes aktivitas bisnis mereka yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Protes warga masyarakat terhadap produk-produk tertentu dari TNCs dapat secara cepat dan efektif memaksa perusahaan-perusahaan untuk mengubah kebijakan-kebijakan dan tingkah laku bisnis mereka yang destruktif dan tidak adil terhadap masyarakat. Protes, melalui kampanye dan pembelanjaan, bisa dibuat dalam beberapa bentuk.

Boikot

Menurut jajak pendapat yang dibuat oleh *Global Market Insite* (GMI), sebuah survei melalui internet atas 15.500 konsumen di 17 negara, 36% konsumen di seluruh dunia memboikot (menolak untuk membeli) produk-produk tertentu. Di antara merek-merek produk yang paling banyak diboikot adalah Coca-Cola, McDonald, dan Nestlé. Tindakan pemboikotan oleh warga masyarakat bisa menghabiskan uang perusahaan. Sebuah survei Bank Koperasi menemukan bahwa boikot konsumen telah

menyebabkan perusahaan kehilangan uang sebesar US$2,5 miliar (sekitar Rp25 triliun) per tahun. Dan nilai keberhasilan tindakan pemboikotan lebih dari sekadar penurunan jumlah penjualan produk di pasar. Menurut John Monogoven, wakil presiden senior sebuah perusahaan yang bergerak di bidang hubungan masyarakat (*public relations*), Pagan International Inc., tindakan pemboikotan oleh warga masyarakat bisa menimbulkan masalah bagi semangat karyawan:

> Para karyawan tidak suka bekerja pada sebuah perusahaan yang sedang diserang. Anda akan memiliki masalah dalam merekrut para mahasiswa terbaik dari perguruan tinggi dan universitas karena mereka tidak ingin bekerja pada sebuah perusahaan yang sedang terlibat masalah. Juga, Anda lihat bahwa para eksekutif tingkat atas harus menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah itu, padahal mereka seharusnya melakukan hal-hal lain.[18]

Pada akhir tahun 1990-an, para pembeli di Inggris menolak untuk membeli makanan yang dimodifikasi secara genetik [lazim disebut *GM-Food*]. Hal ini menyebabkan perubahan besar dalam kebijakan perusahaan eceran makanan raksasa dan rantai makanan cepat saji. "Gerakan menentang makanan yang direkayasa dan dimodifikasi secara genetik telah memenangkan kebijakan demi kebijakan. Misalnya, banyak makanan GM akhirnya dilarang dan dikeluarkan dari rak-rak supermarket di Inggris, lalu disusul dengan undang-undang yang melarang produk ini di seluruh Eropa," kata Naomi Klein.[19]

Perubahan terjadi setelah kekhawatiran atas keamanan makanan GM diangkat ke permukaan, kekhawatiran warga masyarakat yang tidak dapat ditenangkan oleh pemerintah. Krisis BSE Inggris terjadi tak lama sebelum makan GM menjadi masalah, dan warga masyarakat Inggris waktu itu ingat ucapan berharga dari para menteri pemerintah atas masalah ini.

---

18 Co-op America, *Co-op America's Boycott Organizer's Guide*. <http://www.amerikaos.com/boycottguide.html> (accessed 12 February 2008).

19 Klein, N., 'The vision thing: were the DC and Seattle protests unfocused, or are critics missing the point?' *The Nation* (23 June 2000).

Perlawanan terhadap makanan GM pertama kali muncul di Inggris pada tahun 1996 ketika para pelanggan yang cemas akan mengisi troli belanja mereka dengan makanan yang diolah di supermarket lokal, dan membawanya ke tempat kasir di mana mereka akan bertanya tentang produk yang mengandung bahan-bahan ramuan GM. Pertemuan-pertemuan publik dan perdebatan akhirnya mengangkat masalah makanan GM. Supermarket-supermarket mulai memberikan perhatian. Supermarket Islandia merupakan supermarket pertama yang memutuskan untuk berhenti menjual makanan GM pada awal tahun 1998. Larangan penjualan makanan GM di supermarket Islandia menyebabkan ribuan pembeli berbelanja di sana dan keuntungan perusahaan ini melonjak drastis.

Karena Supermarket Islandia bukan merupakan di antara pengecer makanan terbesar, maka waktu itu tidak ada tanggapan segera dari para pengecer saingan lainnya. Namun menyusul sebuah artikel di sebuah surat kabar ("Benih bencana") oleh Pangeran Charles pada bulan Juni 1998, perubahaan kebijakan perusahaan mulai terlihat. Dalam beberapa minggu setelah penerbitan artikel, sebuah perusahaan biotek utama, bernama AgrEvo, membatalkan rencana untuk membudidayakan tanaman perdagangan yang direkayasa secara genetik untuk pertama kali di Inggris. Perusahaan itu mengatakan tidak akan melanjutkan proyek ini karena pasar belum siap menerimanya.

Hal ini lahir dari opini publik dan survei para konsumen. Sebuah kampanye iklan perusahaan Monsanto di Inggris pada tahun 1998, untuk coba membujuk masyarakat membeli tanaman GM, menimbulkan bencana. Warga masyarakat tidak menerima propaganda-propagandanya. Pada bulan Oktober 1998, sebuah studi yang dilakukan oleh *Friends of the Earth* menemukan bahwa 58% dari 2.000 orang yang belanja di supermarket menginginkan agar toko-toko di wilayah mereka bebas dari GM. Dalam waktu enam bulan, Supermarket Marks & Spencer telah menarik semua produk GM dari rak-rak supermarket. Tindakan yang sama diikuti oleh Supermarket Sainsbury pada bulan Juli 1999 dan selanjutnya oleh supermarket-supermarket terkemuka lainnya.

Rantai makanan cepat saji juga ikut bergerak sebagai respons terhadap pemboikotan para pelanggan. Pada bulan Maret 1999, sejumlah restoran seperti Pizza Express, Domino Pizza, dan Wimpy melarang produk-produk dengan bahan-bahan ramuan GM. Restoran McDonald dan Burger King juga mengumumkan mereka akan mengurangi bahan-bahan ramuan GM secara bertahap-tahap. Pemboikotan atas makanan GM telah menyebabkan perubahan kebijakan-kebijakan perusahaan hanya dalam waktu beberapa minggu.

McDonald barangkali merupakan restoran yang mendapat protes paling besar dari warga masyarakat di seluruh dunia. Kampanye anti-McDonald merupakan protes "terhadap promosi makan berkualitas rendah *(junk food)*, secara tidak etis menargetkan anak-anak, eksploitasi para tenaga kerja, kekejaman terhadap hewan, perusakan lingkungan, dan dominasi global perusahaan terhadap kehidupan warga masyarakat".[20]

Kampanye tentang masalah ini sedang dibuat secara aktif di banyak negara seperti Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brasil, Kanada, Kroasia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Israel, Italia, Malta, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Filipina, Portugal, Rumania, Rusia, Afrika Selatan, Swedia, Swiss, Taiwan, Inggris, dan Amerika Serikat. Sebuah Hari Aksi khusus tahunan untuk para pekerja McDonald diadakan setiap bulan Oktober.

Di Inggris protes telah dilakukan dengan membagi-bagikan selebaran di luar restoran McDonald — lebih dari 3 juta selebaran sejak tahun 1990 — dan kampanye menentang tokok-toko baru, termasuk pendudukan yang terhitung sukses selama 552 hari atas sebuah tempat yang direncanakan untuk restoran McDonald oleh penduduk Hinchley Wood di timur-selatan Inggris. Pada tahun 1990 McDonald melayangkan surat tuduhan fitnah kepada dua demonstran Inggris, Helen Steel dan Dave Morris. Dalam apa yang kemudian dikenal sebagai perkara McLibel (berlangsung selama 314 hari), hakim memutuskan bahwa iklan McDonald

20 McSpotlight website. <http://www.mcspotlight.org> (accessed 12 December 2007).

"yang mengatakan bahwa makanan mereka bergizi baik (lemak dan garam tinggi, dll.) tidak benar". Hakim juga menyatakan bahwa McDonald telah "mengeksploitasi anak-anak" dengan iklan-iklan mereka. McDonald juga "harus bertanggung jawab atas kekejaman terhadap hewan", dan "membayar upah rendah terhadap para pekerja, membantu menekan upah dalam perdagangan *catering*". Namun pengadilan juga memutuskan bahwa pasangan Helen Steel dan Dave Morris telah memfitnah McDonald dalam beberapa hal dan memerintahkan keduanya untuk membayar denda sebesar £40.000 (sekitar Rp60 juta) di mana mereka menolak untuk bayar. Perkara ini menyebabkan sejumlah besar berita buruk bagi perusahaan McDonald.

Di Prancis ada protes massal anti-McDonald oleh para petani, termasuk tindakan membongkar sebuah toko. Petani José Bove dipenjara karena pembongkaran restoran McDonald, sebuah kasus yang menarik berita yang luas dan menyebabkan ketidakpercayaan terhadap makanan restoran McDonald semakin meningkat. Pada Olimpiade Sydney tahun 2000, ada protes terhadap penggunaan besar-besaran oleh TNCs bahan kimia pendingin yang berhubungan dengan pemanasan global. Buku dari Eric Schlosser yang berjudul *Fast Food Nation* (*Bangsa Makanan Cepat Saji*), sebuah buku yang berbicara tentang seluk-beluk industri makanan cepat saji, meliputi kritikan yang menghancurkan McDonald.[21] Sikap menolak terhadap McDonald — 'entah warga masyarakat yang menentang sebuah rencana pembukaan restoran baru, kampanye yang merusak citra publik restoran McDonald, atau dari karyawan restoran McDonald yang berdiri menata kekuatan mereka, menunjukkan bahwa warga masyarakat di mana-mana bisa berpikir untuk diri mereka sendiri dan bisa menyerang balik".[22]

Produk-produk perusahaan Nestlé telah diboikot secara internasional selama lebih dari 20 tahun. Jaringan Aksi Internasional untuk Makanan Anak-Anak (*The International Baby Food Action Network* atau IBFAN)

21 Schlosser, E., *Fast Food Nation*, Allen Lane, Penguin, 2001.

22 McSpotlight website.

didirikan pada bulan Oktober 1979 oleh LSM dari beberapa negara yang prihatin bahwa perubahaan-perusahaan pabrik minuman susu yang kuat-seperti Nestle, Cow & Gate, Mead Johnson, Meji, Milupa, dan Wyeth menebarkan iklan-iklan yang menyesatkan, melakukan contoh dan praktik-praktik yang mendorong kaum ibu muda untuk tidak lagi menyusui bayi-bayi mereka. IBFAN mengoordinir pemboikotan terhadap produk-produk yang dibuat oleh Nestlé yang dimulai pada tahun 1977. Karena tekanan dari pemboikotan ini, Nestlé akhirnya mengurangi sejumlah malapraktik yang sebelumnya dilakukannya secara terang-terangan, seperti penggunaan "perawat susu" (para penjual susu dari perusahaan Nestlè yang berpakaian seperti perawat), gambar-gambar bayi pada kaleng susu formula dan beberapa iklan media lainnya.

Pada tahun 1984 boikot terhadap Nestlè dicabut setelah Nestlé berjanji kepada publik bahwa perusahaan akan mematuhi kode etik dari WHO, sekalipun kode etik yang serupa tidak ada dalam hukum nasional. Sebagian besar iklan Nestlé tentang pengganti ASI berhenti, namun praktik-praktik pemasaran lainnya berjalan terus. Dua tahun kemudian, sebuah investigasi di Filipina mengungkapkan bahwa 37% dari bayi di rumah sakit diberi susu yang dipabrik Nestlè dan yang diperoleh secara dari Nestlé. Pemberian gratis ini jelas bertentangan secara langsung dengan Kode Etik. Di Pakistan, Malaysia, dan Singapura, ada bukti di mana perusahaan-perusahaan minuman susu melanggar Kode etik WHO. Pemboikotan konsumen terhadap Nestlé akhir diberlakukan kembali.

IBFAN, yang sekarang anggotanya meliputi lebih dari 200 kelompok di lebih dari 100 negara, berencana untuk melanjutkan pemboikotan terhadap Nestlé hingga Nestlè sungguh-sungguh mematuhi Kode etik WHO dan Resolusi Majelis Kesehatan Dunia. Nestlé adalah sebuah perusahaan yang paling diboikot di Inggris. Pomboikotan ini didukung oleh kelompok-kelompok gereja, kesehatan dan para konsumen, pebisnis, serikat mahasiswa, pemerintah daerah, serikat kaum buruh, Anggota Parlemen dan partai politik. Walaupun tindakan pemboikotan ini memiliki efek yang sedikit pada laba keuntungan yang diraih Nestlé, tetapi pemboikotan telah menodai citranya secara serius (lihat juga bahan Bab 3).

Sebuah pemboikotan terhadap perusahaan minyak ExxonMobil (Esso) terjadi di enam negara — Kanada, Prancis, Jerman, Luksemburg, Inggris, dan Amerika Serikat. Di Inggris, gerakan pemboikotan ini dikenal dengan nama "*Stop Esso*". Para pendukung boikot ini mengatakan bahwa perusahaan ExxonMobil "menggunakan kekayaan dan kekuasaannya untuk menghentikan kegiatan internasional mengenai perubahan iklim". ExxonMobil berkampanye via surat khabar AS untuk mengutuk Kyoto Protokol dan melobi Presiden George Bush untuk keluar Kyoto Protokol. ExxonMobil juga telah mendanai jutaan dolar propaganda untuk melemahkan setiap aksi untuk melindungi iklim, dan sering mengeksploitasi hasil studi ilmiah yang usang atau salah untuk mendukung posisinya.[23]

Segera setelah George W. Bush menjadi presiden Amerika Serikat pada awal tahun 2001, ia menarik AS keluar dari Kyoto Protokol — sebuah perjanjian internasional untuk menangani masalah pemanasan global — persis kebijakan yang dipromosikan ExxonMobil. Karena Amerika Serikat, yang memiliki 5% dari penduduk dunia, bertanggung jawab atas 25% dari polusi yang menyebabkan pemanasan global, maka tindakan AS ini sangat merusak Kyoto Protokol. Dua hari sebelum pelantikan Presiden Bush, ExxonMobil dipanggil masuk dalam pers AS untuk "kebijakan energi bagi pemerintahan baru". Dikatakan bahwa "proses Kyoto yang merusakkan secara ekonomis perlu dipikirkan kembali".[24]

ExxonMobil adalah pendukung yang sudah lama dari Koalisi Iklim Global (*Global Climate Coalition* atau GCC), kelompok industri terkemuka yang merusak inisiatif untuk mengatasi pemanasan global. BP meninggalkan GCC pada tahun 1997 ketika mengakui bahwa perubahan iklim membutuhkan aksi yang segera. Pembelotan secara besar-besaran dari perusahaan seperti Ford, General Motors dan Texaco terjadi pada tahun 1999 dan 2000. ExxonMobil juga akhirnya harus hengkang ketika GCC memutuskan bahwa hanya asosiasi perdagangan yang cocok untuk keanggotaan GCC dan program korporasinya diakhiri. Pada tahun 2002

23 Stop Esso website. <http://www.stopesso.com> (accessed 12 February 2008).
24 *Ibid.*

GCC "menonaktifkan" dirinya dan mengklaim bahwa ia telah mewujudkan tujuannya "dengan menyumbangkan sebuah pendekatan nasional baru terhadap pemanasan global". Oleh karena AS keluar dari Kyoto, maka GCC tidak perlu lagi melanjutkan lobi-lobinya tentang pendanaan bahan bakar fosil.

Kampanye "Stop Esso" mengatakan bahwa ExxonMobil terus menyangkal fakta "pemanasan global... menolak untuk menyumbangkan satu dolar saja dari US$15 miliar laba keuntungan bersih per tahun, energi terbarukan seperti angin dan tenaga surya... dan menyabotase aksi global". Kampanye ini menunjukkan kekuatan warga masyarakat di dunia pasar global. Sebuah investasi bank telah memperingatkan bahwa perusahaan ExxonMobil yang sedang ternoda oleh label "musuh lingkungan hidup nomor satu" merupakan sebuah risiko berbahaya bagi bisnisnya.[25]

Sebuah alat baru, yang berhubungan dengan pemboikotan, diusulkan oleh KarmaBanque. Didirikan pada tahun 2002, gerakan ini mengaku mau menggabungkan pembangkangan sipil ala Gandhi dengan kecerdasan keuangan George Soros "untuk membantu mengubah tata ekonomi dan politik dunia!"

> Hindari membuang-buang waktu dengan kampanye-kampanye Anda — serang harga-harga saham! Anda tidak perlu butuh uang untuk menyerang harga saham perusahaan. Dana *hedge* (orang kaya) akan menyerang harga saham sebuah perusahaan (orang-orang kaya lainnya) untuk Anda jika Anda mengumpan dengan pemboikotan yang tepat. Kami menjumlahkan dan merekomendasikan boikot-boikot pengumpan dana *hedge* yang terbaik.[26]

KarmaBanque memberikan sebuah peringkat cara-cara terbaik untuk memboikot, yang didasarkan pada tingkat kerentanan mereka. Pertama, perlu dilihat bagaimana harga saham perusahaan bergantung pada penjualannya. Jika taruhannya konsisten dengan harga saham perusahaan

25 Lihat Terry Macalister, 'Greenpeace hails Deutsche warning', *The Guardian*, 11 October 2002.

26 Informasi dari KarmaBanque website. <http://www.karmabanque.com> (accessed 12 February 2008).

yang sedang jatuh — dan hal ini kemudian betul terjadi demikian — dana *hedge* dari para investor akan menuai laba keuntungan. Jika taruhan tersebut dikoordinasikan dengan pemboikotan-pemboikotan, maka perusahaan akan terkena dampaknya, demikian kata KarmaBanque.

Warga masyarakat sedang memboikot produk-produk TNCs dan membeli produk-produk yang tidak melalui TNCs. Mereka telah menyadari bahwa mereka sesungguhnya dapat menghindari produk-produk yang dihasilkan TNCs. Mereka mulai membeli produk-produk berlogo *fairtrade* dan produk-produk lokal dari toko-toko kecil.

Perdagangan yang adil (*fair trade)* sedang melonjak popularitasnya di seluruh dunia dan merupakan sebuah pilihan yang semakin penting.[27] Warga masyarakat membeli semakin banyak barang dari *fair trade* karena orang-orang yang menghasilkan produk-produk ini akan menerima pengembalian hasil usaha yang adil dan sebagian besar produk TNCs akan diabaikan. Produk-produk ini terutama dijual oleh koperasi produsen langsung ke prosesor, seperti ke *CaféDirect* dalam kasus kopi. Baik di negara-negara Barat maupun di negara-negara berkembang, semakin banyak toko yang menjual produk-produk yang berlabel *fair trade*. Lebih dari 4.000 macam produk sekarang berlabelkan Logo *Fairtrade* (lihat bahan Bab 11). Berbagai jenis barang perdagangan yang diproduksi *fair trade*, seperti pakaian, sedang meningkat jumlahnya dan juga pengakuan warga masyarakat atasnya. Di Inggris, lebih dari setengah warga masyarakat negara ini sekarang mengenali produk-produk bermerek *Fairtrade*. Universitas, kota dan gereja-gereja menjadi terdaftar sebagai tempat-tempat '*fair trade*'.[28]

Baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara Barat, pembelian produk yang dibudidayakan secara lokal dari petani berskala kecil lebih meningkat daripada makanan yang diproduksi TNCs. Di negara-negara Barat pasar-pasar petani semakin bertumbuh, yang me-

27 Informasi dari IFAT website. <www.ifat.org> (accessed 12 February 2008).

28 Information dari Fairtrade Foundation website. <www.fairtrade.org.uk> (accessed 12 February 2008).

nawarkan orang kesempatan yang sangat baik untuk membeli barang-barang lokal. Ada juga boks makanan organik dan kesempatan untuk pembelian langsung di kebun-kebun para petani (*on-farmshops*).

Petani dan aksi pemegang saham

Karnasemua produk TNCs memiliki pelanggan-pelanggannya, maka sulit bagi warga masyarakat termasuk para petani untuk berhenti membeli produk-produk TNCs, terutama jika sistem ekonomi negara telah memberikan TNCs monopoli atau hak paten. Empat perusahaan, misalnya Du Pont, Syngenta, Monsanto, dan Mitsui, memegang 70% dari paten enam makanan pokok paling utama: beras, jagung, gandum, kedelai, kentang, dan sorgum. Secara total, perusahaan-perusahaan ini telah mengambil lebih dari 600 paten atas tanaman-tanaman pangan ini.[29]

Para petani di negara-negara berkembang sedang berusaha untuk membendung kekuasaan TNCs. Misalnya, Koalisi Pekerja Immokalee (*Coalitionof Immokalee Workers* atau CIW) adalah organisasi kaum buruh US yang berbasis masyarakat, yang anggotanya — sebagian besar Latino, Haiti, dan imigran Suku Maya Indian — bekerja pada pekerjaan-pekerjaan berupah rendah di Florida, seperti pemungutan buah melon dan tomat.[30] Pada tahun 2001, dengan upah di bawah garis kemiskinan, CIW meluncurkan boikot buruh tani untuk pertama kalinya terhadap sebuah perusahaan makanan cepat saji — boikot nasional terhadap Taco Bell, yang merupakan bagian dari jaringan restoran — dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, upah rendah dan kondisi kerja yang buruk.[31] Pada tahun 2005, perusahaan setuju untuk memenuhi tuntutan CIW untuk meningkatkan upah dan memperbaiki kondisi kerja yang baik bagi pemetik tomat di Florida. "Kemenangan ini memberikan kami fondasi yang

---

29 Lihat ActionAid, *Crops and Robbers*, London: ActionAid, 2001.

30 Dari Coalition of Immokalee Workers website.<www.ciw-online.org> (accessed 12 December 2007).

31 *Ibid.*

kuat untuk mengejar perubahan yang lebih mendasar di seluruh industri makanan cepat saji dan, pada gilirannya di industri pertanian Florida."[32]

Pada tingkat yang lebih global, para petani milik Via Campesina telah mengembangkan konsep kedaulatan pangan. Gerakan ini mencapai kematangannya pada bulan Februari 2007 pada sebuah Forum untuk Kedaulatan Pangan di Mali yang dihadiri oleh lebih dari 600 delegasi yang mewakili para nelayan, petani, konsumen, lingkungan, kaum buruh, dan penggembala ternak dari tujuh wilayah di dunia. Peserta Forum, merilis sebuah deklarasi politik pada hari terakhir dari forum untuk mendorong konsep kedaulatan pangan ke dalam tindakan-tindakan nyata.

Kedaulatan pangan adalah hak dari penghasil makanan untuk memutuskan apa yang harus mereka budi dayakan, dan bagaimana dan di mana mereka akan mendistribusikannya. Konsep ini juga mencakup hak para konsumen terhadap makanan yang diproduksi secara lokal, dan kesempatan bagi para produsen dan konsumen untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan. Untuk mencapai hal itu, penguasaan dunia perusahaan terhadap rantai makanan perlu dilawan, bersama dengan kekuasaan WTO, sehingga para petani bisa merebut kembali kontrol atas produksi dan pasar. Pemerintah juga perlu untuk merebut kembali hak mereka untuk menentukan kebijakan pangan dan pertanian di negara-negara mereka.[33]

Aksi para pemegang saham penting untuk menahan laju kekuatan TNCs. Kebanyakan TNCs merupakan perusahaan publik, yang dimiliki oleh publik, yang dalam kenyataannya dimiliki ribuan orang. Orang-orang dengan uang yang sedikit telah menjadi pemegang saham di beberapa perusahaan ini dengan membeli sebuah saham tunggal. Pemegang saham tunggal menerima laporan perusahaan dan berhak untuk menghadiri pertemuan tahunan perusahaan bersangkutan. Mereka dapat mengajukan pertanyaan dalam rapat umum perusahaan atau menyerahkan resolusi yang

---

32 *Ibid.*

33 Lihat Nyelini website.<http://www.nyeleni2007.org> (accessed 27 February 2008).

mendesak perusahaan, misalnya, untuk menghentikan praktik-praktik yang tidak adil. Mereka juga ditempatkan untuk meneliti perusahaan, memantau kegiatannya, menjadi spesialis dalam kegiatan perusahaan dan sebagai pemegang saham mereka bisa menulis surat kepada eksekutif perusahaan.

Aksi pemegang saham dapat menjadi alat yang ampuh untuk juru kampanye yang menginginkan perubahan dalam kebijakan-kebijakan perusahaan. Kadang-kadang ancaman resolusi dari para pemegang saham yang meminta perusahaan untuk mengubah kebijakan bisa mendorong para direksi perusahaan untuk bernegosiasi dengan para aktivis. Eksekutif perusahaan pasti ingin menghindari rasa malu terhadap sebuah resolusi yang ditempuh melalui pemungutan suara dari pemegang saham. Sering kali, resolusi untuk pengungkapan informasi dapat menjadi katalisator untuk mengubah dan memperbaiki kebijakan perusahaan. Perlu diketahui oleh direktur perusahaan bahwa para pemegang saham sesungguhnya tetap memantau seluruh kegiatan bisnis perusahaan mereka. Beberapa contoh dapat diberikan di bawah.

Brooke Bond

Pada 1970-an, anggota Gerakan Pembangunan Dunia (WDM) didorong untuk membeli sebuah saham tunggal di perusahaan teh Brooke Bond. Selama beberapa tahun berturut-turut beberapa resolusi diajukan dan digerakkan oleh pemegang saham anggota WDM yang mendesak perusahaan untuk meningkatkan upah dan memperbaiki kondisi kerja dari pemetik teh di benua Asia. Walaupun semua resolusi ini digugurkan oleh perusahaan Brook Bond, tapi resolusi-resolusi ini telah meningkatkan kesadaran di antara para pemegang saham tentang nasib para pemetik teh di Asia.

BAT

Anggota WDM didorong pada 1980-an untuk membeli saham tunggal di perusahaan rokok BAT. Selama beberapa tahun, mereka mengajukan sejumlah resolusi dan menantang kegiatan perusahaan di negara-negara berkembang pada pertemuan pemegang saham.

Shell

Pada pertemuan tahunan perusahaan Shell pada bulan Mei 1997, 130 pemegang saham mengajukan sebuah resolusi yang menarik dukungan dari pemegang saham institusional dalam bentuk dana pensiun yang dikelola. Resolusi itu, yang diprakarsai oleh kelompok gereja, Konsili Ekumenis untuk Tanggung Jawab sosial perusahaan, meminta Shell untuk "membuat tinjauan independen dan prosedur audit" atas kebijakan lingkungan dan hak asasi manusia.[34] Gerakan ini mendapat dukungan luas tidak hanya dari LSM-LSM seperti *Amnesty International, World Wide Fund for Nature*, dan *Friendsof the Earth*, tetapi juga dari yang organisasi-organisasi yang berbasis di London seperti *Pensiun* dan *Investment Research Consultants.* Meski kalah, resolusi tersebut didukung oleh 18 dana pensiun dengan aset investasi lebih dari £25 miliar (sekitar Rp375 triliun) perusahaan Shell setuju untuk berkonsultasi dengan kelompok gerakan hak asasi manusia dan lingkungan hidup tentang proyek-proyek yang sensitif, dan sejak itu perusahaan Shell telah menarik sejumlah proyeknya, misalnya di Bangladesh dan Kolombia, karena alasan pelanggaran hak asasi manusia.

Syngenta

Tekanan dari para pemegang saham pada Pertemuan Umum Tahunan Pemegang Saham (*Annual General Meeting of Shareholders* atau AGMs) bisa efektif, bahkan bisa tanpa harus ada resolusi tertentu. Pada bulan April 2002 para pemegang saham kecil di perusahaan Syngenta yang berbasis di Swiss menghadiri AGMs dan mereka menuntut perusahaan untuk melarang penjualan bahan kimia paraquat herbisida yang kontroversial. Perusahaan Syngenta menempati urutan pertama di bidang agrokimia dan ketiga di bidang pemasaran benih tanaman pangan. Tindakan pemegang saham Syngenta diikuti publikasi sebuah laporan yang berjudul "Paraquat: Syngenta kontroversial herbisida" yang ditulis oleh *Berne Declaration* (Swiss), *Foro Emaus* (Kosta Rika), *Pesticide Action Network* (PAN) Asia Pa-

34 Dari Ecumenical Council for Corporate Responsibility website. <www.eccr.org> (accessed 12 February 2008).

sifik (Malaysia), PAN Inggris dan Masyarakat Swedia untuk Jaringan Aksi Konservasi Alam. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa para pekerja dan petani secara berkala mengalami masalah kesehatan yang serius karena paraquat herbisida. Keracunannya yang tinggi dan kurangnya penangkal dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius dan bahkan bisa berakhir dengan kematian.

Paraquat digunakan secara luas di perkebunan pisang, kakao, kopi, kapas, kelapa sawit, nanas, karet, dan tebu, serta oleh para petani kecil. Sebuah studi oleh Organisasi Kesehatan Pan-Amerika, berdasarkan data dari Costa Rica, menegaskan bahwa banyak pekerja pertanian menderita paraquat.

Pada AGMs Syngenta tahun 2002, seorang tenaga buruh di perkebunan kelapa sawit Malaysia mendesak perusahaan untuk perlahan-lahan menghentikan penggunaan paraquat. Karena perusahaan Syngenta tidak mengindahkan keluhan ini, maka pemerintah Malaysia menanggapinya dengan mengeluarkan larangan terhadap pemakaian herbisida. Meskipun ada upaya lobi-lobi intensif dari perusahaan Syngenta untuk mengubah keputusan ini, pemerintah Malaysia tetap bergeming. Tekanan dari Syngenta untuk mencabut larangan ini tetap berjalan terus. Aksi LSM menarik publisitas yang cukup luas dan kasus melawan paraquat menjadi perhatian publik.[35]

Kesimpulan

Resistensi warga masyarakat, resistensi para petani dan tekanan dari para pemegang saham telah muncul sebagai cara-cara ampuh untuk memerangi perilaku bisnis TNCs milik publik. "Kami melihat masyarakat sipil yang semakin aktif, yang berusaha mengambil kembali ruang hidup mereka yang telah "direbut" oleh TNCs," kata Mary Kaldor dari Sekolah Ekonomi London.[36]

---

35 Madeley, J., 'Unsuitable for use — profile of paraquat', *Pesticide News*, No. 56 (June 2002), London: Pesticide Action Network.

36 Dikutip dalam Litan, R. E. and P. Wallison. 'Corporate social responsibility investment is not a choice', Council of Saudi Chambers. <http://saudichambers.org.sa> (accessed 16 January 2008)

Ada ruang untuk jaringan terpadu internasional dari kelompok-kelompok ini, dan kelompok-kelompok terpadu lainnya, untuk melawan kekuasaan korporasi, memonitor kegiatan tingkah laku TNCs dan dampak-dampak kegiatan bisnis mereka, serta untuk memublikasikan alternatif-alternatif lain. Internet dan alat komunikasi lain secara cepat membuat jaring kerja ini menjadi mungkin. TNCs bukanlah sebuah kekuatan yang tidak bisa terkalahkan. Aksi warga masyarakat memiliki potensi untuk mengubah dunia yang didominasi perusahaan ini tercungkir balik dan membawa alternatif-alternatif lain yang lebih manusiawi. Mereka-mereka yang saat ini beruntung akan menjadi miskin.

Kesimpulan

Sejak edisi pertama buku ini diterbitkan pada tahun 1999 saya telah berbicara tentang isu-isu di sejumlah pertemuan, mulai dari pertemuan kelompok-kelompok LSM sampai dengan pertemuan para pebisnis. Beberapa pertanyaan menarik telah diikuti. Misalnya — "Apakah saya benar-benar mengatakan bahwa TNCs, termasuk beberapa perusahaan dunia yang paling bergengsi dan menguntungkan, telah terlibat dalam praktik-praktik bisnis yang merusak mata pencaharian warga masyarakat miskin di dunia?" Jawabannya: ya.

"Jadi, apakah Anda mengatakan perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki pemahaman tentang dunia orang miskin? Bahwa para pembuat keputusan TNCs ini benar-benar jauh dari kehidupan orang miskin?" Jawaban terhadap pertanyaan ini: tidak. Beberapa dari TNCs besar memiliki sejumlah orang/pegawai yang bahkan bisa menjelajahi daerah-daerah terpencil negara berkembang dalam rangka mencari tempat penjualan produk-produk mereka dan mencari laba keuntungan. Mereka tahu gambaran umum keadaan kehidupan warga masyarakat miskin di mana mereka mengoperasikan bisnis mereka. Meskipun kebijakan bisnis mereka mempunyai dampak negatif yang sangat merusakkan kehidupan dan alam masyarakat warga miskin, TNCs tetap maju merealisasikan kebijakan-kebijakan bisnis mereka.

"Apakah Anda mengatakan bahwa TNCs tidak mampu untuk mereformasikan diri mereka, tidak mampu berbuat baik, bahwa orang-orang yang bekerja untuk mereka berada di lapangan kerja untuk menindas kaum miskin?" Ini memerlukan sebuah jawaban lebih panjang. Kewajiban yang terbatas yang disebut *limited liability*, sistem perusahaan yang dimi-

liki secara publik mewajibkan TNCs untuk mendulang keuntungan bagi para pemegang sahamnya, laba keuntungan sebanyak mungkin, sehingga mereka dapat meningkatkan dividen untuk para pemegang saham. Ini adalah peran dari sebuah TNC publik. Kalau sebuah TNC gagal melakukan misi ini, maka ia bisa menghadapi kemungkinan untuk diambil alih—mungkin oleh kapitalis spekulan lain yang yakin bahwa mereka dapat menjalankannya secara lebih menguntungkan. Dalam dunia perusahaan, kalau bisnis gagal mendulang keuntungan, maka sistemnya yang dipersalahkan dan bukan orang-orang yang bekerja bagi perusahaan. Menurut mereka, orang-orang yang bekerja pada perusahaan gagal mencapai keuntungan karena terperangkap dalam sistem yang tidak berasal dari mereka. Sebuah praktik bisnis TNC mungkin menodai citranya, menyebabkan pemboikotan atas produk-produknya, dan memaksanya untuk pintar-pintar berelasi dengan warga masyarakat dan pernyataan-pernyataan yang dalam kenyataannya kadang-kadang hasilnya sangat sedikit atau tidak ada hasil sama sekali, tetapi motivasi perusahaan untuk mendulang laba keuntung-an tetap merupakan sesuatu yang imperatif bagi perusahaan.

"Tapi apakah TNCs tidak bisa memutuskan bahwa mereka tetap dapat memaksimalkan keuntungan dengan memperlakukan warga masyarakat miskin secara baik?" Ini adalah sebuah pertanyaan yang bagus dan dalam teori jawabannya adalah ya. Tapi masalahnya adalah bahwa dalam praktiknya hampir tidak ada TNCs telah melakukannya. Kita ambil contoh perusahaan Body Shop yang didirikan dan dipimpin oleh Anita Roddick yang luar biasa. Tapi biarpun demikian, perusahaan Body Shop akhirnya tetap diambil alih oleh sebuah perusahaan yang lebih besar. Melihat kenyataan ini, orang akan berpikir bahwa perusahaan Body Shop telah menunjukkan dirinya berhasil menjadi perusahaan yang lebih besar. Kenyataan tidaklah demikian. Rekor sejarah TNCs secara keseluruhan menunjukkan bahwa mereka tidak mengejar laba keuntungan sambil memperlakukan warga masyarakat miskin dengan baik. Ini bukan merupakan sebuah pertanda baik untuk sebuah perubahan.

"Tapi tidak semua perusahaan besar adalah perusahaan publik. Bagaimana dengan Cargill? Mereka tidak menjadi lebih besar." Cargill adalah

perusahaan yang dimiliki keluarga (lihat bahan Bab 2) yang berlaku sama seperti sebuah perusahaan publik. Kebijaksanaan dari perusahaan ini adalah bahwa ia merupakan sebuah badan yang paling kompeten untuk merencanakan produksi dan distribusi global. Ia hanya terjebak dalam sistem yang sama seperti perusahaan-perusahaan publik.

"Jika kalau sistemnya yang salah, apakah ada kemungkinan untuk mengubah sistem itu?" Undang-Undang Inggris tahun 2006 tentang Perusahaan mewajibkan TNCs untuk memperhitungkan dampak-dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis mereka (lihat bahan Bab 12). Tapi kebijakan pemerintah ini pun tetap jauh dari cukup. Undang-Undang ini dibatasi ruang lingkupnya, dan hukum nasional tidak memadai untuk mengatur TNCs. Kita membutuhkan undang-undang atau hukum internasional untuk mengatur TNCs. Tapi sayangnya, undang-undang internasional untuk mengatur TNCs belum masuk dalam agenda-agenda politik. Sistem ini bisa berubah hanya jika lebih banyak perusahaan mengubah diri mereka menjadi usaha-usaha koperatif seperti, misalnya, John Lewis Partnership. Dan sebuah sistem bisa berubah hanya jika semakin banyak orang yang menuntut perubahan yang menuntut bahwa warga masyarakat miskin berhak untuk hidup lebih baik.

Di bawah tekanan

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa praktik-praktik kerja telah berperan meningkatkan keparahan dampak perusahaan terhadap masyarakat miskin. Banyak TNCs telah berusaha meningkatkan keuntungan dengan memangkas jumlah karyawan mereka dan dengan mengharapkan lebih dari mereka yang tetap bekerja. Karyawan berada di bawah tekanan besar untuk memberikan dan mengoperasikan bagian dari mereka di dalam bisnis untuk menghasilkan keuntungan banyak sebisa mereka sehingga mereka bisa memberikan kontribusi keuntungan maksimal terhadap neraca perusahaan. Zaman keamanan pekerjaan (*job security*) sudah berlalu. Jika para karyawan TNCs tidak menunjukkan keberhasilan dalam kerja mereka, maka mereka bisa terancam akan kehilangan pekerjaan.

Tak pelak hal ini dapat menyebabkan karyawan tersudut. Hal ini dapat mendorong mereka untuk membuat keputusan tanpa pemikiran yang cukup atau tidak memedulikan orang-orang yang akan dikenai dampak negatif dari aktivitas bisnis mereka. Orang miskin, yang tidak bisa melakukan perlawanan balik, sangat rentan. Standar ganda dapat merayap masuk. Seorang manajer senior sebuah perusahaan minyak mengaku: "Anda tidak bisa mengharapkan kami untuk memberlakukan standar-standar yang tinggi di negara-negara berkembang sama seperti di negara-negara kita berlakukan di negara-negara Barat."

Di Barat, pemerintah sangat keras dan menuntut standar lingkungan yang tinggi dan aktivitas TNCs diteliti — dimonitor — secara teliti. Tapi di negara-negara berkembang, syarat-syarat hukum sering lebih rendah dan TNCs bahkan bisa lolos dari hukum. Para karyawan terjebak dalam eksploitasi TNCs dan jika tidak mereka terancam akan kehilangan pekerjaan. Tim Melville-Ross, direktur jenderal-mantan Direksi Institute Inggris telah mengakui bahwa sebagian besar perusahaan menerapkan standar yang berbeda untuk operasi mereka di dunia berkembang dari standar-standar yang mereka terapkan di negara-negara asal mereka, namun mereka mengklaim bahwa sekarang ada konvergensi.[1]

Munculnya pemodal spekulan tampaknya membuatnya TNCs lebih sulit untuk menolak orientasi mengejar laba keuntungan. "Sebuah perusahaan yang terlalu mempertimbangkan keuntungan dan tanggung jawab sosial bisa menjerumuskan dirinya ke dalam bahaya besar dapat dicapai oleh sekelompok investor yang dapat memperoleh keuntungan finansial dengan mengambil alih perusahaan."[2] Kelompok investor semacam itu pada dasarnya adalah 'perampok' yang berusaha untuk menguasai perusahaan yang kinerja bisnisnya tidak memuaskan untuk memaksimalkan efisiensi keuangan perusahaannya sendiri. Hal ini bisa dibuat dengan memisahkan atau menjual sebagian dari perusahaan. Laba keuntungan

1 Lihat 'Rights and wrongs', *Financial Times*, 18 March 1997.
2 Dugger, William M., quoted in D. Korten, *When Corporations Rule the World*, London: Earthscan, 1995, p. 207.

adalah satu-satunya kriteria yang dipakai. "Ada banyak manajer yang sadar secara sosial", kata David Korten, "tapi yang menjadi masalah adalah sistem eksplotir (*predatorysystem*) yang membuat kesadaran sosial ini sulit bertahan."[3]

Walaupun ancaman dari predator akan selalu menghantui perusahaan milik publik, hal ini tidak menjadi alasan bagi TNCs untuk tidak membereskan tingkah laku bisnis mereka. Dalam beberapa kasus, sebuah perubahan kecil saja akan sangat membantu tanpa harus berdampak secara signifikan terhadap perolehan laba keuntungan mereka. Perusahaan Nestlè, misalnya, tidak memikul beban biaya seberapa banyak kalau ia mematuhi kode etik dari WHO sehubungan dengan produk-produk pengganti ASI yang dipasarkannya.

Alternatif

Di dalam dunia yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar, orang kaya memiliki uang yang memungkinkan mereka untuk membeli macam-macam pilihan. Masyarakat miskin sebaliknya tidak memiliki keberuntungan demikian. Kita hanya perlu melihat apa yang sedang terjadi: warga masyarakat di beberapa negara berkembang tidak sanggup membeli obat-obat murah buatan lokal karena kekuatan TNCs farmasi; para petani di India terancam oleh TNCs yang mengambil paten dari tanaman pangan mereka; dan pasokan air dari orang-orang di daerah wisata terancam karena industri pariwisata.

Seorang hakim di pengadilan Swiss mengatakan tentang perusahaan Nestlé (lihat bahan Bab 3) bahwa jika Nestlè ingin terhindar dari tuduhan tidak bermoral dan tingkah laku bisnis tidak etis, maka tidak ada jalan lain kecuali Nestlè harus mengubah praktik periklanannya. Ganti "prakti iklan" untuk "semua praktik bisnis" dan Nestlé harus membaca "perusahaan transnasional": hal ini merupakan tantangan yang mereka hadapi dalam milenium ketiga.

3 When Corporations Rule, p. 212.

TNCs juga bergumul dengan ukuran mereka yang besar dan ada batas tertentu di mana TNCs tidak dapat berfungsi, sekalipun mereka ingin melakukannya. Di sinilah letak kunci untuk perlawanan dan mencari alternatif lain. Diperlukan alternatif terhadap TNCs yang hanya berorientasi memaksimalkan laba keuntungan — alternatif yang dapat memberikan kaum miskin kesempatan atas lebih banyak pilihan.

"Tantangan kita adalah untuk menciptakan sebuah sistem global yang memihak masyarakat yang kecil, lokal, koperatif, yang melestarikan sumber daya, dan bertahan jangka panjang," kata David Korten.[4] Tantangannya adalah bagaimana menciptakan sebuah sistem yang pluralistik dan tidak monopolistik, sebuah sistem di mana warga masyarakat miskin penting.

Organisasi-organisasi sosial yang baru dan masyarakat yang sedang muncul beragam dan inklusif dan memberikan harapan untuk masa depan. TNCs memiliki kekuatan besar, tapi warga masyarakat dewasa ini perlahan-lahan menyadari bahwa mereka sendiri juga kekuatan besar tersendiri. Kesadaran itu, alternatif-alternatif yang sedang berkembang, bisa menjungkirbalikkan dunia yang didominasi TNCs. Hanya TNCs kecil yang manajemennya benar-benar bertanggung jawab bisa memiliki tempat dalam sistem di mana warga masyarakat miskin mendapat keuntungan ketimbang rugi. Tapi TNCs apa pun akan mendapatkan tempat di sistem demikian melalui perbuatan nyata dan tidak cukup hanya dengan kata-kata. Jika mereka ingin menjadi bagian dari masa depan, TNCs harus mengubah lebih mendalam daripada yang pernah mereka bayangkan. Pertanyaannya adalah apakah mereka bisa.

4 *Ibid.*, 270.

Buku yang diterbitkan pertama kali tahun 1999 dan diterbitkan ulang dengan berbagai update tahun 2008 ini mengulas dan melaporkan secara kasatmata kerugian, penderitaan, pemiskinan, dan perusakan sumber-sumber hidup—lahan pertanian, air, hutan, dan laut—dari penduduk miskin di negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Hal itu terjadi karena globalisasi ekonomi neoliberal yang dieksekusi oleh perusahaan-perusahaan internasional. Penerjemah merasa tergerak untuk membantu John Madeley meneruskan informasi dan pesan-pesan yang disampaikannya dalam buku ini bagi sekitar 240 juta penduduk Indonesia.

Ekonomi neoliberal, menurut Madeley, mengancam untuk menghancurkan segala-galanya: lingkungan *(environment),* peradaban manusia (*human civilization*), martabat manusia (*human dignity*), kebudayaan (*human cultures*), pemerintahan kerakyatan *(democracy),* dan kedaulatan negara (*state sovereignty*). Akarnya adalah ketamakan segelintir orang (*greed of the few*). Korbannya adalah mayoritas masyarakat miskin di Amerika Latin, Afrika, dan Asia, termasuk Indonesia. Pemain utamanya adalah negara-negara industri maju. Instrumen yang mereka gunakan adalah lembaga-lembaga keuangan internasional (Bank Dunia dan IMF) dan WTO. Pelaksana-pelaksana lapangannya adalah perusahaan-perusahaan transnasional (Transnational Corporations/TNCs) dengan credo kompetisi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tak terbatas. Kesejahteraan manusia diukur hanya oleh pertumbuhan ekonomi dan konsumsi.

Buku ini bisa membantu kita untuk bersikap kritis terhadap globalisasi ekonomi neoliberal ini dan membangun ekonomi bangsa secara arif, adil, demokratis, dan berkelanjutan seperti yang dicita-citakan oleh falsafah Pancasila

—**Alex Jebadu**

BIG BUSINESS POOR PEOPLES

John Madeley adalah seorang penulis sembilan buku serta penyiar yang memiliki spesialisasi dalam isu-isu pembangunan selama lebih dari tiga puluh tahun. Dari 1983 hingga 1998 ia bekerja sebagai editor di majalah terkenal *International Agricultural Development*. Ia juga seorang kontributor untuk koran-koran utama Inggris seperti *Observer* dan *Financial Times*. Selain itu ia juga menulis untuk banyak LSM, termasuk untuk *Christian Aid*, *The Panos Institute*, dan *The Catholic Institute for International Relations*.

gramediana

BISNIS EKONOMI

ISBN: 978-602-02-2893-8

9 786020 228938

234132552

Penerbit PT Elex Media Komputindo
Kompas Gramedia Building
Jl Palmerah Barat 29-37
Jakarta 10270
Telp. (021) 53650110, 53650111 ext. 3214
Web Page: http://www.elexmedia.co.id